



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Bupati Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pada Diktum KEDUA Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri.....

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
26. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31) ;
27. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya.
4. Penjabat Bupati (Pj. Bupati) adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk memegang jabatan Bupati untuk sementara waktu (sampai Kepala Daerah definitif dilantik).
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPK Nagan Raya adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk masa 4 (empat) Tahun Kedepan Terhitung Sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

8. Rencana

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten Nagan Raya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Pasal 2

Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran umum Kabupaten Nagan Raya;
 - BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - BAB V : Tujuan dan Sasaran;
 - BAB VI : Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Nagan Raya;
 - BAB VII : Kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah; dan
 - BAB IX : Penutup.
- (2) Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 digunakan sebagai:
- a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 2023-2026; dan
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

BAB III.....

BAB III
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2023-2026

Pasal 5

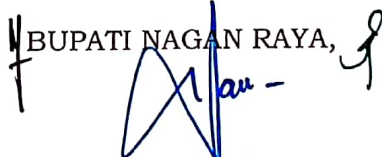
- (1) Penjabat (Pj) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya; dan
 - b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 22 Maret 2022 M
19 Sya'ban 1443 H


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 23 Maret 2022 M
20 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 412

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i-1
DAFTAR TABEL	i-5
DAFTAR GAMBAR	i-16
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-12
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-16
1.4. Maksud dan Tujuan	I-17
1.5. Sistematika Penulisan	I-18
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-3
2.1.1.1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi	II-3
2.1.1.2. Topografi	II-5
2.1.1.3. Geologi	II-5
2.1.1.4. Hidrologi	II-5
2.1.1.5. Klimatologi	II-7
2.1.1.6. Penggunaan Lahan	II-9
2.1.2. Demografi	II-12
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah	II-14
2.1.3.1. Pengelolaan Kawasan Lindung	II-15
2.1.3.2. Pengelolaan Kawasan Budidaya	II-16
2.1.3.3. Kawasan Rawan Bencana Alam	II-18
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-20
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-20
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB	II-20
2.2.1.2. Pendapatan per Kapita	II-23
2.2.1.3. Laju Inflasi	II-24
2.2.1.4. Kemiskinan	II-26
2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia	II-30
2.2.1.6. Ketimpangan Pendapatan	II-32
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-34
2.2.2.1. Angka Melek Huruf	II-34
2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-35
2.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olah Raga	II-37
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-37
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan	II-37
2.3.1.1. Pendidikan Islami	II-37
2.3.1.2. Keagamaan Syariat Islam	II-38
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-40
2.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar	II-40

2.3.2.1.1. Pendidikan	II-40
2.3.2.1.2. Kesehatan	II-46
2.3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-68
2.3.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-74
2.3.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-76
2.3.2.1.6. Sosial	II-76
2.3.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-78
2.3.2.2.1. Ketenagakerjaan	II-78
2.3.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-79
2.3.2.2.3. Pangan	II-83
2.3.2.2.4. Pertanahan	II-83
2.3.2.2.5. Lingkungan Hidup	II-84
2.3.2.2.6. Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-86
2.3.2.2.7. Perhubungan	II-86
2.3.2.2.8. Komunikasi dan Informatika	II-88
2.3.2.2.9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-89
2.3.2.2.10. Penanaman Modal	II-96
2.3.2.2.11. Kepemudaan dan Olah Raga	II-98
2.3.2.2.12. Kebudayaan	II-100
2.3.2.2.13. Perpustakaan	II-101
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-102
2.3.3.1. Pariwisata	II-102
2.3.3.2. Pertanian	II-104
2.3.3.3. Perkebunan	II-109
2.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral	II-112
2.3.3.5. Perdagangan	II-113
2.3.3.6. Perindustrian	II-115
2.3.3.7. Transmigrasi	II-115
2.3.3.8. Kelautan dan Perikanan	II-117
2.3.4. Penunjang Urusan	II-124
2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan	II-124
2.3.4.2. Keuangan	II-125
2.3.4.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	II-125
2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan	II-126
2.3.4.5. Pengawasan	II-126
2.3.4.6. Sekretariat Dewan	II-126
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-127
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-127
2.4.1.1. Pengeluaran Rata-Rata Rumah Tangga	

	per Kapita	II-127
	2.4.1.2. Pengeluaran Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan).....	II-127
	2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-128
	2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-129
	2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-132
2.5.	Evaluasi Pelaksanaan Indikator Pada RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022	II-133
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBK	III-4
3.1.1.1.	Pendapatan Nagan Raya	III-11
3.1.1.1.1.	Pendapatan Asli Daerah Nagan Raya	III-12
3.1.1.1.2.	Dana Perimbangan	III-15
3.1.1.1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-17
3.1.1.2.	Belanja Daerah Nagan Raya	III-20
3.1.1.3.	Pembiayaan Nagan Raya	III-22
3.1.1.4.	Neraca Nagan Raya.....	III-23
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-32
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-34
3.2.2.	Analisis Pembiayaan.....	III-36
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan	IV-2
4.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi	IV-3
4.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IV-4
4.1.3.	Aspek Pelayanan Umum	IV-6
4.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah	IV-15
4.2.	Isu-Isu Strategis	IV-16
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1.	Tujuan dan Sasaran	V-1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA.....	VI-1
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1.	Kerangka Pendanaan	VII-1
7.1.1.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya	VII-1
7.1.1.1.	Proyeksi Pendapatan	VII-2
7.1.1.1.1.	Pendapatan Asli Daerah	VII-2
7.1.1.1.2.	Pendapatan Transfer	VII-8
7.1.1.2.	Belanja Daerah	VII-11



7.1.1.3. Pembiayaan	VII-13
7.1.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	VII-15
7.1.3. Pendanaan Pembangunan dari CSR	VII-17
7.2. Program Perangkat Daerah	VII-20
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Kaidah Pelaksanaan	IX-1
9.2 Pedoman Transisi.....	IX-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1: Target Pembangunan Makro Nasional	I-4
Tabel 2.1: Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya.....	II-1
Tabel 2.2: Jumlah Desa/Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya	II-2
Tabel 2.3: Rekapitulasi Status Desa dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020	II-3
Tabel 2.4: Cekungan Air Tanah di Kabupaten Nagan Raya	II-6
Tabel 2.5: Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya.....	II-7
Tabel 2.6: Kondisi Suhu Udara dan Kelembapan Tahun 2020	II-8
Tabel 2.7: Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2020	II-8
Tabel 2.8: Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya.....	II-10
Tabel 2.9: Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2020	II-12
Tabel 2.10: Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2020	II-13
Tabel 2.11: Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Nagan Raya Per Kecamatan Tahun 2020.....	II-13
Tabel 2.12: Kawasan Strategis Kabupaten Nagan Raya.....	II-14
Tabel 2.13: Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Nagan Raya	II-17
Tabel 2.14: Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya.....	II-18
Tabel 2.15: Tingkat Inflasi Tahun 2017-2021 (persen).....	II-25
Tabel 2.16: Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh, Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-27

Tabel 2.17: Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2013-2020.....	II-30
Tabel 2.18: Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 – 2021.....	II-31
Tabel 2.19: Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional	II-33
Tabel 2.20: Jumlah Penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dari Tahun 2017-2021	II-38
Tabel 2.21: Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2017-2021	II-39
Tabel 2.22: Realisasi Penerimaan Zakat/Infaq/Sadaqah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020.....	II-40
Tabel 2.23: Rasio Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-41
Tabel 2.24: Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020.....	II-42
Tabel 2.25: Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020.....	II-43
Tabel 2.26: Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Nagan Raya, 2020	II-43
Tabel 2.27: Perkembangan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (unit).....	II-44
Tabel 2.28: Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2020 (orang)	II-45
Tabel 2.29: Perkembangan Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-46
Tabel 2.30: Kualifikasi Guru Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-46
Tabel 2.31: Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-47
Tabel 2.32: Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2019	II-48

Tabel 2.33: Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2021.....	II-49
Tabel 2.34: Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-50
Tabel 2.35: Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2021.....	II-51
Tabel 2.36: Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-202.....	II-52
Tabel 2.37: Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-53
Tabel 2.38: Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-54
Tabel 2.39: Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-55
Tabel 2.40: Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.....	II-56
Tabel 2.41: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-57
Tabel 2.42: Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-58
Tabel 2.43: Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-58
Tabel 2.44: Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019	II-59
Tabel 2.45: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA(+) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-60
Tabel 2.46: Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-60
Tabel 2.47: Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-61

Tabel 2.48: Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-62
Tabel 2.49: Penderita Tuberkulosis Paru BTA di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-62
Tabel 2.50: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-63
Tabel 2.51: Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-64
Tabel 2.52: Daftar Lokus Intervensi Kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020	II-65
Tabel 2.53: Data Kasus Covid-19 Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020.....	II-67
Tabel 2.54: Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2021 (Km).....	II-68
Tabel 2.55: Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2021	II-69
Tabel 2.56: Akses Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2019	II-70
Tabel 2.57: Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Kabupaten Nagan Raya (persen) Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.58: Persentase Kondisi Irigasi menurut Daerah Irigasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021	II-71
Tabel 2.59: Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2021	II-73
Tabel 2.60: Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-73
Tabel 2.61: Rasio Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-74
Tabel 2.62: Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2020	II-75
Tabel 2.63: Persentase Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021	II-75

Tabel 2.64: Jumlah Linmas dan Lembaga Swadaya dan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2021	II-76
Tabel 2.65: Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-77
Tabel 2.66: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2020	II-80
Tabel 2.67: Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK Tahun 2017-2021	II-81
Tabel 2.68: Rasio KDRT Tahun 2017-2021	II-81
Tabel 2.69: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020.....	II-82
Tabel 2.70: Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Nagan Raya Dibandingkan dengan Provinsi Aceh Tahun 2019	II-83
Tabel 2.71: Produksi Beras Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-83
Tabel 2.72: Timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-85
Tabel 2.73: Kasus Pencemaran Air yang di Akibatkan Oleh Limbah Industri ...	II-85
Tabel 2.74: Jumlah kepemilikan Administrasi Kependudukan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2021	II-86
Tabel 2.75: Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-87
Tabel 2.76: Jumlah Penumpang Datang Dan Berangkat di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020	II-88
Tabel 2.77: Kondisi Industri Makanan dan Tembakau di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit).....	II-89
Tabel 2.78: Kondisi Industri Kain dan Kulit di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit).....	II-90
Tabel 2.79: Kondisi Industri Kayu di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit).....	II-90
Tabel 2.80: Kondisi Industri dari Besi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit).....	II-91

Tabel 2.81: Kondisi Industri Dari Bahan Galian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit).....	II-92
Tabel 2.82: Kondisi Industri Dari Kertas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit).....	II-93
Tabel 2.83: Kondisi Industri Barang Lainnya di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit).....	II-94
Tabel 2.84: Kondisi Industri Jasa di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit).....	II-95
Tabel 2.85: Jumlah dan Status Koperasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-96
Tabel 2.86: Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-97
Tabel 2.87: Pertumbuhan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-97
Tabel 2.88: Tenaga Kerja Perusahaan (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020.....	II-98
Tabel 2.89: Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-99
Tabel 2.90: Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-99
Tabel 2.91: Perkembangan Kebudayaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-100
Tabel 2.92: Jumlah Pustaka Daerah menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit)	II-101
Tabel 2.93: Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021.....	II-102
Tabel 2.94: Jumlah Sarana/Fasilitas Pariwisata (unit) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-103
Tabel 2.95: Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-105
Tabel 2.96: Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-107

Tabel 2.97: Jenis Kelembagaan Pertanian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020.....	II-107
Tabel 2.98: Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2021 (Ekor)	II-108
Tabel 2.99: Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-109
Tabel 2.100: Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-110
Tabel 2.101: Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020.....	II-111
Tabel 2.102: Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Dalam di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020	II-111
Tabel 2.103: Perkembangan Daya Terpasang, Produksi, dan Listrik Terjual pada PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020	II-112
Tabel 2.104: Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-116
Tabel 2.105: Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi Lokal Yang Menetap Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-116
Tabel 2.106: Fasilitas Sarana dan Prasarana Transmigrasi Lokal di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-117
Tabel 2.107: Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Nagan Raya, 2017-2021	II-117
Tabel 2.108: Produksi Perikanan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021...	II-118
Tabel 2.109: Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021	II-118
Tabel 2.110: Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-119
Tabel 2.111: Perkembangan Produksi Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya, 2017-2021	II-120

Tabel 2.112: Perkembangan Produksi (ton) Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020.....	II-120
Tabel 2.113: Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-121
Tabel 2.114: Kondisi PPI, TPI, dan Pasar Kabupaten Nagan Raya, 2021	II-122
Tabel 2.115: Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-123
Tabel 2.116: Cakupan Produksi Ikan Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-123
Tabel 2.117: Jumlah Bongkar Muat Barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien Tahun 2018-2021	II-128
Tabel 2.118: Jumlah Penumpang melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien Tahun 2018-2021	II-129
Tabel 2.119: Lama Proses Pelayanan, Jumlah Persyaratan (Dokumen), dan Biaya Perijinan Kabupaten Nagan Raya	II-130
Tabel 2.120: Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2019 (%)	II-133
Tabel 2.121: Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022	II-134
Tabel 2.122: Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022	II-135
Tabel 3.1: Pengesahan APBK Tahun 2017-2021	III-4
Tabel 3.2: Laju Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	III-8
Tabel 3.3: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Nagan Raya Tahun 2017-2021	III-11
Tabel 3.4: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nagan Raya Tahun 2017-2021	III-12
Tabel 3.5: Anggaran dan Realisasi Pajak Nagan Raya Tahun 2017-2021	III-13
Tabel 3.6: Anggaran dan Realisasi Retribusi Nagan Raya Tahun 2017-2021	III-14

Tabel 3.7: Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Nagan Raya Tahun 2017-2021	III-14
Tabel 3.8: Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2017-2021	III-15
Tabel 3.9: Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Nagan Raya Tahun 2017-2021	III-16
Tabel 3.10: Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Nagan Raya Tahun 2017-2021	III-17
Tabel 3.11: Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nagan Raya Tahun 2017-2021	III-17
Tabel 3.12: Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Nagan Raya Tahun 2017-2021	III-18
Tabel 3.13: Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017-2021	III-19
Tabel 3.14: Realisasi Belanja Daerah Nagan Raya Tahun 2017-2021	III-20
Tabel 3.15: Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	III-22
Tabel 3.16: Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	III-24
Tabel 3.17: Realisasi Aset Tahun 2017-2020	III-27
Tabel 3.18: Realisasi dan Pertumbuhan Aset Tahun 2017-2020	III-27
Tabel 3.19: Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020.....	III-29
Tabel 3.20: Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2017-2020	III-35
Tabel 3.21: Defisit Rill Anggaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 ..	III-38
Tabel 3.22: Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	III-39
Tabel 3.23: Realisasi Komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	III-41

Tabel 5.1:	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026	V-4
Tabel 6.1:	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026	VI-2
Tabel 6.2:	Arah Kebijakan Pembangunan Nagan Raya Tahun 2023-2026	VI-6
Tabel 6.3:	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif, Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026.....	VI-7
Tabel 7.1:	Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026	VII-3
Tabel 7.2:	Proyeksi Retribusi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026	VII-4
Tabel 7.3:	Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023-2026	VII-5
Tabel 7.4:	Proyeksi Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026	VII-6
Tabel 7.5:	Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026.....	VII-7
Tabel 7.6:	Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026	VII-9
Tabel 7.7:	Proyeksi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2023-2026	VII-10
Tabel 7.8:	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026	VII-12
Tabel 7.9:	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023-2026	VII-14
Tabel 7.10:	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026.....	VII-16
Tabel 7.11:	Proyeksi Pendanaan Pembangunan dari TJS LP/CSR di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026	VII-18
Tabel 7.12:	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026	VII-18



Tabel 8.1: Penetapan Indikator Makro Kabupaten Nagan Raya, 2023-2026	VIII-2
Tabel 8.2: Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya, 2023-2026	VIII-2
Tabel 8.3: Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nagan Raya, 2023-2026	VIII-4

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1: Target Pembangunan Makro Nasional	I-3
Gambar 2.1: Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan.....	II-2
Gambar 2.2: Jumlah Desa/Gampong Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya.....	II-3
Gambar 2.3: Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya	II-4
Gambar 2.4: Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya	II-9
Gambar 2.5: Persentase Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya	II-11
Gambar 2.6: Struktur Ruang Kabupaten Nagan Raya.....	II-15
Gambar 2.7: Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya	II-19
Gambar 2.8: Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya.....	II-20
Gambar 2.9: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah) Tahun 2016 – 2020.....	II-21
Gambar 2.10: PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah), Tahun 2016 – 2020	II-22
Gambar 2.11: Struktur PDRB Kabupaten Nagan Raya (persen).....	II-22
Gambar 2.12: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya (persen), Tahun 2016-2020	II-23
Gambar 2.13: PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya (juta rupiah), Tahun 2016-2020	II-24
Gambar 2.14: Perkembangan tingkat Inflasi Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	II-25
Gambar 2.15: Persentase Kemiskinan Nasional, Aceh dan Nagan Raya Tahun 2017-2021	II-27
Gambar 2.16: Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015–2020	II-28

Gambar 2.17: Perkembangan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015–2020	II-29
Gambar 2.18: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017 – 2021.....	II-31
Gambar 2.19: Indeks Gini Nasional, Provinsi Aceh dan Kab. Nagan Raya	II-33
Gambar 2.20: Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020 (persen).....	II-34
Gambar 2.21: Perkembangan Angka Melek Huruf Dewasa di Kabupaten Tahun 2012-2020 (persen).....	II-35
Gambar 2.22: Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan Nasional, Tahun 2015-2021 (Tahun)	II-36
Gambar 2.23: Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Kelompok Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019	II-79
Gambar 2.24: Grafik Indeks Pembangunan Gender Kab. Nagan Raya Tahun 2010 – 2020	II-80
Gambar 2.25: Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2015-2020 (Persen)	II-105
Gambar 2.26: Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen), Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019.....	II-114
Gambar 2.27: Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019.....	II-114
Gambar 2.28: Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019*	II-115
Gambar 3.1: Proporsi realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2015-2021.....	III-36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah ditetapkan oleh Pemerintah akan dilakukan secara serentak pada Tahun 2024, sesuai dengan aturan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Penyelenggaraan Pilkada Serentak ini akan berdampak antara lain terjadinya kekosongan Kepala Daerah definitif, khususnya bagi daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada Tahun 2022. Tercatat sebanyak 101 Kepala Daerah di Tanah Air yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022, terdiri dari 7 orang Gubernur (termasuk Aceh) dan 94 orang Bupati/Walikota dimana diantaranya terdapat 20 orang Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di Aceh.

Berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah baik pada jenjang provinsi maupun kabupaten/kota mengakibatkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dengan sendirinya tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman untuk implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah periode berikutnya. Ini sesuai dengan arahan dan instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Pasal 201 Poin 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemungutan suara serentak kepala daerah ini menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah, baik pada jenjang propinsi maupun kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2022. Untuk itu, sesuai dengan Pasal 201 Poin 9 akan diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota definitif melalui Pilkada serentak secara nasional.

Disamping itu, sebagai dampak dari kebijakan pemilihan kepala daerah serentak juga menyebabkan terjadinya kekosongan dokumen perencanaan

pembangunan daerah, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengingat RPJMD merupakan jabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, maka dengan berakhirnya periode jabatan kepala daerah tentu berakibat pada berakhirnya pula perodesasi RPJMD sebagai acuan dan pedoman pembangunan, sehingga pejabat kepala daerah yang diangkat tidak mempunyai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2023-2026. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, maka disusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026.

Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya periode tahun 2017-2022 akan berakhir tanggal 09 Oktober 2022. Sesuai dengan Inmendagri tersebut, maka Kabupaten Nagan Raya wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya (RPD) Tahun 2023-2026. Dalam konteks pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga telah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk itu dalam perumusan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyelarasan Target Indikator Makro Dan Program Prioritas Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

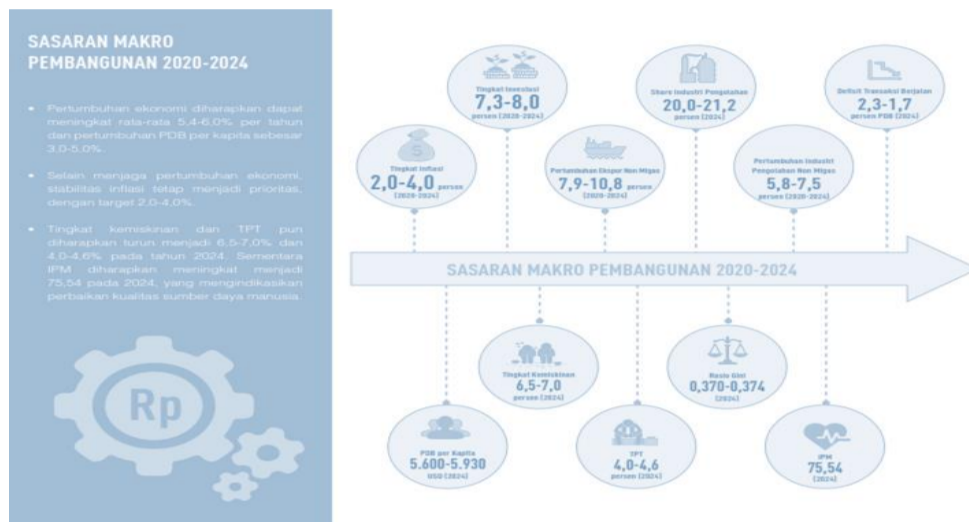
A. Indikator Makro

Target Indikator makro nasional tahun 2020-2024 menjadi acuan untuk menentukan target indikator makro daerah. Indikator makro nasional dapat dilihat pada Gambar 1.1. yang diuraikan sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4-6,0 persen per tahun dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 3,0-5,0 persen.
- Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas, dengan target 2,0-4,0 persen.

- Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun diharapkan turun menjadi 6,5-7,0 persen dan 4,0-4,6 persen pada tahun 2024.
- Indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia.
- Indeks ketimpangan pendapatan (indeks gini) diharapkan meningkat mencapai 0,370-0,374.

Gambar 1.1
Target Pembangunan Makro Nasional



B. Program Prioritas Nasional (PN)

Penyelarasan Program Prioritas Nasional menjadi hal yang penting untuk untuk disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026. Terdapat enam Prioritas Nasional yang berkaitan dengan ekonomi, Sumber Daya Manusia, Revolusi Mental dan Kebudayaan, Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, Stabilitas Keamanan dan Pelayanan Publik. Masing-masing Prioritas Nasional ini memiliki Program Prioritas (PP) Nasional yang penting untuk disinergikan oleh seluruh daerah. Untuk lebih rinci dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Target Pembangunan Makro Nasional

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
I	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	PN-1
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	PN-1, PP1
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	PN-1, PP2
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	PN-1, PP3
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	PN-1, PP4
5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	PN-1, PP5
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	PN-1, PP6
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	PN-1, PP7
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	PN-1, PP8
II	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PN-2
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	PN-2 PP-1
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	PN-2 PP-2
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	PN-2 PP-3
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	PN-2 PP-4
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	PN-2 PP-5
6	Pengentasan kemiskinan	PN-2 PP-6
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	PN-2 PP-7
III	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PN-3
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan	PN-3, PP1



No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
	membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	PN-3, PP2
3	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	PN-3, PP3
4	Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	PN-3, PP4
IV	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN-4
1	Infrastruktur pelayanan dasar	PN-4, PP1
2	Infrastruktur ekonomi	PN-4, PP2
3	Infrastruktur perkotaan	PN-4, PP3
4	Energi dan ketenagalistrikan	PN-4, PP4
5	Transformasi digital	PN-4, PP5
V	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PN-5
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PN-5, PP1
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	PN-5, PP2
3	Pembangunan rendah karbon	PN-5, PP3
VI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN-6
1	Konsolidasi demokrasi	PN-6, PP1
2	Optimalisasi kebijakan luar negeri	PN-6, PP2
3	Penegakan hukum nasional	PN-6, PP3
4	Reformasi birokrasi dan tata kelola	PN-6, PP4
5	Menjaga stabilitas keamanan nasional	PN-6, PP5

2. Penyelarasan Terhadap Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;

Penyelarasan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 menjadi hal yang penting untuk disinergikan terhadap Rencana Pembangunan Kabupaten Nagasari Tahun 2023-2026. Penyelarasan tersebut dilakukan terhadap isu strategis

Pemerintah Aceh. Adapun isu strategis Pemerintah Aceh yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 antara lain:

- Peningkatan Kualitas Demokrasi;
- Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur;
- Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
- Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
- Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
- Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
- Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
- Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
- Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
- Optimalisasi Kemandirian Pangan;
- Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
- Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
- Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana;
- Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

3. Kesesuaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025;

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah masuk pada Tahapan Pembangunan Ke-4, yang merupakan rangkaian akhir tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025.

Tahapan dan prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya pada tahap keempat (periode tahun 2020 - 2025) diarahkan pada optimalisasi pembangunan di seluruh sektor/bidang. Penekanannya adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dengan fokus pembangunan pada peletakan dasar-dasar pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Pada tahap terakhir ini, diharapkan seluruh sasaran pembangunan jangka panjang untuk setiap periode beserta targetnya akan dapat tercapai.

Adapun tahapan dan prioritas pembangunan dalam RPJP Kabupaten Nagan Raya pada periode keempat (2020-2025) adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi pembangunan di seluruh sektor/bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan pembangunan fokus peletakan dasar-dasar pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan;
- Pertumbuhan PDRB diharapkan setara dengan Provinsi Aceh;
- Tingkat kemiskinan menjadi di bawah 10 persen;
- Tingkat pengangguran terbuka menjadi 2-3 persen;
- Pemantapan industriisasi berbasis pertanian melalui pengembangan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah menjadi nilai tambah yang berbasis teknologi dan informasi, serta mendukung kemitraan UKM dan swasta nasional dan asing dalam pemasaran produk unggulan di level nasional dan internasional serta mengembangkan cluster agroindustri;
- Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan berbiaya wajar menurut aturan berlaku, serta optimalisasi reformasi birokrasi kearah pelayanan publik dengan dukungan teknologi *e-government* dan teknologi informasi yang terkini untuk aspek pelayanan perizinan investasi dan perizinan lainnya;
- Peningkatan kualitas pendidikan melalui penambahan jumlah dan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan berinovasi dan kreativitas;
- Pembangunan SDM yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembinaan akhlak mulia, cerdas, dan mampu bersaing di dunia Internasional;
- Pelayanan kesehatan yang mampu menurunkan angka *Stunting*, *Wasting* dan obesitas, meningkatkan angka harapan hidup, angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian Ibu (AKI), yang pada akhirnya mampu meningkatkan angka IPM;
- Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, perumahan dan permukiman, serta tersedianya air bersih dan sanitasi yang pada akhirnya dapat mencapai indikator SDG's terkait dengan pembangunan infrastruktur mendekati 75% dari target SDG's;
- Pembangunan sistem transportasi darat, laut, dan udara yang menjamin arus pergerakan orang, barang, dan jasa serta difokuskan pula pada lancarnya aktivitas pabrikasi dan kegiatan ekspor;

- Penguatan sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika;
- Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak;
- Pemantapan pemerintahan dan pelayanan umum melalui pemantapan kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagari Raya dan DPRK Kabupaten Nagari Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mantapnya kualitas pelayanan dasar pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dengan biaya wajar menurut aturan berlaku, dan pemantapan reformasi birokrasi kearah pelayanan publik dengan dukungan teknologi *e-goverment* dan teknologi informasi yang terkini;
- Pembangunan kebudayaan melalui pengembangan kembali khazanah budaya, adatistiadat, kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional yang berkembang di kabupaten Nagari Raya, menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat terutama pada kalangan generasi muda dalam peran sertanya untuk pembangunan.

4. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJM Kabupaten Nagari Raya Tahun 2017-2022;

Hasil evaluasi capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Nagari Raya antara lain :

- Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nagari Raya menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sebesar 67.78 meningkat menjadi 69.31 pada tahun 2021.
- Angka Kemiskinan Kabupaten Nagari Raya apabila dibandingkan dari tahun 2017 sebesar 19,34 % menurun pada tahun 2021 sebesar 18,23%. Namun hal ini tidak sesuai dengan taerget yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMK Nagari Raya Tahun 2017-2022. Oleh karena itu menjadi perhatian serius seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nagari Raya agar selanjutnya bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nagari Raya meningkat dari tahun 2017 sebesar 4.11 % menjadi 5,11 % pada tahun 2021.

- Pertumbuhan Ekonomi menurun dari tahun 2017 sebesar 3.95 % menjadi 3.54 % pada tahun 2021.
5. Isu-Isu Yang Berkembang
- Penanganan Covid-19 Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanganan Covid-19 menjadi prioritas program yang harus diimplementasikan pada tahun 2023-2026.
 - Pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang, Pemerintah sudah menetapkan untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 90/3037 tanggal 28 April 2021 dimana pemerintah daerah diminta dukungan anggota sukses Pemilu dan Pilkada ditahun 2024 untuk pendidikan politik, forum kerukunan, dan gerakan mitra bersama. Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi ini menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Nagan Raya.
6. Kebijakan Nasional
- Dana wajib (*mandatory spending*) yang disediakan pemerintah dalam formula anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah undang-undang, seperti dana wajib untuk pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).
 - Dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona virus Disease* 2019 (Covid 19) dan dampaknya pemerintah daerah wajib menyediakan dukungan pendanaan penanganan pandemi covid-19 paling sedikit sebesar 8 persen dari alokasi DAU sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

- Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Daerah yang APBD nya diatas Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) diharuskan mengalokasikan anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

7. Jadwal Tahapan Penyusunan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026

Dalam proses penyusunan RPD Tahun 2023-2026 ini dilalui beberapa tahapan dan tata cara, antara lain sebagai berikut:

- Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 18 Januari 2022.
- Penyusunan Draft RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 yang telah di mulai sejak tanggal 19 Januari 2022;
- Pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tentang Isu Strategis dan Sasaran RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 21 Januari 2022;
- Desk Pra Fasilitasi RPD Kab/ Kota di Bappeda Aceh pada tanggal 3 Februari 2022;
- Penyesuaian/ penyempurnaan/perbaikan Dokumen RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 sesuai Berita Acara Hasil Kesepakatan Desk Penyesuaian Antara RPA dan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 4 Februari s/d 10 Februari 2022;
- Pembahasan Draft RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dengan Tim Penyusun RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 11 Februari 2022;
- Pra desk penyusunan Renstra SKPK dalam rangka sinkronisasi terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Lainnya pada tanggal 21 s.d 24 Januari 2022 ;
- Forum Konsultasi Publik Rancangan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dengan seluruh Pemangku Kepentingan/ *stakeholder* Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 14-15 Februari 2022;

- Penyesuaian/ penyempurnaan/perbaiki Dokumen RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 sesuai Berita Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 15 Februari s/d 16 Februari 2022;
- Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Dokumen RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 17 Februari 2022;
- Penyesuaian/ penyempurnaan/perbaiki Dokumen RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 sesuai Hasil Reviu APIP terhadap RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 25 Februari 2022;
- Melakukan Hearing Public (Dengar Pendapat) dengan dalam Rangka Penyempurnaan Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dengan Tokoh Masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang berdomisili di Banda Aceh pada tanggal 01 Maret 2022;
- Pengajuan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ke Bappeda Provinsi Aceh untuk difasilitasi direncanakan tanggal 02 Maret 2022;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 03 Maret 2022;
- Fasilitasi/ evaluasi Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ke Provinsi Aceh pada tanggal 08 Maret 2022;
- Penetapan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada tanggal 14 Maret 2022;
- Penyerahan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 kepada DPRK Nagan Raya pada tanggal 15 Maret 2022.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nagan Raya sampai dengan Tahun 2025;

3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022;
4. RPA Provinsi atau Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku .

Terdapat perbedaan yang substantif antara dokumen RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dengan RPJMD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022. Adapun perbedaan tersebut antara lain :

1. RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Penyusunan Dokumen RPD Kabupaten Nagan Raya 2023-2026 bersifat Teknokratik;
3. Penyusunan RPD tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah.
4. Jangka waktu dokumen RPD adalah 4 tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses

- Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 31. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9).
 32. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
 33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 – 2026;
 34. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan

- dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
35. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Nagan Raya Tahun 2005-2025. Selain itu, dipedomani pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.

Selanjutnya, Rencana Pembangunan Daerah Nagan Raya Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Strategis (Renstra) SKPK Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja (RKPD) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah yang saling berkaitan sebagai berikut :

1. RPJP Kabupaten Nagan Raya dengan periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah disusun dengan mengacu kepada RPJP Provinsi Aceh dan diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Nagan Raya;
2. Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dengan periode waktu 4 (empat) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan tahunan bersifat indikatif dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Nagan Raya dan memperhatikan RPA Tahun 2023-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024;
3. RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya (RKPK) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, mulai dari tahun 2023-2026;
4. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan PD, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya

- (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, mulai dari tahun 2023 – 2026;
5. RKPD Nagan Raya merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKA dan program strategis Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD dan APBK;
 6. Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan DPA-PD.

Dengan hubungan yang demikian ini diharapkan tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara daerah dan provinsi. Adanya jaminan keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan ini, termasuk dalam hal penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya akan berdampak positif pada penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi yang dmuat dan diarahkan dalam RPJPD Kabupaten Nagan Raya kedalam bentuk tujuan, sasaran, serta strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman dan acuan untuk penyusunan Renstra SKPD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBK Tahun 2023- 2026;
3. Menjadi instrumen evaluasi capaian dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya selama periode Tahun 2023-2026;
4. Menjamin terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan sinergis antara perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya dengan pembangunan Provinsi dan Nasional, termasuk dengan provinsi yang berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya;
5. Menyikapi kondisi kekinian akibat dampak dari Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, ada pula arahan yang dimaktub dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri No.050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menuntut adanya penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022; dan
7. Menjadi pedoman bagi Pejabat (Pj) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama periode Tahun 2023-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023–2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan RPD yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan sosial, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil analisis dan kajian. Informasi gambaran umum yang selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu terkait Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka pendanaan

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat informasi Permasalahan Pembangunan, Isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPD ini karena menjadi dasar utama kebijakan pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan mendatang

BAB V : TUJUAN DAN SASARAN

Penyajian dalam bab ini menguraikan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang menggambarkan keterkaitan antar elemen perencanaan dalam satu matrik

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih dan kemudian menjelaskan hubungannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya baik yang bersifat program prioritas disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan dan kerangka pendanaan yang mencakup pengeluaran urusan wajib dan mengikat dan prioritas utama.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Nagan Raya terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB IX : PENUTUP
Merupakan penutup dari keseluruhan penyusunan RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

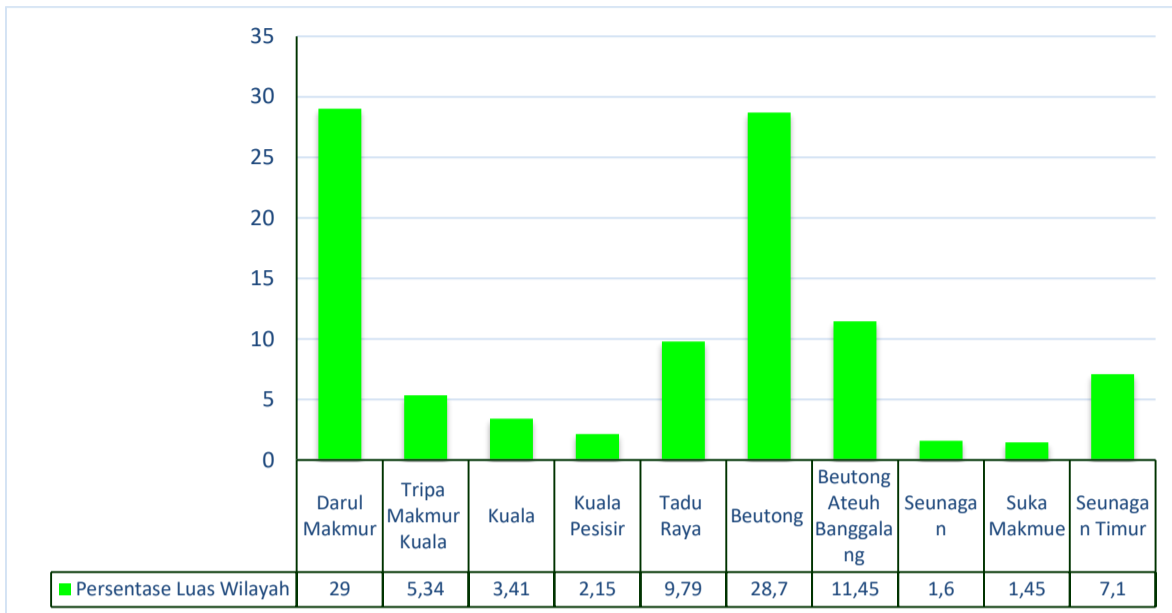
Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kabupaten yang beribukota Suka Makmue ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten baru sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Saat ini, secara administratif Kabupaten Nagan Raya dibagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kemukiman dan 222 (dua ratus dua puluh dua) desa/gampong. Wilayah administrasi kecamatan di lingkup Kabupaten Nagan Raya adalah: Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Darul Makmur dengan luas wilayah 1.027,93 Km² atau 29,06% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya, serta wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Suka Makmue sebesar 51,56 Km² atau 1,45% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan dan jumlah desa di Kabupaten Nagan Raya tersaji pada Tabel 2.1 dan 2.2; Gambar 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah
1	Darul Makmur	Alue Bilie	1,0027,93	29.00
2	Tripa Makmur	Kabu	189.41	5.34
3	Kuala	Ujong Fatihah	120.89	3.41
4	Kuala Pesisir	Padang Rubek	76.34	2.15
5	Tadu Raya	Alue Bata	347.19	9.79
6	Beutong	Babussalam	1,017.32	28.70
7	Beutong Ateuh Benggalang	Kuta Teungoh	405.92	11.45
8	Seunagan	Jeuram	56.73	1.60
9	Suka Makmue	Lueng Baro	51.56	1.45
10	Seunagan Timur	Keude Linteung	251.61	7.10
	Nagan Raya	Suka Makmue	3,544.90	100.00

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2021

Gambar 2.1.
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan



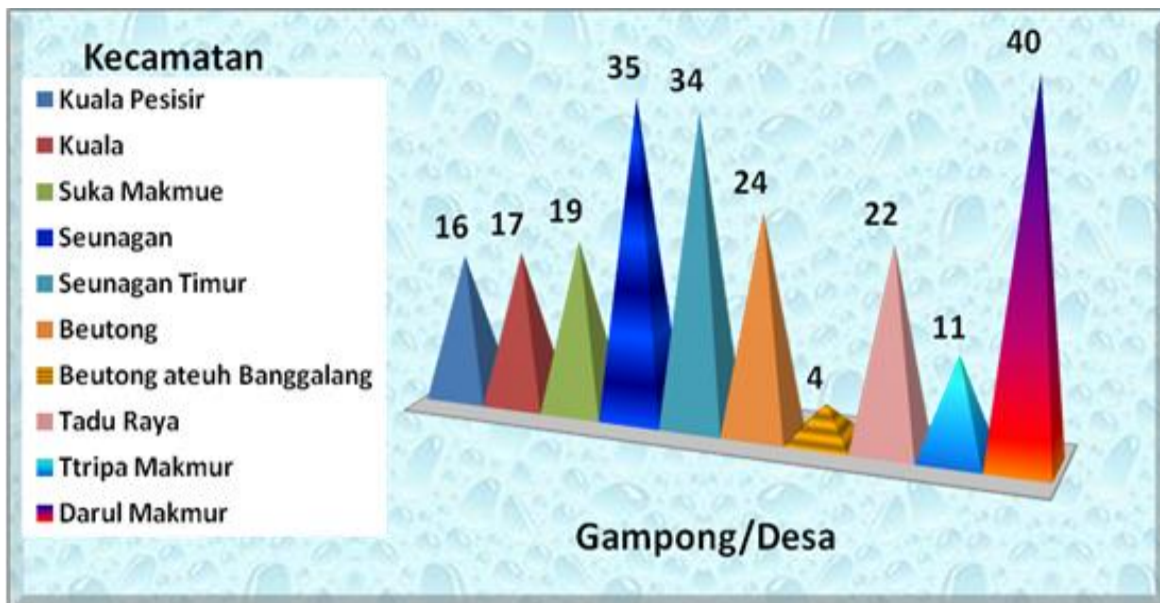
Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (diolah)

Tabel 2.2.
Jumlah Desa/Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Kemukiman	Gampong/Desa
1	Kuala Pesisir	3	16
2	Darul Makmur	5	40
3	Tripa Makmur	2	11
4	Kuala	2	17
5	Tadu Raya	2	22
6	Beutong	4	24
7	Beutong ateuh Banggalang	1	4
8	Seunagan	5	35
9	Suka Makmue	2	19
10	Seunagan Timur	4	34
Jumlah Total		30	222

Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

Gambar 2.2.
Jumlah Desa/Gampong Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

Status Gampong di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang berjumlah 222 Gampong memiliki beberapa tingkatan status. Pada tahun 2020 terdapat 37 Gampong yang meningkat statusnya menjadi 2 tingkatan, 7 Gampong meningkat 1 tingkatan, 175 Gampong statusnya tetap dan 3 Gampong statusnya turun setingkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.
Rekapitulasi Status Desa dalam
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020

No	Status Desa	Tahun	
		2019	2020
1	Maju	15	16
2	Berkembang	72	109
3	Tertinggal	119	90
4	Sangat Tertinggal	16	7
Jumlah		222	222

Sumber: Kemendes, 2021

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis Kabupaten Nagan Raya terletak pada lokasi 03° 43' 50" – 04° 37' 55" Lintang Utara (LU) dan 96° 11' 23" – 96° 47' 58" Bujur Timur (BT) dan memiliki luas wilayah 3.544,90 Km² atau 354.490 Ha atau sebesar 6,25 % dari luas

Provinsi Aceh. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan batas – batas wilayah administratif diatas, Kabupaten Nagan Raya memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi oleh jalan nasional yang merupakan jalur pantai Barat Sumatera yang menghubungkan Ibukota Provinsi Aceh dengan wilayah kabupaten di pesisir barat selatan . Selain itu wilayah ini juga dilintasi oleh jalan strategis Nasional yang menghubungkan wilayah Pantai Barat – wilayah Pantai Timur dan Tenggara melalui Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, posisi Kabupaten Nagan Raya yang dikelilingi Samudera Indonesia, tepatnya dibagian selatan, memungkinkan terbukanya peluang yang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik wilayah pantai barat-selatan maupun dengan pusat pemerintahan provinsi Aceh (Banda Aceh) dan Kabupaten Aceh Besar/sabang atau pun ke Sumatera Utara.

Gambar 2.3.
Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, 2015 – 2035

Bila dilihat dari struktur dan jenis,tanah di Kabupaten Nagan Raya terdiri dari jenis tanah podzolit coklat, Alluvial, Podzolit merah kuning, Andosol, Rock Out

Croups, Renzina, Litosol, Mediterandan beberapa jenis tanah lainnya. Jenis tanah yang ada diwilayah ini berpengaruh besar terhadap pengembangan sektor pertanian dan perkebunan serta jenis tanaman yang cocok dikembangkan.

Jenis tanah tersebut pada umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Beberapa jenis tanah yang mempunyai sifat yang mempunyai resiko erosi yang tinggi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga perlu dilindungi.

2.1.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki Kemiringan lereng bervariasi antara 0–8% sampai dengan lebih dari 40% serta ketinggian antara 0 – 2775 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan ketinggian wilayah pemukiman 0 - 600 mdpl. Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Nagan Raya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas ± 64.636 Ha atau 65,31% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
2. Wilayah dengan ketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas ±1.525,20 Ha atau 10,65% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Wilayah dengan ketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas ±10.196,40 Ha atau 10,30% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
3. Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas ± 61.150 Ha atau 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
4. Wilayah dengan ketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas ± 4.275,55 Ha atau 4,32% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
5. Wilayah dengan ketinggian 300 m dpl, tersebar dengan luas ± 2.180,20 Ha atau 2,20% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

2.1.1.3 Geologi

Jenis Tanah di Kabupaten Nagan Raya terdiri dari tanah Alluvial, Podsolik coklat, Grumosol, Regosol, Podsolik merah kuning, Andosol, Litosol, Mediteran, Organosol, dan Podsolik. Jenis tanah ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kesesuaian tanaman yang dapat dikembangkan.

Jenis tanah tersebut pada umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian, dan tanaman perkebunan atau tahunan. Sedangkan jenis tanah mempunyai sifat yang mudah tererosi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga mempunyai resiko erosi yang tinggi.

2.1.1.4 Hidrologi

Kabupaten Nagan Raya masuk ke dalam lintasan Wilayah Sungai (WS) Woyla – Batee yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Seunagan, Trang, Tripa dan Seumayam. Selain itu terdapat dua DAS yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu DAS Tadu dan Seuneuam.

Kabupaten Nagan Raya dialiri beberapa sungai yang tergolong besar seperti Krueng Beutong, Krueng Seunagan, Krueng Trang, Krueng Tripa, Krueng Tadu, dan Krueng Seumayam. Sebagai daerah hulu, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan sering terjadinya banjir pada musim penghujan terutama di daerah hilir. Kondisi ini (banjir) diperparah oleh karakteristik wilayah di mana perbandingan panjang sungai dan perbedaan ketinggian (kontur) relatif curam, sehingga curah hujan yang terjadinya di daerah hulu (daerah atas) akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir (bawah).

Danau yang tersebar didalam wilayah Kabupaten Nagan Raya seluas 210,01 Ha terdiri dari danau seluas 115,56 ha dan sempadan danau seluas 94,45 ha. Sebaran luas dan lokasi danau, sebagai berikut:

- Kecamatan Seunagan Timur seluas 57,91 ha terdiri dari danau seluas 13,15 Ha dan sempadan danau seluas 44,76 ha;
- Kecamatan Beutong seluas 47,90 ha terdiri dari danau seluas 22,99 ha dan sempadan danau seluas 24,91 ha;
- Kecamatan Tadu Raya seluas 357,09 ha terdiri dari danau seluas 68,44 ha dan sempadan danau seluas 288,65 ha; dan
- Kecamatan Tripa Makmur seluas 35,46 ha terdiri dari danau seluas 10,98 ha dan sempadan danau seluas 24,48 ha.

Pengelolaan Air Tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan air tanah di Kabupaten Nagan Raya seluas 205.343,46 ha. Rincian Cekungan Air Tanah terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.4.
Cekungan Air Tanah di Kabupaten Nagan Raya

NO	CAT		KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (ha)
1	Meulaboh		Nagan Raya	Darul Makmur	73.547,25
				Kuala	12.089,35
				Kuala Pesisir	6.109,97
				Tadu Raya	34.420,65
				Beutong	24.041,59
				Seunagan	5.673,31
				Suka Makmue	5.156,31
				Seunagan Timur	23.281,39
				Tripa Makmur	18.486,39
2	Telege		Nagan Raya	Beutong Ateuh Banggalang	2.537,25

Sumber: RISPAM Kabupaten Nagan Raya 2016

Potensi Sumber Air Baku yang dapat dijadikan sebagai sumber air minum dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas di Kabupaten Nagan Raya, terdapat beberapa titik lokasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.5.
Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Titik Lokasi Sumber Air Baku					
		Sungai	Rawa	Danau	Air Terjun	Mata Air	Embung
1	Darul Makmur	10	-	-	1	2	-
2	Kuala	2	-	-	-	1	-
3	Kuala Pesisir	4	2	-	-	-	1
4	Tadu Raya	8	-	1	-	-	-
5	Beutong	9	-	-	1	-	-
6	Seunagan	3	-	-	-	1	-
7	Suka Makmue	-	-	-	-	-	-
8	Seunagan Timur	2	-	-	-	2	-
9	Tripa Makmur	4	-	-	-	-	-
10	Beutong Ateuh Banggalang	1	-	-	1	1	-

Sumber: RISPAM Kabupaten Nagan Raya 2016

2.1.1.5 Klimatologi

Tahun 2020 Kabupaten Nagan Raya memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,1° C sampai 27,8° C. Suhu terendah terjadi di Bulan Oktober yaitu 22,9° C dan suhu tertinggi terjadi di Bulan Maret yaitu 32,8° C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 75 – 91 %. Curah hujan yang terjadi selama Tahun 2020 untuk Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juli yaitu 739 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan juni yaitu 152,0 mm. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan Desember sebesar 21 hari dan terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 10 hari. Penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 81,8 % dan terendah terjadi pada bulan September sebesar 40,9 %. Kondisi suhu udara, kelembapan, curah hujan, hari hujan, dan penyinaran matahari disajikan pada Tabel 2.5 dan 2.6. dibawah ini.

Tabel 2.6.
Kondisi Suhu Udara dan Kelembapan Tahun 2020

Bulan	Suhu			Kelembaban		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	23.7	27.3	31.9	87	75	98
Februari	23.6	27.4	32.1	75	87	98
Maret	23.8	27.8	32.8	72	85	96
April	23.9	27.2	32.3	77	89	97
Mei	23.9	27.2	32.3	76	88	96
Juni	23.4	27.0	32.2	72	84	94
Juli	23.1	26.5	31.9	75	87	96
Agustus	23.2	27.0	32.5	73	86	96
September	23.1	26.5	31.6	78	89	96
Oktober	22.9	26.1	31.3	81	90	98
November	23.5	26.4	31.0	83	91	97
Desember	23.2	26.4	31.0	83	91	97

Sumber : Nagan Raya Dalam Rangka Tahun 2021

Tabel 2.7.
Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari Tahun 2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari
Januari	579.0	15	81.8
Februari	242.0	12	73.6
Maret	337.0	12	77.2
April	595.0	19	67.5
Mei	385.0	19	67.5
Juni	152.0	10	67.5
Juli	739.0	18	62.7
Agustus	249.0	14	61.8
September	250.0	17	40.9
Oktober	459.0	20	47.2
November	444.0	21	47.7
Desember	307.0	21	56.3

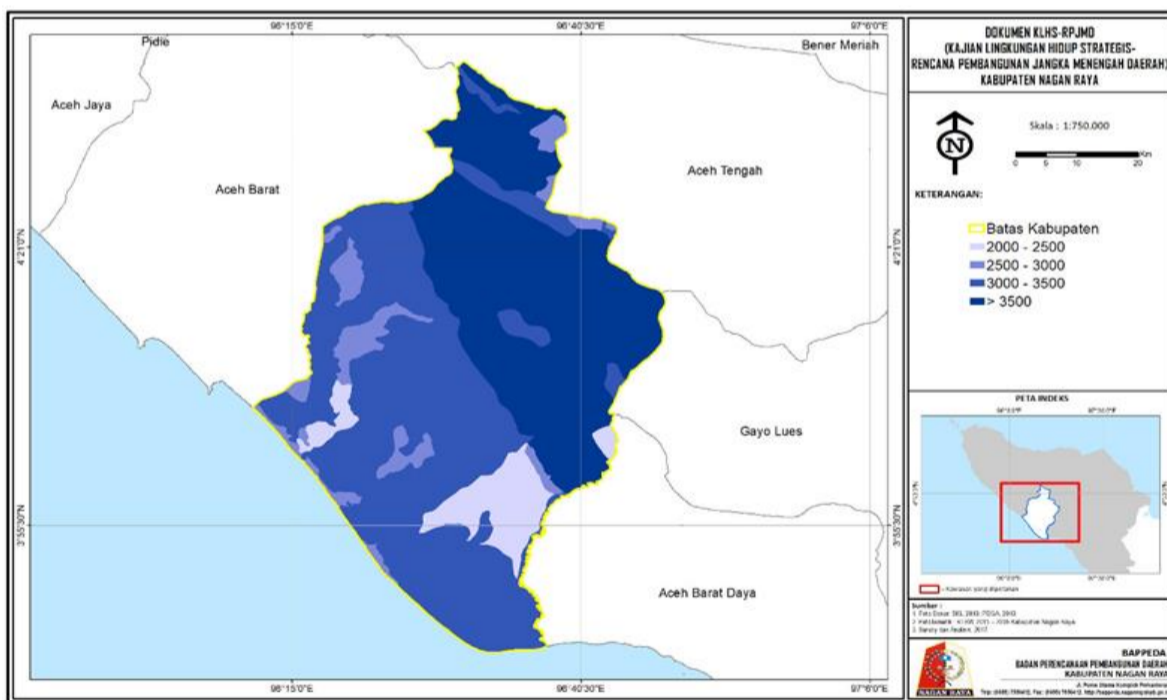
Sumber : Nagan Raya Dalam Rangka Tahun 2021

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan dan penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya yang telah diklasifikasikan peruntukkannya sesuai perundang-undangan dan kebutuhan daerah. Kawasan lindung terdiri atas hutan lindung dan kawasan lindung gambut seluas 129.103,91 Ha, sedangkan selebihnya dari total luas daerah tersebut merupakan kawasan budidaya. Secara umum pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya digunakan untuk keperluan areal permukiman, perkebunan, persawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak belukar dan hutan.

Alokasi ruang terbesar berupa hutan lindung yaitu mencapai luas 129.103,91 Ha atau 36,41 persen dan lahan perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (Swasta Nasional) seluas 54.662,31 Ha atau 15,42 persen. Sedangkan seluas 170.723,78 Ha atau 48,16 persen digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan kebutuhan penggunaan lahan oleh masyarakat setempat. Berikut di bawah ini gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya yang ditampilkan dalam bentuk Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 2.4.
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, 2015 – 2035

Berdasarkan sebarannya, pola penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya terbagi atas tiga wilayah yaitu wilayah pantai, wilayah tengah dan wilayah pedalaman. Wilayah pantai di dominasi kegiatan tambak dan sawah, wilayah

tengah kegiatan perdagangan dan jasa serta sawah dan wilayah pedalaman kegiatan dominan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

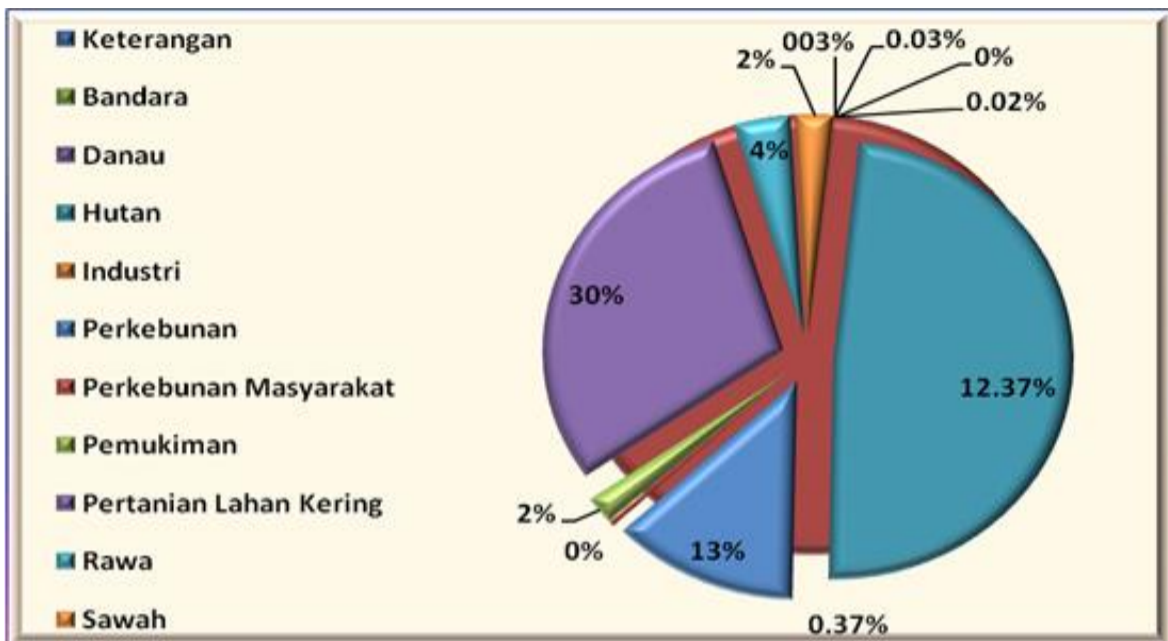
Penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya didominasi oleh hutan, perkebunan dan pertanian lahan kering. Sesuai dengan kondisi penggunaan lahan untuk Bandara sebesar 103,25 Ha atau 0,03%, danau sebesar 114,89 Ha atau 0,03 %, hutan sebesar 163.459,49 Ha atau 46,11 %, industri sebesar 334,80 Ha atau 0,09 %, perkebunan sebesar 54.417,29 Ha atau 15,35 %, perkebunan masyarakat 32.964,54 Ha atau 9,30%, pemukiman sebesar 8.517,18 Ha atau 2,40%, pertanian lahan kering 61.520,71 atau 17,35%, rawa sebesar 13.271,65 Ha atau 3,74%, sawah 12.777,64 Ha atau 3,60%, sungai 2.194,20 Ha atau 0,62% dan tanah terbuka 4.815,49 Ha atau 1,36 % dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Nagan Raya untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut dan gambar berikut ini.

Tabel 2.8.
Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya

No	Keterangan	Luas Lahan	Persentase Luas Lahan
		(Ha)	(%)
1	Bandara	103,25	0,03
2	Danau	114,89	0,03
3	Hutan	163.459,49	46,11
4	Industri	334,80	0,09
5	Perkebunan	54.417,29	15,35
6	Perkebunan Masyarakat	32.964,54	9,30
7	Pemukiman	8.517,18	2,40
8	Pertanian Lahan Kering	61.520,71	17,35
9	Rawa	13.271,65	3,74
10	Sawah	12.777,64	3,60
11	Sungai	2.194,20	0,62
12	Tanah Terbuka	4.815,49	1,36
Jumlah		354,491.13	100.00

Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

Gambar 2.5.
Persentase Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya



Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

Lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Nagan Raya mempunyai luas 24.759,2 Ha yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Darul Makmur dengan luas 2.241,3 Ha; (Sawah 94,3 Ha, Tegalan 2.147 Ha);
- b. Kecamatan Tripa Makmur dengan luas 1.500,8 Ha; (Sawah 77,8 Ha, Tegalan 1.423 Ha);
- c. Kecamatan Kuala dengan luas 2.236,2 Ha; (Sawah 822,2 Ha, Tegalan 1414 Ha);
- d. Kecamatan Kuala Pesisir dengan luas 863,7 Ha; (Sawah 146,7 Ha, Tegalan 717 Ha);
- e. Kecamatan Tadu Raya dengan luas 3.539,1 Ha; (sawah 326,1 Ha, Tegalan 3213 Ha);
- f. Kecamatan Beutong dengan luas 3.539,1 Ha; (Sawah 1.536,9 Ha, tegalan 4.368 Ha);
- g. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dengan luas 961,9 Ha; (Sawah 342,9 Ha, 618 Ha)
- h. Kecamatan Seunagan dengan luas 1.757,1 Ha; (Sawah 1044,1 Ha, Tegalan 713 Ha) ;
- i. Kecamatan Suka Makmue dengan luas 2.247,1 Ha; (sawah 1.541,1 Ha, Tegalan 706 Ha);

- j. Kecamatan Seunagan Timur dengan luas 3.507,3 Ha; (sawah 1.694,3 Ha, Tegalan 1813 Ha).

2.1.2. Demografi

Penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2020 sebanyak 168.392 jiwa, sementara itu jumlah rasio jenis kelamin penduduk perkecamatan tahun 2020 sebesar 102,02. Dilihat dari distribusinya, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Darul Makmur sebesar 46.412 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu sebesar 1.190 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2020 mencapai 48 Jiwa/Km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Seunagan mencapai 281 Jiwa/Km². Dan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu 5 Jiwa/Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2020

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 2010-2020
Darul Makmur	49.412	2.30
Tripa Makmur	9.038	1.31
Kuala	22.350	1.83
Kuala Pesisir	17.338	2.01
Tadu Raya	14.731	2.70
Beutong	13.701	0.86
Beutong Ateuh Banggalang	1.990	1.59
Seunagan	15.924	0.93
Suka Makmue	9.931	2.09
Seunagan Timur	13.977	1.36
NAGAN RAYA	168.392	1.83

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.10.
Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2020

KECAMATAN	PERSENTASE PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
Darul Makmur	29.34	48
Tripa Makmur	5.37	48
Kuala	13.27	185
Kuala Pesisir	10.30	227
Tadu Raya	8.75	42
Beutong	8.14	13
Beutong Ateuh Banggalang	1.18	5
Seunagan	9.46	281
Suka Makmue	5.90	193
Seunagan Timur	8.30	56
NAGAN RAYA	100.00	48

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.11.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Nagan Raya Per Kecamatan Tahun 2020

KECAMATAN	RASIO JENIS KELAMIN
Darul Makmur	103.57
Tripa Makmur	100.98
Kuala	102.32
Kuala Pesisir	105.06
Tadu Raya	103.53
Beutong	101.04
Beutong Ateuh Banggalang	103.48
Seunagan	98.83
Suka Makmue	98.30
Seunagan Timur	98.73
NAGAN RAYA	102.02

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2021

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis Kabupaten Nagan Raya ditetapkan berdasarkan nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi. Berikut Kawasan strategis Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035.

Tabel 2.12.
Kawasan Strategis Kabupaten Nagan Raya

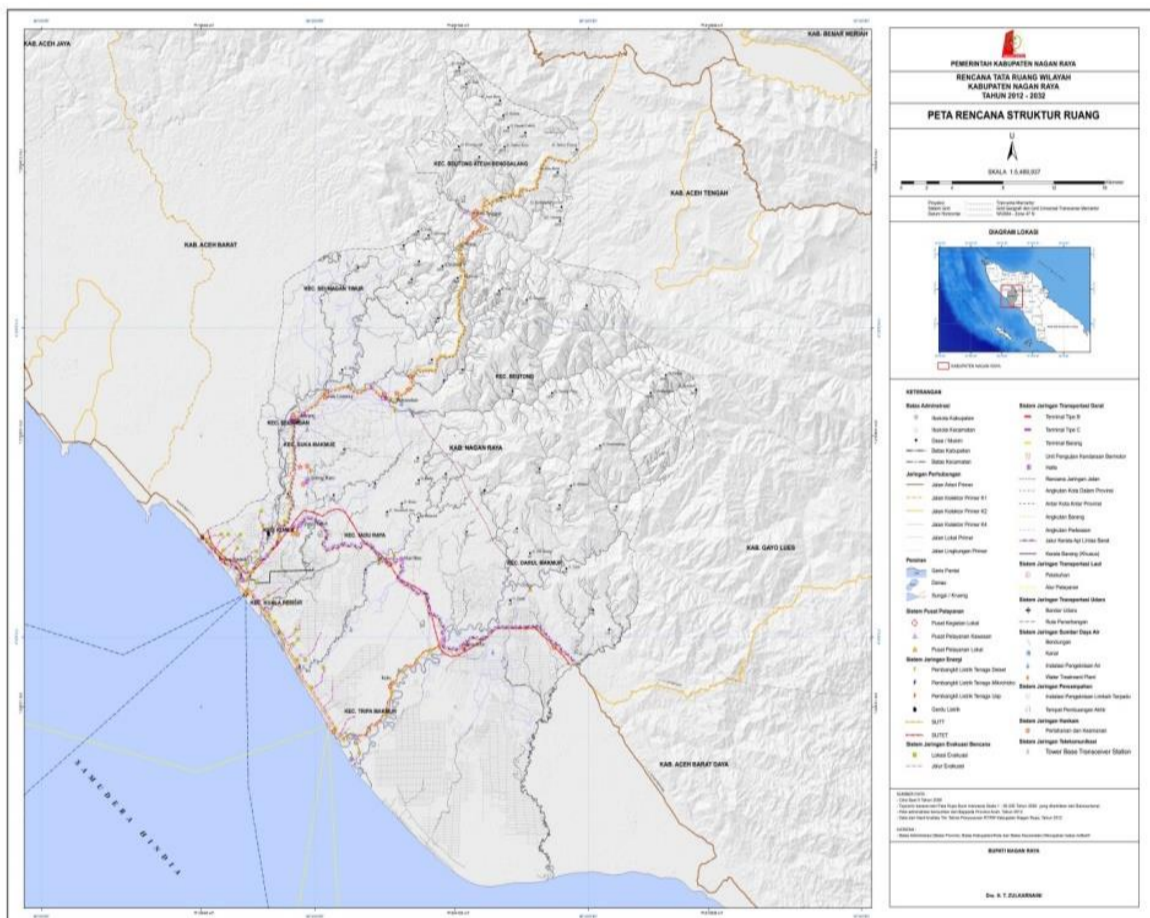
NO	SUDUT KEPENTINGAN	KAWASAN STRATEGIS	KECAMATAN	GAMPONG
1	Ekonomi	Kawasan Agropolitan	Kuala	Cot Kumbang
			Kuala Pesisir	Kuala Trang
			Suka Makmue	Cot Peuradi
			Tadu Raya	Sarah Mantok
			Tripa Makmur	Mon Dua
			Darul Makmur	Simpang Deli Kilang
2	Ekonomi	Kawasan Minapolitan	Kuala Pesisir	Padang Rubek
			Beutong	Blang Leumak
			Tadu raya	Pante Ara
			Tripa Makmur	Sarah Mantok
			Mon Dua	
3	Ekonomi	Kawasan Cepat Tumbuh	Kuala Pesisir	
4	Ekonomi	Kawasan Koridor Perdagangan dan Jasa	Kuala	Ujung Fatimah
				Blang Teungoh
				Simpang Peut
5	Ekonomi	Kawasan Percepatan Daerah Tertinggal	Beutong Ateuh Banggalang	4 (Empat) Gampong
6	Ekonomi	Kawasan Pariwisata		
		Kawasan Danau Laut Tadu	Tadu Raya	6 (Enam) Gampong
		Kawasan Krueng Isep	Beutong	Pante Ara
		Kawasan Bantaran Irigasi Jeuram	Beutong	Keude Seumot
		Kawasan Air Terjun Krueng Itam	Tadu Raya	Krueng Itam
7	Sumber Daya Alam/ Teknologi Tinggi	Kawasan PLTU	Kuala Pesisir	Suak Puntong
		Kawasan Industri Skala Besar	Kuala Pesisir	
		Kawasan Industri Skala Menengah	Tadu Raya	Cot Rambong
				Kuala Tadu
8	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Rawan Bencana Tsunami	Kuala Pesisir	10 (sepuluh) Gampong
			Tadu Raya	3 (tiga) gampong
			Tripa Makmur	5 (lima) gampong

Sumber: RTRW Kab. Nagan Raya Tahun 2015-2035

Selanjutnya, pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Nagan Raya memiliki satu Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

dan satu Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan beberapa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta beberapa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL. PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan dan PPL kawasan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan dalam skala lingkungan.

Gambar 2.6.
Struktur Ruang Kabupaten Nagan Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2015 – 2035

2.1.3.1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Sebagian Wilayah Kabupaten Nagan Raya merupakan Kawasan Lindung, sehingga dalam pemanfaatan kawasan harus mengacu pada pola pemanfaatan ruang kawasan lindung yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antara wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan Kawasan Lindung di Kabupaten Nagan Raya bertujuan untuk:

- a) Mengarahkan fungsi kawasan lindung yang meliputi rencana pemanfaatan ruang kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya, kawasan suaka alam, kawasan perlindungan setempat dan kawasan bencana;
- b) Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber air;
- c) Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan kawasan lindung di Kabupaten Nagan Raya seluas 126.108.96 Ha adalah:

- a) Kawasan lindung
Kawasan hutan lindung di Kabupaten Nagan Raya terdapat wilayah Kecamatan Seunagan Timur seluas 2.446,702 Ha berada di Gampong Pulo Teungoh; Kecamatan Beutong seluas 75.149,446 Ha berada di Gampong Blang Neang, Pante Ara, Pante Bayam, dan Ujong Blang; Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 30.026,599 Ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Meurandeh, Blang Puuk dan Kuta Teungoh; dan Kecamatan Darul Makmur seluas 21.486,159 Ha berada di Gampong Alue Rambot, Alue Waki, Krueng Alem dan Krueng Seumanyam.
- b) Kawasan perlindungan setempat
Kawasan perlindungan setempat di wilayah Kabupaten Nagan Raya dibagi dalam tiga jenis yaitu kawasan sempadan pantai seluas 497,45 Ha, kawasan sempadan sungai seluas 8.961,28 Ha dan kawasan sekitar danau 156,71 Ha.

2.1.3.2 Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pengembangan kawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung Kabupaten Nagan Raya. Adapun kawasan budidaya diperuntukkan untuk: pemukiman, pertanian tanaman pangan, tanaman tahunan/perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata, pengembangan hutan rakyat, industri, lahan basah, lahan kering dan transmigrasi. Luas areal kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.13.
Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Nagan Raya

No	Uraian	Luas Areal Kawasan Lindung(Ha)
Kawasan Hutan Lindung		
1	Kawasan Hutan Lindung	126.108,96
Kawasan Yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahnya		
1	Kawasan Rawa gambut	11.380,71
Kawasan Perlindungan Setempat		
1	Kawasan Spamdan Pantai	497,45
2	Kawasan Spamdan Sungai	8.961,28
3	Kawasan sekitar Danau	156,71
Kawasan Hutan Produksi		
1	Hutan Produksi	16.348,253
2	Hutan Produksi Terbatas	6.637,598
3	Hutan Produksi Koversi	4.658,14
Kawasan Rawan Bencana Alam		
1	Kawasan Rawan Longsor	6.523,94
2	Kawasan Rawan Pasang dan Abrasi	15.702,08
3	Kawasan Rawan Kebakaran	1,363.60
4	Kawasan Rawan Banjir	92,352.28
Kawasan Pertanian		
1	Kawasan Lahan Basah	12.777,64
2	Kawasan Lahan Kering	64.520,71
Kawasan Perkebunan		
1	Perkebunan Besar	54.417,29
2	Perkebunan Rakyat	2.064,40
Kawasan Peternakan		
1	Peternakan Besar	113,33

Tabel 2.12 di atas memperlihatkan perbandingan lahan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Status Penguasaan Lahan Budidaya di wilayah Kabupaten Nagan Raya saat ini yang teridentifikasi dapat digolongkan menjadi dua yaitu: Hak Guna tanah (HGU) dan Hak Milik. Penggunaan lahan yang termasuk status HGU diantaranya Hak Penguasaan Hutan (HPH), Perkebunan Besar dan Hutan

Tanaman Industri (HTI). Pemanfaatan lahan juga untuk berbagai kegiatan pemukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa serta perkantoran.

Tabel 2.14.
Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Kawasan Hutan Lindung		Kawasan Budidaya	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Darul Makmur	21,486,159	16,6	4,608,15	29,69
2	Kuala	-	-	-	-
3	Kuala Pesisir	-	-	-	-
4	Tadu Raya	-	-	-	-
5	Beutong	75,149,446	58,2	5,986,29	37,79
6	Seunagan	-	-	-	-
7	Suka Makmue	-	-	-	-
8	Seunagan Timur	2,446,702	1,9	5,246,36	33,12
9	Beutong Ateuh Banggalang	30,026,599	23,3	5,246,36	33,12
10	Tripa Makmur	-	-	-	-
Jumlah		129,108,96	100	1,584,080	100

Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

2.1.3.3 Kawasan Rawan Bencana Alam

Pada umumnya kondisi geografis, geologis, hidrologis maupun demografis sangat mempengaruhi tingkat kerawanan bencana di suatu daerah. Bencana alam yang terjadi meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia, konflik dengan alam).

Dalam beberapa tahun terakhir, bencana yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya antara lain: banjir genangan, abrasi pantai, longsor, erosi, dan kebakaran lahan. Banjir genangan merupakan bencana tahunan yang melanda beberapa kawasan yaitu Kecamatan Tripa Makmur, Tadu Raya, Kuala Pesisir dan Darul Makmur. Bencana tanah longsor juga sering terjadi di jalan Lintas Tengah Aceh yaitu di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang merupakan wilayah perbukitan yang

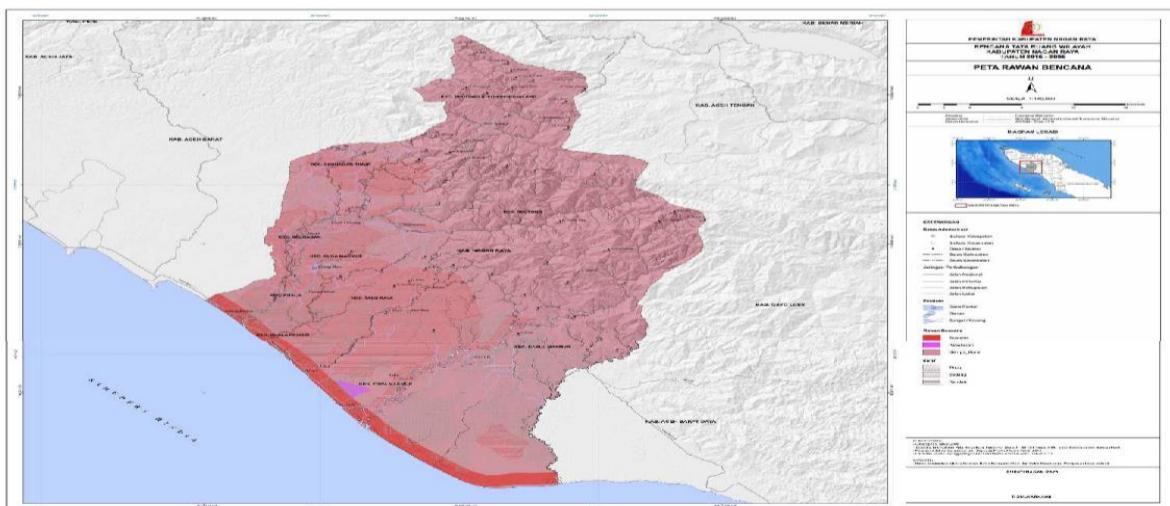
curam (Singgah Mata). Selain itu, bencana kebakaran lahan yang diakibatkan baik oleh faktor alam yaitu cuaca ekstrim pada musim kemarau maupun faktor kesadaran manusia yang rendah akan kepeduliannya terhadap lingkungan.

Berdasarkan potensi rawan bencana di Kabupaten Nagan Raya dapat diklasifikasikan dalam beberapa kondisi yaitu :

1. Kawasan rawan longsor meliputi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
2. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Tripa Makmur;
3. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Tadu Raya, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir dan Darul Makmur;
4. Kawasan rawan kebakaran lahan meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Kuala.
5. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi daerah seluruh wilayah pesisir Kabupaten Nagan Raya.
6. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya terutama untuk bencana dengan skala menengah keatas antara lain belum terpadunya koordinasi antara unsur pemerintah dengan swasta dan masyarakat sipil lainnya. Hal lain yang membuat kurang optimalnya penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana adalah partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih terbatas hanya pada saat terjadinya bencana (fase tanggap darurat), serta sarana dan prasarana pendukung yang masih belum memadai.

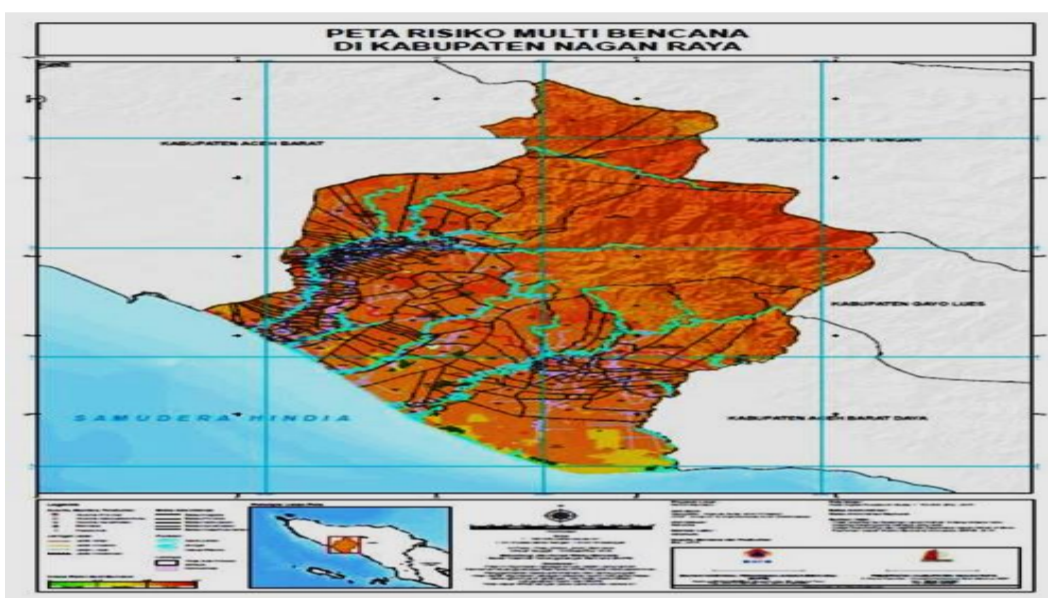
Gambar 2.7.
Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2015 – 2035

Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di kabupaten Nagan Raya adalah bersumber dari perilaku manusia atau aktifitas yang ditekuni oleh masyarakat itu sendiri. Bencana tersebut terjadi akibat faktor kelalaian, pengetahuan masyarakat yang rendah, ketidaktahuan dan lainnya. Bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kebakaran, konflik sosial dan pencemaran lingkungan (polusi udara dan limbah industri). Eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam seperti penambangan yang tidak dikelola dengan baik diperkirakan akan menimbulkan masalah baru terhadap kualitas lingkungan hidup.

Gambar 2.8.
Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya



Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Tahun 2018

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

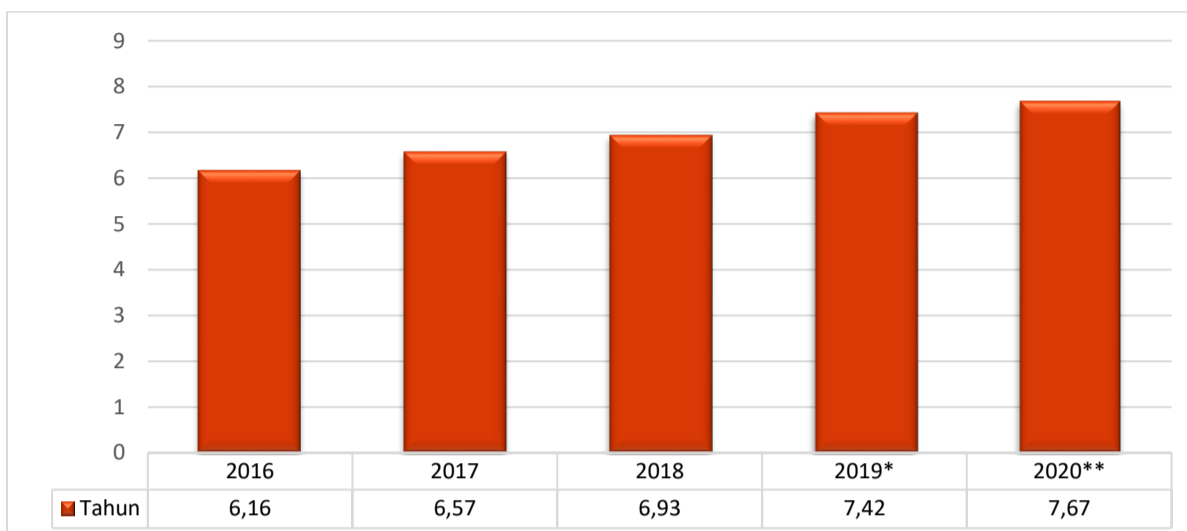
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Perekonomian suatu daerah secara menyeluruh dapat digambarkan dengan PDRB. Meningkatnya nilai PDRB dapat menunjukkan peningkatan perekonomian suatu daerah, begitu juga sebaliknya.

Dilihat dari PDRB Kabupaten Nagan Raya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan terjadi peningkatan nilai PDRB tahun 2016-2020. Ini menunjukkan kinerja perekonomian Kabupaten Nagan Raya meningkat dalam lima tahun terakhir sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2016, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Nagan Raya sebanyak 6,16 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi RP 7,67 triliun tahun 2020. Rata-rata kenaikan tiap tahun sebanyak 0,40 triliun rupiah dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2.9.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya
(Triliun Rupiah) Tahun 2016 – 2020

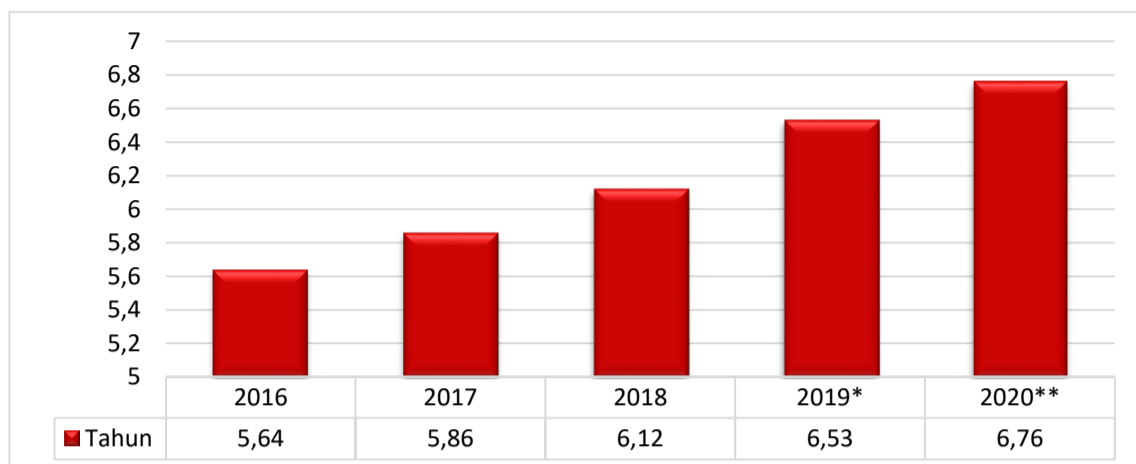


Sumber : Tinjauan Perekonomian Kab. Nagan Raya Tahun 2021

Sementara PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB yang masih dipengaruhi oleh perubahan harga. Untuk melihat nilai PDRB yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (perkembangan riil) maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. Nilai PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016-2020 seperti pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Tahun 2016, nilai PDRB atas dasar harga konstan adalah 5,64 triliun rupiah dan terus naik menjadi 6,76 triliun rupiah pada tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan selama tahun 2016-2020 terjadi peningkatan produktivitas (output) ekonomi secara agregat (menyeluruh) dari keseluruhan kategori lapangan usaha di kabupaten Nagan Raya.

Secara rata-rata, PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya mengalami kenaikan periode 2016-2020. Oleh karena itu, kenaikan PDRB ADHB lebih besar dibandingkan kenaikan PDRB ADHK selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga lebih dominan dibandingkan dengan kenaikan produksi di Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 2.10.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nagan Raya
(Triliun Rupiah), Tahun 2016 – 2020

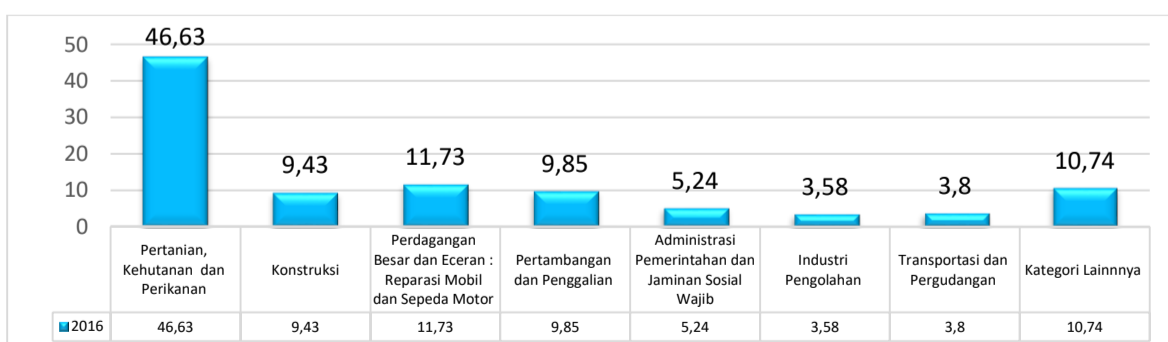


Sumber : Tinjauan Perekonoian Kab. Nagan Raya Tahun 2021

Struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari besarnya peranan atau kontribusi masing-masing kategori atau lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB suatu daerah. Struktur ekonomi disebut berubah jika terjadi perubahan kategori atau lapangan usaha yang dominan dalam pembentukan PDRB digantikan dengan kategori lainnya pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Sampai tahun 2020 struktur ekonomi masyarakat Nagan Raya masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari yang paling besarnya kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya. Kategori ini masih menjadi andalan bagi masyarakat Nagan raya yang ditunjukkan dengan kontribusinya yang tinggi dari tahun ke tahun. Tahun 2020 kontribusi kategori ini sudah mencapai 45,74 % dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya. Keberadaan kategori ini bersifat padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di kabupaten Nagan Raya.

Gambar 2.11.
Struktur PDRB Kabupaten Nagan Raya (persen)



Sumber : Tinjauan Perekonomian, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tren yang positif pada periode waktu 2016-2020. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir sebesar 4,46 persen. Dari tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya sempat melambat sebesar 4,05 persen dan tahun 2017 menjadi 3,95 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya tahun 2019 yaitu 6,77 persen merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.12.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya (persen),
Tahun 2016-2020

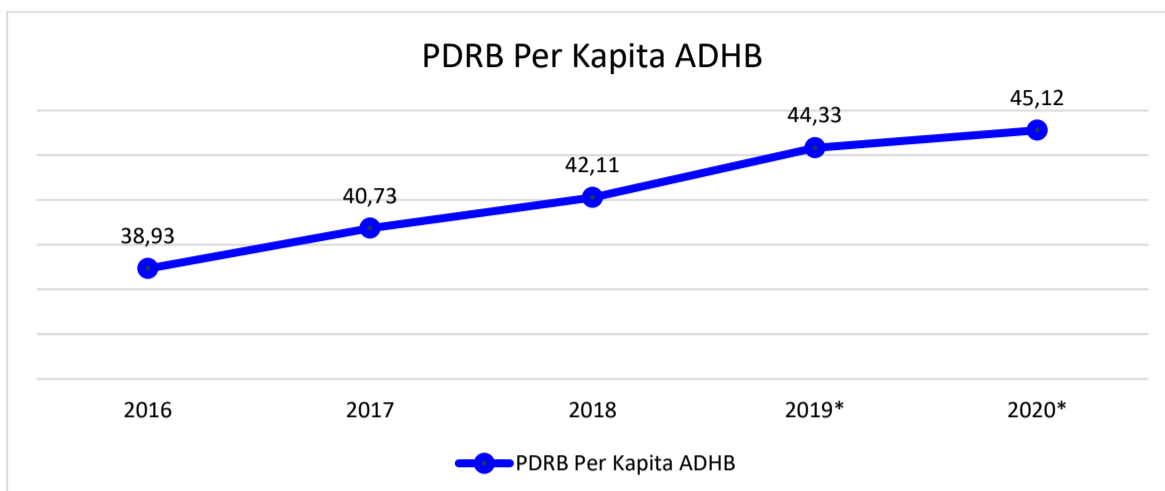


Sumber : Tinjauan Perekonomian Kab. Nagan Raya Tahun 2021

2.2.1.2 Pendapatan Per Kapita

Kondisi taraf hidup dan kesejahteraan warga Kabupaten Nagan Raya salah satunya dapat dilihat daribesaran nilai pendapatan per-kapita penduduknya. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan per-kapita masyarakat penduduk Kabupaten Nagan Raya secara umum menunjukkan tren peningkatan secara persentase menurut ADHK, selama kurun waktu tahun 2017-2021, walaupun pada tahun 2021 angka tingkat pendapatan perkapita sedikit mengalami angka pertumbuhan yang lebih rendah jika di bandingkan dengan tahun 2020.

Gambar 2.13.
PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya (juta rupiah),
Tahun 2016-2020



Sumber : Tinjauan Perekonomian Kab. Nagan Raya Tahun 2021

Dari Gambar 2.13 diatas menjelaskan bahwa pendapatan per-kapita atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,61 persen per-tahun. berdasarkan ADHK tersebut, pendapatan per-kapita penduduk Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu antara 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan ADHK. Hingga tahun 2021, pendapatan per-kapita ADHK penduduk Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar Rp. 19,53 juta, yang meningkat secara rata-rata 3,61 persen per-tahun , dimana pada tahun 2017, saat itu nilai pendapatan per-kapita ADHK penduduk Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar RP. 19,17 juta. PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya mencapai 38,93 juta rupiah. Dalam lima tahun terakhir PDRB per kapita sudah mengalami peningkatan.

Pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi terjadi tahun 2020. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya atas dasar harga berlaku mencapai 45,12. Artinya, setiap penduduk di Kabupaten Nagan Raya rata-rata dapat menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar 45,12. juta rupiah selama tahun 2020.

2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Nagan Raya dapat dicermati dari angka inflasi Kabupaten Meulaboh. Mengutip publikasi data BPS, pada tahun 2021, data yang ada menunjukkan, tingkat inflasi di daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 dan tahun 2021 berada di atas rata-rata nasional, dan bahkan berada di atas Banda Aceh.

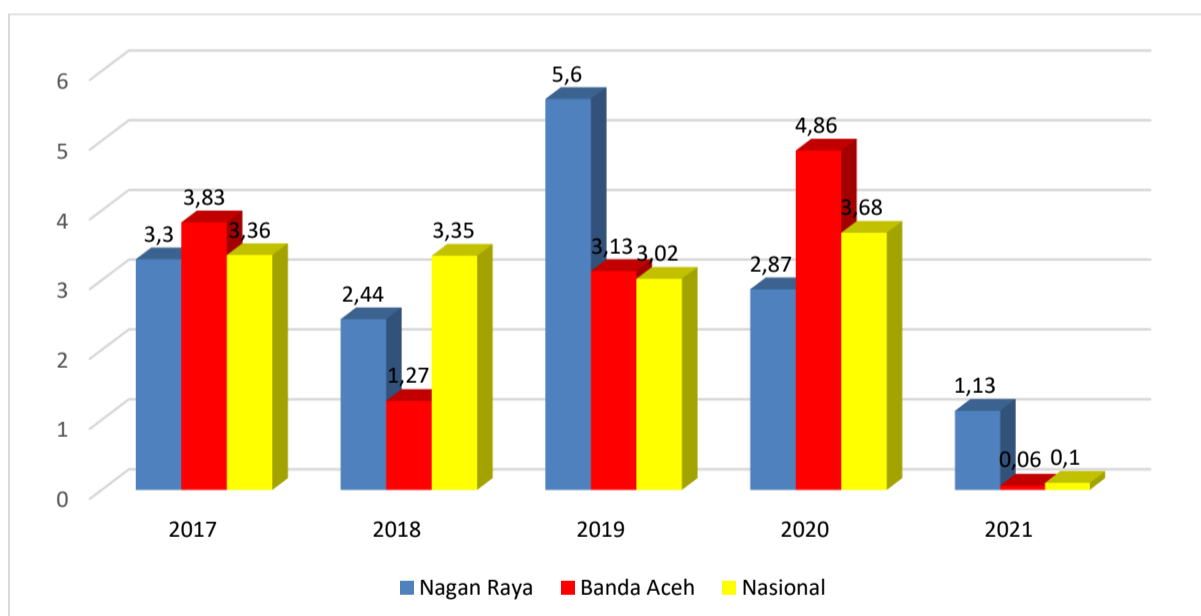
Perkembangan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Nagan Raya yang tergambar dari laju inflasi selama ini mulai menunjukkan kecenderungan dapat lebih terkendali dan terjaga dengan cukup baik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan yang perlu tetap dipertahankan, agar daya beli masyarakat tetap dapat menjangkau upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok masyarakat miskin.

Tabel 2.15.
Tingkat Inflasi Tahun 2017-2021 (persen)

Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
Nagan Raya	3,3	2,44	5,6	2,87	1,13
Banda Aceh	3,83	1,27	3,13	4,86	0,06
Nasional	3,36	3,35	3,02	3,68	0,1

Sumber: BPS Aceh 2021

Gambar 2.14.
Perkembangan tingkat Inflasi Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Aceh 2021

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah kiranya perlu terus berupaya ikut berperan dalam menjaga serta mendorong terciptanya stabilitas harga-harga secara umum agar dimasa mendatang tidak menyebabkan inflasi yang tinggi. Inflasi

yang tinggi dapat menyulitkan kehidupan anggota masyarakat yang berpenghasilan tetap dan rendah. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menjamin distribusi barang-barang dan jasa dengan lancar, dan membuka peluang peningkatan produksi lokal, terutama barang-barang kebutuhan pokok yang mampu dihasilkan oleh daerah serta peningkatan peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Nagan Raya.

2.2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

1. Persentase Penduduk Miskin

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama ini telah dan akan terus memberikan perhatian khusus dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam kaitannya dengan penanggulangan masalah kemiskinan. Berbagai program pembangunan yang dapat mengurangi angka kemiskinan akan terus diprioritaskan dan diintensifkan pelaksanaannya. Sektor pembangunan terkait dalam hal ini seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Begitu halnya dalam konteks kewilayahan, prioritas program pembangunan yang mengarah pada upaya pengurangan angka kemiskinan di daerah ini nantinya akan langsung lebih diarahkan pada wilayah-wilayah yang selama ini dinilai menjadi kantong-kantong kemiskinan di wilayah perkotaan, pegunungan dan sebagian diantaranya yang ada di wilayah pesisir.

Selama periode 2017-2021, implementasi kegiatan pembangunan dalam kaitannya dengan upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dalam hal ini masih perlu mendapat perhatian lebih serius. Hal ini didasarkan pada fenomena, bahwa meskipun persentase angka kemiskinan Kabupaten Nagan Raya beberapa tahun

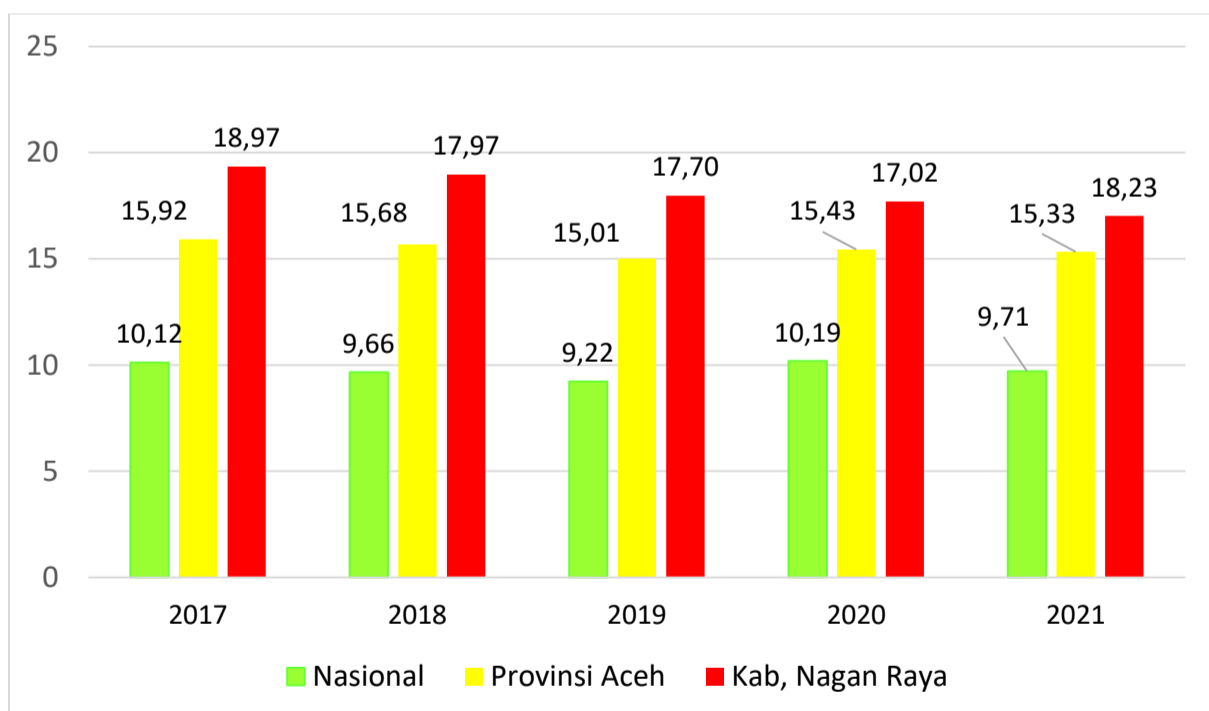
terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2017 persentase kemiskinan Kabupaten Nagan Raya sebesar 19,34 persen. Tahun 2018 samapi dengan tahun 2020 di tingkat kemiskinan juga mengalami perubahan penurunan masing-masing di angka 18,97 persen, 17,79 persen dan 17,07. Begitu juga halnya untuk tahun 2021 tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,02 persen.

Tabel 2.16.
Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh, Nagan Raya Tahun 2017-2021

Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71
Provinsi Aceh	15,92	15,68	15,01	15,43	15,33
Kab, Nagan Raya	18,97	17,97	17,70	17,02	18,23

Sumber: BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2021

Gambar 2.15.
Persentase Kemiskinan Nasional, Aceh dan Nagan Raya Tahun 2017-2021



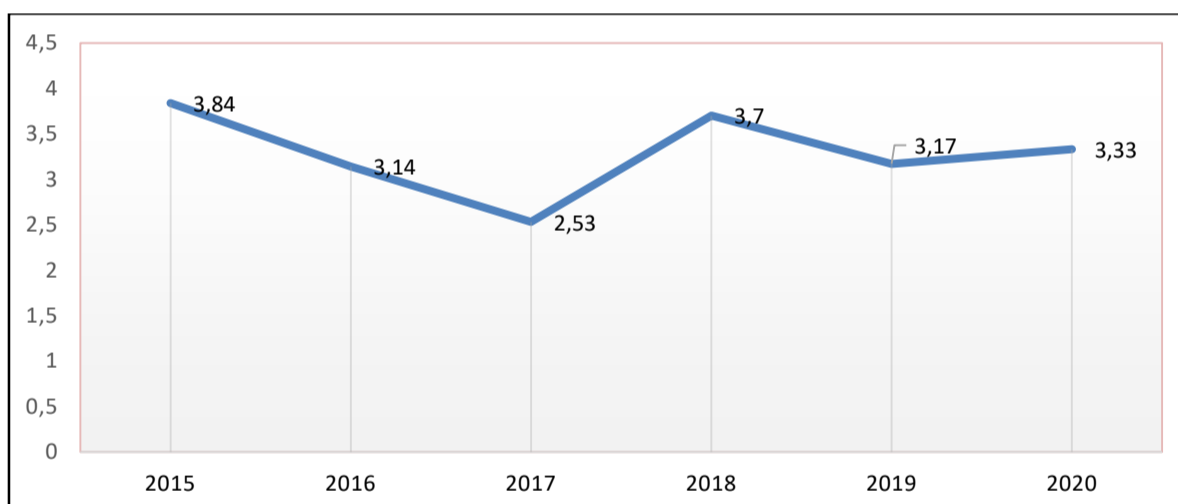
Sumber: BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2021

Berdasarkan data BPS rata – rata persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya termasuk daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Provinsi Aceh. Salah satu faktor yang mungkin dapat menyebabkan masih

belum maksimalnya dampak dari upaya keras Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam hal penanggulangan kemiskinan, kenyataan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berbagai kemungkinan penyebab, seperti dampak dari Covid-19, dorongan inflasi dan naiknya harga-harga barang dan jasa yang cenderung ikut mendorong naiknya batas garis kemiskinan, dimana hal ini tentunya dapat mempengaruhi besaran jumlah penduduk miskin maupun angka kemiskinan itu sendiri.

Kondisi dan kenyataan tersebut pula yang dinilai perlu mendapat perhatian sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam kaitannya dengan upaya yang sudah, sedang maupun yang masih akan dilakukan dalam hal perencanaan dan penyusunan berbagai program pembangunan terkait upaya penanggulangan kemiskinan maupun program-program pembangunan lain yang lebih berpihak pada golongan masyarakat miskin.

Gambar 2.16.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015–2020

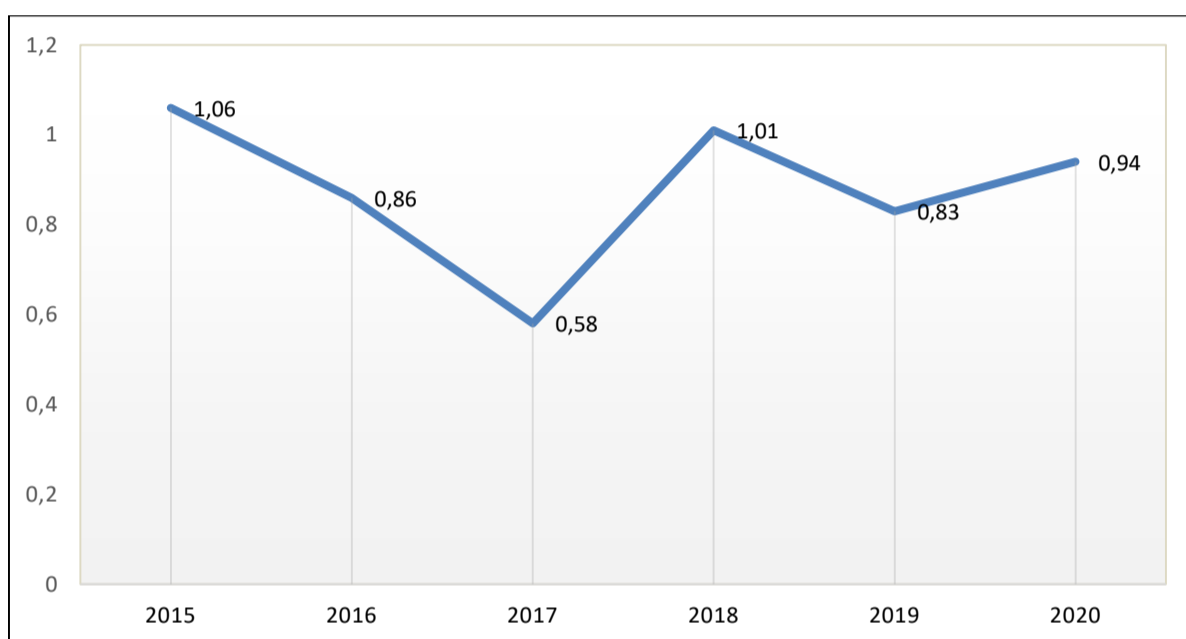


Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2021

Dari Gambar 2.16 di atas menggambarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran

bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Berdasarkan perkembangannya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang di dapat mencapai 3,84. Pada tahun berikutnya 2020 terjadi penurunan menjaddi 3,33.

Gambar 2.17.
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015–2020



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya dapat diturunkan secara efektif. Gambar 2.17 menunjukkan efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami penurunan yang konsisten dari 1,06 menjadi 0,94 pada tahun 2020. Secara umum, hal ini berarti

program dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya cukup efektif menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari tahun ke tahun.

Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami penurunan. Tahun 2015, penduduk miskin berkisar sebesar 20,13 persen turun menjadi 19,25 persen pada tahun 2016, tahun 2017 persentase kemiskinan sedikit mengalami kenaikan sebesar 19.34 persen dan kembali turun menjadi 18.97 pada tahun 2018. Tahun 2019, penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya sebesar 17,97 persen dan ditahun 2020 kembali turun menjadi 17,20 persen. Gambaran terkait angka kemiskinan dan garis kemiskinan Kabupaten Nagan Raya beserta angka perbandingannya, dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 2.17.
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2013-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2013	353.231	32.66	21.75
2014	356.221	31.91	20.85
2015	361.359	31.32	20.13
2016	374.236	30.31	19.25
2017	400.811	31.06	19.34
2018	426.827	31.06	18.97
2019	446.144	29.93	17.97
2020	493.121	29.99	17.70

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2021

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu wilayah.

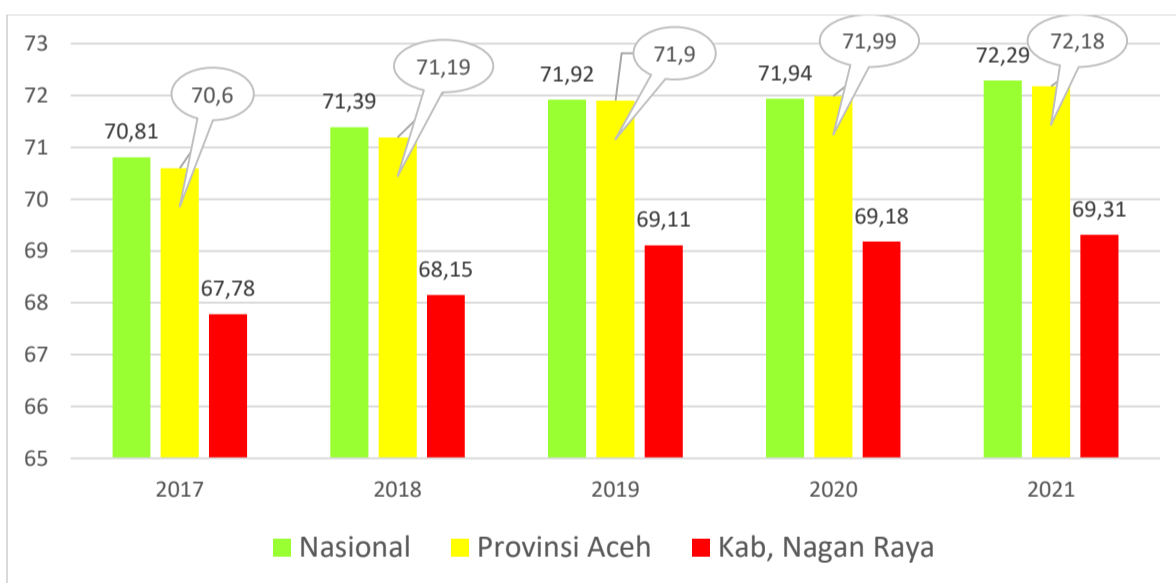
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Nagan Raya pada tahun 2021 sebesar 69,31 dan masuk dalam kategori “sedang”. Pencapaian ini meningkat 1,53 poin dari indeks tahun 2017 yang tercatat 67,78. Angka tersebut menunjukkan angka IPM Nagan Raya berada di bawah rata-rata Aceh pada tahun 2021 yaitu sebesar (72,18) dan Nasional (72,29). Dan posisi Kabupaten Nagan Raya berada pada peringkat 16 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29
2	Provinsi Aceh	70,6	71,19	71,9	71,99	72,18
3	Kab, Nagan Raya	67,78	68,15	69,11	69,18	69,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Gambar 2.18.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

2.2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1

menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Menurut (Todaro dan Smith, 2006), seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, bahwa nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu).

Walaupun dalam kenyataannya masih terdapat banyak pertimbangan untuk menyatakan pemerataan tingkat pendapatan masyarakat, Indeks Gini menjadi salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang dihitung apakah kaya atau miskin), prinsip independensi skala (tidak bergantung pada perekonomian suatu negara), prinsip independensi populasi (tidak bergantung jumlah penduduk), serta prinsip transfer (mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan). Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Indeks Gini valid untuk digunakan sebagai alat ukur ketimpangan yang umum digunakan

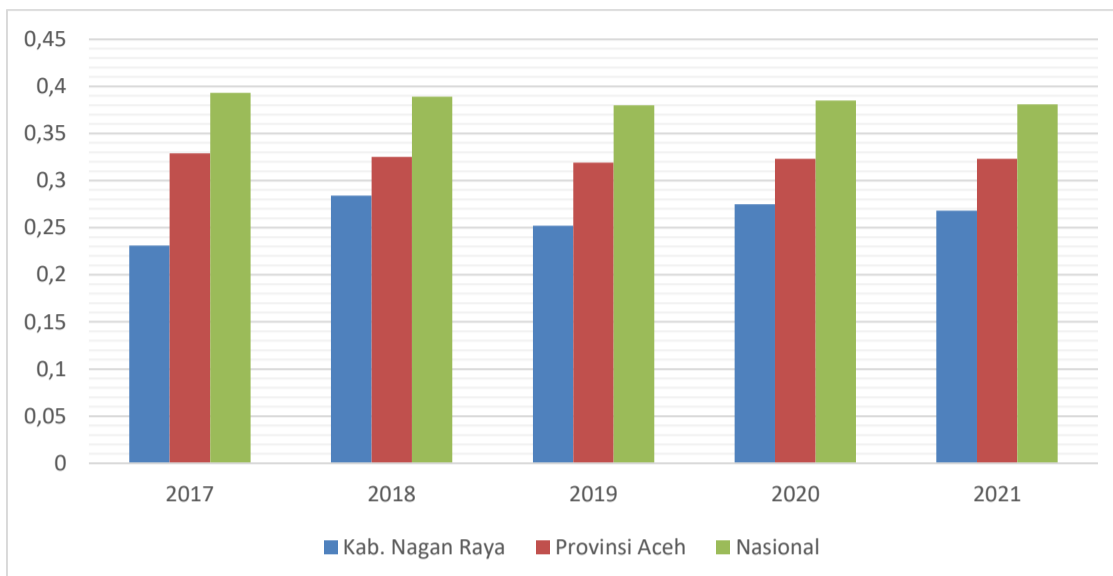
Indeks gini Kabupaten Nagan Raya tahun 2019 adalah 0,252 menunjukkan bahwa di Kabupaten Nagan Raya pemerataan pendapatan penduduk masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Walaupun mengalami fluktuasi dari tahun 2017 s/d 2021 namun masih tergolong kesejangan rendah dan berada dibawah indeks Aceh dan Nasional. Peningkatan ketimpangan ini berbanding terbalik dengan laju indeks gini di Provinsi Aceh dan Indonesia. Untuk indeks gini Provinsi Aceh dan Indonesia, trendnya terus menurun. Perkembangan indeks gini Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Indonesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Hal ini menandakan menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang mahal.

Tabel 2.19.
Perbandingan Rasio Gini
Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Nagan Raya	0,231	0,284	0,252	0,275	0,268
2	Provinsi Aceh	0,329	0,325	0,319	0,323	0,323
3	Indonesia	0,393	0,389	0,380	0,385	0,381

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Gambar 2.19.
Indeks Gini Nasional, Provinsi Aceh dan Kab. Nagan Raya

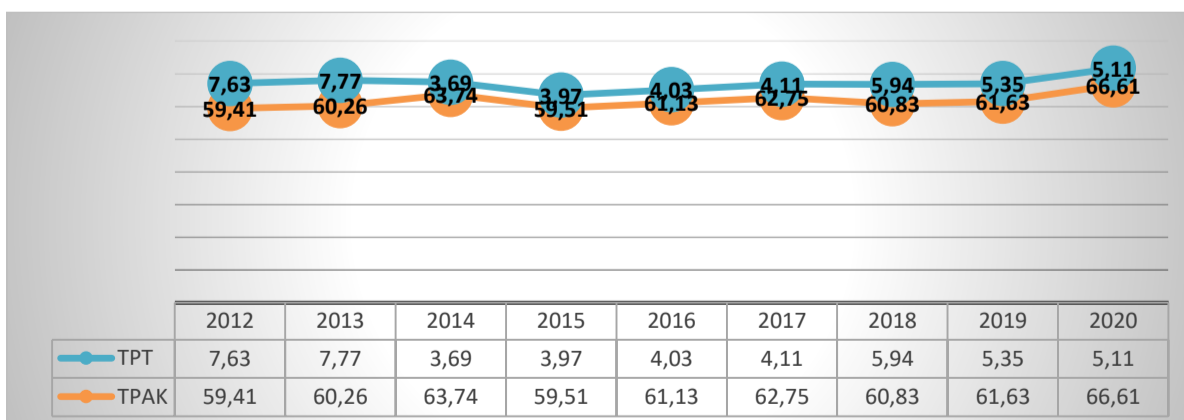


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Kurun waktu 2012-2019, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nagan Raya cenderung stabil, meskipun berfluktuasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan. Tahun 2012 angka TPAK mencapai 59,41 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 61,36 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya juga berfluktuatif selama 2012-2019. Kendati demikian, adanya kemajuan dalam penurunan angka pengangguran di Kabupaten Nagan Raya selama dua tahun terakhir (2015-2019). Tahun 2012, angka TPT mencapai 7,63 persen. Angka TPT tersebut menurun berkisar 50 persen pada periode 2013-2019. Sampai tahun 2019, tercatat TPT di Kabupaten Nagan Raya sebesar 5,35 persen.

Gambar 2.20.
Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020 (persen)



Sumber : BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2021

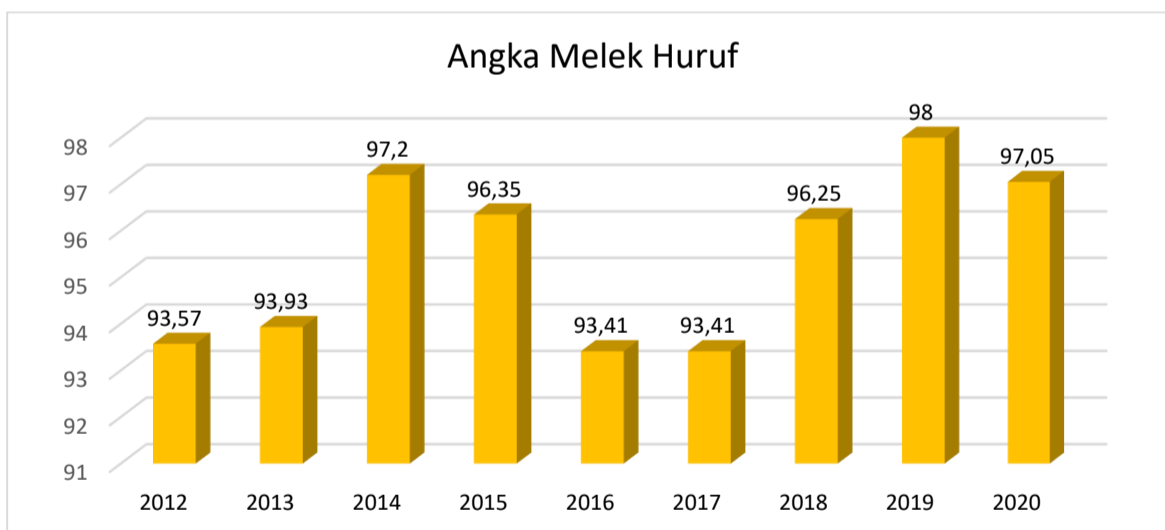
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa baca/tulis di suatu daerah, dengan keseluruhan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun di daerah tersebut. Angka melek huruf menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Angka melek huruf juga menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan program wajib belajar hingga ke tingkat pendidikan menengah pertama (SMP/ sederajat), dimana rata-rata usia normal peserta didik adalah 15 tahun.

Angka Melek Huruf pada Tahun 2014 berkisar sebesar 97.20 persen, artinya terdapat 2,80 persen penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis, dimana angka ini terus meningkat pada tahun 2015 sebesar 96.35 persen, tahun 2016 angka melek huruf di Kabupaten Nagan Raya menurun menjadi 93.41 persen dan kembali meningkat kembali pada tahun 2017 sebesar 95,54 persen , pada tahun 2018 sebesar 96,25 persen dan pada tahun 2020 menjadi 97,05 persen.

Gambar 2.21.
Perkembangan Angka Melek Huruf Dewasa di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2020 (persen)



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

Meskipun capaian angka melek huruf di Kabupaten Nagan Raya mengalami perbaikan dan peningkatan, namun masih terjadinya disparitas antara penduduk dewasa laki-laki dan perempuan.

2.2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

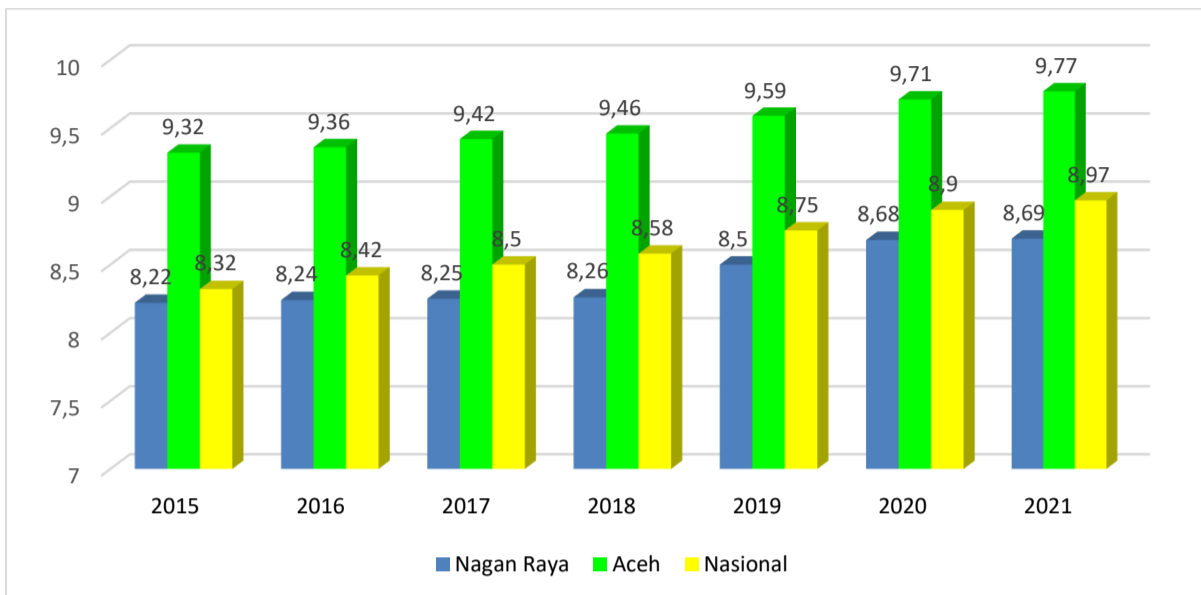
Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan indikator lainnya dalam bidang pendidikan. Kedua indikator tersebut termasuk juga dalam komponen pembentuk IPM, sebagai variabel baru menggantikan variabel angka melek huruf dalam perhitungan IPM, untuk dimensi pengetahuan (pendidikan). Mengutip BPS, angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

Angka Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling -EYS*) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mampu meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, kendati belum mencapai angka ideal. Tahun 2018, angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Nagan Raya sebesar 8.26 Tahun, Kemudian, angka rata-rata lama sekolah tersebut meningkat menjadi 8.5 Tahun pada Tahun 2019. Dan sebesar 8.68 tahun pada tahun 2020, adapun angka rata-rata lama sekolah untuk Aceh tahun 2018 sebesar 9.09 tahun, tahun 2019 sebesar 9.18 dan tahun 2020 sebesar 9.33 tahun. Untuk Nasional tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah sebesar 8.17 Tahun, pada tahun 2019 dan 2020 angka rata-rata lama sekolah adalah sebesar 8.34 Tahun dan 8.48 Tahun.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya keras meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa. Program penyetaraan pendidikan melalui Paket A, B, dan C dipandang juga bermanfaat dalam memperbaiki kualitas SDM dan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Sepanjang tahun 2018-2020, Pemerintah Nagan Raya dinilai cukup berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, meskipun belum mencapai target pemerintah.

Gambar 2.22.
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan Nasional, Tahun 2015-2021 (Tahun)



Sumber : BPS Aceh , 2022

Meskipun angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa bergerak naik secara signifikan, kebijakan lanjutan dan inovasi-inovasi pembangunan pendidikan guna meningkatkan mutu dan kualitas SDM masyarakat, tetap dibutuhkan. Disamping mempertahankan kebijakan pendidikan gratis yang telah gulirkan selama ini, kebijakan pendidikan lainnya yang pro-masyarakat miskin terus diupayakan dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti peningkatan bantuan beasiswa (diupayakan berlanjut ke perguruan tinggi), pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas, peningkatan pembangunan PAUD, serta penyediaan fasilitas pendukung pendidikan yang memadai di setiap jenjang pendidikan dan antar wilayah.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Posisi geografis yang strategis dan ditunjang oleh beragamnya etnis masyarakat di Provinsi Aceh menggambarkan peninggalan keragaman budaya dan seni dengan nilai sejarah yang tinggi, begitu juga dengan Kabupaten Nagan Raya yang memiliki keragaman budaya dan seni yang diwariskan oleh leluhur. Adapun beberapa keragaman budaya dan seni tersebut perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya sebagai bentuk identitas dari suatu daerah.

Adapun keragaman budaya dan seni yang ada di Kabupaten Nagan Raya dapat terlihat dari beberapa kebiasaan masyarakat terutama dalam perayaan pesta perkawinan, sunat rasul, keragaman makanan khas, dan tradisi lainnya yang terus dijaga dan dilestarikan. Selain itu terdapat juga beberapa situs sejarah budaya

antara lain, 8 (delapan) makam, 1 (satu) rumah tradisional, 1 (satu) benteng dan 3 (tiga) tempat bersejarah.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

2.3.1.1 Pendidikan Islami

Pendidikan Islami adalah proses pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai islami yang bertujuan untuk memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan islami di Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal. Beberapa lembaga pendidikan islami yang merupakan lembaga formal seperti Madrasah-madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama dan sekolah islam terpadu yang dikelola oleh pihak swasta. Selain itu terdapat sejumlah lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dan dayah yang dikelola oleh ulama-ulama terkemuka di Kabupaten Nagan Raya.

Berkaitan dengan lembaga pendidikan formal terdapat 14 (empat belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 5 (lima) Madrasah Ibtidaiyah Swasta, 2 (dua) Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 8 (delapan) Madrasah Tsanawiyah Swasta, 1 (satu) Madrasah Aliyah Negeri dan 2 (dua) Madrasah Aliyah Swasta. Selanjutnya juga terdapat 2 (dua) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Swasta dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya berkaitan dengan penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20.
Jumlah Penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dari Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penghafal penghafal Al-Qur`an	23 orang	23 orang	40 orang	70 orang	80 orang
2	Angka melek Al-Qur`an penduduk usia 6-21 tahun	82%	83%	85%	90%	90%
3	Angka melek Al-Qur`an penduduk usia > 21 tahun	79%	80%	82%	85%	87%
4	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi pendidikan dayah	10%	10%	11%	57%	85%

Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, 2022

2.3.1.2 Keagamaan Syariat Islam

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist dengan tujuan terciptanya kemaslahatan dan kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan pengawasan terhadap penegakan Syari`at Islam di Kabupaten Nagan Raya, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait seperti Dinas Syari`at Islam, Satpol PP dan Wilayahul Hisbah termasuk unsur TNI dan POLRI. Syari`at Islam harus dipahami sebagai suatu rahmat sehingga dalam pelaksanaannya akan timbul suatu kesadaran untuk melaksanakannya secara ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai syariat islam dikalangan masyarakat belum optimal direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat. Dalam pelaksanaan Syari`at Islam, ulama memiliki peranan yang sangat penting. Selain menjadi panutan umat, ulama juga menjadi motor penggerak pelaksanaan Syari`at Islam. Disamping itu ulama juga menjadi pembimbing bagi umat dalam rangka menerangkan maksud dan tujuan isi yang terkandung dalam Al-Qur`an dan Hadist dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa faktor pendukung perkembangan pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2017– 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21.
Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam
Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2017-2021

No	Uraian Kegiatan	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	454 Unit	454 Unit	454 Unit	458 Unit	463 Unit
2	Pembinaan Dakwah Agama bagi Masyarakat	204 orang	207 orang	212 orang	217 orang	220 orang
3	Rata-rata jamaah mesjid per waktu shalat	32 orang	32 orang	33 orang	35 orang	38 orang
4	Jumlah Mesjid yang melaksanakan sholat 5 (lima) waktu secara rutin	48 Mesjid	49 Mesjid	50 Mesjid	50 Mesjid	55 Mesjid
5	Pembinaan Dinul Islam	267 orang	271 orang	278 orang	280 orang	280 orang

No	Uraian Kegiatan	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
6	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam	51%	40%	40%	70%	80%
7	Jumlah Kader Ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	158 orang	160 orang	164 orang	200 orang	210 orang

Sumber: Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya 2022

Salah satu bentuk komitmen pemerintah Aceh dalam merealisasikan syariat islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat adalah dengan telah ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal , dimana Baitul Mal diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf, perwalian (Ziswaf dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Realisasi dari penerimaan zakat/infaq/sadaqah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.22.
Realisasi Penerimaan Zakat/Infaq/Sadaqah
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020

NO	TAHUN	REALISASI PENERIMAAN ZIS (Rp.)
1	2017	7.809.500.000
2	2018	5.922.847.908
3	2019	5.017.703.487
4	2020	6.916.300.000

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat perkembangan realisasi penerimaan ZIS di Kabupaten Nagan Raya bersifat fluktuatif, pada tahun 2017 penerimaan ZIS sejumlah Rp. 7.809.500.000,-. Sementara pada tahun 2018 menurun menjadi Rp. 5.922.847.908,-. Dan kembali meningkat menjadi Rp. 6.916.300.000,- pada tahun 2020.

Hal ini disebabkan karena perubahan status kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten, sekarang telah berubah pengelolaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi (sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), sehingga tenaga pendidik Sekolah Menengah Atas berubah status dari yang dulunya Aparatur Sipil Negeri Kabupaten, sekarang menjadi

Aparatur Sipil Negeri Provinsi. Dan dengan adanya perubahan status ini berpengaruh terhadap penerimaan ZIS di Kabupaten Nagan Raya.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.2.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.2.1.1. Pendidikan

A. Pendidikan Anak Usia Dini

Secara umum layanan TK/RA bagi penduduk usia 4-6 Tahun masih belum merata sampai ke seluruh pelosok desa/gampong di Kabupaten Nagan Raya. Jumlah lembaga TK/ RA di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 adalah sebanyak 35 unit dengan jumlah siswa 1.577 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 38 unit pada Tahun 2016 dengan jumlah siswa 2.209 orang, kemudian pada Tahun 2020 meningkat lagi menjadi 50 unit dengan jumlah siswa 2,482 orang.

Berdasarkan data tahun 2012, persentase penduduk usia 4-6 tahun yang telah memasuki TK/RA sebesar 18,71 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.430) orang. Sedangkan pada tahun 2020 partisipasi penduduk usia 4-6 tahun mengalami peningkatan yaitu menjadi 28,94 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.575) orang. selanjutnya rasio pendidikan anak usia dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020 secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.23.
Rasio Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2021

NO	JENIS	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	TK/RA	50	50	50	50	47
2	Siswa	2,287	2,506	2,582	2,482	4.735
3	Penduduk Usia 4-6 Tahun	9,595	9,787	9,983	8,575	8.436
4	Rasio (%)	4,20	3,91	3,87	3,45	1783,00
5	Rasio Ketersedian sekolah per 10.000 penduduk	0,01	0,0	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 2022

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah peserta didik, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir terlihat bervariasi. Pada Tahun 2019, APK tingkat SD/MI sebesar 109,30 persen, turun menjadi 107,85 persen pada tahun 2020. Untuk tingkat pendidikan SMP/MTs, capaian APK pada tahun 2019, tercatat APK tingkat SMP/MTs sebesar 103,50 persen dan menurun menjadi 100,24 persen tahun 2020. Untuk tingkat pendidikan SMA/SMK/MA, capaian APK pada tahun 2019 sebesar 81,57 persen dan meningkat menjadi 85,15 persen tahun 2020.

Tabel 2.24.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Nagas Raya Tahun 2019-2020

Jenjang Pendidikan	APK	
	2019	2020
SD/MI/ Sederajat	109,3	107,85
SMP/MTs/Sederajat	103,5	100,24
SMA/SMK/MA/Sederajat	81,57	85,15

Sumber : Nagas Raya Dalam Angka, 2021

Indikator pendidikan lainnya yaitu angka pendidikan murni (APM). APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan

usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2019-2020 bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM sebesar 99,70 persen tahun 2019, dan turun menjadi 99,34 persen. APM SMP/MTs tahun 2019 sebesar 86,02 persen sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,64 persen. Untuk APM SMA/SMK/MA pada tahun 2019 sebesar 68,39 persen dan pada tahun 2020 naik menjadi 68,60. Sedangkan untuk perguruan tinggi belum ada data.

Tabel 2.25.
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020

Jenjang Pendidikan	APM	
	2019	2020
SD/MI/ Sederajat	99,7	99,34
SMP/MTs/Sederajat	86,02	86,64
SMA/SMK/MA/Sederajat	68,39	68,6

Sumber : Nagan Raya Dalam Angka, 2021

D. Persentase Penduduk Usia 17-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok, Umur Sekolah, Dan Partisipasi Sekolah

Tabel 2.26.
Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Nagan Raya, 2020

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Tahun 2020		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-Laki			
7-12	0,00	99,88	0,12
13-15	0,00	98,89	1,11
16-18	0,00	82,10	17,90

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Tahun 2020		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
19-24	0,00	21,13	78,87
7-24	0,00	68,64	31,36
Perempuan			
7-12	0,00	100,00	0,00
13-15	0,00	100,00	0,00
16-18	2,21	86,52	11,27
19-24	0,00	29,78	70,22
7-24	0,40	76,32	23,29
Jumlah			
7-12	0,00	99,94	0,06
13-15	0,00	99,38	0,62
16-18	1,22	84,55	14,23
19-24	0,00	24,82	75,18
7-24	0,19	72,27	27,54

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2021

E. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah secara bertahap. Jumlah Sekolah Tahun Ajaran di Kabupaten Nagan Raya, 2017-2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tabel 2.27.
Perkembangan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (unit)

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pendidikan Umum						
1	TK	38	38	39		
2	Sekolah Dasar (SD)	135	135	136	137	137
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	39	39	39	40	40

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pendidikan Agama						
1	RA	11	11	11	11	11
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	20	20	20	20	20
3	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	12	12	12	12	12

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2022

Perkembangan peserta didik/murid pada semua jenjang pendidikan menunjukkan fluktuatif. Gambaran lebih lanjut, perkembangan peserta didik menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.28.
Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2020 (orang)

NO	JUMLAH PESERTA DIDIK	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	14.836	14.796	14.727	14.981	14.490
2	SMP	5.707	5.626	5.597	5.650	4.625
Jumlah		20.543	20.422	20.324	20.631	19.115

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Jumlah peserta didik tingkat sekolah dasar mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Begitu pula dengan jumlah peserta didik yang sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan.

Jumlah peserta didik per ruang kelas umumnya jauh lebih rendah daripada standar nasional yang ditemui pada semua jenjang pendidikan. Di tingkat SD, jumlah peserta didik per ruang kelas berkisar 17 orang per ruang kelas (kondisi tahun 2021). Angka ini lebih rendah dari batas atas sebanyak 28 murid per ruang kelas yang ditetapkan dalam standar nasional atau berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).

Daya tampung ruang kelas dibawah SPM pendidikan, disatu sisi berdampak positif bagi peserta didik dalam memperoleh pembelajaran. Pembelajaran bagi seorang peserta didik lebih mudah terawasi oleh guru yang berdampak pada kenyamanan peserta didik mengikuti pelajaran di kelas. Kendati demikian, kondisi tersebut juga dianggap tidak efisien.

Namun berdasarkan kondisi di lapangan, masih terdapat kesenjangan antar wilayah dalam Kabupaten Nagan Raya mengenai rasio peserta didik-ruang kelas. Masih banyak sekolah yang memerlukan ruang kelas baru. Karena jumlah peserta didiknya banyak.

Tabel 2.29.
Perkembangan Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

NO	RASIO PESERTA DIDIK - RUANG KELAS	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sekolah Dasar	17	17	16	17	17
2	Sekolah Menengah Pertama	22	23	23	24	24

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2022

Guru berperan penting dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan peserta didik. Selama delapan tahun terakhir (2012-2021), Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus mengupayakan penambahan guru guna memenuhi kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2017, pada tingkat pendidikan SD, guru yang mengabdikan sebanyak 137 orang untuk guru dengan kualifikasi D1/D2/D3 dan 1.292 orang guru dengan kualifikasi DIV/S1. Jumlah guru ini menurun apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022, dimana jumlah guru SD yang kualifikasi D1/D2/D3 sebanyak 194 orang berkurang dan guru dengan kualifikasi guru DIV/S1 sebanyak 811 orang.

Guru SMP yang mengajar pada tahun 2017 sebanyak 66 orang dengan kualifikasi D1/D2/D3 dan 561 orang guru dengan kualifikasi DIV/S1. Jumlah guru ini menurun apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022, dimana guru dengan kualifikasi D1/D2/D3 sejumlah 66 orang, sedangkan guru dengan kualifikasi DIV/S1 sejumlah 315 .

Gambaran lebih lanjut perkembangan Guru menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.30.
Kualifikasi Guru Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2021

NO	JUMLAH GURU	TAHUN KUALIFIKASI									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		D1/ D2/ D3	DIV/ S1	D1/ D2/ D3	DIV/ S1	D1/ D2/ D3	DIV/ S1	D1/ D2/ D3	DIV/ S1	D1/ D2/ D3	DIV/ S1
1	SD	137	1.292	136	1.286	135	1.248	183	826	194	811
2	SMP	66	561	64	541	62	551	45	310	45	315
Jumlah		203	1.853	200	1.827	197	1.799	228	1.136	239	1.126

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2022

2.3.2.1.2 Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Pada tahun 2017 di Kabupaten Nagan Raya jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 33 bayi dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 2.926. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 52 Angka Kematian Bayi (AKB) dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 2.734 bayi. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Kesehatan harus mencari solusi terhadap permasalahan ini. Untuk mencapai target penurunan Angka Kematian Bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31.
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	33	39	22	52	52
2	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	2.926	3.088	3.021	2.828	2.734
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (%)		11	11	7,28	18,38	19,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

B. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba > 140 sangat tinggi, antara 21 – 140 sedang dan <20 rendah. Angka Kematian Balita merupakan mempresentasikan. peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Salah satu target dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menurunkan jumlah kematian Anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu Negara.

Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas sektor kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Angka Kematian Balita Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 yaitu sebesar 36.9 %. Dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 19.6%. Untuk mencapai target penurunan kematian balita, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi balita menjadi prioritas utama.

Faktor penyebab terjadinya penurunan Angka kematian balita di Kabupaten Nagan Raya juga sama seperti faktor penyebab terjadinya penurunan kematian pada bayi yaitu karena adanya beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui dinas kesehatan diantaranya melakukan Audit Maternal perinatal yaitu upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat sampai fasilitas pelayanan kesehatan, Kendala yang timbul dalam upaya peningkatan mutu pelayanan akan dapat menghasilkan suatu rekomendasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Selanjutnya juga dilakukan pembinaan terhadap petugas kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.32.
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017 – 2019

Tahun	Angka Kematian Balita (%)
2017	36,9
2018	12
2019	8,94
2020	1,4
2021	19,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

C. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0 - 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. Angka Kematian Neonatus (AKN) di Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 sebesar 7.8 % dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 13.89% per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi lebih separuh (68 persen) terhadap jumlah kematian bayi. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.33.
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu	23	31	30	37	38
2	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	2.947	3.121	2.256	2.828	2.734
Angka Kematian Neotal per 1000 kelahiran hidup		7,8	9,93	13,3	13,08	13,89

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

D. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Kematian Ibu atau maternal death didefinisikan sebagai “kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan” (WHO, 2004). Konsep maternal death ini berbeda dengan konsep maternal mortality ratio, atau yang lebih dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI) jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan maternal mortality ratio/AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012).

Dalam lima tahun terakhir kasus kematian ibu di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat drastis. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 Angka Kematian Ibu di

Kabupaten Nagan Raya sebesar 99.8%, dan semakin meningkat drastis pada tahun 2021 sebesar 438.91%. Angka ini tergolong cukup tinggi. Untuk itu perlu upaya-upaya untuk terus menekan kasus kematian ibu, yang pada akhirnya diharapkan tidak ada lagi kematian ibu selama hamil, melahirkan, dan nifas pada tahun yang akan datang.

Upaya efektif dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional dengan fasilitasi kesehatan yang baik, meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal. Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34.
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2021

TAHUN	ANGKA KEMATIAN IBU (%)
2017	99.8
2018	28.40
2019	331.02
2020	141.44
2021	438.91

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

E. Rasio posyandu per satuan balita

Rasio posyandu merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita untuk setiap 1.000 balita disuatu wilayah, pada umumnya posyandu ada disetiap desa dan bisa juga satu desa terdapat lebih dari satu posyandu hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduknya yang banyak, luas desa yang terlalu lebar sehingga masyarakat sulit mendatangi posyanndu.

Penyediaan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Rasio posyandu sebagaimana yang disajikan menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan posyandu sudah memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan posyandu semaksimal mungkin. Rasio posyandu di atas menggambarkan bahwa tingkat pemanfaatan posyandu oleh masyarakat belum maksimal, dimana masih tingginya Angka Kematian Balita. Hal ini berarti banyak posyandu yang belum difungsikan secara maksimal oleh masyarakat. Saat ini jumlah Posyandu di Nagan

Raya sampai Tahun 2021 sebanyak 257 unit dengan jumlah Balita 18.582 dengan rasio posyandu per satuan balita 14.80 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.35.
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah posyandu	257	257	257	257	275
2	Jumlah balita	7.455	5.846	3.680	18.402	18.582
	Rasio posyandu per satuan balita	34,47	43,96	69,84	69,84	14,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

F. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/pustu).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Kondisi tertentu ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Kapasitas layanan satu puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000-50.000 jiwa. Puskesmas yang tersedia saat ini sudah sesuai kebutuhan sebanyak 14 unit untuk jumlah penduduk 167.294 jiwa pada tahun 2019. Sementara rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 adalah 0,08, rasio Poliklinik tahun 2020 adalah 0,05, dan rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) 0,26. Meskipun ketersediaan sarana sudah memadai, namun tingkat pelayanan dan fasilitasnya perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.36.
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
2	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya 2022

G. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah sakit persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk, penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 sebanyak 168.392 jiwa jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 unit yaitu Rumah sakit Umum pemerintah, sehingga rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 sebesar 0,01 artinya jumlah rumah sakit di Kabupaten Nagan Raya sudah memenuhi dari sisi jumlah namun kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan.

H. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 yaitu 19 dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Nagan Raya untuk melayani 168.392 jiwa penduduk Kabupaten Nagan Raya atau dengan rasio 19/100.000 penduduk. Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 20/100.000 penduduk (1:5.000 penduduk) yang artinya 1 orang dokter spesialis melayani 5.000 penduduk, sedangkan kebutuhan dokter spesialis yang ideal adalah sebanyak 31 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter spesialis sebanyak 12 dokter. Jumlah seluruh dokter umum di Kabupaten Nagan Raya adalah 40 orang atau dengan rasio 40/100.000 penduduk. Hal ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 40/100.000 penduduk (1:2.500 penduduk), para dokter umum ini tersebar di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Nagan Raya.

Total jumlah Dokter gigi adalah 10 orang atau 10/100.000 penduduk, Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 11/100.000 penduduk (1:9.000 penduduk), sedangkan kebutuhan dokter gigi yang ideal adalah sebanyak

17 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter umum sebanyak 7 dokter. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.37.
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter Spesialis	8	12	15	17	19
2	Jumlah Dokter Umum	53	47	52	59	40
3	Jumlah Dokter Spesialis Gigi	0	0	0	0	0
4	Jumlah Dokter Gigi	5	5	9	10	10
5	Jumlah Penduduk	161.328	164.483	167.294	168.392	168.392
6	Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
7	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,04	0,02
8	Rasio Dokter Spesialis Gigi per satuan penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, 2022

I. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2021, jumlah tenaga kesehatan sebanyak 949 orang. Secara umum, rasio tenaga kesehatan per penduduk untuk semua jenis tenaga kesehatan masih rendah, kecuali untuk tenaga perawat dan bidan yang sudah mencukupi (standar nasional untuk perawat dan bidang masing-masing 170 orang dan 100 tenaga per 100.000 penduduk). Rasio tenaga medis tahun 2021 sebesar 0.56 persen.

Tabel 2.38.
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perawat	165	169	163	172	239
2	Jumlah Bidan	298	309	372	406	503
3	Jumlah Perawat Gigi	9	9	14	14	16
4	Jumlah Teknis Kefarmasian	22	22	22	22	34
5	Jumlah Apoteker	3	2	8	9	16
6	Jumlah Kesehatan Masyarakat	39	37	34	34	92
7	Jumlah Kesehatan Lingkungan	5	9	10	11	16
8	Jumlah Nutrisionis	24	24	17	17	23
9	Jumlah Dietisien	0	0	0	0	0
10	Jumlah Fisioterapis	12	12	9	9	1
11	Jumlah Okupasi Terapis	0	0	0	0	0
12	Jumlah Terapis Wicara	0	0	0	0	0
13	Jumlah Akupuntur	0	0	0	0	0
14	Jumlah Radiografer	3	3	3	3	0
15	Jumlah Radioterapis	11	11	11	11	0
16	Jumlah Elektromdis	6	6	6	6	0
17	Jumlah Teknisi Gigi	18	18	13	13	0
18	Jumlah Analis Kesehatan	5	7	9	9	9
19	Jumlah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	0	0	0	0	0
20	Jumlah Penduduk	161,328	164,483	167,294	168.392	168.392
21	Rasio Perawat per satuan penduduk	102	102	97	102	0,14
22	Rasio Bidan per satuan penduduk	184	188	222	242	0,3
23	Rasio Perawat Gigi per satuan penduduk	6	5	8	8	0,01
24	Rasio Teknis Kefarmasian per satuan penduduk	14	13	13	12	0,02
25	Rasio Apoteker per satuan penduduk	2	1	5	5	0,01
26	Rasio Kesehatan Masyarakat per satuan penduduk	24	22	20	20	0,05
27	Rasio Kesehatan Lingkungan per satuan penduduk	3	5	6	6	0,01
28	Rasio Nutrisionis per satuan penduduk	14	14	10	10	0,01
29	Rasio Fisioterapis per satuan penduduk	7	7	5	5	0

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
30	Rasio Radiografer per satuan penduduk	2	2	2	2	0
31	Rasio Elektromedis per satuan penduduk	4	4	3	3	0
32	Rasio Analisis Kesehatan per satuan penduduk	3	4	4	4	0
33	Rasio Rekam Medis dan Informasi Kesehatan per satuan penduduk	0	0	0	0	0
34	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	0,4	0,38	0,45	0,51	0,56

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, 2022

J. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah angka jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu yang mengalami komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali seratus persen.

Cakupan komplikasi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 yang tertangani sebesar 45.05 persen. Tahun 2018 s/d tahun 2020 meningkat menjadi 100 persen. Terjadi penurunan cakupan komplikasi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 sebesar 42.79 persen. Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.39.
Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	355	325	561	530	258
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	788	325	561	530	603
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		45,05	100	100	100	42,79

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

K. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis secara umum berfluktuasi, tahun 2017 sebesar 90.69 persen turun menjadi 79.55 persen pada tahun 2020, dan kembali meningkat menjadi 90.55 persen pada tahun 2021. Cakupan persalinan yang tinggi terjadi di Puskesmas Ujong Fatimah dan Simpang Jaya, sementara itu yang terendah berada di Puskesmas Beutong Ateuh. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.40.
Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2022

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	3528	3063	2977	2817	2731
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	3890	3516	3511	3541	3016
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		90.69	87,12	84.79	79,55	90,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya 2022

L. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *Universal Child Immunization* atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana 80 persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Pencapaian desa UCI di Kabupaten Nagan Raya selama 2017-2022 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 desa UCI di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 61.26 persen, dan semakin menurun pada tahun 2021 sebesar 23.42 persen. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut pemerintah harus meningkatkan sosialisasi imunisasi kepada masyarakat secara lebih intensif. Data Cakupan desa Universal Child Immunization (UCI) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41.
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	136	113	91	73	52
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	222	222	222	222	222
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		61,26	50,90	40,99	32,88	23,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

M. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Rata berat badannya hanya sekitar 60-80 persen dari badan ideal. Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Nagan Raya pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 terdapat 4 kasus gizi buruk dan yang tertangani 100 persen, tahun 2018 terdapat 16 kasus dan tertangani 100 persen, tahun 2019 terdapat 18 kasus dan tertangani 100 persen, dan pada tahun 2020 terdapat 5 kasus dan tertangani 100 persen.

Sampai dengan Tahun 2021 cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas mencapai 100 persen dengan kasus meningkat mencapai 10 kasus. Upaya pemerintah kedepan untuk meningkatkan persentase penanganan kasus balita gizi buruk akan dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi perbaikan gizi keluarga kepada seluruh masyarakat. Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2021 di sajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.42.
Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	4	16	18	5	10

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	4	16	18	5	10
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

N. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak.

Pada tahun 2017, cakupan imunisasi campak di Kabupaten Nagan Raya sebesar 73.55 persen. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 80.32 persen. Namun terjadi penurunan pada tahun 2021 sebesar 51.62 persen. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.43.
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	2383	2604	2481	1996	1721
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	3240	3242	3334	3326	3334
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak		73,55	80,32	74,42	60,01	51,62

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022

O. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Cakupan penanganan balita pneumonia dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017, Cakupan penanganan balita pneumonia sebesar 49.24 persen dan semakin menurun pada tahun 2021 sebesar 25.75 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44.
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun	354	267	255	205	197
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	719	733	746	756	765
Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani		49,24	36,43	34,18	27,12	25,75

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022

P. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA+.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ adalah Angka yang menyatakan jumlah penderita TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja kesehatan selama setahun dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA + dalam kurun waktu yang sama dikali dengan seratus persen. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ dari tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukkan penurunan, Pada tahun 2017, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ sebesar 80.00 persen. Dan semakin turun pada tahun 2021 sebesar 39.00 persen. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengobati dirinya semakin rendah. Untuk itu diperlukan sosialisasi terkait penyakit dan penerapan pola hidup sehat (perilaku hidup sehat) kepada masyarakat sejak dini. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ di Kabupaten Nagan Raya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.45.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA(+)
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	176	230	284	166	174

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	220	256	284	446	446
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)		80,00	89,84	100	37,2	39,0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022

Q. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Kasus Tuberkulosis (TB) Paru pada tahun 2017 terdapat 176 kasus baru dan lama atau 0.11 persen per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 284 kasus baru dan lama atau 0.17 persen per 100.000 penduduk. Pada Tahun 2021 terdapat 174 kasus per 100.000 penduduk. Dari data tersebut dapat dilihat kasus TBC baru dan lama bersifat fluktuatif. Hal ini sangat baik karena dilakukannya deteksi dini penyakit TBC yang bertujuan untuk penemuan dini dan mencegah terjadinya TBC kronis serta kegiatan tersebut harus tetap ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.46.
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Banyaknya Kasus Penderita TBC (baru dan lama)	176	230	284	166	174
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	161.329	164.483	167.294	168.392	168.392
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)		0,11	0,14	0,17	0,10	0,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022

R. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Jumlah kasus TB yang meninggal dunia dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2017 terdapat 2 kasus yang meninggal atau 0.001 persen per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 8 kasus yang meninggal atau 0.005 persen per 100.000 penduduk. Pada tahun 2021 kasus kematian akibat TB menurun menjadi 0.002 persen per 100.000 penduduk. Walaupun tingkat kematian karena tuberkulosis masih rendah, namun terdapat

kasus TB yang meninggal menjadi perhatian pemerintah dalam penatalaksanaan penemuan kasus dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.47.
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Paise TB yang meninggal	2	5	8	4	4
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	161.329	164.483	167.294	168.392	168.392
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		0,001	0,003	0,005	0,002	0,002

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022

S. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Jumlah kasus TB yang mendapat pengobatan dalam program DOTS mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2017 terdapat 176 kasus dari 220 perkiraan kasus (80 persen) dan pada tahun 2019 terdapat 284 kasus dari 284 perkiraan kasus (100 persen). Pada tahun 2021 terdapat 174 kasus dari 446 kasus (39.01 persen). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran penderita TB untuk mendapatkan pengobatan yang tepat dengan menggunakan program DOTS masih sangat rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.48.
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	176	230	284	166	174
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	220	256	284	446	446
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		80,00	89,84	100	37,22	39,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022

T. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

Jumlah kasus Tuberkulosis (TB) Paru yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami penurunan. Pada tahun 2017 terdapat 176 kasus dan yang sembuh sebanyak 167 kasus (94.89 persen), sedangkan pada tahun 2020 terdapat 166 kasus dan yang sembuh sebanyak 159 kasus (87.3 persen). Tahun 2021 terdapat 174 kasus dan yang sembuh 80 kasus (45.98 persen). Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan penderita TB dalam pelaksanaan pengobatan dalam program DOTS dan diharapkan peran serta pegugas kesehatan untuk menjemput bola serta peran dari lintas sektor dalam mendukung program DOTS. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.49.
Penderita Tuberkulosis Paru BTA di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasien Tuberkulosis Paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	167	197	256	159	80
2	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	176	230	284	166	174
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		94,89	85,65	90,14	87,3	45,98

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022

U. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes Aegypti, yang ditandai dengan demam disertai perdarahan bawah kulit, selaput hidung, dan lambung. Jumlah kasus DBD di Kabupaten Nagan Raya bersigat fluktuatif, pada tahun 2017 terdapat 21 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP, pada tahun 2019 terdapat 36 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 11 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP. Tindakan penanganan yang telah dilakukan diantaranya perawatan penderita oleh tenaga kesehatan serta tindakan pemberantasan nyamuk penyebab DBD melalui foging dan abatesasi, guna pemutusan mata rantai nyamuk penyebab DBD, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.50.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	21	32	36	23	11
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	21	32	36	23	11
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022

V. Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan penyakit menular endemis dan merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, demikian juga di Indonesia. Penderita Malaria tahun 2012 adalah 60 kasus atau 41,99 per 100.000 penduduk dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan 2 kasus atau 2,57 per 100.000 penduduk. Dari seluruh kasus malaria yang ada, telah dilakukan tindakan penanganan sesuai SOP secara keseluruhan oleh tenaga kesehatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.51.
Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	1	3	2	0	0
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	161,329	164,489	167,294	168.392	168.392
Angka Kejadian Malaria		0,62	1,82	1,20	0,00	0,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022

W. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak

sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah 5 Tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Penanganan stunting perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat Umum, dan lainnya. Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen untuk memimpin langsung upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu upaya percepatan penurunan prevalensi stunting adalah Kemendagri telah menetapkan beberapa lokus stunting. Dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19% pada 2024 dari yang saat ini 30,8% (Riskesdas 2018). Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitive.

Salah satu lokus stunting untuk lingkup Kabupaten/ Kota adalah kabupaten Nagan Raya. Kenapa ditetapkannya lokus stunting untuk kabupaten Nagan Raya karena masih tingginya angka stunting di Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya untuk pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten Nagan Raya tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 050/212/Kpts/2020 Tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi, Pelaksana, Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020. Bupati Nagan Raya telah menetapkan beberapa lokus pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten Nagan Raya yang memenuhi standar indikator World Health Organization (WHO) yaitu dengan prevalensi stunting diatas 20 % dan lokasi dengan permasalahan yang tinggi terhadap sanitasi dan air bersih yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Berikut adalah daftar lokus intervensi kegiatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020.

Tabel 2.52.
Daftar Lokus Intervensi Kegiatan Pencegahan Dan
Penanganan Stunting Terintegrasi
Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

NO	KECAMATAN	DESA	PERSENTASE STUNTING	JUMLAH RUMAH TANGGA YANG TELAH MENGGUNAKAN SANITASI LAYAK	JUMLAH SELURUH RUMAH TANGGA PADA TAHUN TERSEBUT	CAKUPAN RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN SANITASI LAYAK
1	Tripa Makmur	NEUBOK YEE PK	54,05	118	128	92,19
2	Tripa Makmur	LUENG KEUBEU JAGAT	48,28	456	463	98,49
3	Beutong	KUTA JEUMPA	47,62	79	104	75,96
4	Beutong Banggala	KUTA TEUNGOH	47,37	82	146	56,16
5	Tadu Raya	RANTAU SELAMAT	46,24	320	320	100,00
6	Kuala Pesisir	COT RAMBONG	43,24	130	130	100,00
7	Kuala Pesisir	ARONGAN	42,86	248	248	100,00
8	Darul Makmur	SIMPANG DELI KILANG	42,11	106	147	72,11
9	Seunagan	PAROM	40,00	170	219	77,63
10	Darul Makmur	SUKARAMAI	40,00	221	259	85,33
11	Kuala	GUNONG REUBO	39,39	69	85	81,18
12	Darul Makmur	SUAK PALEMBANG	39,34	105	269	39,03
13	Seunagan	KUTA ACEH	38,89	88	103	85,44
14	Darul Makmur	MAKARTI JAYA	38,10	58	179	32,40
15	Tripa Makmur	PANTON PANGE	38,10	100	125	80,00
16	Seunagan	PAYA UN DAN	37,93	150	170	88,24
17	Suka Makmue	ALUE KAMBUEK	36,59	77	124	62,10
18	Suka Makmue	ALUE GAJAH	36,36	28	28	100,00
19	Darul Makmur	ALUE RAMBOT	35,77	335	368	91,03
20	Kuala	BLANG BINTANG	35,05	271	300	90,33
21	Tripa Makmur	UJONG KRUENG	34,78	122	132	92,42
22	Beutong Banggala	BLANG MEURANDEH	34,38	93	122	76,23
23	Kuala Pesisir	LUENG T BEN	33,33	140	153	91,50
24	Darul Makmur	SERBA GUNA	33,01	236	600	39,33
25	Kuala	Alue le Mameh	32,47	188	218	86,24
26	Kuala	BLANG BARO	28,57	97	181	53,59
27	Darul Makmur	BLANG BARO	28,33	211	226	93,36
28	Darul Makmur	UJONG LAMIE	26,45	120	360	33,33
29	Kuala Pesisir	KUALA BARO	24,24	167	173	96,53
30	Kuala Pesisir	PULO	16,67	63	93	67,74

Sumber : Dinkes Kabupaten Nagan Raya, 2021

X. Corona Virus Disease -19 (COVID-19)

Infeksi Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China. Lokasi kemunculannya pertama kali ini, membuat covid-19 juga dikenal dengan

sebutan Wuhan virus. Gejala covid-19 bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala covid-19 yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi covid-19 adalah:

- Demam tinggi disertai menggigil
- Batuk kering
- Pilek
- Hidung berair dan bersin-bersin
- Nyeri tenggorokan
- Sesak napas

Gejala covid-19 tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gejala infeksi virus ini dapat muncul mulai dua hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut.

Selain China, Covid-19 yang disebut WHO sebagai pandemi menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Jepang, Korea Selatan, bahkan hingga ke Indonesia. Sampai dengan tanggal 2 desember 2020 di Indonesia tercatat yang terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 543.975 orang dengan angka kesembuhan sebanyak 454.879 orang, yang meninggal dunia sebanyak 17.081 orang dan yang masih menjalani perawatan sebanyak 72.015 orang. Untuk Aceh tercatat yang terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 8.310 orang dengan angka kesembuhan sebanyak 6.631 orang, dan yang meninggal dunia sebanyak 329 orang, sisanya masih dalam perawatan. Kabupaten Nagan Raya pertama sekali terjadi lonjakan kasus pada bulan Agustus Tahun 2020 dengan jumlah 17 kasus dan meninggal 4 Kasus, meningkat menjadi 68 kasus pada bulan September dengan jumlah yang meninggal 7 kasus, kemudian pada bulan Oktober menurun menjadi 40 kasus, yang meninggal 5 kasus. Sampai Kabupaten Nagan Raya tercatat yang terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 157 orang dengan angka kesembuhan sebanyak 136 orang, dan yang meninggal dunia sebanyak 17 orang, dan 1 orang masih dalam perawatan atau orang dalam pengawasan. Untuk Kabupaten Nagan Raya data covid 19 lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53.

Data Kasus Covid-19 Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

NO	BULAN	KASUS COVID – 19		
		SEMBUH	ORANG DALAM PENGAWASAN	MENINGGAL
1	APRIL	-	-	-
2	MEI	-	-	-
3	JUNI	-	-	-
4	JULI	-	-	-
5	AGUSTUS	17	-	4
6	SEPTEMBER	68	-	7
7	OKTOBER	40	-	5
8	NOVEMBER	9	-	1
9	DESEMBER	2	1	
	TOTAL	136	1	17

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Tingginya kasus Pandemi Covid-19 di Kabupaten Nagan Raya, menjadikan kabupaten ini masuk dalam zona merah dan mempengaruhi banyak sektor bukan hanya kesehatan masyarakat, tapi juga pendidikan, perekonomian yang mempengaruhi stabilitas keuangan daerah/kabupaten baik pada sisi pendapatan maupun belanja kabupaten.

2.3.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

A. Jalan

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada tahun 2021, kondisi baik jalan kabupaten 246,124 Km mengalami peningkatan sepanjang 153.91 km dari kondisi awal tahun 2017. Perkembangan Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2017-2021 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.54.
**Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2021 (Km)**

Kondisi jalan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Baik	92,212	118,906	272,27	274,609	246,124
Sedang	59,611	60,316	191,492	409,037	446,925
Rusak Ringan	53,459	52,443	189,171	213,183	198,946
Rusak Berat	719,139	692,756	271,488	27,592	32,426
Jumlah	924,421	924,421	924,421	924,421	924,421

Sumber : Dinas PUPR Kab. Nagan Raya, 2022

Selanjutnya Perkembangan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini yang menggambarkan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2017-2021, menunjukkan bahwa selama periode tersebut mengalami peningkatan. Rasio panjang jalan Kabupaten Nagan Raya adalah sebesar 0.057 persen tahun 2017 meningkat menjadi 0,146 persen pada tahun 2021.

Tabel 2.55.
**Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021**

NO	Kondisi jalan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jalan Baik (km)	92.212	118.906	272.27	274.609	246.124
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	161.329	164.483	167.294	168.392	168.392
Rasio Panjang Jalan		0.057	0.072	0.163	0.163	0.146

Sumber : Dinas PUPR Kab. Nagan Raya, 2022

Untuk Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan Roda 4 diantaranya meliputi kawasan Gampong Twi meulusong, Gampong Blang Teungku,

Gampong Kila, Gampong Kandeh, Gampong Blang Lango, dan Gampong Gunong Kong. Persentase perbandingan terhadap Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk dengan Rasio 6/222 atau sebesar 0,027.

B. Sanitasi

Untuk pelayanan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya, rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak pada tahun 2018 sebesar 52,00 %. Pada tahun 2021 rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak meningkat menjadi sebesar 73,48 %.

Perkembangan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya meningkat pesat dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 30,08 %, namun pada tahun 2020 tidak ada pendataan, sehingga data tahun 2020 disamakan dengan tahun 2019. Untuk tahun 2021 meningkat sebesar 8,63 %. Secara umum dari tahun 2018 hingga tahun 2021 rata-rata peningkatan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya sebesar 12,90 % hal ini disebabkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akses sanitasi kepada masyarakat seperti : Adanya upaya penurunan kasus stunting, peningkatan sanitasi perdesaan, peningkatan promosi kesehatan. Namun demikian masih terdapat permasalahan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih sehat, masih kurangnya pemecuan terhadap kesehatan masyarakat, masih terdapat desa yang belum bebas dari buang air besar sembarangan (BABS). secara rinci akses sanitasi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.56.
Akses Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2021

URAIAN	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Rasio Rumah Tinggal dengan Akses Sanitasi Layak (%)	52,00	67,64	67,64	73,48
Pertumbuhan (%)	-	30,08	0	8,63

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022.

Rata-rata pertumbuhan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dari Tahun 2017-2021 meningkat sebesar 13,26 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 30,08%. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membangun sarana dan prasarana air minum serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya

Air Minum layak. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dari Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.57.
Proporsi akses Air Minum Layak
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Akses Air Minum Layak	53,76	52,00	67,64	72,24	86,29
2	Pertumbuhan (%)	-	-3,27	30,08	6,80	19,45

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

C. Irigasi

Pelayanan irigasi di wilayah Kabupaten Nagan Raya khususnya pada daerah irigasi, tahun 2021 terdiri dari 1 daerah irigasi kewenangan pusat (DI Jeuram) seluas ±6.000 Ha dan 37 daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang melayani hampir seluruh Kabupaten Nagan Raya menjadi kewenangan daerah seluas ±1.583 Ha. Adapun Kondisi Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Nagan Raya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.58.
Persentase Kondisi Irigasi menurut Daerah Irigasi
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

No	Nama Daerah Irigasi	Status Irigasi	Luas Areal (Ha)		Kondisi (%)		
			Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	D.I Alue Buluh	Semi Teknis	150	18	22,74	34,11	43,15
2	D.I Alue Geureugah	Tidak Berfungsi	200	0	0	0	0
3	D.I Alue Jamok	Tidak Berfungsi	200	0	0	0	0
4	D.I Alue Paku	Tidak Berfungsi	200	0	0	0	0
5	D.I Alue We	Semi Teknis	200	37	28	42	30
6	D.I Babah Dua	Tidak Berfungsi	90	0	0	0	0
7	D.I Blang Meureundeh	Semi Teknis	80	0	0	0	100
8	D.I Blang Seunong	Semi Teknis	141	66	23,6	35,4	41



No	Nama Daerah Irigasi	Status Irigasi	Luas Areal (Ha)		Kondisi (%)		
			Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
9	D.I Blang Teungku	Semi Teknis	75	19	27,6	41,4	31
10	D.I Bungong Talo	Teknis	485	418	23,08	34,62	42,30
11	D.I Cot Mee	Tidak Berfungsi	70	0	0	0	0
12	D.I Gunong Kupok	Tidak Berfungsi	100	0	0	0	0
13	D.I Gunong Nagan	Tidak Berfungsi	102	0	0	0	0
14	D.I Gunung Reubo	Semi Teknis	198	113	24,5	36,75	38,75
15	D.I Karian	Semi Teknis	100	23	23,32	34,98	41,7
16	D.I Kila	Semi Teknis	100	17	20,68	31,02	48,3
17	D.I Krueng Alem	Semi Teknis	200	50	26,04	39,06	34,90
18	D.I Puloe Raga	Semi Teknis	300	109	24,63	36,94	38,43
19	D.I Rambong	Semi Teknis	330	129	22,3	33,45	44,45
20	D.I Semambek	Semi Teknis	200	23	23,31	34,96	41,73
21	D.I Seneuam	Tidak Berfungsi	334	0	0	0	0
22	D.I Twi Meuleusong	Semi Teknis	200	34	21,81	32,71	45,48
23	D.I Twi Pongoh	Semi Teknis	100	51	17,6	26,4	56
24	D.I Alue Meujein	Tidak Berfungsi	200	0	0	0	0
25	D.I Alue Lahu	Tidak Berfungsi	180	0	0	0	0
26	D.I Alue Rambot	Tidak Berfungsi	70	0	0	0	0
27	D.I Blang Aman Tadu	Semi Teknis	200	37	23,02	34,53	42,45
28	D.I Blang Neuang	Semi Teknis	85	37	26,89	40,33	32,78
29	D.I Blang Puuk	Semi Teknis	200	177	15,2	22,8	62
30	D.I Gunong Langoe	Semi Teknis	175	39	28,9	43,35	27,75
31	D.I Krueng Mangkom	Tidak Berfungsi	120	0	0	0	0
32	D.I Krueng Seumayam	Tidak Berfungsi	200	0	0	0	0
33	D.I Lawa Batu	Tidak Berfungsi	200	0	0	0	0
34	D.I Padang Rubek	Semi Teknis	65	37	13,35	20,02	66,63
35	D.I Pante Ara	Semi Teknis	431	82	25,32	37,98	36,7

No	Nama Daerah Irigasi	Status Irigasi	Luas Areal (Ha)		Kondisi (%)		
			Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
36	D.I Suka Mulia	Tidak Berfungsi	300	0	0	0	100
37	D.I Teuminyeu (Alue Seupeng)	Semi Teknis	350	67	21,07	31,6	37,33
	TOTAL		6.931	1.583			

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya 2022

Jaringan Irigasi merupakan saluran, bangunan dan bangunan pelengkap sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam dua kategori yaitu saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian.

Berdasarkan data dari tahun 2017-2021 total panjang jaringan irigasi mengalami kenaikan. Panjang jaringan irigasi dari tahun 2017 sebesar 72.712 meter mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 73.212 meter, sedangkan luas lahan budidaya pada tahun 2017 sampai tahun 2021 tidak mengalami perubahan, yaitu seluas 1.602 Ha. Karena luas lahan budidaya tidak mengalami perubahan, sehingga rasio panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pada tahun 2017 adalah 45.39 persen sedikit meningkat menjadi 45.70 persen pada tahun 2021. Adapun rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59.
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2021

No	Jaringan Irigasi	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Panjang Jaringan Irigasi (m)	72.712	72.712	73.212	73.212	73.212
2	Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha)	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602
	Rasio Jaringan Irigasi	45,39	45,39	45,70	45,70	45,70

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya 2022

D. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Tempat ibadah merupakan sarana bagi umat beragama untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan Agama dan kepercayaan masing-masing. Di Kabupaten Nagan Raya secara resmi sebagian besar sarana tempat ibadah hanya dimiliki oleh umat Islam, berupa Masjid, Mushalla. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah tempat ibadah dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2017 rasio tempat ibadah sebesar 3,3 persen dan pada tahun 2019 sebesar 3,1 persen.

Tabel 2.60.
Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Jumlah Tempat Ibadah	497	497	497
2	Jumlah Penduduk	152.130	158.959	162.682
Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk		3,3	3,1	3,1

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya 2022

E. Penataan Ruang

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Nagan Raya merupakan Ruang Terbuka Hijau Eksisting yakni seluas 261,40 Ha atau (7,80 % dari luas kawasan perkotaan). Ruang Terbuka Hijau akhir tahun perencanaan yakni 743.97 Ha (30 % dari luas kawasan perkotaan), meliputi:

- Kecamatan Suka Makmue;
- Kecamatan Kuala;
- Kecamatan Kuala Pesisir;
- Kecamatan Darul Makmur ;
- Kecamatan Seunagan;
- Kecamatan Beutong;
- Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang; dan
- Kecamatan Tadu Raya

Tabel 2.61.
Rasio Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	75 Ha	75 Ha	75 Ha	75 Ha	75 Ha
2	Luas Kawasan Budidaya	-	-	-	-	-
Rasio Ruang Terbuka Hijau		0.00930	0.00931	0.00932	0.00933	0.00934

Sumber : DLH Kab. Nagan Raya, 2022

2.3.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah yang layak harus dimaknai dari beberapa segi, diantaranya: segi sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas maupun dari sisi fisik, apalagi dari sisi energi yaitu hemat energi. Paling tidak rumah dan permukiman yang layak memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup secara manusiawi. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, perkembangan rumah layak huni mulai tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.62.
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah layak Huni	607	0	709	320	0
2	Jumlah Penduduk	158.223	161.329	164.483	168.392	168.392
Rasio Rumah Layak Huni		0,38	0,00	0,43	0,19	0,00

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Nagan Raya, 2022

B. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Areal kawasan kumuh sesuai dengan SK kumuh pada Tahun 2021 terdiri atas beberapa kawasan permukiman yang ada dalam 10 Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Adapun persentasenya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.63.
Persentase Luas Kawasan Kumuh
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Kawasan Kumuh (ha)	108,33	108,33	108,33	108,33	105,73
2	Luas wilayah (ha)	354.491	354.491	354.491	354.491	354.491
Persentase areal kawasan kumuh		0,031	0,031	0,031	0,031	0,030

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Nagan Raya, 2022

2.3.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas kondisi politik dan keamanan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keadaan yang kondusif tersebut akan menciptakan suasana aman, tertib, tentram dan damai guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tujuan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis.

Tabel 2.64.
Jumlah Linmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2021

NO	TAHUN	JUMLAH LINMAS (ORANG)
1	2017	824
2	2018	1286
3	2019	1286

NO	TAHUN	JUMLAH LINMAS (ORANG)
4	2020	1286
5	2021	1286

Sumber : Satpol PP WH dan Linmas Kab. Nagan Raya Tahun 2022

Dilihat dari segi jumlah personil Linmas pada tahun 2012 berjumlah 852 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 1286 orang. Rasio jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga belum bisa memenuhi target dan cenderung berkurang setiap tahunnya dikarenakan banyak anggota Linmas yang masuk usia tua dan meninggal dunia serta tidak ada regenerasi sebab kurang diminati dari kaum muda gampong karena minimnya perhatian pemerintah.

2.3.2.1.6. Sosial

A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial berupaya keras dalam melakukan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Sosial (PMKS) guna mengurangi jumlah penurunan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, diantaranya seperti kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/keterpencilan, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Adapun jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan jenis permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Tahun/Jumlah (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Anak Dengan Kecatatan	42	43	44	49	55
2	Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu	706	708	710	750	
3	Anak Terlantar	1	2	7	7	3

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Tahun/Jumlah (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Anak Berhadapan dengan Hukum	-	5	11	16	8
5	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	768	768	768	768
6	Korban Tindak Kekerasan	-	-	1	2	
7	Lanjut Usia Terlantar	-	-			1
8	Penyandang Disabilitas	-	-	298	-	2592
9	Tuna Susila	-	-	1	-	
10	Pengemis	-	-	-	-	2
11	Gelandangan	-	-	-	-	-
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	3
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	-
14	Fakir Miskin	-	-	6.692	-	6014
15	Rumah Tidak Layak Huni	-	-	223	-	-
16	Keluarga Rentan	-	-	943	-	-
17	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	13	-	-
18	Korban Bencana Alam	-	-	81	-	-
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	-	-
20	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kab. Nagan Raya, 2022

Secara umum penduduk Kabupaten Nagan Raya tidak memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa sebagai perlindungan dan jaminan bagi keluarganya setelah meninggal dengan program asuransi bagi masyarakat. Tingginya angka kemiskinan, fakir miskin dan keluarga rentan di Kabupaten Nagan Raya, menjadi

perhatian Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan perlindungan sosial melalui santuan kematian. Dengan kebijakan program asuransi kematian bagi masyarakat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhannya.

2.3.2.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.2.1 Ketenagakerjaan

Angkatan kerja yang berkualitas sangat ditentukan dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, pada umumnya mampu berkiprah dalam mendorong percepatan pembangunan, atau mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara umum, tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya masih rendah. Tahun 2017, tingkat partisipasi Angkatan kerja sangat menonjol, yaitu mencapai 26,75 persen.

Berdasarkan komposisi usaha yang paling banyak penduduk bekerja di sektor pertanian sebesar 42,26 persen. Kemudian sektor industri pengolahan penduduk yang bekerja sebesar 37,71 persen. Kemudian penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebesar 20,02 persen.

Gambar 2.23.
Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019



Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2020

2.3.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

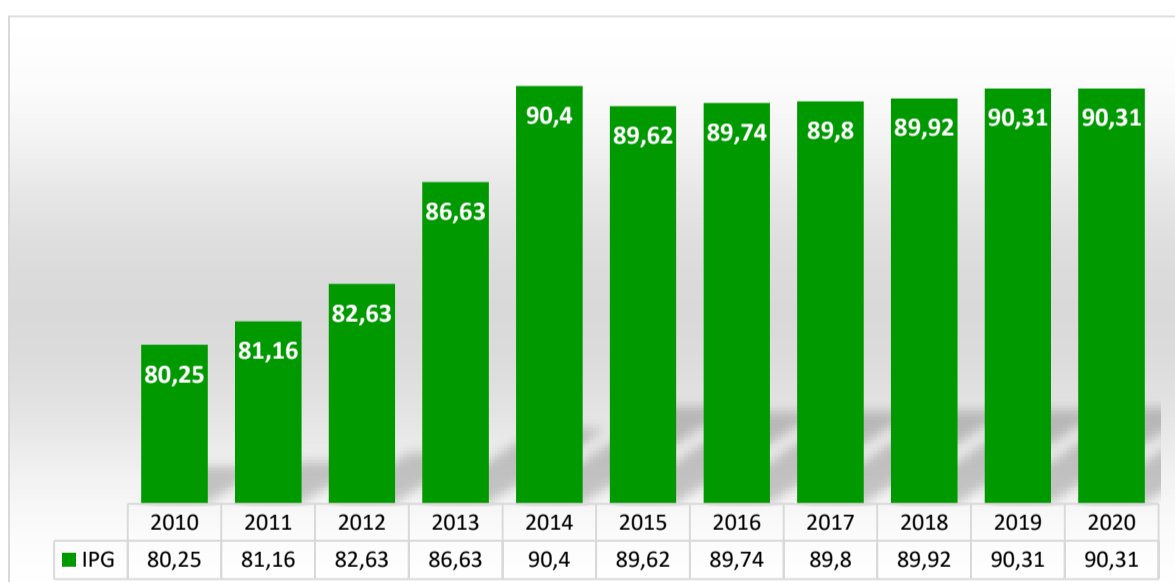
Indeks ini merupakan pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Adapun IPG Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2010 berkisar sebesar 80,25 persen, Tahun

2018 sebesar 89,92 persen. Ada kenaikan persentase sebesar 8 persen selama delapan tahun terakhir.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Nagan Raya menunjukkan persentasi berfluktuatif dimana kondisi pada tahun 2012 lebih baik dari kurun waktu lima tahun terakhir, oleh karenanya perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang pro gender serta mengintegrasikan program-program pembangunan di SKPK dengan Pengarusutamaan Gender.

Faktor-faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk laki-laki antara lain APS SD sederajat dan rasio jenis kelamin saat lahir, sedangkan faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk perempuan yaitu APS SMA sederajat, dan rasio jenis kelamin sejak lahir. Selanjutnya, guna meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan APS SD penduduk laki-laki dan APS SMA bagi penduduk perempuan. Kesenjangan Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2010 sebesar 82,25 persen meningkat tajam hingga pada tahun 2014 sebesar 90,40 persen dan mengalami penurunan pada data terakhir tahun 2018 sebesar 89,92 persen. Dan pada tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan menjadi 90,31 persen.

Gambar 2.24.
Grafik Indeks Pembangunan Gender Kab. Nagan Raya
Tahun 2010 – 2020



Sumber : BPS Kab. Nagan Raya, 2021

2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan masih tergolong minim, dikarenakan beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan maupun kemauan dalam berpartisipasi untuk mengatasi berbagai rintangan yang dihadapi di lembaga

pemerintah dan faktor-faktor lainnya. Adapun keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan Kabupaten Nagan Raya terlihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.66.
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan di pemerintah	2,083	2,188	2,372	2,458	2,645	2,824
2	Jumlah Pekerja Perempuan	18,253	18,361	18,550	18,650	18,850	18,993
Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah		11.41	11.92	12.79	13.18	14.03	14.87

Sumber : BKPSDM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 (data diolah)

3. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRK

Keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Nagan Raya masih minim dibandingkan dengan perwakilan dari laki-laki, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dalam penyelenggaraan pemilu. Proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.67.
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan	3	3	4	4	4
2	Jumlah total kursi di anggota DPRK	25	25	25	25	25
Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRK		12%	12%	16%	16%	16%

Sumber : Bagian Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, 2022

4. Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 2.68.
Rasio KDRT Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KDRT	5	2	3	0	3
2	Jumlah rumah tangga	41.214	42.019	42.737	46.464	39.351
Rasio KDRT		0,012	0,005	0,007	0,000	0,007

Sumber : DPMGP4 Kab. Nagan Raya tahun 2022

Kejadian KDRT di Kabupaten Nagan Raya yang dilaporkan dan tercatat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 5 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0.012 persen. Dan pada tahun 2021 terdapat 3 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0.007 persen.

5. Rasio Angka Partisipasi Murni Perempuan terhadap laki-laki berdasarkan jenjang pendidikan

Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2017-2020 juga bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM tahun 2017 sebesar 22.675 persen, tahun 2018 sebesar 22.463, tahun 2019 sebesar 18.245 dan tahun 2020 sebesar 18.148. Pada tingkat SMP/Mts, capaian APM tahun 2017 sebesar 8.116 persen, tahun 2018 sebesar 9.279, tahun 2019 sebesar 6.921 dan tahun 2020 sebesar 7.109. Selanjutnya pada tingkat SMA/MA, capaian APM tahun 2017 sebesar 7.121 persen, tahun 2018 sebesar 4.235, tahun 2019 sebesar 14.375 dan tahun 2020 sebesar 4.232. Lebih rinci perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut jenjang pendidikan dan jenis Kelami tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	JENIS								TOTAL
		LAKI-LAKI				PEREMPUAN				
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	SMA/MA	3.269	2.997	2.043	1.976	3.852	1.238	2.332	2.256	4.232
2	SMP/Mts	4.297	5.318	3.561	3.661	3.819	3.961	3.360	3.448	7.109
3	SD/MI	11.827	11.757	9.444	9.351	10.848	10.706	8.801	8.797	18.148

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2021

Selanjutnya perbandingan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh dan Nasional pada tahun 2019 adalah Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI di Kabupaten Nagan Raya tahun 2019 tercatat 95,45 persen. Angka ini lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan APM Aceh yaitu 95,39 % dan berada di atas rerata APM nasional yaitu 92,88 persen.

Sementara itu, Kabupaten Nagan Raya tingkat APM SMP/ MTs yaitu 77.24 masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional yaitu 79.02 persen dan 77.45 persen. Demikian juga dengan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/MA, Kabupaten Nagan Raya masih berada lebih unggul yaitu 69,37 persen di bandingkan dengan APM Aceh yaitu 69,27. Sedangkan APM SMA/MA Kabupaten Nagan Raya berada di bawah APM Nasional yaitu 70,90.

Tabel 2.70.
Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Nagan Raya
Dibandingkan dengan Provinsi Aceh Tahun 2019

APM berdasarkan Jenjang Pendidikan	Kabupaten Nagan Raya	Aceh	Nasional
APM SD/MI	95,45	95,39	92,88
APM SMP/MTs	77,24	79,02	77,45
APM SMA/MA	69,37	69,27	70,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020

2.3.2.2.3 Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Pada tahun 2017-2021 terjadi surplus beras dan pangan. Hal ini menunjukkan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk masih terjadi surplus yang dapat dikonsumsi penduduk di luar Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.71.
Produksi Beras Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Beras (kg)	102,892,900	111,537,205	32,950,130	77,759,140	76,100,100
2	Kebutuhan Beras (kg)	19,493,760	19,493,760	20,120,640	18,669,388	19,100,100
3	Surplus Beras (kg)	90,339,140	92,043,445	12,829,490	59,089,752	57,000,000

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2022

2.3.2.2.4. Pertanahan

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. pemerintah akan memberikan status legal bagi tanah-tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat, termasuk yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Redistribusi dan legalisasi aset/tanah bagi masyarakat miskin/ekonomi lemah merupakan salah satu program prioritas daerah dalam mendukung reformasi agraria.

Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reformasi agraria.

2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Konflik atas tanah yang berkepanjangan, yang melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut, bahkan cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya, seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya

kesejangan posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah.

Penanganan dan penyelesaian terhadap konflik pertanahan didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang meliputi mekanisme pelayanan pengaduan dan informasi, pengkajian, penanganan, dan penyelesaian konflik pertanahan, serta bantuan hukum dan perlindungan hukum. Penanganan konflik pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Penanganan konflik pertanahan dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan, pencegahan dampak konflik, dan penyelesaian konflik.

2.3.2.2.5. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan penerapan teknologi tepat guna bagi SKPK pengelola persampahan. Disadari bersama bahwa dalam pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, namun peran swasta dan masyarakat harus dilibatkan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Adapun timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 sebesar 19,56 persen dan terus meningkat menjadi 26,37 persen pada tahun 2021. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.72.
Timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Volume Timbulan Sampah yang ditangani (m ³)	7.952	16.559	9.565	16.310	11.469
2	Total Timbulan Sampah (m ³)	40.654	41.449	42.158	42.434	43.488
Timbulan sampah yang ditangani (%)		19,56	39,95	22,69	38,44	26,37

Sumber : DLH Kabupaten Nagan Raya, 2022

Disamping pelayanan persampahan, Kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga menangani tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelaku usaha / industri. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.73.

Kasus Pencemaran Air yang di Akibatkan Oleh Limbah Industri

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Kasus Pencemaran Air dari Limbah perusahaan	1 Kasus	4 Kasus	10 Kasus	4 Kasus
2	Kasus Pencemaran Air dari Limbah perusahaan yang tertangani	1 Kasus	4 Kasus	10 Kasus	4 Kasus
Persentase Penyelesaian Pencemaran Air		100	100	100	100

Sumber : DLH Kabupaten Nagan Raya, 2022

2.3.2.2.6 Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Administrasi kependudukan seperti dari kepemilikan akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga.

Berdasarkan cakupan kepemilikan akte kelahiran, kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga dari Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.74.

Jumlah kepemilikan Administrasi Kependudukan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran	5.636	5.327	5.868	6.112
2	Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Pernduduk	109.252	114.025	114.508	115.557
3	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga	46.398	41.303	46.464	34.097
4	Jumlah Kepemilikan Kartu Indentitas Anak (%)	0	11	6.409	6.941

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

2.3.2.2.7. Perhubungan

Sarana dan prasarana untuk mendukung adanya jalur angkutan perairan/laut perlu menjadi perhatian pemerintah, hal ini dikarenakan jalur pengangkutan yang tersedia terutama untuk pengangkutan barang hanya lewat darat sehingga untuk mendukung pengembangan Kabupaten Nagan Raya sebagai Kawasan Agro Industri maka pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan juga fasilitas lainnya yang dapat mendukung hadirnya transportasi laut terutama untuk pengangkutan barang.

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah tercermin dari rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Selama tahun 2017-2021, rasio panjang jalan kabupaten terhadap kendaraan penumpang di Kabupaten Nagan Raya mengalami penurunan. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi dari pertumbuhan pertambahan pembangunan jalan dan pertumbuhan jumlah kendaraan penumpang.

Tabel 2.75.
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jalan Kabupaten	924,421	924,421	924,421	6,90	6,90
2	Jumlah Kendaraan Penumpang	202	205	216	5	7
Rasio		4,58	4,51	4,28	1,38	1

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2022

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Nagan Raya tercatat pada tahun 2017 adalah 4,58 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sejumlah 1 persen.

1. Perhubungan Udara

Aktivitas ekonomi yang kian berkembang membutuhkan jasa pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien. Kabupaten Nagan Raya telah memiliki

Bandar Udara Cut Nyak Dhien yang terletak di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir.

Di wilayah barat-selatan Aceh, Bandar Udara Cut Nyak Dhien tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya saja, namun juga masyarakat dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat. Jasa pelayanan transportasi udara tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar daerah, atau sebaliknya. Bandar Udara Cut Nyak Dhien menjadi bandara utama, setelah bandar udara T. Cut Ali di Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi primadona masyarakat/pengusaha dalam bepergian untuk wilayah barat, Aceh. Adapun jumlah penumpang datang dan berangkat melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.76.
Jumlah Penumpang Datang Dan Berangkat
di Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penumpang Datang	21.803	19.601	18.725	4.733	854
2	Penumpang Berangkat	21.768	18.288	18.500	4.297	862

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Nagan Raya Tahun 2022

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penumpang datang dan penumpang berangkat melalui Bandara Cut Nyak Dhien dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017, masyarakat berpergian ke luar daerah melalui Bandara Cut Nyak Dhien sebanyak 21.768 orang, mengalami penurunan menjadi 854 orang pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemic Covid 19.

2. Perhubungan Laut

Di samping transportasi darat, jalur transportasi laut juga sangat berperan dalam mendukung kelancaran perputaran orang, barang, dan jasa. Perannya juga begitu besar dalam percepatan ekonomi daerah di wilayah pesisir. Namun, aktivitas jasa transportasi laut di Nagan Raya belum ada. Kondisi ini berkait erat minimnya sarana dan prasarana pendukung.

2.3.2.2.8. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi semakin menunjukkan kemajuan yang lebih baik di Kabupaten Nagan Raya. Layanan internet sebagai kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dan cepat telah berkembang di Kabupaten Nagan Raya. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dari berbagai investasi dunia usaha/swasta dan BUMN, merupakan pendorong semakin teraksesnya layanan internet dan informasi bagi masyarakat. Layanan komunikasi berupa telepon seluler/handphone sudah menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Penggunaan handphone merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari saat ini. Kendati demikian, telepon rumah juga masih diminati masyarakat sebagai sarana komunikasi.

2.3.2.2.9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi usaha kecil dan menengah (UKM) yang cukup menggembirakan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah industri di Kabupaten Nagan raya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, terdapat 3.198 unit industri tradisional di Kabupaten Nagan Raya. Jumlah industri tersebut mengalami peningkatan sebanyak 5.130 unit pada tahun 2021. Penyumbang terbanyak pada industri ini di tahun 2021 adalah industri makanan dan tembakau sebanyak 1437 unit. Jumlah industri barang lainnya berada pada posisi berikutnya, yaitu makanan dan tembakau dan industri dari bahan galian, masing-masing sebanyak 1.250 unit.

Tabel 2.77.
Kondisi Industri Makanan dan Tembakau
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit)

No	Kecamatan	Industri Makanan dan Tembakau				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Darul Makmur	96	113	125	165	171
2	Tripa Makmur	2	36	40	46	46
3	Kuala	107	173	220	222	225
4	Kuala Pesisir	88	117	127	128	128
5	Tadu Raya	32	47	52	55	56

No	Kecamatan	Industri Makanan dan Tembakau				
		2017	2018	2019	2020	2021
6	Beutong	73	106	115	120	120
7	Beutong Ateuh Banggalang	3	13	13	13	13
8	Seunagan	228	278	299	302	302
9	Suka Makmue	107	148	150	151	151
10	Seunagan Timur	140	223	223	224	225
	Jumlah	876	1254	1364	1426	1437

Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022

Tabel 2.78.
Kondisi Industri Kain dan Kulit
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit)

No	Kecamatan	Industri Kain dan Kulit				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Darul Makmur	102	57	109	112	123
2	Tripa Makmur	22	11	26	27	28
3	Kuala	57	22	81	84	84
4	Kuala Pesisir	58	34	62	63	64
5	Tadu Raya	15	15	41	44	44
6	Beutong	32	21	40	42	42
7	Beutong Ateuh Banggalang	2	2	4	6	6
8	Seunagan	102	28	188	189	189
9	Suka Makmue	53	10	71	71	71

No	Kecamatan	Industri Kain dan Kulit				
		2017	2018	2019	2020	2021
10	Seunagan Timur	79	30	150	153	153
Jumlah		522	230	772	791	804

Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022

Tabel 2.79.
Kondisi Industri Kayu
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit)

No	Kecamatan	Industri Kayu				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Darul Makmur	53	57	57	59	72
2	Tripa Makmur	9	11	11	11	11
3	Kuala	18	22	24	26	27
4	Kuala Pesisir	19	34	34	36	36
5	Tadu Raya	11	15	15	17	18
6	Beutong	20	21	21	22	22
7	Beutong Ateuh Banggalang	4	2	2	3	3
8	Seunagan	28	28	31	31	31
9	Suka Makmue	10	10	12	12	12
10	Seunagan Timur	29	30	30	32	33
Jumlah		201	230	237	249	265

Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022

Tabel 2.80.
Kondisi Industri dari Besi
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit)

No	Kecamatan	Industri dari Besi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Darul Makmur	14	4	4	4	4
2	Tripa Makmur	3	1	1	3	3
3	Kuala	22	17	17	17	17
4	Kuala Pesisir	13	3	3	4	4
5	Tadu Raya	2	2	2	2	2
6	Beutong	1	1	1	3	3
7	Beutong Ateuh Banggalang	-	0	0	1	1
8	Seunagan	11	7	7	7	7
9	Suka Makmue	1	1	1	1	1
10	Seunagan Timur	9	9	9	9	9
Jumlah		76	45	45	51	51

Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022

Tabel 2.81.
Kondisi Industri Dari Bahan Galian
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit)

No	Kecamatan	Industri dari Bahan Galian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Darul Makmur	1	1	109	112	112
2	Tripa Makmur	-	0	26	26	26
3	Kuala	496	513	581	570	570

No	Kecamatan	Industri dari Bahan Galian				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Kuala Pesisir	1	1	62	62	62
5	Tadu Raya	1	0	41	42	42
6	Beutong	-	34	40	36	36
7	Beutong Ateuh Banggalang	-	0	4	4	4
8	Seunagan	-	4	188	180	180
9	Suka Makmue	4	4	71	72	72
10	Seunagan Timur	1	0	150	146	146
Jumlah		504	557	1272	1250	1250

Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022

Tabel 2.82.
Kondisi Industri Dari Kertas
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit)

Kecamatan	Industri dari Kertas				
	2017	2018	2019	2020	2021
Darul Makmur	7	0	0	0	0
Tripa Makmur	1	0	0	0	0
Kuala	16	0	0	0	0
Kuala Pesisir	1	0	0	0	0
Tadu Raya	2	0	0	0	0
Beutong	6	0	0	0	0
Beutong Ateuh Banggalang	-	0	0	0	0
Seunagan	13	0	0	0	0

Kecamatan	Industri dari Kertas				
	2017	2018	2019	2020	2021
Suka Makmue	5	0	0	0	0
Seunagan Timur	6	0	0	0	0
Jumlah	57	0	0	0	0

Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022

Tabel 2.83.
Kondisi Industri Barang Lainnya
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit)

No	Kecamatan	Industri Barang Lainnya				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Darul Makmur	24	27	35	38	40
2	Tripa Makmur	2	6	9	11	12
3	Kuala	11	34	51	54	55
4	Kuala Pesisir	24	27	35	37	39
5	Tadu Raya	19	2	4	6	6
6	Beutong	74	67	72	73	73
7	Beutong Ateuh Banggalang	5	6	7	7	7
8	Seunagan	199	29	42	44	44
9	Suka Makmue	34	18	27	27	27
10	Seunagan Timur	150	27	32	35	35
Jumlah		542	243	314	332	338

Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022

Tabel 2.84.
Kondisi Industri Jasa
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 (Unit)

No	Kecamatan	Industri Jasa				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Darul Makmur	32	217	217	218	218
2	Tripa Makmur	17	29	29	30	32
3	Kuala	25	150	150	153	153
4	Kuala Pesisir	70	126	126	126	126
5	Tadu Raya	47	41	41	46	46
6	Beutong	53	46	46	48	48
7	Beutong Ateuh Banggalang	29	5	5	6	6
8	Seunagan	68	184	184	186	186
9	Suka Makmue	25	82	82	82	82
10	Seunagan Timur	54	87	87	88	88
Jumlah		420	967	967	983	985

Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022

Industri yang berkembang di Kabupaten Nagan Raya pada umumnya masih skala kecil dan menengah. Distribusi aktivitas industri tersebut relatif merata di setiap kecamatan serta memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing wilayah. Sentra pengembangan industri makanan dan tembakau terdapat di Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, Darul Makmur, dan Kuala Pesisir. Mayoritas industri kayu berada di Seunagan, Beutong Ateuh Banggalang, Seunagan Timur, dan Beutong.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.85.
Jumlah dan Status Koperasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	Unit	194	170	141	138	143
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	85	85	87	90	95
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Unit	109	85	54	48	48
4	Jumlah Koperasi yang dibina	Unit	20	20	25	25	30
5	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	9.519	8.964	5.859	7.084	7.213

Sumber : Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022

Pada tahun 2017, jumlah koperasi di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 197 unit koperasi. Angka tersebut menurun menjadi 143 unit pada tahun 2021. Koperasi berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat kecamatan dan gampong. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa, diharapkan peran koperasi lebih optimal dalam menumbuh kembangkan percepatan pembangunan desa/gampong. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memprioritaskan penguatan kelembagaan koperasi melalui perbaikan manajemen dan pengelolaan koperasi, perluasan akses permodalan dan pasar, serta perbaikan sumberdaya manusia sehingga koperasi berkiprah secara berkelanjutan dalam perbaikan kesejahteraan anggota.

2.3.2.2.10. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkan modalnya disuatu daerah berikut serapan tenaga kerja local dan asing. Jumlah investor di Kabupaten Nagan Raya, baik Investor Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2017, jumlah investor di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 47 perusahaan dan semakin menurun pada tahun 2021 sejumlah 7

perusahaan yang merupakan Investor Penanaman Modal Dalam Negeri. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86.
Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	PMA	11	11	11	11	0
2	PMDN	36	38	36	36	7
Jumlah		47	49	47	47	7

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi di sektor Perkebunan merupakan investasi yang paling dominan di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diikuti investasi sektor kelistrikan seperti pembangunan PLTU di suak Puntong, PLTA di Kecamatan Beutong, Beutong Ateuh Banggalang dan Kecamatan Darul Makmur. Nilai investasi Berskala Nasional di Kabupaten Nagan Raya selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Nilai investasi Berskala Nasional di Kabupaten Nagan Raya sejumlah Rp. 257.156.203.571,- dan terus meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.136.832.822.235,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87.
Pertumbuhan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Nagan Raya 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	PMA	8.689.110.204	18.980.967.123	25.731.266.739	28.654.645.200	2.028.896.955.000
2	PMDN	248.467.093.367	196.385.619.728	182.220.790.505	77.943.047.896	107.935.867.235
Nilai Investasi berskala Nasional (PMA+PMDN)		257.156.203.571	215.366.586.851	207.952.057.244	106.597.693.096	2.136.832.822.235

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Jumlah penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja PMA ditambah dengan jumlah tenaga kerja PMDN. Jumlah penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2017 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan, bahkan terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021.

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan jumlah seluruh perusahaan (PMA/PMDN). Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2017 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan, bahkan terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.88.
Tenaga Kerja Perusahaan (PMDN/PMA)
Kabupaten Nagan Raya 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tenaga Kerja PMA	1.831	1.793	1.761	2.164	190
2	Tenaga Kerja PMDN	6.905	6.873	5.704	6.147	58
Jumlah Tenaga Kerja		8.736	8.666	7.465	8.311	248
4	Jumlah PMA/PMDN	47	49	47	47	7
5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	18587,23	17685,71	15882,98	17682,98	3542,86

Sumber : DPMTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

2.3.2.2.11. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur, sejahtera dan berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Di bawah ini data tentang jumlah klub olahraga serta data lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.89.
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Indikator	Unit	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lapangan /sarana olahraga	Unit	236	241	243	244	246
2	Jumlah Klub Olah raga	Klub	182	182	194	219	225
3	Jumlah cabang Olah raga	Buah	14	16	18	20	23
4	Jumlah Organisasi kepemudaan	Buah	10	10	28	32	36

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah membangun dan mengembangkan berbagai sarana olahraga yang tersebar di kecamatan dan ibukota Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah lapangan/sarana olahraga pada sampai dengan tahun 2017 berjumlah 236 unit . Jumlah klub olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Nagan Raya sampai tahun 2021 adalah sebanyak 225 klub olah raga dengan jumlah cabang olah raga sebanyak 23 cabang.

Tabel 2.90.
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	84	88.2	89.96	90.48	90.50
3	Cakupan pembinaan atlet muda	30.45	32.90	45.80	50.38	60.38
4	Jumlah atlet berprestasi	2	17	19	22	69
5	Jumlah prestasi olahraga	5	17	22	8	9

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Nagan Raya sangat minim memperoleh prestasi di bidang olahraga. Namun Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya untuk terus memberikan pembinaan kepada atlet-atlet muda di Kabupaten Nagan Raya.

2.3.2.2.12. Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang yang dikelola secara terpadu juga tidak mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari tahun 2012 s/d 2016 hanya terdapat 3 cagar budaya yang dikelola secara terpadu yaitu Mesjid Jamik Syaikhunna Gudang Buloh, Mesjid Peuleukung dan Museum Alquran. Untuk tahun 2017 s/d 2020 bahkan sudah tidak ada lagi cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Untuk benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ditahun 2017 dan 2018 berjumlah 3 dan bertambah menjadi 4 benda, situs dan kawasan benda, situs dan kawasan yang dilestarikan ditahun 2019. Padahal Kabupaten Nagan Raya memiliki 17 tempat bersejarah, 18 mesjid dan 45 makam. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.91.
Perkembangan Kebudayaan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	0:3	0:3	0:3	0:3	0:3
2	Rasio benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	3:80	3:80	4:80	4:80	4:80

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

Pengembangan sektor kebudayaan di Kabupaten Nagan Raya masih belum optimal. Gedung kesenian yang ada di Kabupaten Nagan Raya hanya tersedia 1 unit. Begitu juga dengan organisasi yang berkiprah di bidang seni di Kabupaten Nagan Raya hanya 1 organisasi, sementara Group Kesenian di Kabupaten Nagan Raya semakin meningkat. Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap

pengembangan dan pelestarian kebudayaan karena sektor kebudayaan akan dapat menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini disebabkan karena pilar pariwisata bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Nagan Raya akan terjaga kelestariannya bila adanya lembaga budaya yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian.

2.3.2.2.13. Perpustakaan

Jumlah perpustakaan Kabupaten di Nagan Raya dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 hanya 1 (satu) unit, sedangkan perpustakaan gampong mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 jumlah perpustakaan gampong sebanyak 45 unit dan terus meningkat menjadi 57 unit pada tahun 2021.

Tabel 2.92.

**Jumlah Pustaka Daerah menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2021 (Unit)**

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Seunagan	8	8	8	8	8
2	Beutong	3	3	3	4	4
3	Seunagan Timur	4	4	4	5	5
4	Suka Makmue	6	6	6	6	6
5	Kuala	8	8	9	10	10
6	Kuala Pesisir	7	7	7	7	7
7	Tadu Raya	4	4	4	5	5
8	Darul Makmur	4	4	4	5	5
9	Tripa Makmur	3	3	3	5	5
10	Beutong Ateuh Banggalang	2	2	2	2	2
Jumlah		45	49	50	57	57

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nagan Raya Tahun 2022

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

Kabupaten Nagan Raya memiliki daya tarik dan objek wisata yang beragam dan unik serta tersebar di seluruh kecamatan. Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya belum dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa kawasan wisata yang sudah dijadikan tujuan wisata, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang sektor pariwisata. Begitu juga dengan promosi wisata belum dikemas dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Jika sektor pariwisata dikembangkan dengan baik maka akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pengembangan ekonomi daerah serta dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor jasa lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kedepan akan mengupayakan pengembangan sektor wisata secara terpadu antara wisata sungai, pantai, dan danau serta wisata religi. Pemerintah juga perlu mengupayakan kerja sama lintas sektor dalam mengemas sektor wisata baik promosi, pemasaran serta kerjasama pengembangan atau pengelolaan sektor wisata dengan pihak swasta. Sebaran obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya untuk lebih jelas dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.93.

Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JENIS OBJEK WISATA	JUMLAH OBJEK WISATA
1	Beutong	Wisata Alam Krueng Isep	5
		Panorama Gunung Singgah Mata	
		Bendungan Irigasi Jeuram	
		Masjid Dayah	
		Makam Teungku Di Seumot	
2	Kuala Pesisir	Wisata Pantai Indah Naga Permai	2
		Wisata Pantai Seunagan	
3	Tripa Makmur	Wisata Pantai Suak Dama	3
		Arung Jeuram Krueng Tripa	
		Situs Kerajaan Islam Ujong Raja	
4	Tadu Raya	Danau Laut Tadu	2
		Air Terjun Krueng Antoeng Alue Gani	

NO	KECAMATAN	JENIS OBJEK WISATA	JUMLAH OBJEK WISATA
5	Seunagan Timur	Makam Habib Muda Seunagan	1
6	Kuala	Mesjid Jamik Syaikhunna Gudang Buloh	1
7	Suka Makmue	Taman Makam Pahlawan	1
8	Darul Makmur	Air Terjun Alue Waki	1
9	Beutong Ateuh Banggalang	Batee Meucureh Cut Nyak Dhien	1
10	Seunagan	Makam Indatu Kuta Aceh	1
Jumlah			18

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2022

Untuk objek wisata di Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 di Kecamatan Beutong terdapat 5 objek wisata yaitu Wisata Alam Krung Isep, Panorama Gunung Singgah Mata, Bendungan Irigasi Jeuram dan Makam Teungku di Seumot, di Kecamatan Kuala Pesisir terdapat 2 objek wisata yaitu Wisata Pantai Indah Naga Permai dan Wisata Pantai Seunagan, di Kecamatan Tripa Makmur terdapat 3 objek wisata yaitu Wisata Pantai Suak Dama, Arung Jeuram Krueng Tripa dan Situs Kerajaan Islam Ujong Raja, di Kecamatan Tadu Raya terdapat 2 objek wisata yaitu Danau Laut Tadu dan Air Terjun Krueng Antoeng Aluen Gani, di Kecamatan Seunagan Timur terdapat 1 objek wisata yaitu Makam Habib Muda Seunagan, di Kecamatan Kuala terdapat 1 objek wisata yaitu Mesjid Jami' Syaikhunna Gudang Buloh, di Kecamatan Suka Makmue terdapat 1 objek wisata yaitu Taman Makam Pahlawan, di Kecamatan Darul Makmur terdapat 1 objek wisata yaitu Air Terjun Alue Waki, di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang terdapat 1 objek wisata yaitu Batee Meucureh Cut Nyak Dhien dan di Kecamatan Seunagan terdapat 1 objek wisata yaitu Makam Indatu Kuta Aceh.

Tabel 2.94.
Jumlah Sarana/Fasilitas Pariwisata (unit) Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2021

No	Jenis Sarana	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Hotel/Wisma/Losmen	4	4	4	4	4
2	Rumah Makan / Restoran	16	16	16	16	16
3	Warung Kopi/Café	23	23	23	23	23
4	Mushalla	3	3	3	4	4
5	MCK	2	2	2	3	3

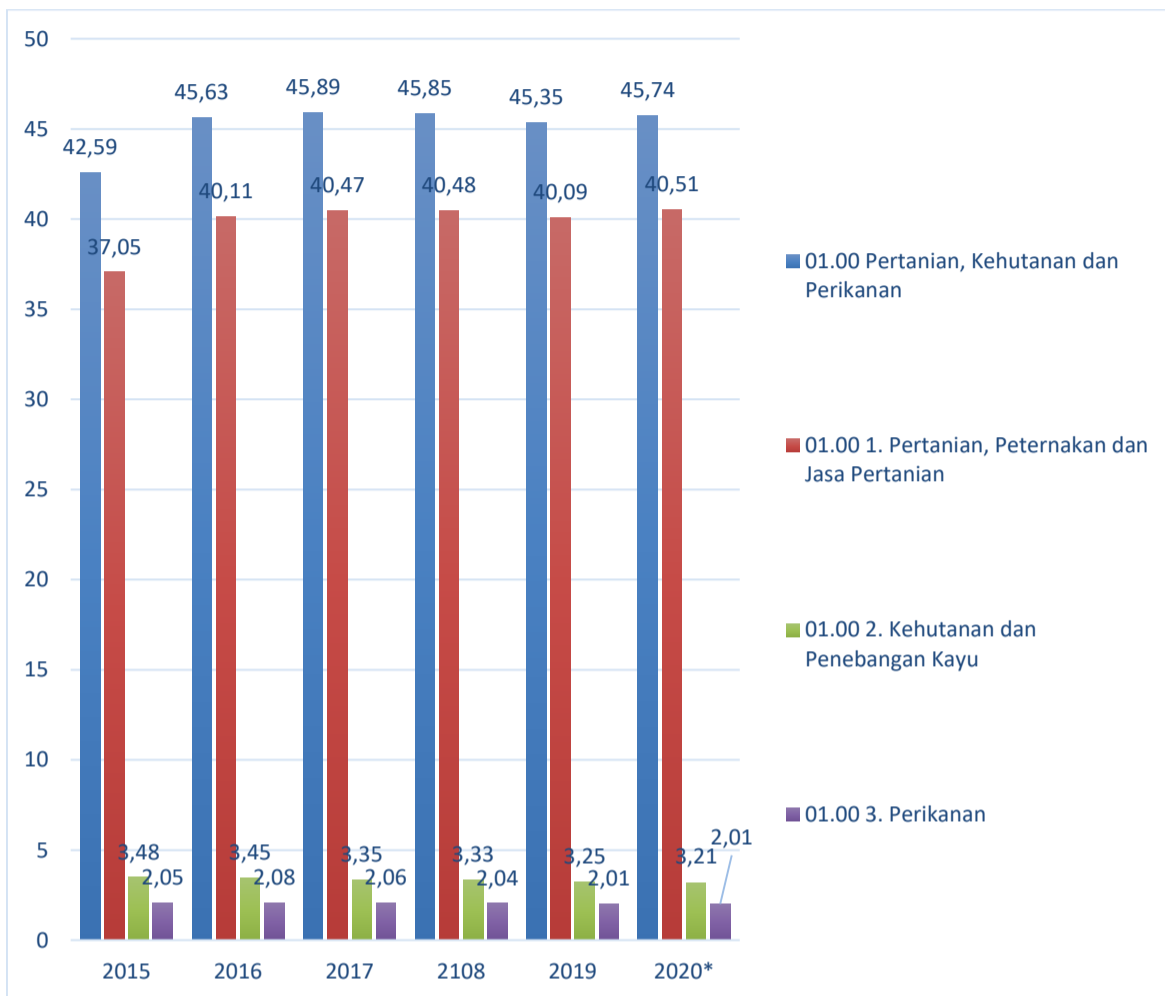
Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2022

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah ketersediaan sarana akomodasi berupa hotel / wisma / losmen sebagai salah satu pendukung pariwisata di Kabupaten Nagan Raya masih sangat minim. Terdapat 4 unit hotel/wisma/losmen yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dengan fasilitas memadai. Untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan bukan hanya fasilitas akomodasi yang sangat diperlukan tapi juga sangat didukung dengan sarana pendukung di kawasan wisata memadai.

2.3.3.2 Pertanian

Dalam kurun waktu tahun 2015-2020 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang berada di sekitar angka 35-45 persen. Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan subsektor yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kontribusi yang mencapai 30-40 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku dalam lima tahun terakhir. Sedangkan dalam kurun waktu tahun 2015-2020 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga masih memberi kontribusi terbesar dan terus meningkat terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang berada di sekitar angka 40-50 persen. Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian juga masih merupakan subsektor yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kontribusi yang mencapai 40-45 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar.2.25.
Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2015-2020 (Persen)



Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya 2021

Tabel 2.95.
Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi					
	Produksi (ton)	181,000	180,278	130,582	144,648	107,023
	Luas areal tanam(ha)	25,609	25,111	29,199	7,569	13,226
	Luas areal panen (ha)	24,981	24,866	17,888	19,685	14,561
	Produktivitas padi (ton/ha)	7.25	7.25	7.30	7.35	7,35
2	Jagung					
	Produksi(ton)	4,096	5,363	5,600	5,267	3,223,9

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	Luas areal tanam (ha)	540	755	745	369	471
	Luas areal panen (ha)	512	650	640	602	399
	Produktivitas jagung(ton/ha)	8.00	8.25	8.75	8.75	8,08
3	Kedelai					
	Produksi (ton)	950	1,119	782.9		42
	Luas areal tanam (ha)	530	637	450		11
	Luas areal panen (ha)	500	589	412		21
	Produktivitas kedelai(ton/ha)	1.90	1.90	1.90		2
4	Kacang Tanah					
	Produksi (ton)	680	756	1,500	388	319,5
	Luas areal tanam (ha)	164	155.0	450.0	97	60
	Luas areal panen (ha)	170.0	189.0	375.0	97	71
	Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha)	4.00	4.00	4.00	4.00	4,5
5	Kacang Hijau					
	Produksi (ton)	37.5	37.5	30		33
	Luas areal tanam (ha)	30	30	32		12
	Luas areal panen (ha)	25	25	20		22
	Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha)	1.5	1.5	1.5		1,5
6	Ubi Kayu					
	Produksi (ton)	3,186	2,403	2,547	1,251	288
	Luas areal tanam (ha)	366	276	309	60	17
	Luas areal panen (ha)	354	267	283	139	32
	Produktivitas ubi kayu (ton/ha)	9.00	9.00	9.00	9.00	9
7	Ubi Jalar					

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	Produksi (ton)	780	351	695.5	156	208
	Luas areal tanam (ha)	130	77	126	25	22
	Luas areal panen (ha)	120	54	107	24	32
	Produktivitas ubi jalar (ton/ha)	6.5	6.5	6.5	6.50	6,5

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022.

Tabel di atas menggambarkan jenis komoditas tanaman pangan unggulan di Kabupaten Nagan Raya, meliputi padi, jagung, kacang tanah, kedele, dan ubi kayu. Di wilayah barat-selatan Aceh, Kabupaten Nagan Raya termasuk penghasil padi terbesar.

Cakupan pembinaan kelompok tani diukur dengan jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan dari jumlah seluruh kelompok tani tahun 2017-2021 sebagai berikut.

Tabel 2.96.
Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan (APBA, OTSUS dan APBN)	290	516	406	446	119
2	Jumlah kelompok tani	1107	1230	1235	1.481	1.242
Cakupan bina kelompok tani (%)		26,20	41,95	32,87	30,11	9,58

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Kelembagaan pertanian yang ada di Kabupaten Nagan Raya, meliputi kelompok tani sebanyak 1.107 kelompok, UPJA 51 unit, kios pertanian 34 unit, KTNA 78 kelompok, koperasi tani 10 unit, BPP 10 unit, dan BBU 2 unit, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97.

Jenis Kelembagaan Pertanian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

NO	JENIS KELEMBAGAAN	SATUAN	JUMLAH
1	BBU	Unit	2
2	Koperasi Tani	Unit	10
3	UPJA	Unit	51
4	Badan Penyuluh Pertanian (BPP)	Unit	10
5	Kios Pertanian	Unit	34
6	Kelompok Tani	Unit	1.107
7	Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Unit	78
Jumlah			1.292

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya 2021

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang besar dalam peternakan, terutama ternak besar sapi dan kerbau. Potensinya juga sangat memungkinkan untuk ditingkatkan mengingat masih tersedianya bahan baku sebagai sumber pakan ternak. Selama tahun 2021, perkembangan populasi ternak di Kabupaten Nagan Raya cenderung berluktuatif. Adapun jumlah kerbau sebanyak 9.527 ekor, sapi 12.816 ekor, kambing 15.473 ekor dan domba 2.137 ekor.

Tabel 2.98.

Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2021 (Ekor)

Kecamatan	Jenis Ternak (ekor)							
	Sapi		Kerbau		Kambing		Domba	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Darul Makmur	2,530	2.122	213	405	1,116	1.244	223	258
Tripa Makmur	978	1.146	603	689	700	982	57	238
Kuala	1,356	1.124	1,110	1125,000	1,035	1.287	83	113
Kuala Pesisir	2,723	2.901	562	593	698	7.131	130	135
Tadu Raya	2,231	3.136	319	419	503	789	219	239
Beutong	50	232	1,203	1.271	114	361	75	109

Kecamatan	Jenis Ternak (ekor)							
	Sapi		Kerbau		Kambing		Domba	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Beutong Ateuh Banggalang	46	33	62	72	221	215	27	37
Seunagan	454	1.134	1,669	1.402	1,368	1.542	141	706
Suka Makmue	594	673	1,387	1.617	1,062	1.225	117	143
Seunagan Timur	221	315	1,377	1.934	237	697	141	159
Total	11,183	12.816	8,505	9.527	7,054	15.473	1,213	2.137

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya Tahun 2022

Sentra pemeliharaan sapi terbesar di Kabupaten Nagan Raya terdapat di Kecamatan Darul Makmur. Beberapa kecamatan lainnya yang merupakan juga sentra pemeliharaan sapi meliputi Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Kuala. Untuk peternakan kerbau, sentra pemeliharaannya terdapat di Kecamatan Seunagan, disamping itu juga Kecamatan Seunagan Timur dan Beutong.

2.3.3.3 Perkebunan

Sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perekonomian Kabupaten Nagan Raya, termasuk sumber pendapatan masyarakat. Dari sisi aspek sosial, usaha perkebunan telah mampu memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat dimana secara langsung ikut mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Nagan Raya mempunyai potensi areal yang luas untuk pengembangan perkebunan mencapai 77.164 Ha.

Tabel 2.99.
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2021

No	Tahun	Luas Areal (ha)	Poroduksi Kepala Sawit (ton)	Produktifitas Kelapa Sawit (%)
1	2017	50.664	115.078	3,147
2	2018	51.566	108.354	2,976
3	2019	51.321	529.137	14,312
4	2020	51.198	520.272	14,312

No	Tahun	Luas Areal (ha)	Poroduksi Kepala Sawit (ton)	Produktifitas Kelapa Sawit (%)
5	2021	52.228	547.888	14,750

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2022

Tabel di atas memperlihatkan jumlah komoditas kelapa sawit merupakan andalan perkebunan Kabupaten Nagan Raya. Kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021), perkembangan luas areal dan produksi kelapa sawit terus meningkat. Tahun 2017, tercatat luas areal perkebunan kelapa sawit 50.664 Ha, sementara tahun 2021 meningkat mencapai 52.228 ha.

Luas tanam yang cenderung bertambah berimplikasi positif terhadap peningkatan produksi kelapa sawit. Hingga akhir tahun 2021, tercatat produksi kelapa sawit di Nagan Raya sebanyak 547.888 ton, meningkat dari produksi tahun 2017 (sebanyak 115.078 ton).

Karet merupakan komoditas andalan ekspor dan terus dikembangkan petani di Nagan Raya. Luas areal yang ditanami petani memperlihatkan penurunan. Tahun 2017, tercatat areal karet yang ditanami petani berjumlah 13.553 Ha. Akhir tahun 2021, areal penanaman komoditas karet menurun menjadi 6.725 Ha, sehingga produksi karet juga ikut menurun.

Tabel 2.100.
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2021

No	Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi Karet (ton)	Produktifitas Karet (%)
1	2017	13.553	5.314	0,392
2	2018	19.220	4.515	0,235
3	2019	8.834	4.078	0,462
4	2020	8.835	4.078	0,751
5	2021	6.725	4,276.89	0,820

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya 2022

Kakao sebagai komoditas ekspor juga ditanami petani Nagan Raya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021), areal perkebunan kakao atau bahan baku coklat di Kabupaten Nagan Raya menurun. Pada tahun 2017, luas areal kakao

di Kabupaten Nagan Raya seluas 5312 Ha, dan menurun menjadi 1.725 Ha pada tahun 2021. Kondisi ini menandakan bahwa minat petani untuk membudidayakan coklat sebagai komoditas andalan daerah semakin menurun.

Sampai akhir tahun 2021, produksi kakao di Kabupaten Nagan Raya tercatat 108,55 ton. Pada tahun 2012 produksi kakao masih sebanyak 1. 081 ton. Itu artinya produksi kakao menurun setiap tahunnya dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi karena setiap tahun luas areal penanaman kakao perkebunan rakyat mengalami penurunan.

Tabel 2.101.
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao
Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2020

No	Tahun	Luas Areal (ha)	Populasi Kakao (ton)	Produktifitas Kakao (%)
1	2017	5312	1081	0,20
2	2018	4700	643	0,14
3	2019	2820	575	0,20
4	2020	2820	576	0,20
5	2021	1725	108,55	0,35

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2022

Komoditas kelapa dalam memperlihatkan peningkatan luas tanam di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2017, luas areal komoditas kelapa dalam mencapai 1.486,60 ha dan semakin meningkat menjadi 2.750 Ha pada tahun 2021.

Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan produksi kelapa dalam selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2017, produksi kelapa dalam mencapai 1050,64 ton dan semakin menunjukkan penurunan produksi pada tahun 2021 sebanyak 287.50 ton. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.102.
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Dalam
di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2020

No	Tahun	Luas Areal (ha)	Populasi Kelapa Dalam (ton)	Produktifitas Kelapa Dalam (%)
1	2017	1.486,60	1050,64	0,71

No	Tahun	Luas Areal (ha)	Populasi Kelapa Dalam (ton)	Produktifitas Kelapa Dalam (%)
2	2018	1.487,60	1108,15	0,74
3	2019	2.785,98	560,22	0,20
4	2020	2.785,98	560,22	0,20
5	2021	2.750	287.50	0,25

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2022

Pengembangan komoditi perkebunan di Nagan Raya terutama untuk perkebunan rakyat selama ini masih dihadapkan beberapa permasalahan substansial yang hampir sama dengan permasalahan di sektor pertanian pangan dan hortikultura, yaitu permasalahan ketersediaan bibit unggul dan penanganan pasca panen. Sebagian besar bibit unggul masih harus didatangkan dari daerah lain dan sulit diakses oleh petani, serta harga yang relatif mahal. Akibatnya petani cenderung menggunakan bibit yang bukan klon/varietas anjuran sehingga berimbas pada rendahnya produktivitas perkebunan rakyat terutama jika dibandingkan dengan perkebunan besar. Permasalahan pasca panen terutama berkaitan dengan masih rendahnya harga komoditi di tingkat petani sehingga hasil kebun tidak dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya harga komoditi perkebunan ditingkat petani disebabkan terutama akibat rendahnya kualitas pengolahan hasil panen, lemahnya sistem kelembagaan petani, dan minimnya ketersediaan unit pengolahan hasil perkebunan.

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Fasilitas Listrik

Pelayanan listrik di Kabupaten Nagan Raya dikelola PT. PLN (Persero). Selama tahun 2017-2020, produksi listrik oleh PT. PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagan Raya terus meningkat. Produksi listrik tahun 2017 sebesar 80.655.023 Kwh. Produksi listrik tersebut meningkat menjadi 87.495.323 Kwh tahun 2020. Daya terpasang listrik sebesar 38.646.700 VA tahun 2017, dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 49.555.350 VA.

Tabel 2.103.
Perkembangan Daya Terpasang, Produksi, dan Listrik Terjual
pada PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten Nagan Raya,
Tahun 2017-2020

Tahun	Daya Terpasang (VA)	Produksi Listrik	Listrik Terjual (Kwh)
		(Kwh)	
2017	38.646.700	80.655.023	69.646.160
2018	42.883.950	86.555.701	75.910.966
2019	47.168.200	93.401.590	83.516.568
2020	49.555.350	87.495.323	76.760.240

Sumber : PT. PLN Kab. Nagan Raya 2020

Dalam upaya mendukung stabilisasi distribusi kelistrikan di wilayah pantai timur, tengah, dan pantai barat, serta wilayah selatan Aceh, pemerintah pusat telah membangun PLTU di Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. PLTU tersebut merupakan bagian integral dari rencana pemerintah pusat untuk pengembangan listrik 10.000 MW di seluruh Indonesia. PLTU tersebut memiliki kapasitas listrik 2x110 Megawatt (MW). Luas area PLTU Nagan Raya mencapai 70 hektar, dengan total investasi senilai Rp.2,36 triliun. Adanya pembangkit listrik tersebut diharapkan masalah kelistrikan di Kabupaten Nagan Raya, termasuk wilayah pantai barat-selatan Aceh dapat teratasi secara berkelanjutan serta berdampak positif terhadap percepatan aktivitas ekonomi masyarakat.

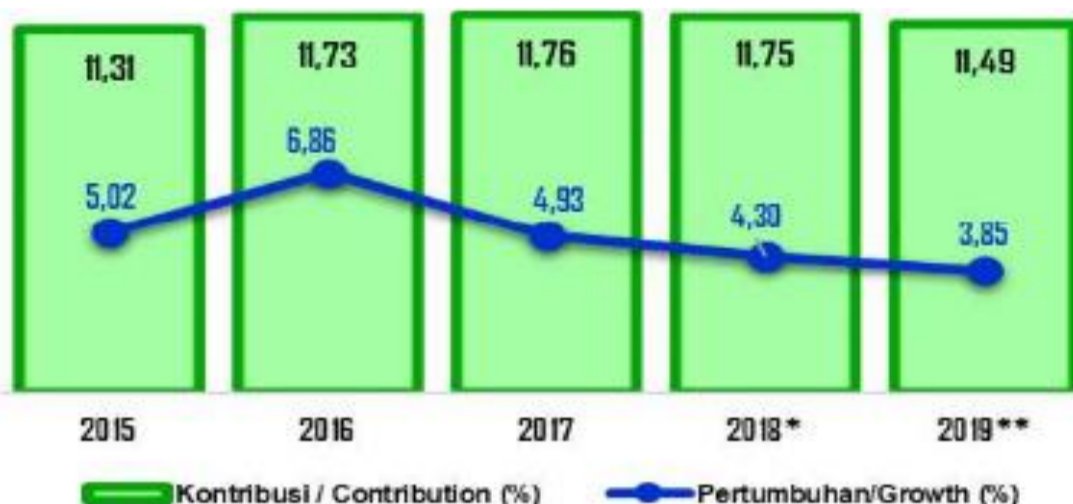
2.3.3.5. Perdagangan

Posisi Kabupaten Nagan Raya yang berada pada jalur lintas nasional di wilayah barat selatan Aceh, terbuka peluang yang sangat besar untuk pengembangan perdagangan. Ketersediaan infrastruktur jalan serta didukung transportasi darat dan udara yang memadai merupakan pendorong untuk berkembangnya aktivitas perdagangan di Kabupaten Nagan Raya. Saat ini, pusat perdagangan terbesar terdapat di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, dan Jeuram, Kecamatan Suka Makmue.

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Nagan Raya yaitu selalu di atas 10 persen pada 2015-2019. Secara umum Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terus tumbuh lebih

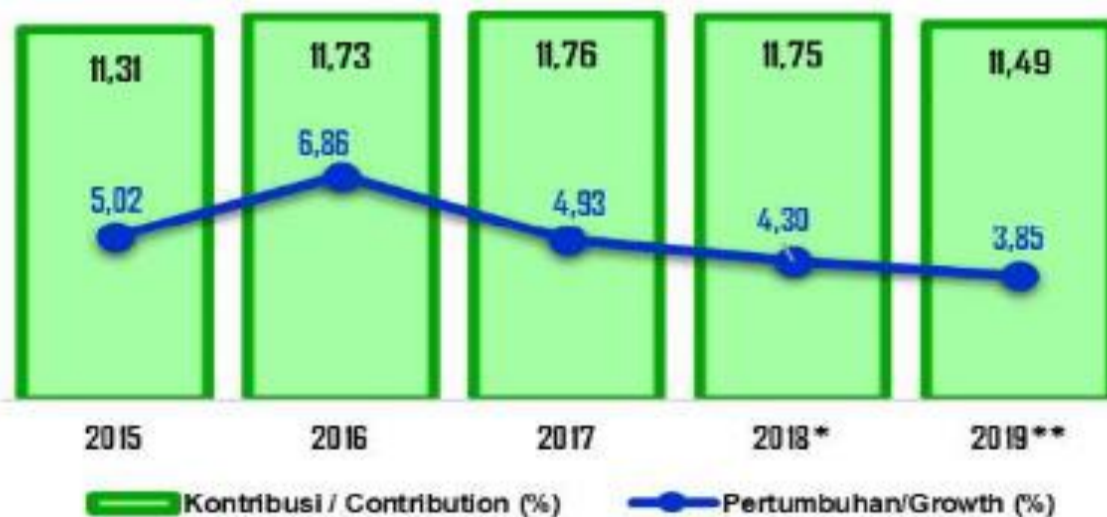
dari 3 persen walaupun berfluktuasi selama periode 2015-2019, Tahun 2015 katagori ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,02, tahun 2019 menjadi 3,85 %.

Gambar 2.26.
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen), Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Nagan Raya, 2020

Gambar 2.27.
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Nagan Raya, 2020

Secara umum Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terus tumbuh lebih dari 3 persen walaupun berfluktuasi selama periode 2015-2019, Tahun 2015 katagori ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,02, tahun 2019 menjadi 3,85%.

2.3.3.6 Perindustrian

Industri pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian . Sektor industri yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya hanya subsektor industri nonmigas. Kontribusinya sector industri semakin meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tahun 2015, kategori industri memiliki kontribusi sebesar 3.09 persen dan menurun menjadi 3,73 persen pada tahun 2019. Kenaikan kontribusi tersebut seiring dengan naiknya kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini karena sektor ini didominasi peranannya oleh jenis industri makanan dan minuman yang mengolah hasil-hasil dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan seperti industri pengolahan padi, industri CPO (Crude Palm Oil) dan industri lainnya yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA).

Gambar 2.28.
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019*



Sumber : BPS Nagan Raya, 2020

2.3.3.7 Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan 5 lokasi transmigrasi dari tahun 2017-2021. Tahun 2017, penempatan jumlah KK pada 5 lokasi transmigrasi tersebut sebanyak 538 KK. Dan meningkat pada tahun 2021 sebanyak 571 kepala keluarga dari 5 lokasi tersebut. Untuk lebih jelas lokasi transmigrasi dan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104.
Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Lokasi	Jumlah Kepala Keluarga				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	UPT.IV. Seneuam Gampong Sumber Bakti	330	330	330	352	339
2	UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk	30	30	30	30	30
3	UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep	85	85	85	90	85
4	UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie	68	68	86	90	90
5	UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango	25	25	25	25	27
Jumlah		538	538	556	587	571

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2022

Adapun jumlah Transmigrasi lokal Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2017-2021 ada 4 (empat) . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.105.
Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi Lokal Yang Menetap
Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

NO	NAMA TRANSMIGRASI LOKAL	2017	2018	2019	2020	2021
1	UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk	30	30	30	30	42
2	UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep	85	85	85	90	85
3	UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie	68	68	86	90	88
4	UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango	25	25	25	25	25
Jumlah		208	208	226	235	240

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2022

Adapun fasilitasi dilokasi transmigrasi tersebut belum memadai, sarana dan prasarana masih kurang, Status sekolah dasar belum Negeri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.106.
Fasilitas Sarana dan Prasarana Transmigrasi Lokal
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

NO	NAMA TRANSMIGRASI LOKAL	Kondisi Jalan	Jembatan	Gorong-Gorong	Listrik	Status Sekolah Dasar (Swasta)
1	UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk	Baik			ada	Tidak Ada
2	UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep	Kurang Baik		Rusak	ada	Swasta
3	UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie	Baik	Rusak	Rusak	22 KK belum ada	Swasta
4	UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango	Kurang Baik	Rusak	Rusak	ada	Swasta

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2022

2.3.3.8 Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017, produksi perikanan laut sebanyak 1.796,10 ton. Pada tahun 2021, produksi perikanan meningkat menjadi 2.570,52 ton. Namun pada tahun 2021, produksi perikanan laut menurun drastic menjadi 549,76 ton. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.107.
Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut
di Kabupaten Nagan Raya, 2017-2021

No	Tahun	Nilai Produksi	Produksi
1	2017	32.329.836.072	1.796,10
2	2018	45.493.425.215	2.401,57
3	2019	47.478.519.000	2.865,29
4	2020	36.277.598.000	2.570,52

No	Tahun	Nilai Produksi	Produksi
5	2021	9.345.920.000	549,76

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya, 2022

Potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih didominasi melalui perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap beberapa tahun terakhir dari tahun 2017 s/d 2020 selalu meningkat. Pada tahun 2017 sebesar .617,08 ton menjadi 3.430,57 ton pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 jumlah perikanan tangkap menurun menjadi 940,84 ton.

Sementara untuk produksi perikanan budidaya dari tahun 2017 s/d 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, produksi perikanan budidaya sebesar 640,21 ton menjadi 1.095,30 ton pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.108.
Produksi Perikanan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi ikan (ton)	3.257,29	4.498,03	4.804,49	4.641,87	2.036,14
2	Budidaya	640,21	1.245,49	1.056,50	1.211,30	1.095,30
3	Perikanan tangkap	2.617,08	3.252,54	3.747,99	3.430,57	940,84
4	Target Daerah (ton)	2.600	3.420,15	3.591,16	3.769	4.032
5	Capaian Produksi Ikan (%)	125,28	131,51	133,89	123,15	50,50

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2022

Beberapa kendala yang dihadapi dalam bidang kelautan dan perikanan sebagian besar masih merupakan usaha sambilan dan belum berorientasi bisnis, keterbatasan kemampuan sumberdaya nelayan dan aparaturnya. Upaya meningkatkan produksi tangkap laut terkendala sarana prasarana, iklim/cuaca yang cenderung tidak bersahabat, sehingga frekuensi (*trip*) nelayan melaut berkurang, keterbatasan permodalan usaha, dan belum berkembangnya pasca panen dan pengolahan produk.

Tabel 2.109.
Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

No	Jenis	Jumlah	
		2020	2021
1	Panjang garis pantai	74,4 km	74,4 km
2	Luas laut	446,4 km ²	446,4 km ²
3	Luas perairan umum	814 km ²	814 km ²
4	Jumlah pangkalan pendaratan ikan (PPI)	2 unit	2 unit
5	Jumlah tempat pendaratan ikan (TPI)	2 unit	2 unit
6	Jumlah kapal motor	125 unit	111 unit
7	Jumlah perahu motor	146 unit	146 unit
8	Jumlah nelayan tetap	538 orang	536 orang
9	Jumlah nelayan tidak tetap	2016 orang	2248 orang
10	Jumlah pemasar ikan	900 orang	900 orang
11	Jumlah kelompok pengolahan ikan	46 orang	46 orang
12	Jumlah unit pengolahan	46 unit	46 unit
13	Jumlah produksi ikan olahan	229,90	229,90
14	Jumlah pasar ikan / depo	7 unit	7 unit

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2022

Jumlah rumah tangga perikanan Budidaya sampai dengan tahun 2021, mencapai 945 rumah tangga. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, peningkatan masyarakat dalam berusaha di bidang budidaya perikanan cukup tinggi. Wilayah-wilayah dengan jumlah rumah tangga perikanan besar di Kecamatan Seunagan Timur, Beutong dan Darul Makmur.

Tabel 2.110.
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Darul Makmur	76	84	94	131	125
2	Tripa Makmur	38	41	41	49	49

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
3	Kuala	68	71	73	83	80
4	Kuala Pesisir	49	52	55	59	53
5	Tadu Raya	60	63	65	71	67
6	Beutong	155	157	161	161	148
7	Beutong Ateuh Banggalang	37	44	44	50	52
8	Seunagan	82	86	89	89	87
9	Suka Makmue	95	98	100	103	98
10	Seunagan Timur	167	171	173	181	186
JUMLAH		827	867	895	977	945

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2022

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan yang sangat drastis nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Nagan Raya. Nilai produksi tersebut terjadi di semua jenis budidaya perikanan, meliputi perairan umum, air tawar, dan air payau. Pola budidaya perikanan yang masih bersifat tradisional dan belum menggunakan teknologi yang modern turut menjadi pemicu belum berkembangnya aktivitas ekonomi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu, peran dunia usaha/swasta yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan sangat diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, ditujukan juga untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak serta berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.111.
Perkembangan Produksi Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan
Kabupaten Nagan Raya, 2017-2021

No	Budidaya Perikanan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perairan Umum	32.803.600.000	35.640.000.000,00	35.299.200.000,00	34.424.400.000,00	15.643.280.000,00
2	Air Tawar	14.724.830.000	33.592.311.000	30.177.500.000	34.453.500.000	26.287.200.000,00
3	Laut	32.329.836.072	45.493.425.215	47.478.519.000	36.277.598.000	9.345.920.000
Jumlah		79.858.266.072	114.725.736.215	112.955.219.000	105.155.498.000	51.276.400.000

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2022

Tabel 2.112.
Perkembangan Produksi (ton) Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020

No	Jenis Ikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lele	89,20	289,66	200,00	150,00	149
2	Mujair	61,07	-	-	-	-
3	Ikan Mas	88,85	13,91	268,5	205,3	190,3
4	Nila	389,00	941,92	588,00	856	756
5	Ikan Lainnya	12,09	1.245,49	1.056,50	1.211,30	1.095,30
Jumlah		640,21	1245,49	1056,50	2422,60	2190,60

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2022

Sektor perikanan dan kelautan berkontribusi positif dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya. Tahun 2021, tercatat nelayan tetap di Kabupaten Nagan Raya mencapai 536 orang jumlah nelayan. Sedangkan rumah tangga yang bermata pencaharian sebagai petani budidaya ikan di kolam mengalami peningkatan, dari 827 rumah tangga tahun 2017 menjadi 1.075 rumah tangga tahun 2021.

Dalam jangka menengah ke depan, pembinaan terhadap nelayan, petani ikan, petani tambak, dan pelaku pengolah ikan, diupayakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berlanjut. Selain itu, pelatihan teknis budidaya, pengolahan pasca panen, dan penyediaan fasilitas perikanan diupayakan terus meningkat sehingga berperan signifikan dalam perbaikan taraf hidup masyarakat nelayan.

Tabel 2.113.
Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Nelayan Tetap	Orang	538	538	538	538	536
Nelayan Tidak Tetap	Orang	1.311	1.311	1.311	2016	2248
Jumlah Petambak	RT	183	185	185	185	185

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Petani Ikan Kolam	RT	827	867	895	1,058	1,075
Jumlah Petani Ikan Perairan Umum	RT	120	140	155	170	200
Kelompok Nelayan	Kelompok	22	28	36	46	50
Jumlah Nelayan yang dibina	Orang	20	28	36	46	46
Jumlah Petambak yang dibina	Orang	10	15	18	20	20
Jumlah petani ikan yang dibina	Orang	905	930	1.050	550	551
Jumlah kelompok Budidaya Ikan	Kelompok	67	75	86	91	93
Jumlah kelompok pengolahan Ikan	Kelompok	40	41	46	46	46
Jumlah Kelompok pengolahan ikan yang dibina	Kelompok	19	19	19	46	46

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2022

Jumlah prasarana yang tersedia di sektor kelautan dan perikanan masih sangat minim bila dibandingkan dengan potensi perikanan Kabupaten Nagan Raya. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Nagan Raya ini belum didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kedepan, perlu pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, seperti pelabuhan perikanan, pengembangan balai benih ikan, pengembangan sarana tangkap serta motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan daya jelajah dan produktivitas nelayan.

Tabel 2.114.
Kondisi PPI, TPI, dan Pasar Kabupaten Nagan Raya, 2021

Kecamatan	Nama PPI	Nama Pasar	Lokasi
Darul Makmur	-	Pasar Alue Bilie Pasar Bukan Pasar Seumayam	Desa Alue Bilie Desa Lamie Desa Serbajadi
Tripa Makmur	TPI Babah Lueng TPI Kuala Tripa	-	-
Kuala	-	Desa Simang Peut	Desa Simang Peut

Kecamatan	Nama PPI	Nama Pasar	Lokasi
Kuala Pesisir	PPI Kuala Tuha	Pasar Langkak Pasar Jembes	Desa Padang Rubek
Tadu Raya	PPI Kuala Tadu	-	-
Beutong	-	Pasar Beutong	Ulee Jalan
Beutong Ateuh Banggalang	-	-	-
Seunagan	-	Pasar Jeuram	Cot Meugat
Suka Makmue	-	Pasar Lueng Baro	Lueng Baro
Seunagan Timur	-	Pasar Uteun Pulo	Desa Uteun Pulo

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya, 2022

Jumlah pembinaan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah telah diberikan dari tahun 2017 s/d 2022 dengan capaian yang selalu meningkat.

Tabel 2.115.
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan	20	28	36	46	50
2	Jumlah kelompok nelayan	22	28	36	46	50
Cakupan pembinaan kelompok nelayan (%)		90,91	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2022

Jumlah produksi ikan tangkap tahun 2012-2019 masih didominasi dari hasil kelompok nelayan. Hal ini menunjukkan efektivitas kelompok nelayan dalam produksi ikan tangkap, karena adanya pengembangan kapasitas dan bantuan permodalan bagi kelompok nelayan.

Tabel 2.116.
Cakupan Produksi Ikan Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah produksi ikan (ton) hasil kelompok nelayan	2.194,52	2.764,64	3.184,79	3.000,54	1.730,72
2	Jumlah produksi ikan (ton)	2.617,08	3.252,54	3.747,99	3.430,57	2.036,14
Cakupan produksi perikanan kelompok nelayan (%)		83,85	85,00	84,97	87,46	85,00

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2022

2.3.4 Penunjang Urusan

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Lingkup perencanaan pembangunan merupakan salah satu layanan urusan wajib yang paling penting dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Nagan Raya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan tugas umum ketatausahaan badan, melakukan koordinasi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan perekonomian, infrastruktur, pemerintahan, sumber daya manusia, keistimewaan, sosial budaya dan penelitian, evaluasi pengembangan pembangunan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan dari tugas pokok dan fungsi yaitu: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK); menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK); melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) berdasarkan rumusan hasil Musrenbang

Kabupaten; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

Capaian indikator perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya sudah dalam tahapan penyempurnaan penyelesaian dokumen. Seperti halnya dokumen RPJPD dan dokumen RTRW yang sudah ditetapkan dengan Qanun, dan pada tahun 2019 telah dilakukan revisi dokumen RPJPD dan tahun 2020 sedang proses pembuatan Qanun. dan untuk dokumen tahunan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3.4.2 Keuangan

Pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sejak tahun 2012-2019 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Keberhasilan membaiknya pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan WTP yang diberikan kepada Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2008-2019, dicapai berkat kerja keras semua pihak, baik unsur pemerintah maupun masyarakat.

Capaian indikator pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya telah Seperti Opini BPK terhadap laporan keuangan, persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan persentase belanja pendidikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan roda pemerintahan belum maksimal dikarenakan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna pengembangan *e-government* (sistem elektronik pemerintahan). Dalam hal ini proses kebijakan *simpeg* (administrasi kepegawaian elektronik) masih dalam pengembangan sehingga pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum optimal terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur memerlukan suatu mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Tatacara pemberian penghargaan dilakukan secara selektif dan terukur sesuai dengan kinerja dan produktivitas aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain, pemberian sanksi yang tegas kepada aparatur pemerintah yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sehingga memberi efek jera kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya. Tatacara pemberian penghargaan dan sanksi kepada aparatur diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Kualitas pelayanan publik belum maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangkan menuntut haknya masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, seperti diantaranya; kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan perlindungan. Salah satu wujud dari upaya pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan publik adalah terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang yang merupakan target yang harus dicapai oleh Nasional dan Pemerintah Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, mutasi, dan bidang umum kepegawaian;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase

implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

2.3.4.5. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan memberikan informasi seperti persentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi maupun keuangan.

2.3.4.6. Sekretariat Dewan

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRK Nagaland Raya; Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRK Nagaland Raya untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMK Nagaland Raya maupun RKPK Nagaland Raya; dan Terintegrasi Program-Program DPRK Nagaland Raya untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pembentukan Perda dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRK Nagaland Raya.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

- Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita Kabupaten Nagaland Raya dari tahun 2015 sampai 2019 terus meningkat. Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita tahun 2019 telah mencapai 20.07 juta rupiah. Nilai ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya mencapai 16.83 juta rupiah.

2.4.1.1. Pengeluaran Rata-Rata Rumah Tangga per Kapita

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita digunakan untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi yang dilakukan rumah tangga maupun

perorangan di suatu wilayah. Konsumsi rumah tangga perkapita dapat menjadi ukuran mengenai pendapatan penduduk. Semakin tinggi pengeluaran/konsumsi rumah tangga per kapita maka semakin tinggi pendapatan penduduk tersebut.

Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2015 sampai 2019 terus meningkat. Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita tahun 2019 telah mencapai 20.07 juta rupiah. Nilai ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya mencapai 16.83 juta rupiah.

2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Selama lima tahun terakhir, pola konsumsi masyarakat Kabupaten Nagan Raya untuk makanan cenderung mengalami penurunan, meskipun proporsinya masih diatas 50 persen. Selanjutnya data untuk rata-rata pengeluaran sebulan untuk tahun 2017 sebesar 359.118, untuk tahun 2018 sebesar 376.027 , dan pada tahun 2019 sebesar 398.667.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor pada suatu daerah atau antar daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur diantaranya dapat dilihat dari fasilitas perhubungan, pengairan/irigasi, air bersih serta energi dan telekomunikasi.

Aktivitas ekonomi yang kian berkembang membutuhkan jasa pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien. Kabupaten Nagan Raya telah memiliki Bandar Udara Cut Nyak Dhien yang terletak di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir. Bandar udara ini dapat disinggahi pesawat sejenis Fokker, dan diupayakan dalam jangka panjang mampu melayani pesawat berbadan besar sesuai kondisi landasan dan prasarana pendukungnya.

Di wilayah barat-selatan Aceh, Bandar Udara Cut Nyak Dhien tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya saja, namun juga masyarakat dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat. Jasa pelayanan transportasi udara tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar daerah, atau sebaliknya.

Aktivitas bongkar dan muat barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien cenderung berfluktuatif. Untuk tahun 2018 sampai 2020 barang yang dibongkar muat bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.117.
Jumlah Bongkar Muat Barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien
Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Barang	Bagasi	Barang	Bagasi	Barang	Bagasi	Barang	Bagasi
1	Muat	3,493	118,209	11,651	68,85	10,052	16,44	-	3,868
2	Bongkar	1,767	94,496	2,967	50,87	574	9,519	-	4,638

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Adapun jumlah penumpang untuk tahun 2018 sampai 2021 melalui Bandara Cut Nyak Dhien bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.118.
Jumlah Penumpang melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien
Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penumpang Datang	19.601	18.725	4.733	854
2	Jumlah Penumpang Berangkat	182.388	18.500	4.297	862

Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Kab. Nagan Raya 2022

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor terkait potensi dan peluang investasi yang dimiliki daerah serta kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan dalam proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Adapun jenis-jenis perijinan yang dilayani antara lain: a) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan); c) IUI (Izin Usaha Industri); d) TDI (Tanda Daftar Industri); e) IMB (Izin Mendirikan Bangunan); dan e) HO (Izin Gangguan).

Saat ini pelayanan perijinan di Kabupaten Nagas Raya sudah berada pada satu atap layanan proses administrasi pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan. Waktu proses pelayanan sebagaimana tertuang dalam SOP yang telah ditetapkan pada peraturan Bupati Nagas Raya Nomor 065/252/2015 tanggal 1 Nopember 2015.

Tabel 2.119.
Lama Proses Pelayanan, Jumlah Persyaratan (Dokumen), dan Biaya Perijinan Kabupaten Nagas Raya

No.	Jenis Perizinan	Jenis Data	Keterangan
1	SIUP	Waktu proses pelayanan (hari)	7
		Jumlah persyaratan (berkas)	1
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
2	TDP	Waktu proses pelayanan (hari)	2
		Jumlah persyaratan (berkas)	4
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
3.	IUI	Waktu proses pelayanan (hari)	3
		Jumlah persyaratan (berkas)	9
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
4.	TDI	Waktu proses pelayanan (hari)	12
		Jumlah persyaratan (berkas)	6
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
5.	IMB	Waktu proses pelayanan (hari)	14
		Jumlah persyaratan (berkas)	14
		Biaya mengurus persyaratan	225.000xkoefesien(sesuai Qanun)
6.	HO	Waktu proses pelayanan (hari)	7
		Jumlah persyaratan (berkas)	7
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Nagas Raya Tahun 2020

Pajak daerah Kabupaten Nagan Raya meliputi pajak hotel , pajak restoran (Rumah Makan dan Katering); pajak hiburan (Pagelaran Kesenian/Musik/Tari, Pameran, Balap Kendaraan Bermotor); pajak reklame (reklame papan, kain, melekat/stiker, baliho dan billboard); pajak penerangan jalan PLN; pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan.

Hasil Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum dan jasa usaha. Untuk retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum ;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;

Sedangkan untuk retribusi jasa usaha terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
- c. Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan Kakus;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Penjualan Produksi Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu (seperti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan , Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Penerbitan sertifikat Kesempurnaan dan Kebangsaan (Pas Kecil).

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi bidang penanaman modal perlu terus dilakukan. Beberapa Perda yang mendukung iklim usaha adalah :

- 1) Qanun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- 2) Qanun Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Peternakan Rakyat dan Perusahaan peternakan;
- 3) Qanun Nomor 17 Tahun 2007 Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah.

Beberapa faktor penyebab belum optimal investasi di Nagasari antara lain adalah:

- 1) belum optimalnya promosi investasi;
- 2) lemahnya dukungan regulasi investasi dan
- 3) belum adanya insentif, kemudahan investasi dan jaminan keamanan bagi investor.
- 4) Lahan Terbatas untuk sektor perkebunan.

Karena itu, Pemerintah harus melakukan beberapa hal: 1) peningkatan promosi investasi; 2) menyediakan regulasi, insentif, kemudahan dan jaminan keamanan bagi investor.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang kreatif, terampil, disiplin, produktif, dan profesional serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat salah satunya dari tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

- a. Kualitas Tenaga Kerja (Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi (S1, S2, S3))

Penduduk berpendidikan Sarjana atau S1/S2/S3 2016 sebesar 4,92 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S1, 0,26 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S2 dan 0,00 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S3.

- b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Angka Beban Tanggungan atau *Dependency Ratio* merupakan suatu ukuran untuk mengetahui produktivitas penduduk. Angka Beban Tanggungan merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang berumur tidak produktif (belum produktif/umur di bawah 15 tahun dan tidak produktif lagi/umur 65 tahun ke atas) dengan yang berumur produktif (umur 15–64 tahun). Angka ini

dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Adapun persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Tanggungan penduduk Kabupaten Nagari Raya pada tahun 2016 sebesar 50,96. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Nagari Raya yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung paling kurang 56 orang yang tidak produktif. Kondisi ini mengalami perubahan yang sangat drastis dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, rata-rata dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 69 penduduk tidak produktif. Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (<15 tahun) dan naiknya proporsi penduduk produktif.

Meningkatnya proporsi penduduk produktif dibandingkan proporsi penduduk tua serta penurunan penduduk usia remaja, berimplikasi positif terhadap perubahan angka beban tanggungan secara keseluruhan. Dengan kata lain, struktur umur penduduk Kabupaten Nagari Raya berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (di bawah 15 tahun) semakin berkurang dari 30 persen, tetapi proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih kurang dari 5 persen.

Tabel 2.120.
Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan
Kabupaten Nagari Raya, Tahun 2017-2019 (%)

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65 tahun +	Angka Ketergantungan
2017	29,13	28,93	29,05	21,13
2018	66,34	66,44	67,30	43,29
2019	4,51	4,62	3,63	47,55

Sumber : BPS Kab. Nagari Raya Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa Angka ketergantungan bisa didapat dari penjumlahan kelompok umur < 0-14 tahun + < 15-64 tahun / 65 tahun+, maka angka ketergantungan untuk tahun 2017 adalah 21,13 %, tahun 2018 adalah 43,29 % dan tahun 2019 adalah 47,55 %

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Pada RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk Tahun 2017-2022. Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJMK Nagan Raya sampai tahun 2021, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.121.
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2022

No	Indikator	Kinerja Standar (satuan)	Kondisi Awal (2017)	Target					Realisasi				CAPAIAN	
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021		
1	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	Sudah Tercapai
2	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	Sudah Tercapai
3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,32	2,891	blm ada	2,82	2,89	2,94	2,891	2,00	baik	belum ada penilaian		Tidak Tercapai
4	Nilai LAKIP	Nilai	C	C	C	C	CC	B	C	C	C	Belum diproses Kemempnan		Sudah Tercapai
5	Jumlah ZIS yang terhimpun	Rp. Milyar	7545	8980	6150	6916	6920	6920	8980	6,15	7,32	7,928		Sudah Tercapai
6	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam	%	50	100	100	70	80	80	100	100	70	80		Sudah Tercapai
7	Angka Kemiskinan	%	19,34	18,97	17,97	17,70	17,00	16,50	18,97	17,97	17,7	18,23		Tidak Tercapai
8	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	29	0	127	231	231	331	0	127	227	0		Sudah Tercapai
9	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	%	46,65	NA	NA	3,87	4,89	5,8	NA	NA	2,61	0,05		Tidak Tercapai
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,11	5,91	5,35	5,11	5,0	4,2	5,91	5,35	5,11	-		Tidak Tercapai
11	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Sudah Tercapai
12	Persentase akses sanitasi	%	42	52,00	67,64	67,64	73,44	80,04	52,00	67,64	67,64	73,48		Sudah Tercapai
13	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	20	60	80	60	80	80	60	80	90	90		Sudah Tercapai
14	Prevalansi Stunting	%	26,2	37,7	26,48	17,3	16,5	15,5	37,7	26,48	26	17,3		Tidak Tercapai
15	Kabupaten Layak Anak	level	-	-	-	-	pratama	pratama	-	-	0	0		Tidak Tercapai
16	Pertumbuhan PDRB	%	3,95	4,29	6,77	3,54	4,06	4,58	4,29	6,77	3,54	-		Tidak Tercapai
17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Index	67,78	68,15	69,11	69,18	69,80	70,00	68,15	69,11	69,18	69,31		Sudah Tercapai
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	6,50	9,89	7,79	7,79	7,80	7,80	9,89	7,79	8,93	4,44		Tidak Tercapai

Sumber : Bappeda Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Tabel 2.122.
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					Realisasi				CAPAIAN	SKPK
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT														
1	PDRB per kapita ADHB	Rp (Juta)	39,07	42,14	44,62	45,01	46,08	47,10	42,14	44,62	45,12	-	Sudah Tercapai	BPS
2	Indek Gini Ratio	%	0,231	0,284	0,252	0,275	0,233	0,212	0,284	0,252	0,275	-	Sudah Tercapai	BPS
3	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	31.060	31.060	29.930	29.611	28.440	27.604	31.060	29.930	29.990	30.710	Tidak Tercapai	BPS
4	Angka Melek Huruf	%	93,41	96,25	98,00	97,50	98,00	98,50	96,25	98,00	97,58	98,00	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
5	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,21	8,50	8,68	8,80	9,00	8,21	8,50	8,68	8,96	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,09	14,44	14,56	15,00	15,25	15,50	14,11	14,12	14,13	14,14	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
7	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,70	68,89	69,14	69,05	70,00	70,20	68,89	69,14	69,22	-	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
8	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	37,34	36,48	24,46	24,46	24,46	24,46	36,48	24,46	-	-	Tidak ada capaian	Dinas Sosial
9	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	10,14	8,19	7,92	7,98	8,01	8,05	8,19	7,92	7,86	-	Sudah Tercapai	BPS
10	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	3,53	3,87	3,73	3,85	3,90	4,00	3,87	3,73	3,53	-	Sudah Tercapai	BPS
11	Kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB	%	0,07	0,09	0,08	0,90	0,10	0,12	0,09	0,08	0,08	-	Sudah Tercapai	BPS
12	Kontribusi sektor konstruksi terhadap PDRB	%	8,86	9,86	10,60	11,00	12,00	13,00	9,86	10,60	11,72	-	Sudah Tercapai	BPS
13	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	11,69	11,75	11,49	11,67	12,05	12,57	11,75	11,49	10,78	-	Tidak Tercapai	BPS
14	Kontribusi sektor Transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	%	3,79	3,69	3,61	3,75	3,95	4,04	3,69	3,61	3,11	-	Sudah Tercapai	BPS
15	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	%	0,359	0,420	0,430	0,55	0,65	0,77	0,420	0,430	0,39	-	Sudah Tercapai	BPS
16	Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB	%	2,26	2,15	2,13	3,50	2,75	3,05	2,15	2,13	2,19	-	Sudah Tercapai	BPS
17	Kontribusi sektor jasa keuangan dan informasi terhadap PDRB	%	1,34	1,52	1,52	1,68	1,75	2,05	1,52	1,52	1,52	-	Sudah Tercapai	BPS
18	Kontribusi sektor Real Estat terhadap PDRB	%	2,41	2,54	2,53	2,75	2,89	3,07	2,54	2,53	2,56	-	Sudah Tercapai	BPS
19	Kontribusi sektor jasa perusahaan terhadap PDRB	%	0,25	0,26	0,27	0,38	0,58	0,75	0,26	0,27	0,26	-	Sudah Tercapai	BPS
20	Kontribusi sektor adminitrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial terhadap PDRB	%	5,22	5,61	5,62	5,20	5,30	5,50	5,61	5,62	5,49	-	Sudah Tercapai	BPS
21	Kontribusi sektor pendidikan terhadap PDRB	%	1,70	1,86	2,04	2,20	2,30	2,40	1,86	2,04	2,20	-	Sudah Tercapai	BPS
22	Kontribusi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial terhadap PDRB	%	1,77	1,84	1,92	2,10	2,20	2,50	1,84	1,92	2,01	-	Sudah Tercapai	BPS
23	Kontribusi sektor jasa lainnya terhadap PDRB	%	0,51	0,53	0,93	1,50	1,75	1,85	0,53	0,93	0,54	-	Tidak Tercapai	BPS
24	Produksi sektor pertanian padi dan palawija	Ton	190.543	210000	190.300	190.000	195.000	197.000	210000	190.300	180.300	181.200	Tidak Tercapai	DISTAN NAK
25	Produksi pertanian padi	Ton	170.151	180.278	130.582	155.000	160.000	165.000	180.278	130.582	127.500	127.700	Tidak Tercapai	DISTAN NAK
26	Produksi sektor perkebunan	Ton	128.064	124.551	5.931,97	71.643	137.353	203.064	124.551	5.931,97	526.222	260.742	Sudah Tercapai	DISBUN
26	Produksi perkebunan sawit	Ton	316.164	117.819	529.137,25	564.730	600.325	635.919	117.819	529.137,25	520.272	547.888	Tidak Tercapai	DISBUN
ASPEK DAYA SAING DAERAH														
1	Rasio ketergantungan	Indeks	50,96	50,50	50,31	50,59	50,86	51,14	50,50	50,31	50,11	-	Tidak Tercapai	BPS
ASPEK PELAYANAN UMUM														
Layanan Urusan Wajib Dasar														
1	Pendidikan													



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					Realisasi				CAPAIAN	SKPK
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	23,83	25,61	25,86	40,50	50,50	65,00	25,61	25,86	39,54	42,17	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
1.2.	Angka partisipasi kasar	%												
	APK SD/MI/Paket A	%	109,47	79,71	78,30	95,00	96,00	97,00	79,71	78,30	101,53	100,00	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
	APK SMP/MTs/Paket B	%	106,90	98,27	91,81	83,00	84,00	85,00	98,27	91,81	100,39	100,00	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
	APK SMA/SMK/	%	86,02	88,35	73,75	90,00	91,00	92,00	88,35	73,75	95,49	96,26	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan													Dinas Pendidikan
	Tamat SD Sederajat	%	26,70	99	99	100	100	100	99	99	98,77	98,83	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
	Tamat SLTP sederajat	%	16,87	90	90,56	100	100	100	90	90,56	93,56	95,25	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
	Diploma I/II/III	%	3,33	3,50	4,00	4,50	5,50	6,00	3,50	4,00	4,50	5,25	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
	Diploma IV/S1	%	3,72	45	50	50	60	65	45	50	50	60	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
	S2/S3	%	0,59	1,50	2,00	2,50	3,50	4,00	1,50	2,00	2,50	3,00	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
1.4.	Angka Partisipasi Murni													Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,73	99,71	81,88	95	96	97	99,71	81,88	95,27	89,74	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88,83	91,82	53,67	83	84	85	91,82	53,67	77,24	70,04	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
1.5.	Angka partisipasi sekolah													Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,36	0,27	0,24	95	96	97	0,27	0,24	96	97	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99,11	1,55	1,45	83	84	85	1,55	1,45	84	85	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
1.6	Angka Melanjutkan (AM):													Dinas Pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	98,03	97,50	85,50	88,50	90,50	98,03	97,50	98,12	98,73	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	91,15	96,54	90,10	84,50	85,50	90	96,54	90,10	92,13	92,46	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
1.7	Fasilitas Pendidikan:													Dinas Pendidikan
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	85,70	95,55	97,15	97,50	98	98,79	95,55	97,15	97,89	98,12	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	87,60	94,31	98,20	98,30	98,50	98,77	94,31	98,20	98,53	98,72	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	69,82	71,05	73,02	75,50	78,50	80,73	71,05	73,02	75,61	76,32	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
1.9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio Index	33,71	35,10	35,71	55,50	65,50	70,22	35,10	35,71	54,87	61,55	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
1.10	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	75,66	66,18	67,18	74,50	73,50	80	66,18	67,18	73,50	74,50	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
1.11	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio Index	81,63	54,31	55,39	81,00	85,00	87	54,31	55,39	64,38	61,27	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
1.12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio Index	71,18	51,15	49,00	70,50	75,50	80	51,15	49,00	69,70	72,64	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
1.13	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio Index	69,96	43,57	41,32	71	75	80	43,57	41,32	62,81	56,32	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
1.14	Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%	37,51	94,33	97,74	93,50	94,50	96	94,33	97,74	98,25	98,72	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
1.15	Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	53,16	67,44	79,88	81,5	83,5	86,5	67,44	79,88	81,50	83,50	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan													
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	5,18	11,00	7,20	7,50	7,30	7,00	11,00	7,20	9,19	2,75	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 Kelahiran	4,85	7,30	6,28	N/A	6,12	6,00	7,30	6,28	11,30	18,87	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					Realisasi				CAPAIAN	SKPK
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	36,90	12,00	8,94	36,37	36,12	35,97	12,00	8,94	1,40	19,60	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	13,86	10,00	12,58	12,59	11,98	11,79	10,00	12,58	13,08	13,09	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/10000 Kelahiran	99,68	28,40	331,02	N/A	150,00	140,00	28,40	331,02	141,44	438,91	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	/1000 Balita	19,76	18,60	17,31	N/A	19,00	19,50	18,60	17,31	13,97	14,80	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk													
	Puskesmas	/1000 Penduduk	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
	Poliklinik	/1000 Penduduk	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
	Pustu	/1000 Penduduk	0,30	0,28	0,28	0,31	0,31	0,31	0,28	0,28	0,29	0,29	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,40	0,41	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
	Dokter Umum	/100.000 Penduduk	0,24	0,35	0,29	0,24	0,29	0,29	0,35	0,29	0,23	0,23	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
	Dokter Spesialis	/100.000 Penduduk	0,03	0,06	0,05	0,28	0,83	0,84	0,06	0,05	0,11	0,11	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
	Dokter Gigi	/100.000 Penduduk	0,02	0,36	0,08	0,18	0,53	0,54	0,36	0,08	0,05	0,05	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	3,84	3,87	4,13	4,39	4,89	5,39	3,87	4,13	0,51	0,68	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	52,25	45,63	80,00	53,01	53,68	53,76	45,63	80,00	75,00	43,00	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	93,11	82,79	85,00	87,00	88,00	90,00	82,79	85,00	80,00	91,00	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	77,33	59,90	40,99	78,46	79,44	79,56	59,90	40,99	32,8	23,42	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
2.15.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	91,62	80,30	74,42	92,95	94,12	94,26	80,30	74,42	60	51,61	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.16.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	18,76	36,42	47,38	19,03	19,27	19,3	36,42	47,38	27,12	25,8	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
2.17.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	49,03	89,94	51,15	49,74	50,36	50,44	89,94	51,15	37,2	39	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.18.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	102,19	140,00	160,20	91,08	86,65	85,96	140,00	160,20	97,5	100	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.19.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	2,56	3,04	2,99	2,25	2,2	2,04	3,04	2,99	2,35	2,30	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.20.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	63,38	89,84	100,00	64,3	65,1	65,2	89,84	100,00	37,2	39	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.21.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	68,33	85,65	92,82	69,32	70,19	70,29	85,65	92,82	87,3	45,9	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.22.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100,00	100	100	100	100	100,00	100	100	100	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
2.23.	Angka kejadian Malaria	/100.000 penduduk	2,39	1,82	0,60	1,98	1,81	1,33	1,82	0,60	0	0	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
2.24.	Cakupan kunjungan bayi	%	84,73	84,10	117,61	86,82	87,91	88,04	84,10	117,61	95,30	103,14	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
2.25.	Cakupan pembantu puskesmas	%	21,17	21,17	21,17	21,17	21,18	21,19	21,17	21,17	0,22	0,22	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					Realisasi				CAPAIAN	SKPK
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.6.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,50	81,18	82,05	95,81	97,01	97,15	81,18	82,05	79,03	93	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.2.7.	Cakupan pelayanan nifas	%	92,12	82,03	99,80	94,39	95,57	95,71	82,03	99,80	79	90	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.2.8.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	71,27	79,74	100,00	76,71	78,43	78,55	79,74	100,00	9,80	20,45	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.2.9.	Cakupan pelayanan anak balita	%	81,68	91,44	107,00	87,91	89,89	90,02	91,44	107,00	70,39	68,93	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.3.0.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	91,13	53,72	95,2	95,23	96,42	96,56	53,72	95,2	73	78	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
2.3.1.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
2.3.2.	Persentase balita gizi buruk	%	0,07	0,10	0,10	0,06	0,07	0,06	0,10	0,10	0,03	0,06	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
3.1	Pekerjaan Umum:													PU PR
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	243,54	221,93 ₂	242,56	261,56	286,56	311,56	221,93 ₂	242,56	274,60 ₉	246,12 ₄	Sudah Tercapai	PU PR
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio Index	0,057	0,072	0,163	0,173	0,131	0,142	0,072	0,163	0,163	0,146	Sudah Tercapai	PU PR
3.1.3.	Jumlah sawah yang terlayani irigasi	Ha	17.597	9,051	9,051	5.700	5.700	5.700	9,051	9,051	5,700	5,700	Tidak Tercapai	PUPR/ Distanna k
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													
4.1	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	607	0	709	709	809	909	0	709	1069	1113	Sudah Tercapai	PERKIM/ Baitul Mal
4.2	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	29	0	127	231	231	331	0	127	227	327	Sudah Tercapai	PERKIM
4.3	Persentase akses air minum Perpipaan	%	42	52,00	67,64	72,24	76,74	81,04	52,00	67,64	72,24	86,29	Sudah Tercapai	PERKIM
4.4	Persentase akses air minum non Perpipaan	%	0	0	10	10	10	10	0	10	10	10	Sudah Tercapai	PERKIM
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat													
5.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	98,75	98,85	98,85	99,10	99,94	99,49	99,99	99,49	99,00	99,50	Sudah Tercapai	SATPOL PP dan WH
5.2	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	90	90	90	90	90	90,10	90,20	Tidak Tercapai	SATPOL PP dan WH
6	Sosial													DINSOS
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	24,83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			16,95	17,85	Tidak Tercapai	DINSOS
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	23,74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					belum ada capaian	DINSOS
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	23,74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			2,61	0,05	belum ada capaian	DINSOS
6.4.	Adanya regulasi santunan kematian	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Sudah Tercapai	Bagian Keisra
Layanan Urusan Wajib Non Dasar														
1	Tenaga Kerja													
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	5,00	10,00	13,00	4,00	3,00	3,00	10,00	13,00	10,00	5,00	Sudah Tercapai	Disnakertrans
1.2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	7.864	7.674	7.876	3818	8582	8.660	7.674	7.876	7.491	7.439	Tidak Tercapai	Disnakertrans
1.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	20,18	20,18	17,24	19,19	19,44	19,69	20,18	17,24	19,19	19,44	Sudah Tercapai	Disnakertrans
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	52,27	52,30	52,35	52,00	52,35	52,36	52,30	52,35			belum ada capaian	Bag. Pemerintahan
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16,00	16,00	16,50	16,00	16,00	16,00	16,00	16,50	16,50	16,50	Sudah Tercapai	DPMGP4
2.3	Rasio KDRT	%	N/A	0,30	0,20	0,36	0,36	0,36	0,30	0,20	0,007	0,10	Sudah Tercapai	DPMGP4
3	Pangan													



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					Realisasi				CAPAIAN	SKPK
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1.	Ketersediaan pangan utama	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sudah Tercapai	DKPP
4	Lingkungan Hidup													
4.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	Ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Tidak Tercapai	DLH
4.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/tidak ada	Tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Tidak Tercapai	DLH
4.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada/tidak ada	Tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Tidak Tercapai	DLH
4.4	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	7,80	10	11	12	19	27	10	11	13	14	Sudah Tercapai	DLH
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	73,80	89,31	89,91	90,67	91,70	92,60	89,31	89,91	90,56	93,79	Sudah Tercapai	Disdukcapil
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	88,51	81,13	81,13	91,95	93,87	95,20	81,13	81,13	88,74	89,37	Sudah Tercapai	Disdukcapil
5.3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah Tercapai	Disdukcapil
5.4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	85,28	89,31	89,91	90,95	92,45	94,16	89,31	89,91	90,56	93,79	Sudah Tercapai	Disdukcapil
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
6.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sudah Tercapai	DPMGP4
6.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	Sudah Tercapai	DPMGP4
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	Sudah Tercapai	DPMGP4
6.4	Persentase LSM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sudah Tercapai	DPMGP4
6.5	Persentase LPM Berprestasi	%	NA	NA	NA	100	100	100	NA	NA	0	0	Tidak Tercapai	DPMGP4
6.6	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100	100	Sudah Tercapai	DPMGP4
6.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sudah Tercapai	DPMGP4
6.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	NA	NA	NA	100	100	100	NA	NA	-	-	Tidak Tercapai	DPMGP4
6.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	NA	NA	NA	100	100	100	NA	NA	-	-	Tidak Tercapai	DPMGP4
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,05	2,15	2,17	2,15	2,10	2,00	2,15	2,17	2,77	2,77	Sudah Tercapai	DPMGP4
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	0,47	2	2,5	2,5	2	2	2	2,5	2,1	2,1	Sudah Tercapai	DPMGP4
7.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	Sudah Tercapai	DPMGP4
7.4	Rasio Akseptor KB	%	90	86	83	83	85	85	86	83	69	69	Perlu Kerja Keras	DPMGP4
7.5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	%	81,91	86,0	83,0	83,0	85,0	90,0	86,0	83,0	69	69	Sudah Tercapai	DPMGP4
7.6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	/1.000 perempuan	0,89	0,87	0,8	0,83	0,82	0,8	0,87	0,8	0,87	0,87	Sudah Tercapai	DPMGP4
7.7	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sudah Tercapai	DPMGP4
8	Perhubungan													
8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum													Dishub
	Angkutan Darat	Trayek	3	3	3	6	7	8	3	3	5	7	Sudah Tercapai	Dishub
	Angkutan Udara	Frek	1.298	1271	962	1463	1518	1573	1271	962	242	36	Tidak Tercapai	Dishub
8.1	Rasio ijin trayek	Indeks	1,8	1,8	2	3,5	4	4,5	1,8	2	2,5	0	Tidak Tercapai	Dishub
8.2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1,265	420	518	669	724	779	420	518	375	-	Tidak Tercapai	Dishub
8.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis													Dishub



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					Realisasi				CAPAIAN	SKPK
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021		
1	Jumlah Bandar Udara	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sudah Tercapai	Dishub
	Jumlah Terminal Tipe B	Unit	1	1	4	1	1	1	1	4	0	0	Tidak Tercapai	Dishub
	Jumlah Terminal Tipe C	Unit	4	1	4	0	0	0	1	4	0	0	Sudah Tercapai	Dishub
8.4	Persentase layanan angkutan darat	%	7,08	7,13	7,93	9,77	10,61	11,41	7,13	7,93	9,72	0	Sudah Tercapai	Dishub
8.5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	8,61	6,77	7,95	11,01	11,81	12,61	6,77	7,95	5,93	-	Tidak Tercapai	Dishub
8.6	Pemasangan Rambu-rambu	%	29	33	37	44	49	54	33	37	12,5	12	Tidak Tercapai	Dishub
8.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio Index	76,98	83,00	87,67	82,98	84,98	86,98	83,00	87,67	81,95	83,95	Tidak Tercapai	Dishub
8.8	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum													Dishub
	Angkutan Udara	Orang	26.640	37.894	37.225	26.747	26.792	26.846	37.894	37.225	10.651	1.716	Tidak Tercapai	Dishub
8.9	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun													Dishub
	Bandara	Kg	159.840	217.965	134.338	160.480	160.753	161.074	217.965	134.338	36.539	8.501	Tidak Tercapai	Dishub
9	Komunikasi dan Informatika													
9.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0,40	N/A	N/A	0,44	0,44	0,51	N/A	N/A	0,51	0,51	Sudah Tercapai	DISKOMI NFOTIK
9.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	80	85	85	85	85	95	85	85	95	95	Sudah Tercapai	DISKOMI NFOTIK
9.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	74	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Sudah Tercapai	DISKOMI NFOTIK
10	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah													
10.1	Persentase koperasi aktif	%	43,68	50,30	73,88	75,00	80,00	90,00	50,30	73,88	65,22	66,43	Sudah Tercapai	Disperin dagkop dan UKM
10.2	Persentase koperasi tidak aktif	%	56,32	49,70	26,12	25,00	20,00	10,00	49,70	26,12	34,78	33,57	Sudah Tercapai	Disperin dagkop dan UKM
11	Penanaman Modal													
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Inves tor	5,33	4	2	6	6	6	4	2	3	7	Tidak Tercapai	DPMPPTS P
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milya r)	500,00	215	207	218	219	240	215	207	1,625	21,384	Tidak Tercapai	DPMPPTS P
11.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milya r)	148,52	-52,08	-14,16	14,16	52,08	57,29	-52,08	-14,16	207	821	Tidak Tercapai	DPMPPTS P
12	Kepemudaan dan Olah Raga													
12.1	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	Organ isasi	10	16	28	32	36	40	16	28	32	36	Sudah Tercapai	Disbudpa rpora
12.2	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sudah Tercapai	Disbudpa rpora
12.3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	84,00	88,30	89,98	90,48	92,28	94,08	88,30	89,98	90,48	92,28	Sudah Tercapai	Disbudpa rpora
12.4	Cakupan pembinaan atlet muda	%	30,45	32,90	45,80	50,38	55,42	60,96	32,90	45,80	50,38	55,42	Sudah Tercapai	Disbudpa rpora
12.5	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	2	17	19	22	25	28	17	19	22	25	Sudah Tercapai	Disbudpa rpora
12.6	Jumlah prestasi olahraga	Prest asi	5	17	22	8	10	11	17	22	8	10	Sudah Tercapai	Disbudpa rpora
13	Statistik													
13.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ti dak	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Sudah Tercapai	BPS
13.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/ti dak	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Sudah Tercapai	BPS
13.3	Buku "PDRB"	Ada/ti dak	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Sudah Tercapai	BPS
14	Persandian													
14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	N/A	50	50	50	50	50	50	50	70	70	Sudah Tercapai	Diskomin fotik
15	Kebudayaan													
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festiv al	2	2	1	0	3	2	2	1	0	3	Sudah Tercapai	Disbudpa rpora
15.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	3	3	4	0	1	2	3	4	0	1	Sudah Tercapai	Disbudpa rpora
15.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	Sudah Tercapai	Disbudpa rpora
16	Perpustakaan													
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1781	1210	925	500	900	1100	1210	925	978	3557	Sudah Tercapai	Dinas Perpusta kaan dan Arsip



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					Realisasi				CAPAIAN	SKPK
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	koleksi	N/A	31.456	32.469	32.598	34.430	34.630	31.456	32.469	32.598	34.430	Sudah Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Arsip
16.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1.000 Penduduk	%	0,42	0,42	0,42	1	1	0,42	0,42	0,42	1	Sudah Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Arsip
16.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	1.597	1,023	1,023	700	600	700	1,023	1,023	700	800	Sudah Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Arsip
16.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	2.877	7.095	7.595	7.724	8.670	8.870	7.095	7.595	7.724	9.121	Sudah Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Arsip
16.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	2	2	2	2	2	2	2	3	5	Sudah Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17 Kearsipan														
17.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	2,22	1,55	2,62	2,70	3,00	5,00	1,55	2,62	2,27	4,54	Sudah Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	Sudah Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Layanan Urusan Pilihan														
1 Pariwisata														
1.1.	Kunjungan wisata	%	90,05	90,70	93,10	0,00	90,06	87,06	90,70	93,10	0,00	90,06	Sudah Tercapai	Disbudparpora
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	15,00	16,06	16,21	0,00	14,63	15,21	16,06	16,21	0,00	14,63	Sudah Tercapai	Disbudparpora
2, Pertanian														
2.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	6.858	7.250	7.300	9.500	9.700	9.800	7.250	7.300	7.350	7.400	Tidak Tercapai	Distanna k
2.2.	Cakupan bina kelompok petani	%	93,63	95,50	94,25	97,00	100,00	100,00	95,50	94,25	96,30	96,45	Akan dicapai	Distanna k
2.3.	Jumlah Produksi Gabah/Padi	Ton	170,151	180,278	130,582	155,000	160,000	165,000	180,278	130,582	121,20	122,20	Tidak Tercapai	Distanna k
3 Energi dan Sumber Daya Mineral														
3.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	93,00	95,78	96,99	98,57	99,02	100	95,78	96,99	98,57	99,02	Sudah Tercapai	Bag. Perekonomian dan SDA
3.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	Rasio Indeks	97,00	98,00	98,50	100	100	100	98,00	98,50	98,70	99,52	Sudah Tercapai	Bag. Perekonomian dan SDA
3.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	63,08	70,59	70,00	87,56	92,01	100	70,59	70,00	87,56	92,01	Sudah Tercapai	Bag. Perekonomian dan SDA
4 Perdagangan														
4.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	Milyar	150	150	200	152	104	56	150	200	N/A	N/A	belum ada capaian	Disperindagkop dan UKM
5 Perindustrian														
5.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	65,25	70,25	75,35	82	85	90	70,25	75,35	80,27	82,50	Tidak Tercapai	Disperindagkop dan UKM
6 Transmigrasi														
6.1.	Jumlah transmigran lokal	UPT	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	Sudah Tercapai	Disnakertrans
6.2	Jumlah transmigrasi	KK	208	208	226	235	228	221	208	226	410	410	Sudah Tercapai	Disnakertrans
7 Kelautan dan Perikanan														
7.1.	Produksi perikanan (Ton Produksi Persentase Terhadap Target Produksi Aceh)	%												DKPP
	Produksi perikanan ikan	Ton	3.257,29	4.498,03	4.804,27	3.769,16	4.031,57	4.233,15	4.498,03	4.804,27	4.641,87	2.036,14	Tidak Tercapai	DKPP
	- Perikanan Tangkap	Ton	2.617,08	3.252,54	3.747,77	3.029,60	3.181,08	3.340,13	3.252,54	3.747,77	3.430,57	940,84	Tidak Tercapai	DKPP
	- Perikanan Budidaya	Ton	640,21	1.245,49	1.056,50	739,56	850,49	893,02	1.245,49	1.056,50	1.211,30	1.095,30	Sudah Tercapai	DKPP
7.2.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	90	100,00	100	96,00	98,00	100,00	100,00	100	100	100	Sudah Tercapai	DKPP
8 Peternakan														
8.1.	Populasi ternak besar (sapi dan kerbau)	ekor	20.824	21.210	19.198	22.489	23.036	23.589	21.210	19.198	20.753	22.602	Tidak Tercapai	Distanna k
8.2	Populasi ternak kecil (kambing dan domba)	ekor	12.169	13.646	13.635	13.609	14.089	14.569	13.646	13.635	22.593	17.607	Sudah Tercapai	Distanna k
9 Pertanian														
9.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	66,20	70,23	75,44	80,32	85,14	90,53	83,25	89,58	90,02	98,45	Sudah Tercapai	Dinas Pertanian
9.2	Penyelesaian kasus tanah negara	%	0	30	40	50	60	70	0	0	14,29	14,29	Tidak Tercapai	Dinas Pertanian
Penunjang Urusan														
1 Perencanaan Pembangunan														



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					Realisasi				CAPAIAN	SKPK	
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/tidak	Tidak	tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	tidak	Ada	Ada	Ada	Sudah Tercapai	Bappeda
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/tidak	Ada	Ada	tidak	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sudah Tercapai	Bappeda
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPKK yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sudah Tercapai	Bappeda
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sudah Tercapai	Bappeda
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RPKK	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sudah Tercapai	Bappeda
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RPKK kedalam APBK	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sudah Tercapai	Bappeda
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sudah Tercapai	Bappeda
2	Keuangan														
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sudah Tercapai	BPKD
2.2.	Persentase SILPA	%	1,04	0,702	0,472	0,55	0,55	0,55	0,702	0,472	0,435	1,465	Sudah Tercapai	BPKD	
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,03	0,698	0,471	0,50	0,50	0,50	0,698	0,471	0,435	1,465	Sudah Tercapai	BPKD	
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	22,46	14,99	9,84	7,00	4,00	1,00	14,99	9,84	7,703	9,99	Sudah Tercapai	BPKD	
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20,00	22,05	21,34	21,69	20,00	20,00	22,05	21,34	19,46	21,22	Sudah Tercapai	BPKD	
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10,00	15,69	15,69	19,08	10,00	10,00	15,69	15,69	18,79	14,15	Sudah Tercapai	BPKD	
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	1,04	0,79	1,00	0,87	0,75	0,66	0,79	1,00	0,94	0,83	Akan dicapai	BPKD	
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	10,00	0,04	0,12	15,00	10,00	10,00	0,04	0,12	0,23	0,14	Tidak Tercapai	BPKD	
2.9.	Penetapan APBD	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sudah Tercapai	BPKD
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan														
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	Sudah Tercapai	BKPSDM
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	16,79	0,040	0,038	0,05	0,05	0,05	4,013	3,836	0	4,672	Sudah Tercapai	BKPSDM	
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	40,20	0,00	0,004	0,01	0,02	0,02	0,000	0,428	0,8547	1,0273	Sudah Tercapai	BKPSDM	
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	22	18	33	40	40	40	18	33	34	34	Sudah Tercapai	BKPSDM	
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	jabatan	426	421	433	195	147	147	421	433	2612	2611	Sudah Tercapai	BKPSDM	
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	jabatan	2.220	2.091	2.081	2.037	2.500	3.494	2.091	2.081	2.048	2.001	Tidak Tercapai	BKPSDM	
4	Penelitian dan pengembangan														
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil keltbangan.	%	N/A	N/A	15	20	25	30	15	20	30	50	Sudah Tercapai	Bappeda	
	Penerapan SIDA:	Sudah/ Belum	Sudah	Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Belum	sudah	Sudah Tercapai	Bappeda	
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	N/A	N/A	N/A	N/A	20	30	N/A	N/A	2	2	Tidak Tercapai	Bappeda	
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	N/A	30	30	30	40	50	25	30	43	64	Sudah Tercapai	Bappeda	
5	Pengawasan														
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	80	83	88	90	90	90	83	88	80	89	Sudah Tercapai	Inspektorat	
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,5	91	91	0,65	0,51	0,5	91	91	0,65	0,5	Sudah Tercapai	Inspektorat	
5.3.	Jumlah temuan BPK	Temuan	24	63	91	28	25	24	63	91	20	-	Sudah Tercapai	Inspektorat	
6	Sekretariat Dewan														



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					Realisasi				CAPAIAN	SKPK
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sudah Tercapai	Sekretari at DPRK
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sudah Tercapai	Sekretari at DPRK
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sudah Tercapai	Sekretari at DPRK
Keistimewaan dan Kekhususan Aceh														
1 Pendidikan														
1.1.	Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz	Orang	23	23	30	70	80	100	23	30	70	80	Sudah Tercapai	DSI
1.2.	Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama Islam	%	82	83	85	100	120	130	83	85	90	90	Tidak Tercapai	DSI
1.3.	Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama Islam	%	79	80	82	100	110	120	80	82	85	87	Tidak Tercapai	DSI
1.4.	Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sudah Tercapai	DSI
1.5.	Persentase dayang Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%	10	10	11	57	85	100	10	11	57	85	Sudah Tercapai	DSI
2 Kebudayaan														
2.1.	Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi	gampang	6	0	0	30	35	25	0	0	30	35	Sudah Tercapai	Disbudpa rpora
2.2.	Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim	%	73	0	0	25	30	20	0	0	25	30	Sudah Tercapai	Disbudpa rpora
2.3.	Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah	%	82	0	0	15	25	30	0	0	15	25	Sudah Tercapai	Disbudpa rpora
2.4.	Meningkatnya pemahaman terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni, Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur	wilayah	34	0	0	17	23	30	0	0	17	23	Sudah Tercapai	Disbudpa rpora
3 Keagamaan														
3.1.	Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%)	Unit	454	454	454	458	463	470	454	454	458	463	Sudah Tercapai	DSI
3.2.	Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat	Orang	204	207	212	217	220	223	207	212	217	220	Sudah Tercapai	DSI
3.3.	Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat	Orang	32	31	32	35	38	40	31	32	35	38	Sudah Tercapai	DSI
3.4.	Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid	48	48	49	50	55	60	48	49	50	55	Sudah Tercapai	DSI
3.5.	Pembinaan Dinul Islam	Orang	267	271	270	280	290	300	271	270	270	280	Sudah Tercapai	Satpol PP dan WH
3.6.	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	%	50	100	100	70	80	80	100	100	70	80	Sudah Tercapai	Satpol PP dan WH
3.7.	Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	158	160	164	200	210	220	160	164	0	0	Tidak Tercapai	DSI
3.8.	Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Rp (000)	7.545	8.980	6.150	6.916	6.920	6.920	8.980	6.150	7,32	7.928	Sudah Tercapai	Baitul Mal
3.9.	Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Rp (000)	7.545	8.980	6.150	6.916	6.920	6.920	8.980	6.150	6.916	7.363	Sudah Tercapai	Baitul Mal
4 Kesatuan dan Perdamaian														
4.1.	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	belum ada capaian	Kesbang pol
4.2.	Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	belum ada capaian	Kesbang pol
4.4.	Jumlah Anak Korban Konflik Yang Mendapat Perhatian Pemerintah	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	belum ada capaian	Kesbang pol

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					Realisasi				CAPAIAN	SKPK
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.5.	Jumlah Rumah Korban Konflik Yang di Bangun	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	belum ada capaian	Kesbang pol
Keistimewaan dan Kekhususan Aceh														
1	Kesatuan Bangsa dan Politik													
1.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	ada/tidak	N/A	ada	tidak ada	ada	ada	ada	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Tidak Tercapai	Kesbang pol
1.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	N/A	-	-	-	ada	ada	-	-	tidak ada	tidak ada	Tidak Tercapai	Kesbang pol
1.3.	Jumlah LSM	LSM	2	5	4	4	5	5	5	4	6	10	Sudah Tercapai	Kesbang pol

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian yang tepat mengenai kemampuan keuangan daerah dan memperoleh suatu keyakinan dalam memproyeksikan anggaran selanjutnya dalam melakukan pendanaan terhadap rencana pembangunan Kabupaten. Dengan melakukan analisis yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dasar dalam melakukan proyeksi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Nagasari Tahun 2023-2026 menggunakan analisis tren yang didasarkan pada data historis 5 (lima) tahun terakhir dari 2017-2021 untuk memberikan gambaran kinerja realisasi APBD tahun selama tahun dimaksud yang dapat dipergunakan sebagai dasar analisis, mencakup analisis kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) menjadi refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sudah selayaknya memberikan jaminan secara keseluruhan bagi peningkatan pelayanan serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kondisi kesehatan keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang efisien dan efektif. Sejauh manakah kesehatan keuangan suatu daerah, dapat kita telusuri dari kondisi anggarannya.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Kemampuan keuangan daerah akan memberikan daya dukung terhadap manajemen pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, diantaranya dapat diukur melalui kapasitas Pendapatan Asli Daerah

(PAD), rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan seluruh daerah telah diberikan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah, oleh karenanya maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan Kabupaten Nagan Raya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan pengelolaannya.

Faktor pandemi covid-19 juga sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah yaitu dari tahun 2019-2022 yang relatif menurun dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi sulit. Akan tetapi diproyeksikan ke depannya akan semakin membaik atau pulih pasca pandemi covid-19 yang angkanya semakin membaik dengan adanya program vaksinasi dari pemerintah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dari kinerja pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya baik dari pelaksanaan non program maupun program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBK. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam penyusunan APBK, setiap alokasi

biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kinerja keuangan yang disajikan dalam Bab ini merupakan kinerja keuangan dari realisasi keuangan selama 5 (lima) Tahun terakhir Tahun 2017-2019 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh.

Kinerja Keuangan yang disajikan dalam bab ini dikeuarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKD) Nagan Raya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan rentang periode 2017 hingga 2020 (*audited*), sedangkan tahun 2021 merupakan realisasi yang belum diaudit (*unaudited*).

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan Keuangan Kabupaten Nagan Raya yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBK dapat dilihat dari aspek ketepatan waktu penetapan APBK dan tingkat realisasinya. Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui selama periode tahun 2017-2021 pengesahan APBK di Nagan Raya selalu tepat waktu yang dilakukan pengesahannya antara bulan November dan Desember.

Tabel 3.1
Pengesahan APBK Tahun 2017-2021

Tahun	Nomor Qanun	Tanggal Pengesahan	Pagu (Rp.)
2017	Qanun Nomor 8 tahun 2016	27 Desember 2016	1,342,388,146,373.00
2018	Qanun Nomor 6 tahun 2017	27 Desember 2017	1,137,442,705,073.00
2019	Qanun Nomor 8 tahun 2018	27 Desember 2018	1,304,066,370,950.00
2020	Qanun Nomor 8 tahun 2019	23 Desember 2019	1,293,481,943,599.14
2021	Qanun Nomor 3 tahun 2020	23 Desember 2020	1,237,988,722,284.00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Nagan Raya,2022

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga dapat dilihat dari perkembangan APBK dari tahun ke tahun. Analisis pengelolaan Keuangan

Kabupaten Nagas Raya pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. APBK merupakan wujud dari kesepakatan bersama dari pihak eksekutif dengan legislatif dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya melalui pengelolaan keuangannya maka analisis pengelolaan keuangan dilakukan terhadap APBK dan Laporan Keuangan Kabupaten Nagas Raya pada umumnya. Sebelum melakukan analisis pengelolaan keuangan, terlebih dahulu kita harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBK. Secara umum struktur APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

A. Pendapatan Daerah Kabupaten Nagas Raya

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Nagas Raya dikelompokkan atas beberapa komponen:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (non fisik/fisik).
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari pendapatan hibah, dana darurat, bantuan dana kontigensi, dana bagi hasil provinsi,

dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi.

B. Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari beberapa komponen:

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dan belanja tidak terduga serta Belanja Transfer ke Pemerintah Pusat.
2. Belanja Langsung (BL) yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

C. Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu (SiLPA).

2. Pengeluaran Pembiayaan yang didalamnya meliputi penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.

Tabel 3.2

**Laju Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Target					Rata-rata Pertumbuhan %
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	PENDAPATAN	1.138.556.108.950,68	982.156.185.125,24	1.125.215.929.047,06	1.143.988.633.866,93	1.100.054.282.888,30	3,57
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74.051.054.126,89	97.118.515.691,03	87.625.375.251,38	109.062.630.923,57	96.135.476.225,30	1,24
	Pajak Daerah	19.480.004.604,00	16.086.658.524,00	17.297.157.591,75	15.373.830.424,00	14.796.064.566,00	6,04
	Retribusi daerah	1.801.485.225,00	1.170.887.425,00	2.113.863.563,00	1.114.023.375,00	1.051.604.400,00	(-18,26)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.915.223.053,45	2.920.346.661,00	2.925.867.025,00	2.925.320.229,00	2.447.755.261,00	6,03
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	42.322.839.444,74	70.382.393.230,03	58.172.155.976,94	82.284.243.249,59	71.079.212.256,30	1,58
	DANA PERIMBANGAN	621.196.403.776,00	667.610.847.884,00	673.321.655.285,00	636.322.138.520,00	661.319.226.353,00	1,38
	Dana Bagi Hasil Pajak	13.780.044.888,00	14.533.109.751,00	11.852.238.112,00	15.309.367.003,00	28.098.761.913	12,72
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	5.028.594.087,00	5.206.846.471,00	5.094.615.270,00	-	9.091.687.565	1,21
	Dana Alokasi Umum	506.544.842.000,00	501.612.944.200,00	514.300.667.890,00	485.041.973.000,00	477.108.051.000	-0,66
	Dana Alokasi Khusus	95.842.922.801,00	146.257.947.462,00	142.074.134.013,00	71.847.647.994,00	147.020.725.875,00	12,24
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	443.308.651.047,79	217.426.821.550,21	364.268.898.510,68	398.603.864.423,36	19.958.466.000,00	1,82
	Pendapatan Hibah	-	-	-	23.876.770.069,36	-	-
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	23.473.440.000,00	-	-	-
	Bantuan Dana Kontigensi	-	-	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.799.141.318,79	25.263.000.550,21	26.285.544.950,68	32.432.076.903,00	29.233.056.629	18,5

	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	237.040.752.800,00	192.163.821.000,00	185.426.767.000,00	194.783.734.000,00	90.948.227.681,00	22,68
	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (Otsus)	183.468.756.928,00	0	129.083.146.560,00	147.511.283.451,00	0	-
2	BELANJA	1.142.011.208.104,00	987.053.457.994,62	1.126.913.767.809,17	1.132.517.829.317,00	1.085.183.932.744.32	3,22
	Belanja Operasi	584418714215.00	585463547009.62	601873429083.12	601423425764.47	631918131022.01	2,31
	Belanja Pegawai	379805531400.00	404177503897.62	409786587325.48	377122108096.15	341,459,718,686.81	-1,34
	Belanja Barang dan Jasa	190,409,660,272.00	176,198,493,112.00	183,951,071,757.64	214,715,749,544.32	276,291,912,840.20	10,33
	Belanja Hibah	11,989,798,161.00	2,502,800,000.00	3,266,000,000.00	4,999,075,260.00	4,348,806,915.00	3,63
	Belanja Bantuan Sosial	2,213,724,382.00	2,584,750,000.00	4,869,770,000.00	4,586,492,864.00	9,817,692,580.00	42,23
	Belanja Modal	336.680.572.689,00	186.621.969.989,00	293.442.563.407,05	281.956.623.182,53	222.646.463.547.31	-1,91
	Belanja Tidak Terduga	640.874.000,00	2.054.898.500,00	1.211.436.000,00	3.560.981.923,00	3,931,761,000.00	63,55
	Belanja Trasfer	220271047200.00	212498809996.00	230386339319.00	245576798447.00	226687577175.00	180,07
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	413.645.496,00	1.312.109.099,00	2.796.733.072,00	1,579,482,150.00	--
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	220.271.047.200,00	212.271.047.200,00	229.074.230.220,00	242.780.065.375,00	225,108,095,025.00	179,96
3	PEMBIAYAAN						
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.242.479.093,09	11.789.852.612,51	7.009.830.528,52	5.311.991.766,41	15.782.796.316,34	13,86
	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	15.177.209.984,51	11.787.379.939,77`	6.892.579.743,13	5.311.991.766,41	16.782.796.316,34	13,85
	Penyesuaian Saldo Awal	65.269.108,58	2.472.672,74	489.584,39			-
	Penerimaan Kembali Piutang	-	-	116.761.201,00			-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-		-

	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	1.000.000.000,00	-
--	--	---	---	---	---	------------------	---

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), Tahun 2021 (unaudited),
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya (diolah)

Secara umum kondisi APBK di Kabupaten Nagan Raya dalam periode 2017-2021 mengalami tren yang fluktuatif, baik komponen pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Kondisi pendapatan terendah terdapat pada di tahun 2018. Defisit anggaran terjadi pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021, dimana realisasi Belanja Nagan Raya lebih tinggi jika dibandingkan realisasi Pendapatan Nagan Raya. Sementara pada tahun 2020 terjadi surplus anggaran, hal ini dikarenakan realisasi Belanja Nagan Raya lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Nagan Raya.

3.1.1.1 Pendapatan Nagan Raya

Realisasi pendapatan di Kabupaten Nagan Raya pada periode 2017-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif. Realisasi pendapatan terjadi peningkatan pada tahun 2018 hingga 2020, namun mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021. Realisasi pendapatan terendah terdapat pada tahun 2018 sebesar 982 juta. Bila dilihat dari capaiannya per tahun, terlihat bahwa persentase pendapatan Nagan Raya terhadap nilai target tercatat tinggi di atas 81 persen meskipun terdapat juga realisasinya menurun. Realisasi pendapatan Nagan Raya mengalami fluktuatif atau turun naik pada tahun 2017 hingga 2019 kemudian baru terjadi peningkatan pada tahun 2020 hingga 2021. Realisasi pendapatan Nagan Raya mengalami puncak tertinggi pada tahun 2021 sebesar 96 persen.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Nagan Raya Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	%	
2017	1.266.663.945.370	1.138.556.108.950,68	89,89	-0,9
2018	1.109.758.966.210	982.156.185.125,24	88,50	-13,73
2019	1.279.480.445.950	1.125.215.929.047,06	87,94	14,56
2020	1.221.726.149.907	1.143.988.633.866,93	93,63	1,66
2021	1.145.834.771.001	1.100.054.282.888,30	96,00	-3,84
Rata-Rata Pertumbuhan AAGR				3.57

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (Audited), 2021 (Unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(diolah)

Besarnya angka Pendapatan Nagan Raya tidak dapat dipisahkan dari beberapa komponen penyusun pendapatan diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah, sebagaimana tertuang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah Nagan Raya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nagan Raya adalah pendapatan yang dihimpun berdasarkan peraturan daerah(Qanun) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten Nagan Raya untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nagan Raya Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	%	
2017	116,121,893,442.49	74,051,054,126.89	63.77	-28,93
2018	130,411,018,024.00	97,118,515,691.03	74.47	31,15
2019	139,486,871,966.00	87,625,375,251.38	62.82	-9,77
2020	110,641,161,007.99	109,062,630,923.57	98.57	24,46
2021	100,132,542,939.00	96,135,476,225.30	96,00	-11,85
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				1,24

Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(diolah)

Tabel 3.4 menggambarkan bahwa realisasi PAD Nagan Raya selama periode 2017-2021 mengalami penurunan. Realisasi PAD Nagan Raya terjadi penurunan yang signifikan pada pada tahun 2019. Meskipun demikian realisasi PAD Nagan Raya terus membaik dengan tercapainya realisasi sebesar 98,57 persen pada tahun 2020 dan 96 persen pada tahun 2021.

Meskipun secara pencapaian realisasi PAD yang cukup baik dari tahun ke tahun, namun pendapatan dari komponen PAD harus terus dapat ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus memberikan upaya optimal dalam peningkatan PAD menuju kemandirian fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Nagan Raya. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan diantaranya: 1) Penyusunan regulasi pemungutan Pajak Nagan Raya; 2) Penyusunan regulasi pemungutan Retribusi Nagan Raya; 3) Membangun teknologi informasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor; 4) Membangun layanan unggulan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; 5) Pemutakhiran basis data subjek dan objek Pajak Kendaraan Bermotor; 6) Melakukan pelatihan teknis aparatur pemungutan Pajak dan Retribusi

Nagan Raya; 7) Melakukan koordinasi dan penegakan hukum; 8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemungutan Pajak dan Retribusi Nagan Raya di lingkungan Pemerintah Nagan Raya.

a. Pajak Nagan Raya

Sektor perpajakan di Kabupaten Nagan Raya tercatat bahwa terjadinya peningkatan realisasi pajak dari tahun 2017 hingga 2021. Peningkatan realisasi pajak tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp. 14.796.064.566,00 mencapai 114 persen.

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Pajak Nagan Raya Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan
	(Rp)	(Rp)	%	(%)
2017	22,546,369,793.49	19,480,004,604.00	86.40	-1,78
2018	19,833,675,569.00	16,086,658,524.00	81.11	-17,42
2019	20,675,500,000.00	17,297,157,591.75	83.66	7.52
2020	18,775,099,899.26	15,373,830,424.00	81.88	-11,12
2021	12,937,919,380.00	14,796,064,566.00	114,36	-3.76
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				6,04

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah)

b. Retribusi Nagan Raya

Sektor retribusi sama halnya dengan sektor perpajakan, karena dapat dilakukan pemungutan melalui jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah kabupaten Nagan Raya untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Pencapaian angka realisasi retribusi Nagan Raya secara keseluruhan masih belum cukup baik, hal itu ditandai dengan terjadinya tren fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 realisasi retribusi Nagan Raya masih 24.66 persen. Sedangkan dari tahun 2018 hingga 2021 persentase realisasi retribusi sudah mencapai di atas 50 persen dengan angka tertinggi pada tahun 2018 sebesar 114 persen meskipun masih dalam tren fluktuatif. Secara garis besar pertumbuhan realisasi retribusi Nagan Raya sebesar minus 18,26.

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Retribusi Nagan Raya Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	%	
2017	7,304,996,700.00	1,801,485,225.00	24.66	-35.20
2018	1,026,521,205.00	1,170,887,425.00	114.06	-35.00
2019	3,367,996,700.00	2,113,863,563.00	62.76	80.54
2020	1,170,887,425.00	1,114,023,375.00	95.14	-47.30
2021	1,085,098,683.00	1,051,604,400.00	96.91	-5.60
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				-18.26

Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah)

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Kabupaten Nagan Raya Yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Nagan Raya Tahun 2017-2021

Selain dari dua sektor yang telah disebutkan yaitu pajak dan retribusi, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga memberikan kontribusi yang cukup baik namun masih berfluktuatif. Pencapaian realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.447.755.261.-, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,925,867,025,-. Secara rata-rata pertumbuhan dari sektor ini mencapai 6,03 dalam kurun waktu 2017-2021. Besarnya target dan realisasi pengelolaan keuangan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dapat dilihat dari Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Nagan Raya Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	%	
2017	5,500,000,000.00	2,915,223,053.45	53.00	-3,75
2018	3,028,940,639.00	2,920,346,661.00	96.41	0,18
2019	11,000,000,000.00	2,925,867,025.00	26.60	0,19
2020	3,700,000,000.00	2,925,320,229.00	79.06	-0,02
2021	1,200,000,000.00	2,447,755,261.00	203.98	-16,33
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				6,03

Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah)

d. Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penambahan dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan zakat, pendapatan, BLUD merupakan komponen dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Bila dilihat pada tabel 3.8, realisasi pendapatan pada sektor kelompok ini cenderung kurang baik arena tren yang masih fluktuatif dari semua segi baik jumlah realisasi, persentase realisasi, maupun pertumbuhan rata-rata dari periode 2017 hingga 2021. Realisasi tertinggi dari pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdapat pada tahun 2020 sebesar Rp. 92.574.777.124,57 dengan persentase pencapaian 102,07 persen. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2017 dengan capaian sebesar Rp. 52.769.564.297.89 atau 61,17 persen. Jika dihitung rata-rata pertumbuhan secara tahunan dari tahun 2017 hingga 2021 diperoleh capaian 12,73 pada kelompok ini.

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	%	
2017	86,270,526,949.00	52,769,564,297.89	61.17	-35,51
2018	109,550,821,250.00	79,860,969,742.03	72.90	51.34
2019	115,443,375,266.00	68,214,354,096.63	59.09	-14.58
2020	90,695,173,683.73	92,574,777,124.57	102.07	35.71
2021	77,546,524,876.00	71,079,212,256.30	91.66	-23,22
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				12,73

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah)

3.1.1.1.2. Dana Perimbangan

Pada prinsipnya dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah. Dana perimbangan Kabupaten Nagan Raya secara keseluruhan mengalami tren fluktuatif pada periode 2017 hingga 2021. Realisasi dana perimbangan tertinggi terdapat pada tahun 2019 sebesar Rp. 673.321.655.285,00 atau dengan capaian 96,40 persen. Rata-rata pertumbuhan tahunan dari tahun 2017 hingga 2021

mencapai 1,38. Perkembangan dana perimbangan nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Nagan Raya
Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	%	
2017	639,312,573,000.00	621,196,403,776.00	97.17	-4,57
2018	680,524,764,534.00	667,610,847,884.00	98.10	7,47
2019	698,470,150,000.00	673,321,655,285.00	96.40	0,86
2020	657,313,853,823.00	636,322,138,520.00	96.81	-5,50
2021	663,408,208,438.00	661,319,226,353.00	99,68	3,93
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				1,38

Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah)

A. Dana Alokasi Umum (DAU)

Besaran dana perimbangan sangat tergantung dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA lainnya. Realisasi DAU di Nagan Raya dari tahun 2017 hingga 2021 bisa dikatakan sangat baik dengan cenderung stagnan meskipun masih mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif). Persentase realisasi dari target yang ditetapkan sangat baik pada 2017 dan 2021 dengan capaian 100 persen. Sedangkan pada tahun 2018 hingga 2020 masih sangat baik dengan persentasi 98.49 persen. Dana Alokasi Umum(DAU) menurun pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 sebesar Rp. 485.041.973.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp. 477.108.051.000,00 dikarenakan penurunan dana transfer Pemerintah Pusat melalui DAU tersebut dialihkan dalam penanganan pandemic covid-19 yang terjadi di Indonesia. Besarnya anggaran dan realisasi DAU di Nagan Raya dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Nagan Raya
Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	%	
2017	506,544,842,000.00	506,544,842,000.00	100.00	-1,76
2018	507,106,599,000.00	501,612,944,200.00	98.92	-0,97
2019	522,187,942,000.00	514,300,667,890.00	98.49	2,53
2020	487,688,377,000.00	485,041,973,000.00	99.46	-5,69
2021	477,108,051,000.00	477,108,051,000	100.00	-1,64
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				-0,66

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(diolah)

B. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Selain DAU, dana perimbangan selanjutnya yang sangat berpengaruh terhadap proporsi pendapatan Nagan Raya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Bila dilihat realisasinya, DAK di Nagan Raya bisa dikatakan masih mengalami tren fluktuatif baik dari segi realisasi anggaran atau persentase realisasinya. Pada tahun 2020 realisasi DAK sebesar Rp. 135,970,798,517.- dengan capaian 99.45 persen. Perkembangan DAK di Nagan Raya dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.11

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nagan Raya
Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	%	
2017	110,352,495,000.00	95,842,922,801.00	86.85	-17,38
2018	149,203,278,000.00	146,257,947,462.00	98.03	52,60
2019	153,782,146,000.00	142,074,134,013.00	92.39	-2,86
2020	136,710,935,000.00	135,970,798,517.00	99.45	-4,30
2021	155,843,326,000.00	147,020,725,875	94.34	8,13
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				12,24

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(diolah)

C. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

Selanjutnya, dana perimbangan yang juga memberikan andil pada proporsi pendapatan di Nagan Raya yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak (hidrokarbon dan SDA lainnya). Realisasi DBH pajak mengalami tren fluktuatif (peningkatan-penurunan) pada periode tahun 2017-2021 dengan rata-rata pertumbuhan 12,72. Besarnya proporsi DBH disesuaikan dengan penerimaan negara atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan dan orang pribadi dalam negeri atas PPh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta PPh atas pemungutan/pemotongan penghasilan wajib pajak menurut Pasal 21 UU PPh. Perkembangan DBH Pajak di Nagan Raya dari tahun 2017 hingga 2021 terdapat pada Tabel 3.12

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Nagan Raya
Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	%	
2017	22,415,236,000.00	18,808,638,975.00	83.91	15,57
2018	24,214,887,534.00	19,739,956,222.00	81.52	4,95
2019	16,704,890,000.00	11,852,238,112.00	70.95	-39,95
2020	32,914,541,823.00	15,309,367,003.00	46.51	29,16
2021	22,127,926,173.00	28,098,761,913	126,98	83,63
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				12,72

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(diolah)

3.1.1.1.3. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuatif. Peningkatan realisasi lain-lain pendapatan nagagan raya tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 443.038.651.047,79 dengan capaian 86.71 persen. Pada sektor ini Nagagan Raya mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 20.523.088.000,00 dikarenakan hanya pendapatan Hibah Dana BOS yang ada.

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	%	
2017	511,229,478,928.00	443,308,651,047.79	86.71	12,51
2018	298,823,183,652.23	217,426,821,550.21	72.76	-50,95
2019	441,523,423,984.00	364,268,898,510.68	82.50	67,54
2020	453,771,135,077.00	398,603,864,423.36	87.84	9.43
2021	20,654,085,265.00	19,958,466,000.00	99.36	-94,99
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				1,82

Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah)

3.1.1.2. Belanja Daerah Nagan Raya

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, bahwa pengelompokan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah telah diatur dengan ketentuan dimana Belanja Daerah terdiri dari 4 komponen Belanja diantaranya :

- Belanja Operasi;
- Belanja Modal;
- Belanja Tidak Terduga (BTT); dan
- Belanja Transfer.

Bila dilihat dari komponen Belanja Nagan Raya selama periode tahun 2017-2021, rata-rata realisasi Belanja Nagan Raya mencapai 92,30 persen. Realisasi ini terdiri dari:

- Belanja Operasi sebesar 87,27;
- Belanja Transfer sebesar 93,83 persen;
- Belanja Modal sebesar 87,18 persen, dan
- Belanja Tidak Terduga sebesar 48,67 persen.

Pada kelompok Belanja Operasi, Perkembangan realisasi Belanja Nagan Raya dari tahun 2017 hingga 2021 terdapat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Realisasi Belanja Daerah Nagan Raya Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun					Rata-Rata
	2017	2018	2019	2020	2021	(%)
BELANJA DAERAH	89,16	88,09	85,99	92.30.00	92,53	92.30.00
Belanja Operasi	89,51	89,66	86,2	90,65	92,48	87,27
Belanja Pegawai	89,58	93,08	88,23	92,49	97,77	88,27
Belanja Hibah	85,21	96,84	82,13	83.97	84,39	83.97
Belanja Bantuan Sosial	78,24	55,25	96,72	85.82	89,79	85.82
Belanja Barang dan Jasa	89,82	83,31	81,85	87.84	87,29	87.84
Belanja Transfer	94,37	93,38	93,2	94,79	94,28	93,83
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	18,29	30,86	75.72	54,24	75.72
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	94,38	94,14	94,29	95.07.00	94,77	94,21
Belanja Modal	86.59.00	79.04.00	80.93	94.87	96.24.00	87,18
Belanja Tidak Terduga	21,36	58,71	48,46	48.67	60,25	48.67

Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(diolah)

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi tersebut antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Hibah. Pada kelompok Belanja Operasi, Belanja Pegawai memiliki proporsi realisasi terbesar, dengan realisasi pada tahun 2021 mencapai 97,77 persen. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRK serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati. Pengelompokan Belanja Pegawai sebagaimana yang di atur

di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 juga mengelompokkan bahwa pengeluaran Pemerintah Nagan Raya yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau tujuan organisasi merupakan bagian dari Belanja pegawai.

Pada tahun 2021, kelompok Belanja Hibah memiliki realisasi sebesar 84,39 persen. Penggunaan Dana Hibah tersebut mengacu kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2021 tersebut juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 96 persen, Belanja hibah memiliki proporsi realisasi paling kecil dalam Belanja Operasi.

b. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran Pemerintah Nagan Raya yang digunakan untuk perolehan aset tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Realisasi belanja modal periode tahun 2017-2021 mencapai 87,18 persen atau setara dengan Rp. 2,053,296,064,827,78 dari total rencana anggaran sebesar Rp. 2,364,266,486,099,00. Pada tahun 2021, realisasi belanja modal Nagan Raya mencapai 96,24 persen, yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok belanja modal diantaranya: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Realisasi belanja tidak terduga selama periode tahun 2017-2021 mencapai 48,67 persen atau sebesar Rp. 14,059,857,223.00 dari total anggaran sebesar Rp. 25,872,200,000.00. Sedangkan belanja tidak terduga pada tahun 2021 hanya mencapai 60,25 persen, atau sebesar Rp. 3,931,761,000,00 dari Rp. 6,525,000,000,00 yang direncanakan.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah kabupaten/kota. Secara garis besar, pengelompokan belanja transfer Nagan Raya dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk belanja diantaranya belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah daerah. Dari kedua kelompok belanja tersebut, belanja bantuan keuangan memiliki proporsi realisasi paling besar mencapai 94,21 persen, atau sebesar Rp. 1,369,030,712,340.00 dari Rp. 1,455,630,625,125.40 yang telah ditargetkan. Sedangkan pada kelompok transfer bagi hasil memiliki realisasi sebesar 75,72 persen, atau mencapai Rp. 6,101,969,817,00 dari Rp. 18,286,794,035,00 yang termasuk pada periode 2017-2021.

3.1.1.3. Pembiayaan Nagan Raya

Pembiayaan Aceh terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Nagan Raya yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Nagan Raya, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang Nagan Raya dan penerbitan obligasi Nagan Raya. Sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Nagan Raya, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman dan pembayaran nilai nominal obligasi.

Tabel 3.15

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Nagan Raya Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Pertumbuhan
	(Rp.)	(Rp.)		(%)
2017	14,177,209,984.51	15,242,479,093.09	107.51	64,45
2018	10,787,379,939.77	11,789,852,612.51	109.29	-22,65
2019	31,000,000,000.00	7,009,830,528.52	22.61	-40,54
2020	5,311,991,766.41	5,311,991,766.41	100.00	-24,22
2021	15,782,796,316.00	15,782,796,316.00	100	197,11
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				11,70

Sumber: Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (diolah)

Realisasi pembiayaan Nagan Raya selama periode tahun 2017-2021 cenderung mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2017 realisasi pembiayaan Nagan Raya mencapai Rp. 15,242,479,093.09, dan terus mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif) hingga 2021 dengan capaian sebesar Rp. 15,782,796,316.00. Namun pada tahun 2019 realisasi pembiayaan mengalami penurunan sejumlah Rp. 7,009,830,528.52, sebesar 26.61 persen.

3.1.1.4. Neraca Nagan Raya

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan neraca daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Berdasarkan penyajian data neraca, dapat diketahui tentang jumlah Aset, baik Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar serta kewajiban dan Ekuitas Dana dalam periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Sementara kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang pihak ketiga, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya;
- 2) kewajiban jangka panjang yang mencakup utang dalam negeri-setor perbankan/obligasi dan utang jangka panjang lainnya. Seterusnya, dari ekuitas dana dapat pula diketahui kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Selama periode tahun 2017-2020 rata-rata pertumbuhan Aset Pemerintah kabupaten Nagan Raya mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 4,88% dimana rata-rata pertumbuhan dari Aset Lancar mencapai 3,41% sedangkan rata-rata pertumbuhan dari Aset Tetap mencapai 6,99%. Sementara untuk kewajiban Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan mencapai 173,58% dan ekuitas dana mencapai 4,59%. Untuk lebih rinci mengenai kondisi perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2017-2020, dapat dilihat pada Tabel 3.16 di bawah ini.

Tabel 3.16
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2020

U R A I A N	2017	2018	2019	2020	Rata – Rata Pertumbuhan (%)
ASSET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	9.602.334.734,14	4.268.387.291,81	1.385.879.358,56	5.215.099.895,88	44,53
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.612.975,00	84.000,00	141.450,00	478.838,96	-4,47
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	275.412.426,00	898.752.684,00	1.060.474.749,00	10.823.868.164,00	165,72
Kas di Bendahara FKTP	1.778.022.890,13	1.624.071.726,00	1.431.468.375,00	674.288.153,00	0,36
Kas Lainnya	-	-	358.917,00	-	-
Setara Kas	14.266.689,00	38	-	-	-
Piutang Pajak	10.429.173.852,00	12.026.767.720,00	13.174.095.254,00	14.437.156.679,00	18,34
Piutang Retribusi	5.610.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	-26,87
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.312.181.100,00	21.594.062.228,00	33.343.891.000,00	8.608.727.400,00	63,8
Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	4.254.392.645,00	-
Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	5.943.051.585,66	10.062.669.372,68	8.592.735.376,00	4.867.339.810,00	8,13
Piutang Lainnya	4.915.200,00	-	-	-	-
Penyisihan Piutang	-4.100.778.541,90	-5.162.785.377,98	-6.256.680.387,20	-7.190.149.919,30	6960,68
Belanja Dibayar Dimuka	648.641.000,00	-	-	62.796.313,15	-
Persediaan	7.368.119.702,81	9.456.879.434,51	11.897.098.683,06	10.938.109.156,69	68,24
Jumlah Aktiva Lancar	44.398.293.838,34	55.005.540.620,34	67.453.598.344,27	52.766.778.400,88	3,41
INVESTASI JANGKA PANJANG					



Investasi Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	0
Jumlah Investasi Permanen	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	0
ASET TETAP					
Tanah	152.905.806.172,00	135.225.313.788,00	162.067.945.528,00	181.822.569.588,00	16,52
Peralatan dan Mesin	293.039.451.631,00	305.981.489.428,00	336.689.486.730,00	406.127.059.953,00	11,87
Gedung dan Bangunan	878.368.854.865,00	843.045.888.300,00	909.452.910.611,00	952.420.251.321,00	7,46
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	917.376.041.565,00	1.027.868.401.115,00	1.185.885.007.107,00	1.295.095.927.380,00	19,57
Aset Tetap Lainnya	41.556.580.456,00	40.978.874.796,00	45.496.598.752,00	47.707.570.502,00	17,42
Konstruksi Dalam Pengerjaan	133.794.233.970,00	119.713.983.770,00	123.740.603.356,00	135.762.825.159,00	39,37
Akumulasi Penyusutan	-692.599.023.958,00	-767.673.290.684,00	-868.447.464.435,00	-988.331.606.661,00	-
JUMLAH ASET TETAP	1.724.441.944.701,00	1.705.140.660.513,00	1.897.390.639.649,00	2.030.604.597.242,00	6,59
ASET LAINNYA					
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	184.845.786,00	184.845.786,00	-
Aset Tak Berwujud	12.889.888.400,00	13.599.388.400,00	5.169.993.900,00	5.169.993.900,00	-10,53
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-8.701.479.500,00	-4.520.646.300,00	-4.719.953.100,00	-
Aset Lain-lain	75.358.783.958,65	77.123.033.958,65	34.499.051.699,65	27.729.672.749,65	-17,43
Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	-	-1.764.250.000,00	-1.654.250.000,00	-1.654.250.000,00	-
Jumlah Aset Lainnya	88.433.518.144,65	80.441.538.644,65	33.678.995.085,65	26.710.309.335,65	-19,61
JUMLAH ASET	1.869.023.756.683,99	1.852.337.739.777,99	2.010.273.233.078,92	2.121.831.684.978,53	4,88
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek					
Utang Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Utang Belanja	31.786.685.580,00	19.116.399.068,00	43.440.119.626,14	137.100.247,00	-

Utang Jangka Pendek Lainnya	44.998.674.048,00	61.735.969.053,00	79.199.933.754,95	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	76.785.359.628,00	80.852.368.121,00	122.589.345.892,09	45.943.981.281,10	173,58
Jumlah Kewajiban	76.785.359.628,00	80.852.368.121,00	122.589.345.892,09	45.943.981.281,10	173,58
EKUITAS					
Ekuitas Dana					
Ekuitas	1.792.238.397.055,99	1.771.485.371.656,99	1.887.683.887.186,83	2.075.887.703.697,43	4,59
Jumlah Ekuitas Dana	1.792.238.397.055,99	1.771.485.371.656,99	1.887.683.887.186,83	2.075.887.703.697,43	4,59
		-			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.869.023.756.683,99	1.852.337.739.777,99	2.010.273.233.078,92	2.121.831.684.978,53	4,88

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (Audited),
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya

Tabel 3.17
Realisasi Aset Tahun 2017-2020

Tahun	ASET	ASET LANCAR	ASET TETAP
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
2017	1.869.023.756.683,99	44.398.293.838,34	1.724.441.944.701,00
2018	1.852.337.739.777,99	55.005.540.620,34	1.705.140.660.513,00
2019	2.010.273.233.078,92	67.453.598.344,27	1.897.390.639.649,00
2020	2.121.831.684.978,53	52.766.778.400,88	2.030.604.597.242,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Sesuai dengan yang disajikan dalam Tabel 3.17, secara keseluruhan realisasi aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2017-2020 berfluktuasi cenderung meningkat/naik. Peningkatan realisasi aset terjadinya penambahan pada Aset Tetap karena adanya realisasi belanja modal sedangkan Aset Lancar mengalami penurunan karena terjadi pengeluaran belanja yang mengakibatkan menurunnya kas atau bank dan meningkatnya penyisihan piutang yang dapat mempengaruhi jumlah dari aset lancar. Realisasi aset yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tetap cenderung mengalami peningkatan (naik).

Tabel 3.18
Realisasi dan Pertumbuhan Aset Tahun 2017-2020

Tahun	Realisasi Aset		Realisasi Aset Lancar		Realisasi Aset Tetap	
	Jumlah (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2017	1.869.023.756.683,99	9,98	44.398.293.838,34	-19,03	1.724.441.944.701,00	11,6
2018	1.852.337.739.777,99	-0,89	55.005.540.620,34	23,89	1.705.140.660.513,00	-1,12
2019	1.988.561.119.384,37	8,53	67.453.598.344,27	22,63	1.897.390.639.649,00	11,27
2020	2.121.831.684.978,53	5,55	52.766.778.400,88	-21,77	2.030.604.597.242,00	7,02
	Rata-Rata	4,88		03.41		6,59

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Sebagaimana yang disajikan dalam tabel 3.18 diatas diketahui pertumbuhan aset pemerintah Kabupaten Nagan Raya sangat berfluktuasi. Pertumbuhan positif terhadap total aset terjadi pada tahun 2017-2020.

Jika dilihat dari segi aset lancar, pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2017 dan 2020 dengan pertumbuhan negative tertinggi mencapai 26,16%. Kemudian dari segi aset tetap pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2017, 2019 dan 2020. Sebaliknya realisasi aset tetap mengalami pertumbuhan negative pada tahun 2018 sebesar 1,12 persen.

Dalam rangka memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial daerah, perlu dilakukan analisa atau interpretasi terhadap data finansial yang tercermin dalam laporan keuangan daerah. Terdapat dua bentuk umum rasio keuangan yang sering digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan dan kinerja yaitu rasio likuiditas (liquidity ratio) dan rasio solvabilitas (solvability ratio). Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek. Pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya disebut Pemerintah Daerah yang liquid.

Tingkat likuiditas suatu daerah dapat diukur dengan beberapa cara diantaranya dengan menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar (Current Ratio). Cara lainnya ialah dengan menunjukkan kemampuan Daerah membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibanding asset lain. Cara ini lebih dikenal dengan Quick Ratio analysis. Sementara rasio solvabilitas yang disebut juga dengan rasio leverage digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh daerah dengan dana yang dipinjamkan dari pemerintah pusat/swasta/investor. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio leverage adalah total debt to equity ratio (rasio hutang terhadap ekuitas) dan total debt to total asset ratio (rasio hutang terhadap total aktiva).

Tabel 3.19

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020

RASIO	RUMUS	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	44.398.293.838,34	55.005.540.620,34	67.453.598.344,27	52.766.778.400,88
	Kewajiban Jangka Pendek	76.785.359.628,00	80.852.368.121,00	122.589.345.892,09	45.943.981.281,10
	Current Ratio	0,58	0,68	0,55	1,15
	Aset Lancar-Persediaan	37.030.174.135,53	45.548.661.185,83	55.556.499.661,21	41.828.669.244,19
	Kewajiban Jangka Pendek	76.785.359.628,00	80.852.368.121,00	122.589.345.892,09	45.943.981.281,10
	Quick Ratio	0,48	0,56	0,45	0,91
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	76.785.359.628,00	80.852.368.121,00	122.589.345.892,09	45.943.981.281,10
	Total Aset	.1.869.023.756.683,99	1.852.337.729.777,99	2.010.273.233.078,92	2.121.831.684.978,53
	Rasio Total Hutang/Aset	0,04	0,04	0,06	0,02
	Total Hutang	76.785.359.628,00	80.852.368.121,00	122.589.345.892,09	45.943.981.281,10
	Total Ekuitas	1.792.238.397.055,99	1.771.485.371.656,99	1.887.683.887.186,83	2.075.887.703.697,42
	Rasio Hutang/Modal	0,04	0,05	0,06	0,02

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya 2017-2020, data diolah

Dari Tabel 3.19 di atas diketahui Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan mencairkan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan dari 0,58 di tahun 2017 menjadi 1,15 di tahun 2020.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kemampuan membayar hutang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak memadai.

1. Current ratio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, current rasio selama periode tahun 2017-2020 juga mengalami peningkatan, dari sebesar 0,58 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 1,15 persen pada tahun 2020. Current ratio yang baik memiliki parameter sebesar 1,5-3. Sedangkan Kabupaten Nagan Raya memiliki rata-rata pertumbuhan sebanyak 0,74 selama 4 tahun terakhir. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membayar hutang jangka pendek belum memadai.
2. Quick ratio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Quick ratio selama periode tahun 2017-2020 berfluktuasi, dari sebesar 0,48 pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,91 pada tahun 2020. Quick ratio terendah berada pada tahun 2019 sebanyak 0,45. Nilai quick ratio yang baik bernilai 1. Sedangkan Kabupaten Nagan Raya memiliki rata-rata pertumbuhan sebanyak 0,60 selama 4 tahun terakhir. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membayar hutang jangka pendek juga masih belum memadai.
3. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Selama periode tahun 2017-2020, rasio total hutang terhadap aset menunjukkan tren penurunan yaitu dari angka 0,04 pada tahun 2017 menjadi 0,02 pada tahun 2020. Sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh hutang terhadap asset masih berfluktuasi. Meskipun demikian kemampuan keuangan

Pemerintah Kabupaten Nagas Raya relatif sangat kuat dalam pelunasan seluruh kewajibannya.

4. Rasio Hutang terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Selama periode tahun 2017-2020, Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Nagas Raya berkisar antara 0,01 sampai 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Nagas Raya, sehingga dapat diartikan kemampuan keuangan juga masih relatif kuat bila akan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan terebih yang bersifat jangka panjan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBK yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan beberapa strategi berupa:

- a. Optimalisasi penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan lebih menitikberatkan pada (1) potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) tidak memberatkan masyarakat; (3) tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan dan dilaksanakan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten.

Kebijakan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada perdagangan dan jasa.

- b. Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang berhubungan dengan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan regulasi perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, kebijakan Belanja Daerah ditujukan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagas Raya, antara lain untuk pengembangan perangkat pendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan pelaksanaan Syariat Islam. Untuk mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan keberpihakan APBK pada kebutuhan masyarakat, maka arah dan kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran belanja diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang secara langsung dapat menyentuh kepentingan masyarakat dengan melaksanakan prinsip akuntabel, transparan, adil dan bertanggungjawab.
- b. Besaran belanja daerah untuk setiap bidang pelayanan public dialokasikan secara proporsional sesuai dengan tingkat prioritas serta melakukan efisiensi anggaran pada belanja pegawai.
- c. Belanja pegawai diarahkan untuk:
 - Pemberian gaji
 - Penyediaan anggaran tambahan penghasilan PNS;
 - Pemberian tunjangan untuk Ketua, Wakil ketua, Anggota DPRK;
 - Penyediaan anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru.
- d. Pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah serta organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan melalui upaya yang jelas, selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- e. Pemberian bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan urgensi tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam rangka mendukung upaya-upaya penanggulangan dan permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan

dan peningkatan SDM yang dilakukan secara jelas, selektif/tidak mengikat, rasional dan jumlahnya dibatasi.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Didalam Permendagri tersebut terdapat penyesuaian terhadap nomenklatur rekening belanja dari nomenklatur yang sebelumnya sudah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Mengacu pada Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 membuat klasifikasi mengenai Belanja Daerah, terdiri dari:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu instrument ekonomi sebuah pemerintahan dalam menjalankan kebijakan dan rencananya. Kebijakan dan rencana ini akan diterjemahkan kedalam bentuk program dan kegiatan. Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah seharusnya merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh kegiatan yang telah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Hal ini dilakukan agar pengelolaan APBK dapat menjadi tolok ukur dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Adanya gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah kabupaten Nagan Raya pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk

menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut berupa proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2017-2021 :

Tabel 3.20
Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2017-2021

Tahun	Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Persentase
			(%)
2017	1.142.011.208.104,00	379.805.531.400,00	33,26
2018	987.053.457.994,62	404.177.503.897,62	40,05
2019	1.126.913.767.809,17	409.786.587.325,48	36,36
2020	1.132.517.829.317,00	377.122.108.096,15	33,3
2021	1.085.868.477.759,82	330.762.058.831,31	30,46
Rata-rata			40,79

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (Audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Berdasarkan Tabel 3.20 diketahui proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran tahun 2017-2021 diketahui berkisar antara 33.26 persen sampai 30.46 persen dengan rata-rata proporsi per tahun sebesar 40,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2021 masih ideal (dibawah 50 persen), dengan kata lain porsi belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan public lebih besar dibandingkan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Tren realisasi proporsi total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama periode tahun 2017-2019 cenderung meningkat. Persentase realisasi proporsi tertinggi terdapat pada tahun 2018 yang mencapai 40,05%. Namun proporsi belanja ini mengalami penurunan mulai dari

tahun 2019 hingga tahun 2021. Penurunan ini dapat diartikan karena anggaran belanja dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Nagan Raya. Untuk lebih rinci, persentase mengenai realisasi pemenuhan belanja aparatur dapat dilihat pada Gambar 3.7

Gambar 3.1
Proporsi realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2015-2021



Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2022

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan selama periode tahun 2017-2021, diketahui defisit anggaran terjadi pada tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara jumlah Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Adanya defisit anggaran pada tahun 2017, 2018 dan 2019 menunjukkan pengelolaan APBK belum berjalan optimal, sehingga kedepan diharapkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, Zakat/Infaq/Sadaqah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sehingga dengan meningkatnya pendapatan dapat menjadi penyeimbang terhadap

pertumbuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA Kabupaten Nagas Raya dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.21
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Pendapatan Daerah	1.138.556.108.950,68	982.156.185.125,24	1.125.215.929.047,06	1.143.988.633.866,93	1.102.357.355.525,57
Dikurangi Realisasi:					
Belanja Daerah	1.142.011.208.104,00	987.053.457.994,62	1.126.913.767.809,17	1.132.517.829.317,00	1.085.868.477.759,82
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
Defisit Riil	-3.455.099.153,32	-4.897.272.869,38	-1.697.838.762,11	11.470.804.549,93	16.488.877.765,75

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020(audited), 2021 (unaudited)

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Tabel 3.22
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

URAIAN	Tahun									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jumlah	Persentase SiLPA	Jumlah	Persentase SiLPA	Jumlah	Persentase SiLPA	Jumlah	Persentase SiLPA	Jumlah	Persentase SiLPA
Jumlah SiLPA	11.787.379.939,77		6.892.579.743,13		5.311.991.766,41		16.782.796.316,34		32.271.674.082,09	
Pelampauan Penerimaan PAD	(42.070.839.315,60)	(36,23)	(33.292.502.332,97)	(25,53)	(51.861.496.714,62)	(37,18)	(1.578.530.084,42)	(1,43)	(1.578.530.084,42)	-1,69
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-18.116.169.224,00	-2,83	-12.913.916.650,00	-1,9	-25.148.494.715,00	-3,6	-20.991.715.303,00	-3,19	-2.088.982.085,00	-0,31
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-67.920.827.880,21	-13,29	-81.396.362.102,02	-27,24	-77.254.525.473,32	-17,5	-55.167.270.653,64	-12,16	-130.997.265,00	0,63

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020(audited), 2021 (unaudited)

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Dari Tabel 3.22 diketahui SiLPA tertinggi adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 32.271.674.082,09 sebaliknya SiLPA terendah adalah pada tahun 2019 sebesar Rp.5.311.991.766,41. Secara keseluruhan bila dilihat dari tren SiLPA selama periode tahun 2017-2021 berfluktuasi.

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif merupakan sebaliknya yaitu tidak efektifnya penerimaan PAD dan tidak dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SiLPA Kabupaten Nagan Raya dapat disesuaikan.

Realisasi komposisi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3.34.

Tabel 3.23
Realisasi Komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

URAIAN	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
Jumlah SiLPA	15.177.209.984,51	100	11.787.379.939,77	100	6.892.579.743,13	100	5.311.991.766,41	100	16.782.796.316,34	100
Penerimaan PAD	-59.745.257.701,99	-36,44	42.070.839.315,60	36,23	-33.292.502.332,97	-25,53	-51.861.496.714,62	37,18	1.578.530.084,42	-1,43
Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166.898.992.716,00	-20,41	-8.765.670.724,00	-1,49	-12.913.916.650,00	-1,9	-25.148.494.715,00	-3,60	20.991.715.303,00	-3,19
Penerimaan Transfer Pusat Lainnya	-17.248.133.900,00	-7,45	10.360.467.700,00	-3,58	-26.809.000.000,00	-12,24	0,00	100	-2.190.000.000,00	-1,11
Penerimaan Transfer Provinsi	-7.292.530.766,61	-22,05	64.810.858.680,21	23,91	-54.587.362.102,02	-68,36	-65.799.965.473,32	71,46	41.444.165.803,00	-56,10
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-2.100.000.000,00	-13,04	-2.100.000.000,00	-100	-	-	11.454.560.000,00	6,98	11.533.104.850,64	- 6,30
Penghematan Belanja Tidak Langsung (BTL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	127.141.719.984,00	-19,25	60.818.440.840,00	-9,79	-42.398.810.206,38	-7,12	63.965.797.292,52	10,18	46.231.902.412,25	- 7,34
Penghematan Belanja Langsung (BL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140.320.405.085,11	-18,7	78.011.506.411,00	11,82	-91.094.077.949,00	-17,34	119.600.880.848,31	17,53	48.288.409.945,15	- 8,08
Penerimaan Pembiayaan	-	-	65.269.108,58	0,43	2.472.672,74	0,02	24.990.169.471,48	78,09	-	100
Pengeluaran Pembiayaan	-1.000.000.000,00	-100	-1.000.000.000,00	-100	-1.000.000.000,00	-100	-1.000.000.000,00	-100	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 (audited), 2021 (unaudited)

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah)

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan kabupaten adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dengan memanfaatkan dan mengalokasi sumber daya yang ada. Dengan mempertimbangkan kondisi kekinian Kabupaten Nagan Raya berikut permasalahan pembangunan, serta tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi, maka agenda pembangunan kedepan harus dirumuskan ke dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang mampu menyelesaikan isu-isu strategis dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang jelas dan terukur selama periode tahun 2023-2026. Dalam konteks ini, perumusan strategi-strategi pembangunan yang tepat dan terarah selama tahun 2023-2026 penting diberi fokus. Strategi ini dirancang sesuai dengan kondisi kekinian yang sedang dan diperkirakan akan dihadapi oleh Kabupaten Nagan Raya.

Permasalahan kemiskinan yang masih tinggi merupakan isu krusial yang dihadapi oleh Kabupaten Nagan Raya. Kendatipun sebelum 2020 telah menunjukkan grafik penurunan yang landai, namun adanya pandemi Covid 19 menjelang pertengahan tahun 2020 telah menyebabkan angka kemiskinan di Kabupaten ini kembali mengalami kenaikan. Pada Maret 2021, angka kemiskinan di Nagan Raya adalah sebesar 17,02%, menurun 0,68 poin dibanding dengan Maret 2020 (17,07%). Dampak pandemi ini juga menyebabkan terjadinya kenaikan angka pengangguran sebagai akibat terganggunya lapangan usaha ekonomi di daerah ini, khususnya di sektor informal. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak orang yang kehilangan mata pencaharian (usahanya tutup) dan terbatasnya ruang gerak sehingga menyebabkan produktivitas menurun. Begitu juga halnya dengan angka IPM. Pada tahun 2020 angka IPM Nagan Raya masih 69,18%, atau dibawah angka rata-rata Nasional (71,94 persen) dan juga dibawah rata-rata Aceh (71,99 persen).

Berbagai faktor pembatas, termasuk adanya pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir ini telah berimbas pada kurangnya daya dorong pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya menjadi relatif rendah, mengalami penurunan di triwulan ketiga 2020, yakni hanya tumbuh 3,54 persen. Saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya mulai kembali bergerak naik meskipun masih relatif rendah jika dibandingkan dengan sejumlah kabupaten atau kota lain di Aceh.

Secara sektoral, Nagan Raya dilimpahi oleh berbagai potensi sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, serta sumberdaya mineral (pertambangan). Dari kontribusi dalam PDRB Nagan Raya sektor pertanian

(perkebunan, peternakan dan perikanan) selama 5 tahun terakhir ini mencapai kisaran 35-45 persen. Disusul sektor perdagangan dengan kontribusinya sebesar 11,49 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan sendiri relatif masih rendah, yakni hanya 6,96 persen. Ini mengindikasikan bahwa hasil produksi pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan langsung di daerah ini selama ini pada umumnya masih dijual tanpa melalui proses pengolahan, sehingga bukan produk jadi atau setengah jadi. Artinya, berbagai potensi ekonomi yang dimiliki ini belum dikelola secara baik, sehingga tidak menghasilkan nilai tambah yang tinggi bagi daerah dan pelaku usahanya.

4.1. Permasalahan Pembangunan Nagan Raya

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Nagan Raya dalam 5 tahun terakhir menunjukkan arah yang positif. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan dan penyempurnaan melalui akselerasi atau percepatan proses pembangunan daerah yang lebih terarah. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama ini telah diupayakan secara optimal, namun demikian belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan yang ada. Berbagai kendala masih dihadapi oleh pemerintah daerah baik dikarenakan kompleksitas permasalahan dan isu-isu strategis yang mengemuka, juga disebabkan oleh terbatasnya anggaran pembangunan yang tersedia.

Lebih lanjut terjadinya pandemi Covid-19 dalam dua terakhir ini ikut menambah beban dan kompleksitas permasalahan di daerah. Kondisi ini menyebabkan tuntutan untuk menjawab tantangan pembangunan yang ada semakin besar dan tidak ringan. Disaat yang sama kehidupan masyarakat di Nagan Raya pun semakin dinamis seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di daerah ini.

Salah satu permasalahan yang paling penting yaitu pelaksanaan kehidupan berdemokrasi diantaranya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada. Jumlah pemilih Nagan Raya yang memiliki hak suara pada pemilu 2019 adalah 120.805 pemilih, dan pengguna hak pilih 102.983 pemilih dengan persentase sebesar 85,23 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari Provinsi Aceh sebesar 79,7 persen dan partisipasi nasional sebesar 81,69 persen. Untuk itu perlu adanya upaya dalam peningkatan penggunaan hak pilih di Kabupaten Nagan Raya agar lebih maksimal.

Dilandasi oleh pertimbangan di atas, maka program yang dirancang didalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk periode tahun 2023-2026 hendaknya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Dengan upaya ini keinginan masyarakat Nagan Raya menggapai harapan perbaikan taraf kehidupannya dapat direalisasikan lebih maksimal.

4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan yang berkaitan dengan Aspek Geografi dan Demografi dapat ditelaah dari karakteristik lokasi dan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi. Masing-masing permasalahan untuk aspek ini diuraikan sebagai berikut:

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Nagan Raya memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi oleh jalan nasional yang merupakan jalur pantai Barat Sumatera yang menghubungkan Ibukota Provinsi Aceh dengan wilayah kabupaten di pesisir barat selatan. Selain itu wilayah ini juga dilintasi oleh jalan strategis Nasional yang menghubungkan wilayah Pantai Barat – wilayah Pantai Timur dan Tenggara melalui Kabupaten Aceh Tengah. Namun sampai saat ini Nagan Raya belum dapat menggunakan manfaat yang dapat diperoleh dari posisi yang sangat strategis karena dilintasi jalan nasional tersebut. Manfaat yang dapat digunakan antara lain dengan cara membangun sentra-sentra produksi UMKM dan akses pemasarannya.

B. Wilayah Rawan Bencana

Dalam beberapa tahun terakhir, bencana yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya antara lain: banjir genangan, abrasi pantai, longsor, erosi, dan kebakaran lahan. Banjir genangan merupakan bencana tahunan yang melanda beberapa kawasan yaitu Kecamatan Tripa Makmur, Tadu Raya, Kuala Pesisir dan Darul Makmur. Bencana tanah longsor juga sering terjadi di jalan Lintas Tengah Aceh yaitu di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang merupakan wilayah perbukitan yang curam (Singah Mata). Selain itu, bencana kebakaran lahan yang diakibatkan baik oleh faktor alam yaitu cuaca ekstrim pada musim kemarau maupun faktor kesadaran manusia yang rendah akan kepeduliannya terhadap lingkungan.

C. Demografi

Dilihat dari distribusinya, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Darul Makmur sebesar 46.412 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu sebesar 1.190 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2020 mencapai 48 Jiwa/Km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Seunagan mencapai 281 Jiwa/Km². Dan Kecamatan dengan kepadatan

penduduk terkecil yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu 5 Jiwa/Km². Laju pertumbuhan penduduk di Nagan Raya mencapai 1,83 persen sementara laju pertumbuhan penduduk di Aceh 1,65 persen. Hal ini menandakan bahwa beban pertumbuhan penduduk di nagan raya sangat tinggi.

4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan yang mencakup pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan Aceh, Laju Inflasi, Pendapatan per kapita, Ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya sebesar 4,05 persen. Pada tahun 2019 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya mencapai 6,77 persen merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3,12 persen. Kondisi ini lebih tinggi angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebesar 2,82 persen namun masih lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 3,51 persen.

2. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per-kapita atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,61 persen per-tahun. berdasarkan ADHK tersebut, pendapatan per-kapita penduduk Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu antara 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan ADHK. Hingga tahun 2021, pendapatan per-kapita ADHK penduduk Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar Rp. 19,53 juta, yang meningkat secara rata-rata 3,61 persen per-tahun, dimana pada tahun 2017, saat itu nilai pendapatan per-kapita ADHK penduduk Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar RP. 19,17 juta.

3. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2017 persentase kemiskinan Kabupaten Nagan Raya sebesar 19,34 persen. Tahun 2018 samapi dangan tahun 2020 di tingkat kemiskinan juga mengalami perubahan penurunan masing-masing di angka 18,97 persen, 17,79 persen dan 17,07. Begitu juga halnya untuk tahun 2021 tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 18,23 persen. Namun

kondisi kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya masih jauh tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Aceh sebesar 15,33 persen dan Nasional sebesar 9,71 persen pada tahun 2021.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 sebesar 3,5 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh sebesar 2,95 dan Nasional sebesar 1,67. Selanjutnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 sebesar 0,94 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh sebesar 0,81 dan Nasional sebesar 0,42.

4. Laju Inflasi

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Nagan Raya dapat dicermati dari angka inflasi Kabupaten Meulaboh. Mengutip publikasi data BPS, pada tahun 2021, data yang ada menunjukkan, tingkat inflasi di Kota Meulaboh pada tahun 2017 dan tahun 2021 berada di atas rata-rata nasional, dan bahkan berada di atas Banda Aceh. Namun pada tahun pada tahun 2018 tingkat inflasi di Kota Lhokseumawe berada di bawah angka nasional akan tetapi dibawah rata-rata Aceh. Tingkat inflasi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 mengalami penurunan di bawah rata-rata Aceh bahkan di bawah rata-rata nasional.

Namun pada tahun 2021 posisi ini berubah menjadi tertinggi baik di tingkat rata-rata nasional maupun di tingkat rata-rata provinsi. Perkembangan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Nagan Raya yang tergambar dari laju inflasi selama ini mulai menunjukkan kecenderungan dapat lebih terkendali dan terjaga dengan cukup baik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan yang perlu tetap dipertahankan, agar daya beli masyarakat tetap dapat menjangkau upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok masyarakat miskin.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Nagan Raya pada tahun 2021 sebesar 69,31 dan masuk dalam kategori "sedang". Pencapaian ini meningkat 1,53 poin dari indeks tahun 2017 yang tercatat 67,78. Angka tersebut menunjukkan angka IPM Nagan Raya berada di bawah rata-rata Aceh pada tahun 2021 yaitu sebesar (72,18) dan Nasional (72,29). Dan posisi Kabupaten Nagan Raya berada pada peringkat 16 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017 sampai dengan 2021.

6. Ketimpangan Pendapatan

Indeks gini Kabupaten Nagan Raya tahun 2019 adalah 0,252 menunjukkan bahwa di Kabupaten Nagan Raya pemerataan pendapatan penduduk masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Walaupun mengalami fluktuasi dari tahun 2017 s/d 2021 namun masih tergolong kesejangannya rendah dan berada dibawah indeks Aceh dan Nasional. Peningkatan ketimpangan ini berbanding terbalik dengan laju indeks gini di Provinsi Aceh dan Indonesia. Untuk indeks gini Provinsi Aceh dan Indonesia, trendnya terus mengalami penurunan.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan selama kurun waktu 4 (empat) Tahun terakhir. Pada tahun 2017, TPT Kabupaten Nagan Raya sebesar 4,11 persen meningkat menjadi 4,99 persen pada tahun 2021. Kondisi ini masih berada dibawah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Aceh sebesar 6,30 persen dan Nasional sebesar 6,49 persen pada tahun 2021.

4.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

1. Pendidikan Islami

Pendidikan Islami adalah proses pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai islami yang bertujuan untuk memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan islami di Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal. Beberapa lembaga pendidikan islami yang merupakan lembaga formal seperti Madrasah-madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama dan sekolah islam terpadu yang dikelola oleh pihak swasta. Selain itu terdapat sejumlah lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dan dayah yang dikelola oleh ulama-ulama terkemuka di Kabupaten Nagan Raya.

2. Keagamaan Syariat Islam

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist dengan tujuan terciptanya kemaslahatan dan kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan pengawasan terhadap penegakan Syari`at Islam di Kabupaten Nagan Raya, diperlukan koordinasi yang baik antara

pihak-pihak terkait seperti Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan Wilayahul Hisbah termasuk unsur TNI dan POLRI. Syariat Islam harus dipahami sebagai suatu rahmat sehingga dalam pelaksanaannya akan timbul suatu kesadaran untuk melaksanakannya secara ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan kondisi pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya masih menunjukkan permasalahan salah satunya ditinjau dari rata-rata jamaah mesjid per waktu shalat. Pada tahun 2017 jumlah jamaah sebanyak 32 Orang dan mengalami peningkatan menjadi 38 Orang pada tahun 2021. Begitu pula jumlah mesjid yang melaksanakan sholat 5 (lima) waktu secara rutin masih dikategorikan rendah bila dibandingkan dengan total mesjid yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2017 jumlah mesjid yang melaksanakan sholat 5 (lima) waktu secara rutin sebanyak 48 mesjid dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 55 mesjid yang melaksanakan sholat 5 (lima) waktu secara rutin pada tahun 2021.

B. Layanan Urusan Wajib

1. Layanan Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

- Berdasarkan data tahun 2012, persentase penduduk usia 4-6 tahun yang telah memasuki TK/RA sebesar 18,71 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.430) orang. Sedangkan pada tahun 2020 partisipasi penduduk usia 4-6 tahun mengalami peningkatan yaitu menjadi 28,94 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.575) orang.
- Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir terlihat bervariasi. Pada Tahun 2019, APK tingkat SD/MI sebesar 109,30 persen, turun menjadi 107,85 persen pada tahun 2020. Untuk tingkat pendidikan SMP/MTs, capaian APK pada tahun 2019, tercatat APK tingkat SMP/MTs sebesar 103,50 persen dan menurun menjadi 100,24 persen tahun 2020. Untuk tingkat pendidikan SMA/SMK/MA, capaian APK pada tahun 2019 sebesar 81,57 persen dan meningkat menjadi 85,15 persen tahun 2020.
- Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 sebesar 8,25 Tahun dan terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 8,69 Tahun. Kondisi ini masih rendah bila dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh sebesar 9,77 Tahun dan Nasional sebesar 8,97 Tahun.

b. Kesehatan

- Pada tahun 2017 di Kabupaten Nagan Raya jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 33 bayi dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 2.926 bayi. Mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 52 Angka Kematian Bayi (AKB) dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 2.734 bayi. Kondisi Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Nagan Raya masih tinggi bila dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Provinsi Aceh sebanyak 11 bayi per 1000 Kelahiran hidup.
- Pada Tahun 2019 AKABA Kabupaten Nagan Raya turun menjadi 60 balita per 1000 kelahiran hidup. Untuk mencapai target penurunan kematian balita, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi balita menjadi prioritas utama.
- Dalam lima tahun terakhir kasus kematian ibu di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat drastis. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Nagan Raya sebesar 99.8%, dan semakin meningkat drastis pada tahun 2021 sebesar 438.91%. Angka ini tergolong cukup tinggi. Untuk itu perlu upaya-upaya untuk terus menekan kasus kematian ibu, yang pada akhirnya diharapkan tidak ada lagi kematian ibu selama hamil, melahirkan, dan nifas pada tahun yang akan datang.
- Pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup Kabupaten Nagan Raya adalah 69,22 Tahun. Kondisi ini masih di bawah rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Aceh yaitu 69,96 Tahun dan rata-rata nasional yaitu 71,57 Tahun.
- Bupati Nagan Raya telah menetapkan beberapa lokus pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten Nagan Raya yang memenuhi standar indikator World Health Organization (WHO) yaitu dengan prevelensi stunting diatas 20 % dan lokasi dengan permasalahan yang tinggi terhadap sanitasi dan air bersih yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2021 pravelansi stunting di Kabupaten Nagan Raya sebesar 37,32 persen. Kondisi ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan prevelansi stunting Provinsi Aceh sebesar 33,20 persen dan prevelansi stunting Nasional sebesar 24,40 persen.
- Kabupaten Nagan Raya pertama sekali terjadi lonjakan kasus pada bulan Agustus Tahun 2020 dengan jumlah 17 kasus dan meninggal 4 Kasus, meningkat menjadi 68 kasus pada bulan September dengan jumlah

yang meninggal 7 kasus, kemudian pada bulan Oktober menurun menjadi 40 kasus, yang meninggal 5 kasus.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Panjang jalan Kabupaten dengan kondisi baik masih sangat kecil persentasenya sebesar 26,6 persen atau setara dengan 246.124 Km dari total panjang jalan Kabupaten yaitu 924.421 Km.
- Rasio panjang jalan Kabupaten Nagan Raya adalah sebesar 1,12 tahun 2012 menurun menjadi 0,163 pada tahun 2019. Hal ini berarti dalam 0,163 meter panjang jalan melayani 1 (satu) orang penduduk pada tahun 2019.
- Persentase perbandingan terhadap Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk dengan Rasio 6/222 atau sebesar 0,027

d. Sanitasi

- Akses air minum layak pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 86,29 %. Adapun kriteria yang digunakan untuk menghitung pencapaian akses air minum layak terdiri dari Jaringan Perpipaan dan jaringan bukan perpipaan. Untuk jaringan bukan perpipaan terdiri dari : sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindung dan penampungan air hujan serta depot air minum. Untuk jaringan perpipaan, akses air minum tahun 2021 hanya 4,27%.

e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, perkembangan rumah layak huni sampai 2019 sebesar 0,431 persen.

f. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Stabilitas kondisi politik dan keamanan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keadaan yang kondusif tersebut akan menciptakan suasana aman, tertib, tentram dan damai guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tujuan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis.

g. Sosial

- Pemerintah Kabupaten Nagas Raya melalui Dinas Sosial berupaya keras dalam melakukan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Sosial (PMKS) guna mengurangi jumlah penurunan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, diantaranya seperti kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/keterpencilan, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi

2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Ketenagakerjaan

- Tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Nagas Raya masih rendah. Tahun 2017, tingkat partisipasi Angkatan kerja sangat menonjol, yaitu mencapai 26,75 persen. Berdasarkan komposisi usaha yang paling banyak penduduk bekerja di sektor pertanian sebesar 42,26 persen. Kemudian sektor industry pengolahan penduduk yang bekerja sebesar 37,71 persen. Kemudian penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebesar 20,02 persen.

b. Pangan

- Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Pada tahun 2012-2019 terjadi surplus beras dan pangan setara beras di Kabupaten Nagas Raya. Hal ini menunjukkan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk masih terjadi surplus yang dapat dikonsumsi penduduk di luar Kabupaten Nagas Raya.

c. Kepemudaan dan Olahraga

- Pemerintah Kabupaten Nagas Raya telah membangun dan mengembangkan berbagai sarana olahraga yang tersebar di kecamatan dan ibukota Kabupaten Nagas Raya dengan jumlah lapangan/sarana olahraga pada sampai dengan tahun 2021 berjumlah 236 unit . Jumlah klub olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Nagas Raya sampai tahun 2021 adalah sebanyak 225 klub olah raga dengan jumlah cabang olah raga sebanyak 23 cabang.
- Minimnya jumlah prestasi olahraga ini juga sangat dipengaruhi dengan jumlah atlet yang berprestasi yang juga mengalami penurunan, pada tahun 2016 hanya ada 3 orang atlet yang berprestasi, yaitu atlet canagn olahraga silat, taekwondo dan bulutangkis. Hal ini juga disebabkan karena sedikit sekali pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Nagan Raya terhadap para atlet muda, hal ini ditunjukkan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 pembinaan tersebut mengalami penurunan yaitu 0,29% pada tahun 2016. Selanjutnya untuk tahun 2017 Jumlah prestasi adalah 5 prestasi, meningkat di tahun 2018 menjadi 17 prestasi, masih terus meningkat di tahun 2019 menjadi 22 prestasi. Dan ditahun 2020 Jumlah prestasi di bidang olah raga kembali menurun hingga mencapai 8 prestasi.

d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. dikarenakan beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan maupun kemauan dalam berpartisipasi untuk mengatasi berbagai rintangan yang dihadapi di lembaga pemerintah dan faktor-faktor lainnya.

e. Pertanahan

- Konflik atas tanah yang berkepanjangan, yang melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut, bahkan cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya, seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah.

f. Lingkungan Hidup

- Disadari bersama bahwa dalam pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, namun peran swasta dan masyarakat harus dilibatkan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Adapun timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 sebesar 19,56 persen dan terus meningkat menjadi 26,37 persen pada tahun 2021.
- Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau yang masih rendah sebesar 7,80% dari 30 % dari luas kawasan perkotaan sebesar 743.97 Ha.

g. Perhubungan

- Selama tahun 2012-2019, rasio panjang jalan kabupaten terhadap kendaraan penumpang di Kabupaten Nagan Raya berfluktuatif. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi dari pertumbuhan pertambahan pembangunan jalan dan pertumbuhan jumlah kendaraan penumpang.

h. Koperasi dan UKM

- Kabupaten Nagas Raya memiliki potensi usaha kecil dan menengah (UKM) yang cukup menggembirakan. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nagas Raya tahun 2020, mencatat bahwa jumlah industri tradisional di Nagas Raya adalah sebanyak 3587 unit pada tahun 2019. Penyumbang terbanyak pada industri ini di tahun 2019 adalah industri dari besi dan industri jasa, masing-masing sebanyak 967 unit. Jumlah industri barang lainnya berada pada posisi berikutnya, yaitu makanan dan tembakau dan industri dari bahan galian, masing-masing sebanyak 772 unit.
- Dampak COVID-19 bagi pelaku UMKM terhadap produktivitas yang dihasilkan mengalami penurunan sehingga perlu adanya bantuan modal untuk pengembangan usaha. Selain itu, koperasi aktif hanya sebesar 66,43 persen dari 195 koperasi yang ada. Pembinaan koperasi masih rendah yaitu sebanyak 30 koperasi, untuk itu pemberdayaan koperasi menjadi penting terhadap keberlangsungan aktivitas pelaku usaha.

3. Layanan Urusan Pilihan

a. Kebudayaan

Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Nagas Raya masih rendah dan belum menjadi perhatian khusus. Hal ini terlihat dari tidak ada pemeliharaan 3 cagar budaya yang dikelola khusus oleh Pemerintah Daerah serta masih minimnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 4 benda dari 80 item. Selain itu, tidak ada event kebudayaan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Nagas Raya untuk peningkatan pelestarian kebudayaan lokal maupun nasional.

b. Pariwisata

Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagas Raya belum dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa kawasan wisata yang sudah dijadikan tujuan wisata, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang sektor pariwisata. Begitu juga dengan promosi wisata belum dikemas dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nagas Raya. Jika sektor pariwisata dikembangkan dengan baik maka akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pengembangan ekonomi daerah serta dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor jasa lainnya.

c. Pertanian dan Kehutanan

Dalam kurun waktu tahun 2015-2020 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang berada di sekitar angka 35-45 persen. Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan subsektor yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kontribusi yang mencapai 30-40 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku.

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam upaya mendukung stabilisasi distribusi kelistrikan di wilayah pantai timur, tengah, dan pantai barat, serta wilayah selatan Aceh, pemerintah pusat telah membangun PLTU di Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Adanya pembangkit listrik tersebut diharapkan masalah kelistrikan di Kabupaten Nagan Raya, termasuk wilayah pantai barat-selatan Aceh dapat teratasi secara berkelanjutan serta berdampak positif terhadap percepatan aktivitas ekonomi masyarakat.

e. Perdagangan

Saat ini, pusat perdagangan terbesar di Kabupaten Nagan Raya terdapat di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, dan Jeuram, Kecamatan Suka Makmue. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Nagan Raya yaitu selalu di atas 10 persen pada 2015-2019.

f. Perindustrian

Sektor industri yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya hanya subsektor industri nonmigas. Dilihat dari segi kontribusi atau peranannya terhadap PDRB Kabupaten Nagan Raya, sektor ini memiliki kontribusi di atas dua persen dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Kontribusi ini relatif masih kecil dalam membentuk perekonomian yang kuat di kabupaten Nagan Raya. Walaupun begitu, kontribusinya memiliki tren naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 kategori ini memiliki kontribusi sebesar 2,36 persen dan naik menjadi 3,53 persen pada tahun 2016. Dan Pertumbuhan industri pengolahan naik lagi sebesar 6,96% di tahun 2019.

g. Kelautan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Nagas Raya yang tergarap saat ini masih relatif menggembirakan. Implikasinya, produksi perikanan laut berfluktuatif sepanjang delapan tahun terakhir. Tahun 2012, produksi perikanan laut 279.57 ton. Jumlah produksi perikanan laut tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2.865.29 ton atau senilai Rp. 47.478.519.000,-. Produksi perikanan laut tersebut tertinggi selama delapan tahun terakhir.

h. Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Nagas Raya telah menetapkan 5 lokasi transmigrasi dari tahun 2017-2021. Tahun 2017, penempatan jumlah KK pada 5 lokasi transmigrasi tersebut sebanyak 538 KK. Dan meningkat pada tahun 2021 sebanyak 571 kepala keluarga dari 5 lokasi tersebut. Adapun untuk transmigrasi lokal 4 lokasi dari tahun 2017-2021 penempatan jumlah KK terus meningkat di tahun 2021 jumlah KK yang menetap sebanyak 240 KK. Di lokasi transmigrasi lokal banyak fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai perlu peningkatan jalan, jembatan, gorong-gorong, UPT Ujong Lamie listrik belum memadai ada 22 KK yang belum memiliki listrik.

4. Penunjang Urusan Pilihan

a. Perencanaan Pembangunan

Lingkup perencanaan pembangunan merupakan salah satu layanan urusan wajib yang paling penting dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Nagas Raya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Keuangan

Capaian indikator pengelolaan keuangan Kabupaten Nagas Raya telah Seperti Opini BPK terhadap laporan keuangan, persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan persentase belanja pendidikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kepegawaian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan roda pemerintahan belum maksimal dikarenakan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna pengembangan *e-government* (sistem elektronik pemerintahan). Dalam hal ini proses kebijakan *simpeg* (administrasi kepegawaian elektronik) masih dalam pengembangan sehingga pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum optimal terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

d. Penelitian dan Pengembangan

Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

e. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan memberikan informasi seperti persentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi maupun keuangan.

4.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita Kabupaten Nagas Raya dari tahun 2015 sampai 2019 terus meningkat. Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita tahun 2019 telah mencapai 20.07 juta rupiah. Nilai ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya mencapai 16.83 juta rupiah.

b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor pada suatu daerah atau antar daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah.

c. Iklim Berinvestasi

Beberapa faktor penyebab belum optimal investasi di Nagas Raya antara lain adalah:

- belum optimalnya promosi investasi;
- lemahnya dukungan regulasi investasi
- belum adanya insentif, kemudahan investasi dan jaminan keamanan bagi investor.
- Lahan Terbatas untuk sektor perkebunan.

Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan beberapa hal:

- peningkatan promosi investasi;
- menyediakan regulasi, insentif, kemudahan dan jaminan keamanan bagi investor.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang kreatif, terampil, disiplin, produktif, dan profesional serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan pembangunan.

4.2. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang ditangani melalui proses pembangunan Kabupaten Nagas Raya tetap mencermati isu-isu strategis yang terjadi di tingkat Aceh dan nasional. Keseluruhan isu strategis diupayakan untuk ditangani dengan mengimplementasi program dan kegiatan yang tepat. Isu strategis merupakan perbedaan (*gap*) antara kondisi saat ini (*existing condition*) dengan harapan yang tergambar lewat tujuan pembangunan selama periode 2023-2026 sebagai masa transisi.

Adapun isu-isu strategis nasional, provinsi, dan Nagas Raya antara lain sebagai berikut:

a) Isu strategis untuk lingkup nasional meliputi:

1. Peningkatan produktivitas dan skala ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan (melalui *food estate* dan korporasi petani dan nelayan);
2. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per

- kapita (melalui pengembangan *major project* pengembangan industri dan UMKM terpadu;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan (jalan tol dan pembangkit listrik);
 4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan
 5. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

b) Isu strategis di Aceh meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana;
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan;

Adapun Isu Strategis Kabupaten Nagan Raya

Adapun isu-isu strategis pembangunan yang ada di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Demokrasi

Kabupaten Nagan Raya salah satu juga Kabupaten berada dibawah Pemerintah Aceh sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, akan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu menyiapkan pendanaan yang mencukup dan fasilitas yang memadai. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga perlu mendorong pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan dan bebas money politic dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan keterwakilan perempuan dalam pesta demorasi tersebut.

2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Masih terdapat hal-hal yang berkaitan dengan masih kurangnya kemampuan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membangun profesionalisme, kompetensi, dan integritas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dengan meningkatkan moral, kejujuran, dan ketulusan dalam bekerja;
- b. Meningkatkan pelayanan publik atau pelayanan umum yang bersifat responsif/aktif;
- c. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan praktik *good and clean governance* mencakup penguatan gerakan anti korupsi, transparansi, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), penguatan audit internal, dan partisipasi masyarakat madani dalam membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab;
- d. Penguatan azas akuntabilitas berupa pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan Penguatan manajemen sistem informasi yang meliputi: pengelolaan *database* dan *monitoring* dan pengendalian

3. Pelaksanaan Syariat Islam dan Keistimewaan Aceh

Dalam hal pelaksanaan penerapan syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran di kalangan anak anak, orang dewasa dan lanjut usia diupayakan melalui kegiatan berupa kelompok pengajian membaca Al Quran dengan memberdayakan balai-balai dan meunasah pada setiap gampong. Mengoptimalkan peran ulama dalam pembangunan dan peningkatan SDM tentang syariat Islam juga penting dalam mempengaruhi minat belajar Al quran dan

ilmu agama di kalangan masyarakat. Upaya ini dilakukan bersamaan dengan peningkatan pelatihan dan pemberian beasiswa dalam ikhtiar mencetak ulama di lembaga pendidikan yang ada. Selanjutnya, kegiatan dan event-event islami yang masih kurang pembinaannya selama ini perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, ketersediaan pendanaan yang memadai perlu disediakan oleh pemerintah daerah, baik melalui APBK maupun sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Disamping itu, perhatian terhadap peningkatan minat pemuda dalam pemahaman syariat Islam penting diberikan. Untuk hal tersebut, peran pemuda dalam pelaksanaan syariat Islam perlu dibina dengan baik terutama melalui pemberdayaan karang taruna yang ada serta sosialisasi dan pembinaan pemuda tentang bahaya aliran sesat. Secara bersamaan, penting juga diberikan perhatian terhadap keberadaan regulasi yang berkaitan dengan kelengkapan instrumen hukum/pembinaan tentang penguatan syariat Islam (narkoba, hari besar Islam, waktu shalat, waktu adzan, pakaian, olahraga, pertunjukan kesenian dan rekreasi). Pembentukan instrumen hukum ini dinilai sangat penting dalam rangka penguatan implementasi syariat Islam di daerah Nagasari.

Penanganan perdamaian yang masih menyisakan pekerjaan rumah adalah pemberdayaan ekonomi, terutama janji penyediaan lahan. Umumnya penyediaan lahan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada mantan kombatan/tapol napol dan korban konflik hanya berupa pembagian lahan tanpa adanya legalitas (pengurusan sertifikat tanah) dan tidak diikuti dengan program pengembangan ekonomi yang konkrit. Sebahagian dari tanah yang dibagi tersebut masih berupa kawasan hutan produksi atau hutan produksi terbatas yang masih membutuhkan proses yang panjang sehingga dapat dimanfaatkan. Begitu halnya mengenai Bidang Keistimewaan, Syariat Islam dan Perdamaian Aceh, dengan tujuan untuk memantapkan sistem pendidikan dayah, Kelanjutan program reintegrasi serta Kelanjutan program kelembagaan asimetris.

4. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Isu pelayanan pendidikan yang berkualitas di tujukan untuk meningkatkan aksesibilitas sektor pendidikan dasar dan menengah keseluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya aksesibilitas sektor pendidikan diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, dan angka melek huruf. Disamping itu dalam rangka mencapai

pelayanan pendidikan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan pemerataan guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan kualifikasi tenaga pendidikan. Isu ini juga diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan pendidikan vokasional yang unggul dan berdaya saing.

Berkaitan dengan upaya peningkatan literasi masyarakat, dapat dilakukan dengan optimalisasi fasilitas dan pelayanan pustaka daerah maupun gampong. Selain itu juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu kunci penting untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Nagan Raya. Layanan pendidikan yang baik dan layak akan memotivasi dan memudahkan masyarakat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga berdampak pada perbaikan kualitas SDM. Dengan modal keterampilan yang tinggi akan memperbesar peluang mereka meraih kesempatan kerja dalam dunia kerja. Peningkatan peran *skill development center* (SDC) perlu terus didorong untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan dapat diterima di pasar tenaga kerja. Selain itu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menjadi fokus dalam peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.

5. Penanggulangan Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrem

Kabupaten Nagan Raya masih mengalami masalah tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di kabupaten ini berada di atas rata-rata angka nasional dan rata-rata Aceh. Adanya pandemi Covid 19 turut menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan di Nagan Raya. Selain persentase kemiskinan yang tinggi, Kabupaten Nagan Raya juga harus memastikan terpenuhinya layanan dasar, jaminan dan perlindungan sosial, serta meningkatkan pendapatan masyarakat minimal di atas garis kemiskinan ekstrem (setara 1,9 USD) per hari.

Sarana dan prasarana pertanian dan perikanan termasuk pasar rakyat dan pasar induk perlu dioptimalkan serta dikembangkan. Hal ini penting untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Pendekatan untuk menangani persoalan dan sasaran di atas bersifat menyeluruh dan multi sektoral. Dalam hal ini beberapa kebijakan dapat ditempuh antara lain seperti penciptaan iklim usaha yang kondusif dan prospektif, sehingga kegiatan pembangunan dapat berlangsung dan diarahkan lebih bersifat intensif tenaga kerja (*labor intensive*) di masing-masing sektor baik langsung maupun tidak langsung. Disamping itu, kebijakan sektoral juga ditempuh untuk meningkatkan nilai tukar petani. Dalam konteks ini, proses perencanaan dan pelaksanaan usaha

yang berorientasi perluasan kesempatan kerja terus diupayakan, khususnya di daerah-daerah padat penduduk, miskin, dan juga di daerah-daerah pemukiman baru.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan keahlian dan pengembangan sarana pendukung usaha serta akses permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan upaya ini diharapkan dapat mendorong masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dalam bidang kesehatan difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan fasilitas kesehatan, kualitas, dan kuantitas tenaga kesehatan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sarana dan prasarana yang ada termasuk lingkungan serta mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Melalui penanganan isu strategis ini, maka pelayanan kesehatan diharapkan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat secara berkualitas, terukur, dan akuntabel. Pemasalahan yang masih ditemui antara lain adalah masih adanya angka kematian bayi sekitar 12/1000 kelahiran dan terjadinya kematian balita 13/1000 bayi yang hidup. Disamping itu, masih ada jumlah bayi ber gizi buruk sekitar 16/1000 bayi. Untuk itu, permasalahan ini harus mampu ditekan sekecil mungkin dan seoptimal mungkin dapat ditiadakan. Isu *stunting* juga mesti diberikan perhatian mengingat angka *stunting* di Nagan Raya masih 27,17 persen, atau melebihi angka nasional yang hanya 20,0 persen. Sementara itu, jumlah puskesmas dan posyandu sudah memadai dengan ratio 1 : 78. Namun, yang harus dioptimalkan adalah peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan dan obat-obatan.

Angka penularan Covid19 di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan angka dalam beberapa bulan terakhir terus mengalami penurunan dengan ditandai berkurangnya kasus harian yang ditemukan. Meskipun demikian tingkat kewaspadaan dan upaya pencegahan tidak boleh lemah. Hal ini penting mengingat perkembangan pandemi Covid 19 sangat dinamis, di mana setiap saat dapat bermutasi menjadi varian-varian baru yang lebih berbahaya. Untuk itu penanganan Covid 19 saat ini lebih menitikberatkan pada penciptaan imunitas masyarakat melalui perluasan cakupan vaksisasi, dan aksi pencegahan lainnya seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, menunda atau membatasi perjalanan dan juga mengiringi dengan doa.

Masih tingginya kasus *stunting* memberikan implikasi buruk terhadap pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Nagas Raya. *Stunting* mengancam kualitas dan produktivitas sumber daya manusia (SDM). Anak-anak yang *stunting* rentan diserang oleh berbagai penyakit, sehingga akhirnya dapat menurunkan perkembangan daya saing SDM. Intervensi untuk menurunkan angka *Stunting* dilakukan secara terintegrasi dengan fokus pada upaya percepatan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi *stunting* terintegrasi. Ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pencapaian penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Nagas Raya. Pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* juga merupakan bagian dari isu strategis nasional yang intinya untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, kreatif dan produktif.

7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan serta Pengelolaan UMKM, Pengembangan Agrobisnis dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Kabupaten Nagas Raya

Perkembangan perekonomian di Nagas Raya dapat dilihat melalui laju pertumbuhan PDRB. dalam kurun waktu 2017-2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagas Raya menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, meskipun sedikit berfluktuasi. Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Nagas Raya dengan kontribusi mencapai 44,99% dari total PDRB, meskipun perannya terus cenderung menurun. Hal ini terlihat dari tren pertumbuhan PDRB sector pertanian yang menurun dari 6,1% pada tahun 2017 menjadi 1,99% di tahun 2021. Kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten, terkait penetapan dan pengembangan sektor unggulan yang selalu mampu memacu pertumbuhan ekonomi pada trend yang positif sangat diperlukan. Dalam menciptakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah sangat besar dalam memberikan kontribusi dengan suatu kebijakan untuk mengalokasikan pengeluaran pemerintah dengan memprioritaskan sektor pertanian sebagai sektor unggulan, dimana peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan pembangunan pada sektor pertanian memungkinkan pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dan secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan penduduk kabupaten. Dalam hal ini, pengembangan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan diikuti dengan meningkatkan diversifikasi pangan.

Kendatipun nilai kontribusi pertanian jauh lebih tinggi dibanding sektor lainnya, namun pertumbuhan sector ini relatif lambat. Di sisi lain, sektor non pertanian terus berkembang dengan memanfaatkan lahan pertanian. Hal ini

berpengaruh pada terjadinya pergeseran strata sosial dimana dari sebelumnya keluarga petani menjadi keluarga yang tidak lagi bertumpu mata pencahariannya pada sektor pertanian. Dalam kaitan ini, perlu dibentuk qanun/regulasi yang mengatur pemanfaatan dan penggantian lahan, khususnya lahan yang beralih fungsi dengan cara memperluas lahan pertanian. Upaya ini dapat dilakukan melalui pencetakan sawah baru dan mengoptimalkan sawah-sawah yang tidak produktif, dengan tetap memperhatikan RTRW Kabupaten Nagas Raya. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk ketahanan pangan yang memadai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan juga penting diberikan perhatian. Hal ini diikuti dengan penyediaan bibit unggul, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, sarana irigasi yang memadai, penyediaan alat-alat produksi pertanian, dan pengaturan musim tanam (serentak). Namun demikian, sektor pertanian tetap harus dipacu pada aspek off farm-nya dengan mendorong berkembangnya proses hilirisasi yang berbasis pertanian, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi petani dan memperbaiki nilai tukar petani. Jika ini dapat diwujudkan, maka harapan disparitas pendapatan di sektor pertanian tidak terpaut jauh dengan sektor non pertanian yang diperkirakan pertumbuhannya terus akan meningkat

Berdasarkan sebaran penggunaan lahan, di Kabupaten Nagas Raya penggunaannya terbagi atas tiga wilayah yaitu wilayah pantai, wilayah tengah, dan wilayah pedalaman. Wilayah pantai didominasi kegiatan sawah, wilayah tengah kegiatan perdagangan dan jasa serta sawah, dan wilayah pedalaman kegiatannya lebih dominan perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan kehutanan. Sesuai kondisi geografis dan topografi wilayahnya, terdapat lahan budidaya yang dinilai berpotensi untuk diarahkan peruntukannya bagi pengembangan sektor perkebunan dan hutan produksi. Ini tentunya juga membutuhkan perhatian dan fokus dengan menyusun dokumen konsep perencanaan pembangunan dimasa mendatang. Dengan demikian terdapat sinergi dan kesesuaian program-program yang diusulkan dalam perencanaan dengan konsep rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ada.

Potensi sektor perikanan terutama subsektor kelautan di Nagas Raya selama ini didukung dengan keberadaan fasilitas tempat pendaratan ikan (TPI) yang tersebar di sejumlah kecamatan pesisir, di samping juga adanya pelabuhan pendaratan ikan (PPI), beserta infrastruktur penunjang operasional lainnya. Namun demikian, upaya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor perikanan tersebut memerlukan keseriusan dan komitmen dari semua pihak. Dengan demikian, potensi sektor kelautan yang melimpah ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Semua ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai

kearifan lokal (local wisdom), terutama menyangkut dengan konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (sustainable development).

Kebijakan lain yang harus diambil oleh pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah menyiapkan skema hulu-hilir yang berbasis kawasan. Kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan mencapai 44,94 persen (2021), sementara kontribusi sektor perdagangan sebesar 11 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 6,72% terhadap PDRB ADHB Tanpa Migas (2021). Ke depan, para pelaku ekonomi diharapkan tidak lagi menjual bahan mentah, tetapi harus diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kabupaten Nagan Raya harus merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke pasar regional, provinsi, dan nasional. Untuk itu, harus disiapkan infrastruktur dan suprastruktur agar kegiatan ekspor dapat dilakukan melalui kepabeanaan dalam wilayah Aceh dan tidak lagi melalui provinsi lain. Dalam hal ini Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang cukup baik dalam pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT), berbasis ketersediaan bahan baku yang tersedia di daerah, seperti dari sektor perkebunan yang relatif besar sehingga menghasilkan produk turunan misalnya, proses penciptaan added value dengan merubah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO) yang sudah dimulai oleh 11 unit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Nagan Raya serta kawasan peternakan terpadu.

Selain itu, optimalisasi peran koperasi, usaha/kelompok usaha kecil dan menengah perlu juga dilakukan dengan dukungan pendampingan dan dana yang memadai. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat mengundang investor dengan melakukan promosi dan memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta mengusahakan agar keamanan daerah tetap kondusif.

8. Ketenagakerjaan, Penurunan Angka Pengangguran dan Perluasan Lapangan Kerja

Semakin tinggi dan beragamnya lulusan pendidikan, baik pendidikan menengah, kejuruan maupun pendidikan tinggi (universitas, politeknik, poltekkes dan lainnya) membutuhkan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Untuk itu, diperlukan peningkatan kompetensi keahlian lulusan melalui magang industri dan pelatihan/training pada lembaga asosiasi profesi yang sesuai dengan pasar kerja. Pemerintah dan pengusaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja/usaha baru, serta mengoptimalkan keberadaan Balai latihan kerja (BLK) yang sebelumnya kurang berfungsi. Pengiriman tenaga kerja profesional ke luar negeri, mengundang investor untuk berinvestasi, mengusahakan keamanan yang kondusif, dan

melaksanakan kerja sama investasi baik dengan investor lokal maupun investor asing juga perlu diupayakan ke depan. Selain itu, perlu mengaktifkan dan mengoptimalkan sentra sentra industri yang telah ada dan mempromosikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Kabupaten Nagan Raya. Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunkan angka kemiskinan dari 17,70 persen tahun 2021 menjadi minimal 13%-14% pada tahun 2023-2026.

9. Pembangunan Infrastruktur Strategis

Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana ikut mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Nagan Raya. Adanya wabah pandemi Covid-19 dalam dua terakhir ini juga ikut memperlemah kinerja ekonomi daerah ini. Meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya mulai pulih dan bergerak naik, namun masih relatif rendah dibanding dengan kabupaten/kota di seluruh di Aceh. Pada triwulan III 2021, pertumbuhan ekonomi Nagan Raya hanya tumbuh 3,02 persen.

Isu strategis untuk kegiatan pekerjaan umum untuk menunjang pertumbuhan ekonomi didominasi oleh pembangunan jalan kabupaten, jalan kecamatan, dan jalan desa, serta pengairan, air minum, dan drainase. Data terakhir (2021) menunjukkan bahwa, panjang jalan kabupaten yang telah dibangun seluruhnya 924,421 km, terdiri dari jalan kondisi baik 272,270 km, kondisi sedang 191,429 km, rusak ringan 189,171 km, dan rusak berat 271, 448 km. Perbaikan jalan yang ada selama ini belum optimal. Jalan aspal baru hanya mencapai 72 persen, akan direncanakan akan ditingkatkan menjadi 90 persen. Pembangunan jembatan yang menghubungkan kecamatan dan desa perlu ditingkatkan menjadi jembatan permanen dan mengikuti lebar jalan baru.

Areal persawahan di kabupaten ini mulai berkurang. Banyak lahan produktif yang telah berubah fungsi untuk peruntukan perumahan dan sarana industri/perdagangan. Kesemua ini menyebabkan terjadinya penyusutan produksi padi. Diperlukan regulasi tentang pencegahan alih fungsi lahan. Disamping itu perlu mempertahankan lahan irigasi yang telah ada dan diikuti dengan usaha mencetak sawah baru. Selain itu, ada irigasi yang kekurangan air, sehingga harus dibangun jaringan irigasi untuk mengairi air yang dapat digunakan pada saat kekurangan air danantisipasi kekurangannya pada musim kemarau. Permasalahan drainase lahan dan drainase irigasi yang belum optimal dibangun memerlukan perencanaan dan pembangunannya ke depan.

Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat yang sangat dibutuhkan. Dengan pengembangan

infrastruktur dasar dan juga konektivitas antarwilayah, maka diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antarwilayah pembangunan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dasar yaitu irigasi, air baku, dan infrastruktur pemukiman seperti sarana air minum, persampahan, drainase lingkungan, jalan lingkungan diharapkan dapat memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Infrastruktur dasar merupakan bahagian pelayanan dasar masyarakat yang sangat dibutuhkan seperti air minum dan sanitasi layak. Pengembangan infrastruktur dasar dan juga konektivitas antarwilayah diharapkan dapat menurunkan kesenjangan wilayah pembangunan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang meliputi irigasi, air baku, infrastruktur pemukiman meliputi sarana air minum, persampahan, drainase lingkungan, jalan lingkungan diharapkan akan memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

10. Peningkatan Prasarana dan Sarana Budaya, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Wilayah Kabupaten Nagan Raya mempunyai topografi yang umumnya wilayah pegunungan dan pantai. Hal ini dapat dijadikan sebagai promosi wisata lokal berupa wisata sejarah, wisata alam, wisata pantai, wisata buatan, dan wisata minat khusus.

Kekayaan adat dan budaya serta adat istiadat yang beragam ini menarik untuk dikembangkan sebagai bagian dari promosi pariwisata. Banyaknya area pantai dan sungai serta daerah irigasi yang luas pun menarik dimanfaatkan sebagai objek wisata daerah. Wisata kuliner dengan beragam macam makanan dan minuman dapat dijadikan sebagai komoditas objek wisata. Semua potensi wisata ini perlu didata untuk selanjutnya direncanakan dengan baik dan dibangun atau dikembangkan dan dilestarikan sehingga dapat meningkatkan sumber PAD Nagan Raya. Pengelolaan sarana penunjang wisata seperti hotel dan penginapan lainnya perlu dioptimalkan. Untuk itu, penguatan profesionalisme tenaga kepariwisataan perlu ditingkatkan sehingga memenuhi standar pelayanan sebagai objek wisata.

Peran pemuda dan pemudi dalam pembangunan di Kabupaten Nagan Raya selama ini belum optimal. Perkumpulan pemuda dalam bentuk karang taruna pada umumnya berada dalam kondisi yang relatif pasif. Ke depan, diperlukan pembinaan

yang terkait dengan pembinaan manajemen dan penyediaan sarana dan prasarana dengan menyediakan alokasi pendanaan yang memadai.

Kegiatan keolah-ragaan selama ini belum berkembang dengan baik. Prestasi para atlet/pemain yang ada di daerah ini belum mempunyai pencuat ditingkat nasional maupun propinsi. Hal ini disebabkan minimnya SDM pelatih, wasit dan juri. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dioptimalkan kualitas SDM pelatih, wasit, dan juri. Hal ini dapat dilakukan melalui pengiriman mengikuti kegiatan training baik di tingkat propinsi maupun tingkat nasional. Sarana dan prasarana olah raga yang berstandar nasional di kabupaten ini juga masih terbatas. Karenanya diperlukan peningkatan sarana dan prasarana tersebut. Di sisi lain, pembinaan para olahragawan yang prestasi juga masih minim dan kurang terarah. Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga yang telah ada juga kurang terawat dan terpelihara disebabkan kurangnya pendanaan dan promosi. Untuk itu perlu dioptimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga yang telah ada. Perhatian untuk pembina, pelatih, dan pelaku olahraga di Nagas Raya perlu ditingkatkan pada masa mendatang.

Selain upaya strategis diatas, diperlukan kebijakan pengembangan kemampuan pemuda disertai pemberian ruang yang optimal bagi pemuda untuk turut serta dalam proses pembangunan daerah. Beberapa kebijakannya antara lain: (i). Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan; dan (ii). Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan: 1) Menggiatkan organisasi kepemudaan (karang taruna) di tingkat RW/Kelurahan/Gampong; dan 2) Melakukan pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor).

11. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan difokuskan pada perwujudan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Selain itu, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas terutama industri perkebunan dan pertambangan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Persoalan persampahan selalu menjadi hal rumit dalam masyarakat yang masih kurang memiliki kepekaan terhadap kebersihan lingkungan. Ketidaksiplinan dalam memelihara kebersihan dapat menciptakan suasana yang tidak

menyebabkan akibat adanya timbunan sampah. Kondisi ini memunculkan bau tidak sedap, lalat berterbangan, dan gangguan berbagai penyakit, serta berpeluang terjadinya pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas estetika. Perilaku membuang sampah sembarangan ini tidak mengenal tingkat pendidikan maupun status sosial. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan menjadi faktor yang paling dominan. Masyarakat masih tidak mengetahui ataupun tidak mau tahu akan bahaya yang terjadi akibat tidak menjaga lingkungan sekitar. Salah satu bentuk perilaku masyarakat adalah membuang sampah di sungai. Kondisi ini menyebabkan lingkungan di sekitar tepi sungai terlihat sangat kotor akibat tumpukan sampah, dan menyebarkan aroma yang tidak sedap, bahkan menyebabkan pemandangan estetika yang sangat buruk.

Untuk saat ini, pengelolaan masalah sampah di Nagasari secara umum baru teratasi sebesar 60 persen. Untuk itu, diperlukan kebijakan khusus dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah agar persoalan sampah bisa terselesaikan secara tuntas.

Pertumbuhan rata-rata sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mengalami pertumbuhan yang positif. Namun demikian, berkenaan dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, maka diperlukan sosialisasi dan regulasi hal kebersihan lingkungan dan termasuk pembuatan regulasi persampahan di seluruh kabupaten ini.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai di Kabupaten Nagas Raya tetap mengacu pada pencapaian visi dan misi daerah yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagas Raya Tahun 2005-2025. Hasil evaluasi terhadap RPJM Nagas Raya Tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa sejumlah indikator tujuan dan sasaran telah dilaksanakan dan dicapai. Meskipun demikian, terdapat juga program dan kegiatan yang tetap direncanakan untuk dilanjutkan kembali pelaksanaannya dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nagas Raya periode 2023-2026.

Tahapan perencanaan pembangunan Nagas Raya telah memasuki tahap yang keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagas Raya. Tahapan pembangunan keempat ini merupakan rangkaian akhir dari tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten ini. Pada akhir periode ini diharapkan dapat dicapai, "TERWUJUDNYA KABUPATEN NAGAS RAYA YANG ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, DAN DAMAI PADA TAHUN 2025", sebagai sebuah kondisi ideal yang ingin dicapai oleh masyarakat Nagas Raya. Kondisi ideal ini dinilai sangat relevan jika dikaitkan dengan amanah yang tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam dokumen RPJP Kabupaten Nagas Raya 2005-2025 telah ditentukan 7 (tujuh) sasaran pokok dari prioritas pembangunan pada periode keempat tersebut, yakni: (1) Terwujudnya pembangunan masyarakat yang berkualitas dan islami; (2). Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang produktif; (3). Terciptanya tata pemerintahan yang baik; (4). Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan; (5). Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah; (6). Terwujudnya Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; dan (7). Terwujudnya penanggulangan dan pengurangan masyarakat miskin.

Tahapan dan prioritas pembangunan Kabupaten Nagas Raya pada tahap keempat (periode tahun 2020 - 2025) diarahkan pada optimalisasi pembangunan di seluruh sektor/bidang. Penekanannya adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dengan fokus pembangunan pada peletakan dasar-dasar pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Pada tahap terakhir ini, diharapkan seluruh sasaran pembangunan jangka panjang untuk setiap periode beserta targetnya akan dapat tercapai.

Adapun tahapan dan prioritas pembangunan dalam RPJP Kabupaten Nagan Raya pada periode keempat (2020-2025) adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pembangunan di seluruh sektor/bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan pembangunan fokus peletakan dasar-dasar pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan;
2. Pertumbuhan PDRB diharapkan setara dengan Provinsi Aceh;
3. Tingkat kemiskinan menjadi di bawah 10 persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka menjadi 2-3 persen;
5. Pemantapan industrilisasi berbasis pertanian melalui pengembangan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah menjadi nilai tambah yang berbasis teknologi dan informasi, serta mendukung kemitraan UKM dan swasta nasional dan asing dalam pemasaran produk unggulan di level nasional dan internasional serta mengembangkan cluster agroindustri;
6. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan berbiaya wajar menurut aturan berlaku, serta optimalisasi reformasi birokrasi kearah pelayanan publik dengan dukungan teknologi *e-government* dan teknologi informasi yang terkini untuk aspek pelayanan perizinan investasi dan perizinan lainnya;
7. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penambahan jumlah dan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan berinovasi dan kreativitas;
8. Pembangunan SDM yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembinaan akhlak mulia, cerdas, dan mampu bersaing di dunia Internasional;
9. Pelayanan kesehatan yang mampu menurunkan angka *Stunting*, *Wasting* dan obesitas, meningkatkan angka harapan hidup, angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian Ibu (AKI), yang pada akhirnya mampu meningkatkan angka IPM;
10. Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, perumahan dan permukiman, serta tersedianya air bersih dan sanitasi yang pada akhirnya dapat mencapai indikator SDG's terkait dengan pembangunan infrastruktur mendekati 75% dari target SDG's;

11. Pembangunan sistem transportasi darat, laut, dan udara yang menjamin arus pergerakan orang, barang, dan jasa serta difokuskan pula pada lancarnya aktivitas pabrikan dan kegiatan ekspor;
12. Penguatan sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika;
13. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak;
14. Pemantapan pemerintahan dan pelayanan umum melalui pemantapan kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagasari dan DPRK Kabupaten Nagasari dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mantapnya kualitas pelayanan dasar pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dengan biaya wajar menurut aturan berlaku, dan pemantapan reformasi birokrasi kearah pelayanan publik dengan dukungan teknologi *e-goverment* dan teknologi informasi yang terkini;
15. Pembangunan kebudayaan melalui pengembangan kembali khazanah budaya, adatistiadat, kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional yang berkembang di kabupaten Nagasari, menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat terutama pada kalangan generasi muda dalam peran sertanya untuk pembangunan;
16. Pembangunan kepemudaan dan olahraga melalui peningkatan kualitas pemuda sebagai individu dan dalam organisasi kepemudaan, pemenuhan sarana olahraga dan peningkatan prestasi atlit Kabupaten Nagasari ditingkat Provinsi dan Nasional.

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2023-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir 2026	Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi		Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu	Persen	0,87	0,87	0,88	0,89	0,95	0,95	Kesbangpol, Setdakab (Bag. Pemerintahan)
1.1		Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Nagan Raya, serta peran lembaga demokrasi.	Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu	persen	0.85	0.87	0.88	0.89	0.95	0.95	Kesbangpol, Setdakab (Bag. Pemerintahan)
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Persen	62,58	65,00	66,00	67,00	68,00	68,00	Seluruh OPD
2.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD



NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir 2026	Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12
2.2		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	26,14	59,00	60,00	65,00	70,00	70,00	BKPSDM (Semua SKPK)
2.3		Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,76	2,00	2,30	2,45	2,50	2,50	Diskominfotik, Setdakab (Bag. Organisasi)
2.4		Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai LPPD	Scor	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Setdakab
2.5		Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	36,63 C	60 B	65 B	70 BB	81 A	81 A	Setdakab (Bag. Organisasi)
3	Menegakkan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat		Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	Persen	60,00	70,00	76,00	81,00	85,00	85,00	Dinas Syariat Islam / Satpol PP dan WH



NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir 2026	Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12
3.1		Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan	Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	95,00	100,00	105,00	110,00	115,00	115,00	Dinas Syariat Islam / Sekretariat MPD/Sekretariat MPU
3.2		Tersalurkannya ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah)	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Rasio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Baitul Mal
3.3		Tegaknya Syariah dalam bermasyarakat	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	Persen	60,00	70,00	76,00	81,00	85,00	85,00	Satpol PP dan WH
3.4		Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah	Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi	Persen	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	Dinas Syariat Islam
4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan serta Kapasitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,31	70,2	71,2	71,53	74,42	69,31	Dinas Pendidikan, Dinkes, RSUD, DPMGP4, Bappeda, Disbudparpora, Perkim, Disnakertrans, Disperindagkop



NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir 2026	Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12
4.1		Meningkatnya akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.96	9.00	9.18	9.24	9.32	9.32	Dinas Pendidikan
4.2		Meningkatnya kualitas pendidikan	Persentase guru yang lulus pendidikan profesi guru (PPG)	Persen	83.5	83.72	83.91	84.03	84.46	84.46	Dinas Pendidikan
4.3		Meningkatnya kualitas Penduduk	Angka Partisipasi Kasar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
4.4		Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	25,00	15,00	35,00	25,00	40,00	40,00	Disbudparpora
4.5		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat yang menerapkan PHBS	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	Dinkes, RSUD
4.6		Menurunnya angka stunting	Prevalansi Stunting	Persen	17,30	16,50	15,40	14,20	13,00	13,00	Dinkes, Perkim, DPMGP4, DKPP,
4.7		Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,07	92,67	92,98	93,28	93,58	93,58	Bappeda



NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir 2026	Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12
4.8		Tercapainya status Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Layak Anak	Level	madya	madya	pratama	madya	Nindya	Nindya	DPMGP4
4.9		Tertanganinya Covid-19	Jumlah kasus yang tertangani	Persen	85,00	90,00	92,00	95,00	99,00	99,00	Dinkes
4.10		Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	Tipe Rumah Sakit Umum Daerah	Tipe	C	C	B	B	B	B	RSUD
4.11		Meningkatnya life Skill masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	Persen	19,93	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	Disnakertrans/Disperindagkop
4.12		Meningkatkan Kelestarian Kebudayaan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	3	2	3	2	3	3	Disbudparpora/MAA
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Strategis untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta		Persentase Penduduk Miskin	Persen	18,23	18,00	16,00	15,50	15,00	15,00	Dinsos, Setdakab, Perkim, Distanak, DKPP, Disperindagkop, Disbun, Bappeda, DPMGP4, PUPR, DLH, BPBD
			Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,54	4,20	4,30	4,40	4,50	4,50	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,99	4,08	3,92	3,78	3,64	3,64	



NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir 2026	Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan UMKM Terpadu (Hulu-Hilir), Agroindustri dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran										
5.1		Menurunnya beban penduduk miskin	Persentase Penduduk miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	Dinsos, Setdakab
5.2		Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,62	0,64	0,65	0,66	0,68	0,68	DPMGP4
5.3		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penduduk miskin	Persen	97,76	500	400	300	200	200	Dinsos, Setdakab
5.4		Menurunnya tingkat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,99	4,08	3,92	3,78	3,64	3,64	Disnakertrans



NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir 2026	Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12
		pengangguran terbuka									
5.5		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan ekonomi	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	Setdakab
5.6		Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten	Indeks	71,64	74,27	75,59	76,91	78,23	78,23	DKPP
5.7		Meningkatnya kontribusi sektor perekonomian	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB	Persen	44,94	45,11	45,34	45,55	45,70	45,70	Distanak/ DKPP/ Disbun
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB	Persen	4,39	4,49	4,59	4,61	4,65	4,65	Disperindagkop
			Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB ADHB	Persen	9,49	10,20	10,50	10,80	11,20	11,20	Disperindagkop

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir 2026	Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12
5.8		Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Jumlah angka Inflasi	Persen	1,13	1,01	0,90	0,70	0,50	0,50	Bappeda/Setdakab (Bag. Ekonomi)
5.9		Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	40,95	42,25	43,55	44,85	46,15	46,15	PUPR
5.10		Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	22,43	24,67	27,14	29,85	32,83	32,83	PUPR/ Distannak
5.11		Meningkatnya kualitas dan akses air bersih	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	4,27	6,40	7,42	8,41	9,37	9,37	Perkim
5.12		Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi	Persentase Rumah tangga bersanitasi	Persen	73,48	73,98	74,48	74,98	75,48	75,48	Perkim
5.13		Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	1.029	1.079	1.129	1.179	1.229	1.229	Perkim/Baitul Mal
5.14		Meningkatnya kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,96	57,42	57,65	57,88	58,11	58,11	DLH

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target				Kondisi Akhir 2026	Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12
		Lingkungan Hidup									
5.15		Meningkatnya ketahanan terhadap Kebencanaan	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,36	0,38	0,40	0,41	0,42	0,42	BPBD

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nagas Raya tahun 2023-2026 sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB V sebelumnya, maka ditetapkan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan yang akan dijalankan selama 4 (empat) tahun, mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Nagas Raya 2023-2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1. berikut ini.

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Nagas Raya
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi	1.1 Meningkatkan hak-hak politik masyarakat Nagas Raya, serta peran lembaga demokrasi	1.1.1 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.1.1.1Peningkatan peran lembaga pendidikan melalui pendidikan dan pengembangan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
		1.1.2 Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.1.2.1Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	2.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2.1.1 Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	2.1.1.1Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang baik
	2.2 Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2.2.1 Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pengelolaan aset daerah	2.2.1.1Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah
	2.3 Meningkatkan tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	2.3.1 Peningkatan layanan sistem pengadaan berbasis elektronik	2.3.1.1 Penyediaan layanan berbasis digital
	2.4 Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2.4.1 Pemantapan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.4.1.1 Pelayanan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yang optimal
	2.5 Meningkatkan profesionalitas ASN	2.5.1 Peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	2.5.1.1 Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur
Menegakkan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat	3.1 Meningkatkan peran ulama dalam pembangunan	3.1.1 Penguatan Peran Ulama dalam Pembangunan	3.1.1.1 Peningkatan kapasitas ulama
	3.2 Tersalurkannya ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah)	3.2.1 Optimalisasi Ziswaf melalui tersedianya data Muzakki dan Mustahik	3.2.1.1 Penyediaan Database Ziswaf
	3.3 Tegaknya Syariah dalam bermasyarakat	3.3.1 Peningkatan Pelaksanaan Dan Pengawasan Syariat Islam di Kabupaten Nagas Raya	3.3.1.1 Penguatan pelaksanaan dan pengawasan syariat islam
	3.4 Meningkatkan kualitas Pendidikan dayah	3.4.1 Peningkatan kapasitas guru dayah serta sarana dan prasarana dayah	3.4.1.1 Penguatan kelembagaan dayah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menaikkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	4.1 Meningkatkan akses pendidikan	4.1.1 Peningkatan profesionalisme dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	4.1.1.1 Ketersediaan SDM pendidik dan tenaga kependidikan
	4.2 Meningkatkan kualitas pendidikan	4.2.1 Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	4.2.1.1 Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
	4.3 Meningkatkan kualitas Penduduk	4.3.1 Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan	4.3.1.1 Optimalisasi Balai Latihan Kerja
	4.4 Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga	4.4.1 Peningkatan Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga	4.4.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
	4.5 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4.5.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang merata, terjangkau dan berkeadilan, serta upaya promotif-preventif	4.5.1.1 Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
	4.6 Menurunnya angka stunting	4.6.1 Penanganan stunting yang terintegrasi	4.6.1.1 Integrasi penanganan Stunting
	4.7 Meningkatkan Peran Perempuan dalam pembangunan	4.7.1 Peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan	4.7.1.1 Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan
	4.8 Tercapainya status Kabupaten Layak Anak	4.8.1 Perwujudan Kabupaten Layak Anak	4.8.1.1 Ketersediaan Pemenuhan hak anak
	4.9 Tertanganinya Covid-19	4.9.1 Peningkatan ketahanan kesehatan menghadapi pandemi	4.9.1.1 Optimalisasi daya tahan kesehatan masyarakat terhadap penyakit menular
	4.10 Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	4.10.1 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	4.10.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
	4.11 Meningkatnya <i>life Skill</i> masyarakat	4.11.1 Peningkatan pelatihan keterampilan masyarakat dalam memiliki kompetensi keahlian	4.11.1.1 Ketersediaan pelatihan ketrampilan yang sesuai kompetensi
	4.12 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	4.12.1 Peningkatan Kelestarian Kebudayaan	4.12.1.1 Pemeliharaan pelestarian budaya lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Strategis untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta Pengembangan UMKM Terpadu (Hulu-Hilir), Agroindustri dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	5.1 Menurunnya beban penduduk miskin	5.1.1 Peningkatan kesadaran penduduk miskin tentang pentingnya meningkatkan taraf hidup melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan	5.1.1.1 Pemberdayaa sosial dan perlindungan serta jaminan sosial
	5.2 Meningkatnya kemandirian desa	5.2.1 Peningkatan Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Ekologi Desa	5.2.1.1 Pemberdayaan dan peningkatan ketahanan sosial dan masyarakat
		5.2.2. Peningkatan kapasitas aparaturnya gampong	5.2.2.1 Pemberdayaan aparaturnya dan masyarakat gampong
	5.3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	5.3.1 Pemberdayaan ekonomi masyarakat	5.3.1.1 Peningkatan pemberdayaan kesejahteraan rakyat
	5.4 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	5.4.1 Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	5.4.1.1 Penyediaan Lapangan kerja
	5.5 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	5.5.1 Optimalisasi potensi ZIS untuk peningkatan pendapatan masyarakat	5.5.1.1 Intensifikasi penerimaan ZIS
	5.6 Meningkatnya ketahanan pangan	5.6.1 Peningkatan ketersediaan dan akses pangan	5.6.1.1 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
	5.7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	5.7.1 Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan	5.7.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
		5.7.2 Perbaikan iklim investasi	5.7.2.1 Peningkatan kemudahan berinvestasi
		5.7.3 Peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional	5.7.3.1 Penyediaan sarana dan prasarana pasar tradisional
	5.8 Terkendalinya tingkat inflasi daerah	5.8.1 Penguatan peran pemerintah daerah dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	5.8.1.1 Stabilisasi harga pasar
5.9 Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	5.9.1 Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	5.9.1.1 Penyediaan jalan dan jembatan yang baik	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5.10 Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	5.10.1 Peningkatan kelembagaan pengelola irigasi, komisi irigasi, P3A dalam program pengembangan sistem irigasi	5.10.1.1 Optimalisasi bidang irigasi
	5.11 Meningkatnya kualitas dan akses air bersih	5.11.1 Pemenuhan infrastruktur penyediaan air bersih	5.11.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana air bersih
	5.12 Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi	5.12.1 Peningkatan infrastruktur penyediaan sanitasi dan air limbah	5.12.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan air limbah
	5.13 Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	5.13.1 Pemanfaatan dana desa dan ZIS untuk pembangunan dan rehab rumah layak huni	5.13.1.1 Optimalisasi penyaluran ZIS
	5.14 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	5.14.1 Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	5.14.1.1 Pencegahan kerusakan lingkungan
	5.15 Meningkatnya ketahanan terhadap Kebenbencana	5.1.15 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	5.1.15.1 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Untuk itu, Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagas Raya difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program prioritas yang diimplementasikan setiap tahunnya sebagaimana yang di sajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Kebijakan Pembangunan Nagas Raya
Tahun 2023-2026

Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Mewujudkan kemandirian pangan dan penanggulangan dampak Covid-19 untuk pengentasan kemiskinan serta memantapkan pelaksanaan syariat Islam.	Menyukseskan pesta demokrasi dan meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dalam pengentasan kemiskinan.	Meningkatkan nilai tambah melalui penyediaan infrastruktur dan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan untuk memantapkan kemandirian ekonomi serta pengentasan kemiskinan	Memantapkan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan untuk kemandirian ekonomi serta pengentasan kemiskinan

Selanjutnya berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nagas Raya tahun 2023-2026 yang diuraikan sebelumnya, perlu ditentukan program strategis pembangunan berdasarkan nomenklatur yang telah ditetapkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.3

TABEL 6.3.
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF, KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Kode			Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
										2023		2024		2025		2026		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi					Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu	Persen	0,87	0,87	1.019.682.976	0,88	1.029.879.806	0,89	1.050.477.402	0,95	1.081.991.724	0,95	1.081.991.724	Kesbangpol, Setdakab (Bag. Pemerintahan)	
1.1		Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Nagan Raya, serta peran lembaga demokrasi.				Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu	persen	0.85	0.87	1.019.682.976	0.88	1.029.879.806	0.89	1.050.477.402	0.95	1.081.991.724	0.95	1.081.991.724	Kesbangpol, Setdakab (Bag. Pemerintahan)	
			8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Ada/tidak	Tidak ada	Ada	10.207.000	Ada	10.309.070	Ada	10.515.251	Ada	10.830.709	Ada	10.830.709	Kesbangpol
			8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	Tidak ada	Ada	1.009.475.976	Ada	1.019.570.736	Ada	1.039.962.150	Ada	1.071.161.015	Ada	1.071.161.015	Kesbangpol
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik					Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Persen	62,58	65,00	658.702.437.573	66,00	669.249.074.786	67,00	676.133.771.476	68,00	679.696.384.562	68,00	679.696.384.562	Seluruh OPD	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Opini BPK	WTP/WDP	WTP	WTP	241.088.909.050	WTP	243.499.798.141	WTP	248.369.794.103	WTP	255.820.887.926	WTP	255.820.887.926	BPKD
			5 0 0	2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				233.538.525.288		235.873.910.541		240.591.388.752		247.809.130.414		247.809.130.414	BPKD
					Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
					Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
					Persentase SILPA	%	1,46	0,56		0,57		0,58		0,6		0,6		
					Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,465	0,51		0,52		0,53		0,54		0,54		
					Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	9,99	1,02		1,04		1,06		1,08		1,08		
					Persentase belanja pendidikan (20%)	%	21,22	20,4		20,81		21,22		21,65		21,65		
					Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,15	10,2		10,4		10,61		10,82		10,82		
					Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	0,83	0,67		0,69		0,7		0,71		0,71		
					Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,14	10,2		10,4		10,61		10,82		10,82		
					Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		



NO	Tujuan	Sasaran	Kode			Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
										2023		2024		2025		2026		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	774.481.585	WTP	782.226.401	WTP	797.870.929	WTP	821.807.057	WTP	821.807.057	BPKD
			6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3	63.125.400	3	63.756.654	3	65.031.787	3	66.982.741	3	66.982.741	Inspektorat
			6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	%	89	90	1.979.528.786	92	1.999.324.074	94	2.039.310.555	96	2.100.489.872	96	2.100.489.872	Inspektorat
							Persentase pelanggaran pegawai	%	0,5	0,4		0,39		0,38		0,37		0,37		
							Jumlah temuan BPK	Temuan	20	18		16		15		14		14		
			7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai Lakip	Nilai	36,63 C	60 B	66.129.025	65 B	66.790.315	70 B	68.126.122	81 A	70.169.905	81 A	70.169.905	10 Kecamatan
											7.130.600		7.201.906		7.345.944		7.566.322		7.566.322	Kec. Kuala
											6.208.150		6.270.232		6.395.636		6.587.505		6.587.505	Kec. Kuala Pesisir
											7.860.320		7.938.923		8.097.702		8.340.633		8.340.633	Kec. Darul Makmur
											6.840.350		6.908.754		7.046.929		7.258.336		7.258.336	Kec. Tripa Makmur
											6.121.350		6.182.564		6.306.215		6.495.401		6.495.401	Kec. Tadu Raya
											6.320.750		6.383.958		6.511.637		6.706.986		6.706.986	Kec. Suka Makmue
											5.784.155		5.841.997		5.958.836		6.137.602		6.137.602	Kec. Seunagan

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
								2023		2024		2025		2026		K	Rp		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									5.600.000		5.656.000		5.769.120		5.942.194		5.942.194	Kec. Seunagan Timur	
									7.650.450		7.726.955		7.881.494		8.117.938		8.117.938	Kec. Beutong	
									6.612.900		6.679.029		6.812.610		7.016.988		7.016.988	Kec. Beutong Ateuh Banggalang	
			7	0102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Lakip	Nilai	36,63 C	60 B	13.453.045	65 B	13.587.575	70 B	13.859.327	81 A	14.275.107	81 A	14.275.107	10 Kecamatan
									1.700.000		1.717.000		1.751.340		1.803.880		1.803.880	Kec. Kuala	
									1.500.000		1.515.000		1.545.300		1.591.659		1.591.659	Kec. Kuala Pesisir	
									1.800.000		1.818.000		1.854.360		1.909.991		1.909.991	Kec. Darul Makmur	
									1.300.000		1.313.000		1.339.260		1.379.438		1.379.438	Kec. Tripa Makmur	
									1.253.045		1.265.575		1.290.887		1.329.614		1.329.614	Kec. Tadu Raya	
									1.400.000		1.414.000		1.442.280		1.485.548		1.485.548	Kec. Suka Makmue	
									1.600.000		1.616.000		1.648.320		1.697.770		1.697.770	Kec. Seunagan	
									1.300.000		1.313.000		1.339.260		1.379.438		1.379.438	Kec. Seunagan Timur	
									1.600.000		1.616.000		1.648.320		1.697.770		1.697.770	Kec. Beutong	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									1.400.000		1.414.000		1.442.280		1.485.548		1.485.548	Kec. Beutong Ateuh Banggalang
			705	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Lakip	Nilai	36,63 C	60 B	24.123.565	65 B	24.364.801	70 B	24.852.097	81 A	25.597.660	81 A	25.597.660	10 Kecamatan
									2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	Kec. Kuala
									2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	Kec. Kuala Pesisir
									3.000.000		3.030.000		3.090.600		3.183.318		3.183.318	Kec. Darul Makmur
									2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	Kec. Tripa Makmur
									2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	Kec. Tadu Raya
									2.300.000		2.323.000		2.369.460		2.440.544		2.440.544	Kec. Suka Makmue
									2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	Kec. Seunagan
									3.023.565		3.053.801		3.114.877		3.208.323		3.208.323	Kec. Seunagan Timur
									2.500.000		2.525.000		2.575.500		2.652.765		2.652.765	Kec. Beutong
									2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	Kec. Beutong Ateuh Banggalang



NO	Tujuan	Sasaran	Kode			Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
										2023		2024		2025		2026		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RPKP	Ada/ tidak	Ada	Ada	2.365.683.246	Ada	2.389.340.078	Ada	2.437.126.880	Ada	2.510.240.686	Ada	2.510.240.686	BAPPEDA
			5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				203.168.269		205.199.952		209.303.951		215.583.069		215.583.069	BAPPEDA	
							Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Sudah/ Belum	sudah	sudah		sudah		sudah	sudah		sudah			
							Penerapan SIDA:	Sudah/Belum	sudah	sudah		sudah		sudah	sudah		sudah			
							Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	2,04081633	10		30		50		80		80		
							Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	2	10		30		50		80		80		
							Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	64	65		70		75		80		80		
			5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.840.334.386		1.858.737.730		1.895.912.484		1.952.789.859		1.952.789.859	BAPPEDA	
							Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada		Ada		Ada	Ada		Ada			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
								2023		2024		2025		2026		K	Rp			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	tidak		tidak		Ada		Ada		Ada				
					Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPKP yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada/ tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
					Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
					Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RPKP	Ada/ tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
					Penjabaran Konsistensi Program RPKP kedalam APBK	Ada/ tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
					Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Ada/ tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
			2	10	12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	%	61,34	67,63	173.056.280	71,01	174.786.843	74,56	178.282.580	78,29	183.631.057	78,29	183.631.057	Dinas Pertanahan
			2	10	17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Penyelesaian kasus tanah negara	%	60	66	47.300.175	69	47.773.177	72	48.728.640	75	50.190.499	75	50.190.499	Dinas Pertanahan
2.2		Meningkatnya profesionalitas ASN				Indeks profesionalitas ASN	Indeks	26,14	59,00	2.404.128.740	60,00	2.428.170.027	65,00	2.476.733.428	70,00	2.551.035.431	70,00	2.551.035.431	BKPSDM (Semua SKPK)	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			5 0 3 0 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					864.128.740		872.770.027		890.225.428		916.932.191		916.932.191	BKPSDM
					Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	4,67	4,67			4,67		4,67		4,67		4,67	
					Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	34	36,00			36,00		37,00		37,00		37,00	
					Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	jabatan	2611	2.612,00			2.612,00		2.612,00		2.615,00		2.615,00	
					Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	jabatan	2001	2.182,00			2.232,00		2.232,00		2.232,00		2.232,00	
			5 0 4 0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.540.000.000		1.555.400.000		1.586.508.000		1.634.103.240		1.634.103.240	BKPSDM
					Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jam	120	120,00			120,00		120,00		120,00		120,00	
					Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,67	4,67			4,67		4,67		4,67		4,67	
2.3		Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik			Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,76	2,00	1.667.664.020	2,30	1.684.340.660	2,45	1.718.027.473	2,50	1.769.568.298	2,50	1.769.568.298	Diskominfotik, Setdakab (Bag. Organisasi)
			2 1 6 0 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					350.260.000		353.762.600		360.837.852		371.662.988		371.662.988	Diskominfotik

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		
					Proporsi rumah tangga dengan akses internet	jumlah	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		
					Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,76	2,00		2,30		2,45		2,50		2,50		
			2	1 6	0 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			835.028.015		843.378.295		860.245.861		886.053.237		886.053.237	Diskominfotik
					Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0,51	0,61		0,66		0,07		0,08		0,75		
					Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	90,00	92,00		94,00		95,00		97,00		97,00		
			2	2 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			100.000.000		101.000.000		103.020.000		106.110.600		106.110.600	Diskominfotik
			2	2 0	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			101.255.105		102.267.656		104.313.009		107.442.399		107.442.399	Diskominfotik
			2	1 2	0 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			125.120.900		126.372.109		128.899.551		132.766.538		132.766.538	Disdukcapil



NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
								2023		2024		2025		2026		K	Rp		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	93,79	98,25		98,75		98,95		99,40		99,40			
					Rasio bayi berakte kelahiran	%	89,37	90,50		92,50		93,25		94,00		94,00			
					Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah			
					Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	93,79	98,25		98,75		98,95		99,40		99,40			
			2	1806	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Laporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	114,00	120,00	156.000.000	140,00	157.560.000	150,00	160.711.200	170,00	165.532.536	170,00	165.532.536	DPMPTSP
2.4		Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)			Nilai LPPD	Scor	Baik	Sangat Baik	13.925.392.108	Sangat Baik	14.064.646.029	Sangat Baik	14.345.938.950	Sangat Baik	14.776.317.118	Sangat Baik	14.776.317.118	Setdakab	
			4	012	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	Baik	Sangat Baik	5.995.782.316	Sangat Baik	6.055.740.139	Sangat Baik	6.176.854.942	Sangat Baik	6.362.160.590	Sangat Baik	6.362.160.590	Setdakab
			7	016	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	Baik	Sangat Baik	66.129.025	Sangat Baik	66.790.315	Sangat Baik	68.126.122	Sangat Baik	70.169.905	Sangat Baik	70.169.905	10 Kecamatan
									7.130.600		7.201.906		7.345.944		7.566.322		7.566.322	Kec. Kuala	
									6.208.150		6.270.232		6.395.636		6.587.505		6.587.505	Kec. Kuala Pesisir	
									7.860.320		7.938.923		8.097.702		8.340.633		8.340.633	Kec. Darul Makmur	
									6.840.350		6.908.754		7.046.929		7.258.336		7.258.336	Kec. Tripa Makmur	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
								2023		2024		2025		2026		K	Rp		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									6.121.350		6.182.564		6.306.215		6.495.401		6.495.401	Kec. Tadu Raya	
									6.320.750		6.383.958		6.511.637		6.706.986		6.706.986	Kec. Suka Makmue	
									5.784.155		5.841.997		5.958.836		6.137.602		6.137.602	Kec. Seunagan	
									5.600.000		5.656.000		5.769.120		5.942.194		5.942.194	Kec. Seunagan Timur	
									7.650.450		7.726.955		7.881.494		8.117.938		8.117.938	Kec. Beutong	
									6.612.900		6.679.029		6.812.610		7.016.988		7.016.988	Kec. Beutong Ateuh Banggalang	
			7	0102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	Baik	Sangat Baik	56.681.570	Sangat Baik	57.248.386	Sangat Baik	58.393.353	Sangat Baik	60.145.154	Sangat Baik	60.145.154	10 Kecamatan
									6.031.570		6.091.886		6.213.723		6.400.135		6.400.135	Kec. Kuala	
									5.700.000		5.757.000		5.872.140		6.048.304		6.048.304	Kec. Kuala Pesisir	
									5.800.000		5.858.000		5.975.160		6.154.415		6.154.415	Kec. Darul Makmur	
									5.600.000		5.656.000		5.769.120		5.942.194		5.942.194	Kec. Tripa Makmur	
									5.800.000		5.858.000		5.975.160		6.154.415		6.154.415	Kec. Tadu Raya	
									5.650.000		5.706.500		5.820.630		5.995.249		5.995.249	Kec. Suka Makmue	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD				
								2023		2024		2025		2026		K	Rp					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
									5.700.000		5.757.000		5.872.140		6.048.304		6.048.304	Kec. Seunagan				
									5.500.000		5.555.000		5.666.100		5.836.083		5.836.083	Kec. Seunagan Timur				
									5.400.000		5.454.000		5.563.080		5.729.972		5.729.972	Kec. Beutong				
									5.500.000		5.555.000		5.666.100		5.836.083		5.836.083	Kec. Beutong Ateuh Banggalang				
			7	0	0	0	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	Baik	Sangat Baik	26.723.565	Sangat Baik	26.990.801	Sangat Baik	27.530.617	Sangat Baik	28.356.535	Sangat Baik	28.356.535	10 Kecamatan
									2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	Kec. Kuala				
									2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	Kec. Kuala Pesisir				
									3.000.000		3.030.000		3.090.600		3.183.318		3.183.318	Kec. Darul Makmur				
									2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	Kec. Tripa Makmur				
									2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	Kec. Tadu Raya				
									2.300.000		2.323.000		2.369.460		2.440.544		2.440.544	Kec. Suka Makmue				
									2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	Kec. Seunagan				

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
								2023		2024		2025		2026		K	Rp			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									3.023.565		3.053.801		3.114.877		3.208.323		3.208.323	Kec. Seunagan Timur		
									2.500.000		2.525.000		2.575.500		2.652.765		2.652.765	Kec. Beutong		
									2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	Kec. Beutong Ateuh Banggalang		
			4	0 2	0 2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		7.780.075.632		7.857.876.388		8.015.033.916		8.255.484.934		8.255.484.934	Setwan DPRK		
							Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada				
							Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada				
							Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada				
2.5		Meningkatnya nilai SAKIP					Nilai SAKIP	Nilai	36,63 C	60 B	399.616.343.655	65 B	407.572.119.928	70 BB	409.223.277.522	81 A	404.778.575.789	81 A	404.778.575.789	Setdakab (Bag. Organisasi)

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	Nilai	36,63 C	60 B	399.616.343.655	65 B	407.572.119.928	70 BB	409.223.277.522	81 A	404.778.575.789	81 A	404.778.575.789	Semua SKPK
									141.541.539.607		144.301.599.630		144.878.806.028		143.953.146.361		143.953.146.361	Dinas Pendidikan
									756.485.091		771.236.550		774.321.496		769.374.201		769.374.201	Sekretariat MPD
									40.186.417.489		40.970.052.630		41.133.932.840		40.871.119.916		40.871.119.916	Dinkes
									63.028.352.788		64.257.405.667		64.514.435.290		62.136.639.660		62.136.639.660	BLUD RSU - SIM
									6.674.773.427		6.804.931.509		6.832.151.235		6.788.499.254		6.788.499.254	PUPR
									3.065.438.183		3.125.214.228		3.137.715.085		3.117.667.596		3.117.667.596	PUPR
									1.379.511.807		1.406.412.287		1.412.037.936		1.403.016.143		1.403.016.143	Kesbangpol
									2.367.247.270		2.413.408.591		2.423.062.226		2.407.580.797		2.407.580.797	Satpol PP dan WH
									3.862.798.869		3.938.123.447		3.953.875.941		3.928.613.836		3.928.613.836	BPBD
									2.957.280.057		3.014.947.018		3.027.006.806		3.007.666.654		3.007.666.654	Dinas Syariat Islam
									2.492.710.641		2.541.318.498		2.551.483.772		2.535.181.832		2.535.181.832	Dinsos
									1.211.249.366		1.234.868.729		1.239.808.204		1.231.886.821		1.231.886.821	Sekretariat Baitul Mal
									1.105.859.810		1.127.424.076		1.131.933.772		1.124.701.621		1.124.701.621	Sekretariat MPU
									1.229.345.402		1.253.317.638		1.258.330.908		1.250.291.180		1.250.291.180	Sekretariat MAA
									1.921.933.039		1.959.410.733		1.967.248.376		1.954.679.232		1.954.679.232	Disnakertrans

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									4.235.770.068		4.318.367.585		4.335.641.055		4.307.939.777		4.307.939.777	DPMGP4
									1.168.014.919		1.190.791.209		1.195.554.374		1.187.915.738		1.187.915.738	DINAS PERTANAHAN
									6.145.858.133		6.265.702.367		6.290.765.176		6.250.572.219		6.250.572.219	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									2.647.427.769		2.699.052.611		2.709.848.821		2.692.535.055		2.692.535.055	Disdukcapil
									3.463.597.709		3.531.137.864		3.545.262.415		3.522.611.025		3.522.611.025	Dinas Perhubungan
									2.225.692.238		2.269.093.237		2.278.169.610		2.263.613.928		2.263.613.928	Diskominfotik
									2.631.832.165		2.683.152.892		2.693.885.504		2.676.673.730		2.676.673.730	Disperindagkop
									2.920.410.882		2.977.358.895		2.989.268.330		2.970.169.297		2.970.169.297	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
									2.962.226.233		3.019.989.644		3.032.069.603		3.012.697.104		3.012.697.104	Disbudparpora
									2.130.975.652		2.172.529.677		2.181.219.795		2.167.283.546		2.167.283.546	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
									3.456.718.873		3.524.124.891		3.538.221.391		3.515.614.987		3.515.614.987	DKPP

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									7.607.760.828		7.756.112.165		7.787.136.613		7.737.383.040		7.737.383.040	Distannak
									2.536.053.286		2.585.506.325		2.595.848.350		2.579.262.956		2.579.262.956	Dinas Perkebunan
									17.123.276.111		17.617.179.995		17.687.648.715		17.574.638.790		17.574.638.790	SETDAKAB
									448.971.215		457.726.154		459.557.058		456.620.856		456.620.856	KDH/WKDH
									5.381.858.429		5.486.804.668		5.508.751.887		5.473.555.369		5.473.555.369	Setwan DPRK
									7.915.816.245		8.070.174.662		8.102.455.360		8.050.687.152		8.050.687.152	DPRK
									5.301.785.943		5.405.170.769		5.426.791.452		5.392.118.596		5.392.118.596	BAPPEDA
									18.339.336.621		18.696.953.685		18.771.741.500		18.787.312.721		18.787.312.721	BPKD
									307.415.172		316.667.340		338.803.123		336.638.442		336.638.442	Sekretariat Korpri
									2.415.889.423		2.462.999.266		2.472.851.264		2.457.051.722		2.457.051.722	BKPSDM
									4.866.662.288		4.961.562.203		4.981.408.451		4.949.581.237		4.949.581.237	Inspektorat
									2.549.593.123		2.599.310.189		2.609.707.429		2.593.033.487		2.593.033.487	Kec. Darul Makmur
									1.707.672.087		1.740.971.693		1.747.935.580		1.736.767.670		1.736.767.670	Kec. Suka Makmue
									2.063.341.131		2.103.576.283		2.111.990.588		2.098.496.658		2.098.496.658	Kec. Kuala
									2.009.046.741		2.048.223.152		2.056.416.045		2.043.277.192		2.043.277.192	Kec. Kuala Pesisir
									1.666.784.913		1.699.287.218		1.706.084.367		1.695.183.853		1.695.183.853	Kec. Tripa Makmur
									2.522.409.093		2.571.596.071		2.581.882.455		2.565.386.292		2.565.386.292	Kec. Beutong
									2.088.389.288		2.129.112.879		2.137.629.331		2.123.971.589		2.123.971.589	Kec. Seunagan Timur

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									2.105.144.930		2.146.195.257		2.154.780.038		2.141.012.717		2.141.012.717	Kec. Seunagan
									1.592.562.626		1.623.617.598		1.630.112.068		1.619.696.956		1.619.696.956	Kec. Tadu Raya
									1.297.106.678		1.322.400.258		1.327.689.859		1.319.206.983		1.319.206.983	Kec. Beutong Ateuh Banggalang
3	Menegakkan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat				Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	Persen	60,00	70,00	76.662.877.307	76,00	77.429.506.080	81,00	78.978.096.202	85,00	81.347.439.088	85,00	81.347.439.088	Dinas Syariat Islam / Satpol PP dan WH
3.1		Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan			Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	95,00	100,00	34.347.128.251	105,00	34.690.599.534	110,00	35.384.411.524	115,00	36.445.943.870	115,00	36.445.943.870	Dinas Syariat Islam / Sekretariat MPD/Sekretariat MPU
			9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH			34.060.157.701		34.400.759.278		35.088.774.464		36.141.437.697		36.141.437.697	Dinas Syariat Islam
					Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%)	Unit	463,00	463,00		463,00		463,00		463,00		463,00		
					Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat	Orang	220,00	222,00		222,00		222,00		222,00		222,00		
					Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat	Orang	38,00	50,00		60,00		60,00		60,00		60,00		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid	55,00	60,00		65,00		70,00		75,00		75,00		
					Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	95,00	100,00		105,00		110,00		115,00		115,00		
					Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz	Orang	80,00	90,00		100,00		110,00		120,00		120,00		
					Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam	%	90,00	92,00		94,00		96,00		98,00		98,00		
					Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam	%	87,00	88,00		89,00		90,00		91,00		91,00		
					Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
					Persentase dayang Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		
			9 0 1 0 3	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	95,00	100,00	125.854.050,00	105,00	127.112.590,50	110,00	129.654.842,31	115,00	133.544.487,58	115,00	133.544.488	MPU
3.2		Tersalurkannya ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah)			Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Rasio	100,00	100,00	7.222.574.235	100,00	7.294.799.977	100,00	7.440.695.977	100,00	7.663.916.856	100,00	7.663.916.856	Sekretariat Baitul Mal
			9 0 1 0 4	PROGRAM BAITUL MAL				7.222.574.235		7.294.799.977		7.440.695.977		7.663.916.856		7.663.916.856	Baitul Mal	
					Jumlah ZIS yang terhimpun	Rp. Milyar	792,00	832,00		874,00		918,00		964,00		964,00		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Rp (000)	792,00		832,00		874,00		918,00		918,00		
					Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Rp (000)	792,00		832,00		874,00		918,00		918,00		
3.3		Tegaknya Syariah dalam bermasyarakat			Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	Persen	60,00	70,00	871.900.620,00	76,00	880.619.626,20	81,00	898.232.018,72	85,00	925.178.979,29	85,00	925.178.979,29	Satpol PP dan WH
			1	0502	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				628.610.000		634.896.100		647.594.022		667.021.843		667.021.843	Satpol PP dan WH
					Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	%	60,00	70,00		76,00		81,00		85,00		85,00		
					Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentrman, keindahan)	%	65,00	71,00		75,00		79,00		82,00		82,00		
					Persentase Penegakan PERDA	%	30,00	60,00		67,00		71,00		75,00		75,00		
					Pembinaan Dinul Islam	Orang	9,00	20,00		22,00		25,00		30,00		30,00		
					Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	%	60,00	70,00		76,00		81,00		85,00		85,00		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode			Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
										2023		2024		2025		2026		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			9	0	0	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid	55,00	60,00	243.290.620	65,00	245.723.526	70,00	250.637.997	75,00	258.157.137	75,00	258.157.137	10 Kecamatan
											24.150.000		24.391.500		24.879.330		25.625.710		25.625.710	Kec. Kuala
											24.221.500		24.463.715		24.952.989		25.701.579		25.701.579	Kec. Kuala Pesisir
											24.650.000		24.896.500		25.394.430		26.156.263		26.156.263	Kec. Darul Makmur
											24.500.000		24.745.000		25.239.900		25.997.097		25.997.097	Kec. Tripa Makmur
											24.443.000		24.687.430		25.181.179		25.936.614		25.936.614	Kec. Tadu Raya
											24.626.120		24.872.381		25.369.829		26.130.924		26.130.924	Kec. Suka Makmue
											24.350.000		24.593.500		25.085.370		25.837.931		25.837.931	Kec. Seunagan
											24.000.000		24.240.000		24.724.800		25.466.544		25.466.544	Kec. Seunagan Timur
											24.350.000		24.593.500		25.085.370		25.837.931		25.837.931	Kec. Beutong
											24.000.000		24.240.000		24.724.800		25.466.544		25.466.544	Kec. Beutong Ateuh Banggalang
3.4		Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah					Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi	Persen	85,00	86,00	34.221.274.201	87,00	34.563.486.943	88,00	35.254.756.682	89,00	36.312.399.382	89,00	36.312.399.382	Dinas Syariat Islam



NO	Tujuan	Sasaran	Kode			Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
										2023		2024		2025		2026		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			1	01	07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Ada	Ada	161.116.500,00	Ada	162.727.665,00	Ada	165.982.218,30	Ada	170.961.684,85	Ada	170.961.684,85	Sekretariat MPD
			9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Ada	Ada	34.060.157.701	Ada	34.400.759.278	Ada	35.088.774.464	Ada	36.141.437.697	Ada	36.141.437.697,48	Dinas Syariat Islam
4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan serta Kapasitas Sumber Daya Manusia						Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,31	70,2	192.734.105.769	71,2	194.832.254.673	71,53	198.660.275.172	74,42	204.481.461.746	69,31	204.481.461.746	Dinas Pendidikan, Dinkes, RSUD, DPMGP4, Bappeda, Disbudparpora, Perkim, Disnakertrans, Disperindagkop
4.1		Meningkatnya akses pendidikan					Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.96	9.00	59.689.427.765	9.18	60.286.322.043	9.24	61.492.048.484	9.32	63.336.809.938	9.32	63.336.809.938	Dinas Pendidikan
			1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					59.689.427.765		60.286.322.043		61.492.048.484		63.336.809.938		63.336.809.938	Dinas Pendidikan
							Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	98,12	98,26		98,26		98,56		98,71		98,71		
							Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	98,72	98,90		98,98		99,08		99,36		99,36		



NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	76,32	76,51		76,66		76,81		76,98		76,98		
					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio Index	61,55	61,88		61,97		61,99		62,08		62,08		
4.2		Meningkatnya kualitas pendidikan			Persentase guru yang lulus pendidikan profesi guru (PPG)	Persen	83.5	83.72	29.844.713.883	83.91	30.143.161.021	84.03	30.746.024.242	84.46	31.668.404.969	84.46	31.668.404.969	Dinas Pendidikan
			1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			29.844.713.883		30.143.161.021		30.746.024.242		31.668.404.969		31.668.404.969	Dinas Pendidikan
					Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	74,50	74,87		74,98		75,12		75,52		75,52		
					Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio Index	61,27	61,65		61,89		61,93		61,98		61,98		
					Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio Index	72,64	72,97		73,18		73,71		74,03		74,03		
					Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio Index	56,32	56,63		56,79		56,87		56,92		56,92		
					Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%	98,72	98,99		99,17		99,54		99,84		99,84		
					Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	83,50	83,72		83,91		84,03		84,46		84,46		
4.3		Meningkatnya kualitas Penduduk			Angka Partisipasi Kasar	Persen	100,00	100,00	30.313.152.933	100,00	30.616.284.462	100,00	31.228.610.151	100,00	32.165.468.456	100,00	32.165.468.456	Dinas Pendidikan

NO	Tujuan	Sasaran	Kode			Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
										2023		2024		2025		2026		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				29.844.713.883		30.143.161.021		30.746.024.242		31.668.404.969		31.668.404.969	Dinas Pendidikan	
						Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,31	70,20		71,20		71,53		74,42		74,42			
						Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	42,17	42,66		43,17		43,61		43,88		43,88			
						APK SD/MI/Paket A	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
						APK SMP/MTs/Paket B	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
						APK SMA/SMK/	%	96,26	96,44		96,62		96,78		96,93		96,93			
						Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,96	9,00		9,18		9,24		9,32		9,32			
						Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,14	14,26		14,38		14,45		14,58		14,58			
						Angka Pendidikan Tamat SD Sederajat	%	98,83	98,92		99,02		99,32		99,66		99,66			
						Angka Pendidikan Tamat SLTP sederajat	%	95,25	95,66		95,85		95,96		96,03		96,03			
						Angka Pendidikan Tamat Diploma I/II/III	%	5,25	5,35		5,49		5,72		5,89		5,89			
						Angka Pendidikan Tamat Diploma IV/S1	%	60,00	60,80		60,96		61,12		61,33		61,33			
						Angka Pendidikan Tamat S2/S3	%	3,00	3,14		3,28		3,58		3,75		3,75			
						Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	97,00	97,19		97,55		97,71		97,88		97,88			
						Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	85,00	85,44		85,76		85,89		85,97		85,97			
						Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,73	98,96		99,11		99,38		99,59		99,59			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	92,46	92,82		92,82		92,97		93,18		93,18		
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	89,74	89,96		90,07		90,43		90,68		90,68		
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	70,04	70,43		70,74		70,74		70,91		70,91		
			2	2 3	0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			413.761.500		417.899.115		426.257.097		439.044.810		439.044.810	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	3557,00	3900,00		4000,00		4500,00		5000,00		5000,00		
					Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	koleksi	34.430	37.430		40.430		43.430		46.430		46.430		
					Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1.000 Penduduk	1,00	1,2		1,5		1,8		2,00		2,00		
					Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	800,00	900,00		1000,00		1250,00		1500,00		1500,00		
					Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	5,00	8,00		10,00		15,00		20,00		20,00		
					Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	9.121	10.121		11.121		12.121		13.121		13.121		



NO	Tujuan	Sasaran	Kode			Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
										2023		2024		2025		2026		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			2	2	0	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				54.677.550		55.224.326		56.328.812		58.018.676		58.018.676	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	4,54	6,81		10,22		12,22		15,35		15,35			
						Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	1,00	2,00		3,00		4,00		5,00		5,00			
4.4		Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga					Jumlah atlet berprestasi	Atlet	25,00	15,00	6.290.423.565	35,00	6.353.327.801	25,00	6.416.861.079	40,00	6.481.029.689	40,00	6.481.029.689	Disbudparpora
			2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	10,00	20,00	5.415.153.768	21,00	5.469.305.306	15,00	5.523.998.359	22,00	5.579.238.342	22,00	5.579.238.342	Disbudparpora
			2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	36,00	29,00	875.269.797	29,00	884.022.495	29,00	892.862.720	29,00	901.791.347	29,00	901.791.347	Disbudparpora
4.5		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					Persentase Masyarakat yang menerapkan PHBS	Persen	75,00	80,00	1.000.258.895	85,00	1.010.261.484	90,00	1.030.466.714	95,00	1.061.380.715	95,00	1.061.380.715	Dinkes, RSUD
			1	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.000.258.895		1.010.261.484		1.030.466.714		1.061.380.715		1.061.380.715	Dinkes	
						Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	2,75	6,38		6,11		5,08		4,30		4,30			
						Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100000 Kelahiran	438,91	330,40		307,30		280,39		250,22		250,22			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
								2023		2024		2025		2026		K	Rp			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk															
					- Puskesmas	/1000 Penduduk	0,08	0,09		0,09			0,09		0,09		0,09			
					- Puskesmas	Unit	14,00	16,00		16,00			16,00		16,00		16,00			
					- Poliklinik	/1000 Penduduk	0,04	0,05		0,05			0,06		0,07		0,07			
					- Poliklinik	Unit	6,00	9,00		9,00			10,00		12,00		12,00			
					- Pustu	/1000 Penduduk	0,29	0,28		0,28			0,28		0,27		0,27			
					- Pustu	Unit	49,00	49,00		49,00			49,00		49,00		49,00			
4.6		Menurunnya angka stunting			Prevalansi Stunting	Persen	17,30	16,50	37.655.857.713	15,40	38.032.416.290	14,20	38.793.064.616	13,00	39.956.856.554	13,00	39.956.856.554	Dinkes, Perkim, DPMGP4, DKPP,		
			1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalansi Stunting	persen	17,30	16,50	37.655.857.713	15,40	38.032.416.290	14,20	38.793.064.616	13,00	39.956.856.554	13,00	39.956.856.554	Dinkes
4.7		Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,07	92,67	5.995.782.316	92,98	6.055.740.139	93,28	6.176.854.942	93,58	6.362.160.590	93,58	6.362.160.590	Bappeda		
			4	0 1	0 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	7,00	8,00	5.995.782.316	9,00	6.055.740.139	10,00	6.176.854.942	10,00	6.362.160.590	10,00	6.362.160.590	SETDAKAB
4.8		Tercapainya status Kabupaten Layak Anak			Kabupaten Layak Anak	Level	madya	madya	58.765.000	pratama	59.352.650	madya	60.539.703	Nindya	62.355.894	Nindya	62.355.894	DPMGP4		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode			Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
										2023		2024		2025		2026		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			2	0	0	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	level	madya	madya	58.765.000	pratama	59.352.650	madya	60.539.703	Nindya	62.355.894	Nindya	62.355.894	DPMGP4
4.9		Tertanganinya Covid-19					Jumlah kasus Covid yang tertangani	Persen	85,00	90,00	196.000.000	92,00	197.960.000	95,00	201.919.200	99,00	207.976.776	99,00	207.976.776	Dinkes
			1	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah pasien Covid yang mendapatkan pelayanan	Pasien	200,00	220,00	98.000.000	230,00	98.980.000	240,00	100.959.600	250,00	103.988.388	250,00	103.988.388	BLUD/Dinkes
											50.000.000		48.490.000		49.479.800		50.994.194		50.994.194	BLUD RSU - SIM
											48.000.000		50.490.000		51.479.800		52.994.194		52.994.194	Dinkes
4.10		Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan					Tipe Rumah Sakit Umum Daerah	Tipe	C	C	20.360.000.000	B	20.563.600.000	B	20.974.872.000	B	21.604.118.160	B	21.604.118.160	RSUD
			1	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit	Skor	C	C	20.360.000.000	B	20.563.600.000	B	20.974.872.000	B	21.604.118.160	B	21.604.118.160	BLUD RSU SIM
4.11		Meningkatnya life Skill masyarakat					Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	Persen	19,93	23,42	994.749.625	23,42	1.004.697.121	23,42	1.024.791.064	23,42	1.055.534.796	23,42	1.055.534.796	Disnakertrans/Disperindag kop
			2	0	0	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					943.564.000		952.999.640		972.059.633		1.001.221.422		1.001.221.422	Disnakertrans
							Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	NA	13,33		13,33		13,33		13,33		13,33		



NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
								2023		2024		2025		2026		K	Rp			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,99	4,08		3,92		3,78		3,64		3,64				
					Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	%	19,93	23,42		23,42		23,42		23,42		23,42				
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	64,99	67,49		68,53		69,58		70,63		70,63				
			2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari kerja yang Terdaftar yang ditempatkan.	%	0,05	0,06	51.185.625	0,06	51.697.481	0,06	52.731.431	0,07	54.313.374	0,07	54.313.374	Disnakertrans
4.1 2		Meningkatkan Kelestarian Kebudayaan					Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	3	2	334.974.075	3	509.131.663	2	514.222.979	3	519.365.209	3	519.365.209	Disbudparpora/MAA
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	1	4	30.857.395	3	31.165.969	4	31.477.629	3	31.792.405	3	31.792.405	Disbudparpora	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						169.116.680		170.807.847		172.515.925		174.241.085		174.241.085	
											104.116.680		105.157.847		106.209.425		107.271.520		107.271.520	Disbudparpora
											65.000.000		65.650.000		66.306.500		66.969.565		66.969.565	MAA
					Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi	gampong	35	47		14		50		50		50		50		
					Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim	%	30	35		34		40		50		50		50		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
								2023		2024		2025		2026		K	Rp		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah	%	25	35			35			40		70		70	
				PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)					135.000.000		136.350.000		137.713.500		139.090.635		139.090.635		MAA
					Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi	gampong	35	47			14			50		50		50	
					Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim	%	30	35			34			40		50		50	
					Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah	%	25	35			35			40		70		70	



NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Strategis untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta Pengembangan UMKM Terpadu (Hulu-Hilir), Agroindustri dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran				Persentase Penduduk Miskin	Persen	18,23	18,00	156.020.732.734	16,00	154.236.128.027	15,50	153.756.806.560	15,00	153.942.712.483	15,00	153.942.712.483	Dinsos, Setdakab, Perkim, Distanak, DKPP, Disperindagkop, Disbun, Bappeda, DPMGP4, PUPR, DLH, BPBD
5.1	Menurunnya beban penduduk miskin				Persentase Penduduk miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	75,00	80,00	2.272.490.560,00	85,00	2.295.215.465,15	90,00	2.341.119.775,27	95,00	2.411.353.367,89	95,00	2.411.353.367,89	Dinsos, Setdakab
			50204	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	4,44	7,80	1.537.246.445	7,96	1.552.618.909	8,12	1.583.671.288	8,28	1.631.181.426	8,28	1.631.181.426	BPKD
			10602	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	%			424.639.460		428.885.855		437.463.572		450.587.479		450.587.479	Dinsos
			10605	PROGRAM PERLINDUNGAN	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	30.710,00	30.610,00	310.604.655		313.710.702		319.984.916		329.584.463		329.584.463	Dinsos

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
								2023		2024		2025		2026		K	Rp		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				DAN JAMINAN SOSIAL															
5.2		Meningkatnya kemandirian desa			Indeks Desa Membangun	Indeks	0,62	0,64	8.499.428.930	0,65	8.584.423.219	0,66	8.756.111.684	0,68	9.018.795.034	0,68	9.018.795.034	DPMGP4	
			2	1 3 0 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	70,00	100,00	395.693.260	100,00	399.650.193	100,00	407.643.196	100,00	419.872.492	100,00	419.872.492	DPMGP4
						Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	222,00	222,00	3.810.366.900	222,00	3.848.470.569	222,00	3.925.439.980	222,00	4.043.203.180	222,00	4.043.203.180	DPMGP4
			2	1 4 0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	222,0	222,0	3.810.366.900	222,00	3.848.470.569	222,00	3.925.439.980	222,00	4.043.203.180	222,00	4.043.203.180	DPMGP4
						Persentase LSM aktif	%	100,0	100,0		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMGP4
						Persentase Posyandu aktif	%	100,0	100,0		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMGP4
			2	1 3 0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				393.643.925		397.580.364		405.531.972		417.697.931		417.697.931	DPMGP4	
						Persentase LPM Berprestasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
						Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
						Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
						Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode			Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
										2023		2024		2025		2026		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	222,00	222,00	89.357.945	222,00	90.251.524	222,00	92.056.555	222,00	94.818.252	222,00	94.818.252	10 Kecamatan
										8.900.000		8.989.000		9.168.780		9.443.843		9.443.843	Kec. Kuala	
										8.350.000		8.433.500		8.602.170		8.860.235		8.860.235	Kec. Kuala Pesisir	
										9.500.000		9.595.000		9.786.900		10.080.507		10.080.507	Kec. Darul Makmur	
										8.750.000		8.837.500		9.014.250		9.284.678		9.284.678	Kec. Tripa Makmur	
										8.657.945		8.744.524		8.919.415		9.186.997		9.186.997	Kec. Tadu Raya	
										9.150.000		9.241.500		9.426.330		9.709.120		9.709.120	Kec. Suka Makmue	
										9.250.000		9.342.500		9.529.350		9.815.231		9.815.231	Kec. Seunagan	
										9.200.000		9.292.000		9.477.840		9.762.175		9.762.175	Kec. Seunagan Timur	
										8.700.000		8.787.000		8.962.740		9.231.622		9.231.622	Kec. Beutong	
										8.900.000		8.989.000		9.168.780		9.443.843		9.443.843	Kec. Beutong Ateuh Banggalang	
5.3		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat					Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penduduk miskin	Persen	98	500	15.995.782.316	400	16.055.740.139	300	16.176.854.942	200	16.362.160.590	200	16.362.160.590	Dinsos, Setdakab



NO	Tujuan	Sasaran	Kode			Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD				
										2023		2024		2025		2026		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					15.995.782.316		16.055.740.139		16.176.854.942		16.362.160.590		16.362.160.590	SETDAKAB				
5.4		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,99	4,08	346.614.536,00	3,92	350.080.681,36	3,78	357.082.294,99	3,64	367.794.763,84	3,64	367.794.763,84	Disnakertrans				
			2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					26.993.936		27.263.875		27.809.153		28.643.427		28.643.427	Disnakertrans				
							Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	79,37	63,49		63,49		47,62		47,62		47,62						
							Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	39,83	52,18		58,26		64,33		70,38		70,38						
							Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	7.953,00	7.973,00		7.993,00		8.013,00		8.033,00		8.033,00						
			3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigrasi	UPT	4,00	4,00	51.140.080,00	4,00	51.651.480,80	4,00	52.684.510,42	4,00	54.265.045,73	4,00	54.265.046	Disnakertrans				
			3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran lokal	KK	410,00	410,00	62.190.520,00	410,00	62.812.425,20	410,00	64.068.673,70	410,00	65.990.733,92	410,00	65.990.734	Disnakertrans				
			3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi	4 Kawasan	-	1,00	130.675.000,00	1,00	131.981.750,00	1,00	134.621.385,00	1,00	138.660.026,55	1,00	138.660.027	Disnakertrans				
			2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio daya serab tenaga kerja	%	13,75	15,00	75.615.000,00	17,00	76.371.150,00	19,00	77.898.573,00	21,00	80.235.530,19	21,00	80.235.530	DPMPTSP				
5.5		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat					Jumlah Pemberdayaan ekonomi	Persen	75,00	80,00	388.654.000,00	85,00	392.540.540,00	90,00	400.391.350,80	95,00	412.403.091,32	95,00	412.403.091,32	Setdakab				
			2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)	186,00	194,00	388.654.000,00	197,00	392.540.540,00	201,00	400.391.350,80	205,00	412.403.091,32	205,00	412.403.091	Setdakab				



NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.6		Meningkatnya ketahanan pangan			Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten	Indeks	71,64	74,27	153.465.165,00	75,59	154.999.816,65	76,91	158.099.812,98	78,23	162.842.807,37	78,23	162.842.807,37	DKPP
			2	094	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	70,80	71,80	19.897.165,00	72,90	20.096.136,65	73,90	20.498.059,38	74,00	21.113.001,16	74,00	21.113.001	DKPP
			2	095	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	70,80	71,80	23.672.000,00	72,90	23.908.720,00	73,90	24.386.894,40	74,00	25.118.501,23	74,00	25.118.501	DKPP
			2	093	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	70,80	71,80	109.896.000,00	72,90	110.994.960,00	73,90	113.214.859,20	74,00	116.611.304,98	74,00	116.611.305	DKPP
5.7		Meningkatnya kontribusi sektor perekonomian			Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB	Persen	44,94	45,11	26.453.994.245,84	45,34	23.473.722.154,63	45,55	20.828.214.001,24	45,70	17.829.366.241,34	45,70	17.829.366.241,34	Distanak/ DKPP/ Disbun
					Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB	Persen	4,39	4,49		4,59		4,61		4,65		4,65		Disperindagkop
					Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB ADHB	Persen	9,49	10,20		10,50		10,80		11,20		11,20		Disperindagkop
			3	275	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				152.500.000,00		154.025.000,00		157.105.500,00		161.818.665,00		161.818.665	Distannak
					Produksi sektor pertanian palawija	Ton	3.828,40	3.836,06		3.839,90		3.843,74		3.847,58		3.847,58		
					Produksi pertanian padi	Ton	102.936,80	103.555,35		103.866,01		104.177,61		104.490,14		104.490,14		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ha	6,50	6,52		6,60		6,70		6,70		6,70		
			3	2 7	0 4				98.756.200,00		99.743.762,00		101.738.637,24		104.790.796,36		104.790.796	Distannak
					Populasi ternak besar (sapi dan kerbau)	ekor	22.343,00	22.387,69		22.432,46		22.477,33		22.522,28		22.522,28		
					Populasi ternak kecil (kambing dan domba)	ekor	17.607,00	17.642,21		17.677,50		17.712,85		17.748,28		17.748,28		
			3	2 7	0 3				25.245.032.545,84		22.252.670.837,63		19.582.741.657,90		16.546.529.727,70		16.546.529.728	Distannak
					Produksi sektor pertanian palawija	Ton	3.828,40	3.836,06		3.839,90		3.843,74		3.847,58		3.847,58		
					Produksi pertanian padi	Ton	102.936,80	103.555,35		103.866,01		104.177,61		104.490,14		104.490,14		
					Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	6,50	6,52		6,60		6,70		6,70		6,70		
			3	2 7	0 2				700.000.000,00		707.000.000,00		721.140.000,00		742.774.200,00		742.774.200	Distannak
					Produksi sektor pertanian palawija	Ton	3.828,40	3.836,06		3.839,90		3.843,74		3.847,58		3.847,58		
					Cakupan bina kelompok petani	Ton	102.936,80	103.555,35		103.866,01		104.177,61		104.490,14		104.490,14		
					Cakupan bina kelompok petani	ton/ha	6,50	6,52		6,60		6,70		6,70		6,70		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode			Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
										2023		2024		2025		2026		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			3	2	0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					257.705.500		260.282.555		265.488.206		273.452.852		273.452.852	Distannak
						Produksi sektor pertanian palawija	Ton	3.828,40	3.836,06				3.839,90		3.843,74		3.847,58		3.847,58	
						Cakupan bina kelompok petani	Ton	102.936,80	103.555,35				103.866,01		104.177,61		104.490,14		104.490,14	
						Cakupan bina kelompok petani	%	62,02	53,94				52,30		56,32		60,62		60,62	
			3	3	0	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah industri Pengolahan	Unit	4.145,00	4.195,00	883.935.215	4.245,00	892.774.567	4.295,00	910.630.058	4.345,00	937.948.960	4.345,00	937.948.960	Disperindagkop
			2	1	0	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	64,00	66,00	55.132.810	68,00	55.684.138	70,00	56.797.821	72,00	58.501.755	72,00	58.501.755	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			2	1	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					500.000.000		505.000.000		515.100.000		530.553.000		530.553.000	Disperindagkop
						Persentase Koperasi Aktif	%	66,43	70,97			75,16		76,43		81,25		81,25	Disperindagkop	
						Persentase Koperasi aktif	%	33,57	29,03			24,84		23,57		18,75		18,75	Disperindagkop	
			2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Bina kelompok pengrajin	%	75,35	76,86	100.158.000	78,54	101.159.580	80,58	103.182.772	82,62	106.278.255	82,62	106.278.255	Disperindagkop
			3	3	0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah UTTP yang ditera/teraulang	Unit	38,00	53,00	500.000.000	74,00	505.000.000	104,00	515.100.000	146,00	530.553.000	146,00	530.553.000	Disperindagkop

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.8		Terkendalinya tingkat inflasi daerah			Jumlah angka Inflasi	Persen	1,13	1,01	994.011.578	0,90	1.003.951.694	0,70	1.024.030.728	0,50	1.054.751.649	0,50	1.054.751.649	Bappeda/Setdakab (Bag. Ekonomi)
			4 0 0 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Penurunan angka inflasi	Persen	1,13	1,01	994.011.578	0,90	1.003.951.694	0,70	1.024.030.728	0,50	1.054.751.649	0,50	1.054.751.649	Setdakab (Bag. Ekonomi)
5.9		Meningkatnya kualitas jalan kabupaten			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	40,95	42,25	71.019.862.000	43,55	71.730.060.620	44,85	73.164.661.832	46,15	75.359.601.687	46,15	75.359.601.687	PUPR
			1 0 3 1 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				71.019.862.000		71.730.060.620		73.164.661.832		75.359.601.687		75.359.601.687	PUPR	
					Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	40,95	42,25		43,55		44,85		46,15		46,15		
					Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Index	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		
					Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	26,63	28,24		29,86		31,48		33,09		33,09		
			2 1 5 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1.900.402.000		1.919.406.020		1.957.794.140		2.016.527.965		2.016.527.965	Dinas Perhubungan	
					Jumlah arus penumpang angkutan umum (Angkutan Darat)	Trayek	7,00	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		
					Pemasangan Rambu-rambu	%	12,00	13,00		14,00		15,00		16,00		16,00		
					Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio Index	83,95	83,95		83,95		83,95		83,95		83,95		
					Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	-	275,00		368,00		549,00		764,00		764,00		



NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
								2023		2024		2025		2026		K	Rp			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Rasio ijin trayek	Indeks	15,00	15,00		20,00		25,00		36,00		36,00				
					Persentase layanan angkutan darat	%	5,80	5,80		7,30		9,60		13,45		13,45				
					Jumlah Pelabuhan Laut, Darat/Udara/ Terminal Bis (Terminal Tipe B)	Unit		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00				
					Jumlah Pelabuhan Laut, Darat/Udara/ Terminal Bis (Terminal Tipe B)	Unit	3,00	4,00		4,00		4,00		5,00		5,00				
					Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%		4,50		6,50		7,50		9,50		9,50				
5.1 0		Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani			Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	22,43	24,67	21.899.271.000	27,14	22.118.263.710	29,85	22.339.446.347	32,83	22.562.840.811	32,83	22.562.840.811	PUPR/ Distannak		
			1 0 3	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi	Rasio Index	45,70	45,70	13.280.671.000	45,66	13.413.477.710	45,69	13.547.612.487	45,71	13.683.088.612	45,71	13.683.088.612	PUPR	
			3	2 7	0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	22,43	24,67	8.618.600.000	27,14	8.704.786.000	29,85	8.791.833.860	32,82	8.879.752.199	32,82	8.879.752.199	Distannak
5.1 1		Meningkatnya kualitas dan akses air bersih			Persentase penduduk berakses air minum	Persen	4,27	6,40	670.359.152	7,42	677.062.744	8,41	690.603.998	9,37	711.322.118	9,37	711.322.118	Perkim		
			1	0 3	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				670.359.152		677.062.744		690.603.998		711.322.118		711.322.118	Perkim	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Persentase penduduk berakses air minum	%	4,27	6,40		7,42		8,41		9,37		9,37		
					Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	5,41	9,70		11,79		13,81		15,78		15,78		
5.1 2		Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi			Persentase Rumah tangga bersanitasi	Persen	73,48	73,98	1.274.500.000	74,48	1.287.245.000	74,98	1.312.989.900	75,48	1.352.379.597	75,48	1.352.379.597	Perkim
			1 0 3 0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Rumah tangga bersanitasi	Persen	73,48	73,98	1.274.500.000	74,48	1.287.245.000	74,98	1.312.989.900	75,48	1.352.379.597	75,48	1.352.379.597	Perkim
5.1 3		Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau			Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	1.029,00	1.079,00	312.206.500,00	1.129,00	315.328.565,00	1.179,00	321.635.136,30	1.229,00	331.284.190,39	1.229,00	331.284.190,39	Perkim/Baitul Mal
			1 0 4 0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit			312.206.500		315.328.565		321.635.136		331.284.190		331.284.190	Perkim
					Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	1.073	196		198		200		202		202		
					Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	227	100		100		100		100		100		
5.1 4		Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,96	57,42	2.760.276.751	57,65	2.787.879.519	57,88	2.815.758.314	58,11	2.843.915.897	58,11	2.843.915.897	DLH
			2 1 1 0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada/ tidak ada	Tidak Ada	Ada	101.140.500	Ada	102.151.905	Ada	103.173.424	Ada	104.205.158	Ada	104.205.158	DLH

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
								2023		2024		2025		2026		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2.1.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.386.856.251		1.400.724.814		1.414.732.062		1.428.879.382		1.428.879.382	DLH
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,96	57,42			57,65		57,88		58,11		58,11	
					Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	26,37	34,07			34,85		35,54		36,15		36,15	
			2.1.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.272.280.000		1.285.002.800		1.297.852.828		1.310.831.356		1.310.831.356	DLH
					Jumlah Sarana prasarana persampahan	Unit	1.026	1.200			1.500		1.700		2.000		2.000	
					Persentase cakupan area pelayanan	Persen	4,66	4,66			4,87		5,08		5,31		5,31	
5.1.5		Meningkatnya ketahanan terhadap Kebenbencana an			Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,36	0,38	2.979.816.000	0,40	3.009.614.160	0,41	3.069.806.443	0,42	3.161.900.636	0,42	3.161.900.636	BPBD
			1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kapasitas ketahanan Bencana	Indeks	0,36	0,38	314.354.000	0,40	317.497.540	0,41	323.847.491	0,42	333.562.916	0,42	333.562.916	BPBD
			1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Indeks Kapasitas ketahanan Bencana	Indeks	0,36	0,38	2.665.462.000	0,40	2.692.116.620	0,41	2.745.958.952	0,42	2.828.337.721	0,42	2.828.337.721	BPBD



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung total kapasitas dan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Sebelum melakukan analisis kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Disamping itu, juga diperlukan data-data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah untuk 4 (empat) tahun serta berbagai informasi pendukung dalam melakukan proyeksi APBK.

7.1.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya

Dalam menghitung proyeksi terhadap pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan analisis dan pertimbangan (*judgment*) antara lain dengan menganalisis tren realisasi, laju dan rata-rata pertumbuhan realisasi serta asumsi lainnya. Adapun cara atau pendekatan yang dilakukan dalam menghitung proyeksi pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:

1. Berdasarkan laju pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja 5 (lima) tahun terakhir dari masing-masing kode rekening/ perkiraan dari pendapatan dan belanja.
2. Rata-rata pertumbuhan sejak terjadinya realisasi pendapatan dan belanja dari tahun 2017-2021.
3. Analisis terhadap kecenderungan jumlah realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari tahun 2015-2021 dengan menggunakan pertimbangan (*judgment*) terhadap ketersediaan dana dalam menentukan jumlah SiLPA Tahun sebelumnya.
4. Jika diperoleh penetapan angka pendapatan dan belanja daerah untuk tahun berikutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah disesuaikan dengan peraturan terkait.

7.1.1.1. Proyeksi Pendapatan

Asumsi target penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Nagan Raya untuk tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

7.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023-2026 diproyeksikan dengan laju pertumbuhan pendapatan sebesar 1,24% per tahun. Proyeksi tersebut mempertimbangkan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,24%. PAD diproyeksikan mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi dikarenakan COVID-19. Pemulihan ekonomi diperkirakan akan terus bergerak maju baik terutama dari sektor pajak daerah.

Selanjutnya, pemulihan ekonomi daerah yang terus membaik pada tahun 2023-2026 dapat memberikan dampak pada sektor usaha dan perdagangan di Kabupaten Nagan Raya. Besarnya retribusi daerah yang ditingkatkan beberapa tahun mendatang dengan rata-rata proyeksi pertumbuhan sebesar 17,51 persen diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Nagan Raya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya pada kelompok Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diprediksikan juga meningkat dengan persentase pertumbuhan sebesar 6,03 persen. Pertumbuhan pengelolaan kekayaan daerah ini didukung oleh penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap BUMA yang ada di Kabupaten Nagan Raya yaitu Bank Aceh Syariah. Sementara itu, Lain-Lain PAD yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 1,58. Berikut Proyeksi Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan (2023-2026):

Tabel 7.1
Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun				Pertumbuhan
	2023	2024	2025	2026	
Pajak Hotel	18.912.234,00	20.054.532,93	21.265.826,72	22.550.282,66	6,04%
Pajak Restoran	2.585.844.259,62	2.742.029.252,90	2.907.647.819,78	3.083.269.748,09	6,04%
Pajak Reklame	544.305.762,25	577.181.830,29	612.043.612,84	649.011.047,05	6,04%
Pajak Penerangan Jalan	4.877.168.589,71	5.171.749.572,53	5.484.123.246,71	5.815.364.290,81	6,04%
Pajak Pengambilan Galian Gol C	1.766.904.744,40	1.873.625.790,96	1.986.792.788,73	2.106.795.073,17	6,04%
Pajak Air Tanah	201.145.345,01	213.294.523,85	226.177.513,09	239.838.634,88	6,04%
Pajak Sarang Burung Walet	8.732.394,00	9.259.830,60	9.819.124,37	10.412.199,48	6,04%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.766.904.744,40	1.873.625.790,96	1.986.792.788,73	2.106.795.073,17	6,04%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.890.381.300,83	6.246.160.331,40	6.623.428.415,41	7.023.483.491,70	6,04%
Jumlah	17.660.299.374,22	18.726.981.456,42	19.858.091.136,39	21.057.519.841,02	

Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah)

Tabel 7.2
Proyeksi Retribusi Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
Retribusi Jasa Umum	842.505.571,50	990.028.297,07	1.163.382.251,89	1.367.090.484,19	17,51%
Retribusi Jasa Usaha	454.202.472,24	533.733.325,13	627.190.030,36	737.011.004,68	17,51%
Retribusi Perizinan Tertentu	121.490.651,25	142.763.664,28	167.761.581,90	197.136.634,89	17,51%
Jumlah	1.418.198.694,99	1.666.525.286,48	1.958.333.864,15	2.301.238.123,76	

Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah)

Tabel 7.3
Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.595.354.903,24	2.751.854.803,90	2.917.791.648,58	3.093.734.484,99	6,03%
Jumlah	2.595.354.903,24	2.751.854.803,90	2.917.791.648,58	3.093.734.484,99	

Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah)

Tabel 7.4
Proyeksi Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
Lain-Lain PAD yang Sah	80.169.303.766,24	81.435.978.765,75	82.722.667.230,25	84.029.685.372,48	1,58 %
Jumlah	80.169.303.766,24	81.435.978.765,75	82.722.667.230,25	84.029.685.372,48	

Sumber: BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah)

Tabel 7.5
Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.625.703.440,00	20.728.831.957,20	20.832.476.116,99	20.936.638.497,57	0,5%
Jumlah	20.625.703.440,00	20.728.831.957,20	20.832.476.116,99	20.936.638.497,57	

Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah)

7.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

Dana perimbangan yang merupakan bagian dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat ke daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang meningkat dan juga berkurang. Komponen Dana Alokasi Umum diprediksi terus mengalami penurunan hingga tahun 2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,66 persen. Penurunan tersebut masih diasumsikan bahwa fokus Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19 di Indonesia.

Selain DAU, dana DAK Fisik maupun Non Fisik juga diprediksi bergerak lambat dengan rata-rata penurunan hingga mencapai 0,10 hingga 1,63 persen. Berdasarkan pola pergerakan realisasi dana DAK dari tahun 2018 hingga 2021 dan target DAK 2022 tersebut menggambarkan bahwa alokasi dana tersebut akan berkurang dan hanya akan dialokasikan untuk proyek pembangunan yang strategis. Selanjutnya, dana bagi hasil yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil Sumber Daya Alam diprediksi juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,96 %.

Pada pendapatan transfer, persentase dana OTSUS akan mengalami penurunan yang cukup signifikan seiring dengan berkurangnya alokasi tersebut sebesar 1 persen dari DAU Nasional mulai dari tahun 2023 hingga 2027. Dengan berkurangnya dana OTSUS tersebut tentu saja akan memberikan guncangan besar bagi pembangunan strategis di Aceh khususnya Kabupaten Nagan Raya. Besaran dana OTSUS untuk 4 (empat) tahun selanjutnya diproyeksikan tetap. Untuk itu, peningkatan serapan PAD yang tergerus oleh penurunan penerimaan dari pendapatan transfer akan diupayakan dengan mengintensifikasi penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan penerimaan dari zakat.

Tabel 7.6
Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	37.190.449.478,00	39.778.904.761,67	42.547.516.533,08	45.508.823.683,78	6,96
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	477.108.051.000,00	473.959.137.863,40	470.831.007.553,50	467.723.522.903,65	0,66
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	100.830.483.826,00	100.931.314.309,83	101.032.245.624,14	101.133.277.869,76	0,10
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	46.190.242.049,00	46.943.142.994,40	47.708.316.225,21	48.485.961.779,68	1,63
Jumlah	670.445.431.676,67	679.697.578.633,81	689.077.405.218,96	698.586.673.410,98	1,38%

Sumber: BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah)

Tabel 7.7
Proyeksi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun				Pertumbuhan
	2023	2024	2025	2026	
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur	45.474.113.840,50	45.474.113.840,50	45.474.113.840,50	45.474.113.840,50	1% (Penurunan Otsus menjadi 1% dari DAU Nasional)
Jumlah	45.474.113.840,50	45.474.113.840,50	45.474.113.840,50	45.474.113.840,50	

Sumber: BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah)

7.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah secara umum terjadi peningkatan dan penurunan pada beberapa kelompok belanja. Pada kelompok belanja pegawai, terjadi peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 1,34% persen. Adanya Peraturan Presiden No.12 Tahun 2019 mengakibatkan peningkatan pada anggaran untuk belanja pegawai. Hal ini dikarenakan alokasi belanja yang sebelumnya terbagi 2 yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung kini digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga kelompok belanja pegawai menjadi bertambah. Berdasarkan hasil proyeksi, alokasi belanja pegawai pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 348.850.449.052,38.

Alokasi untuk belanja hibah diasumsikan mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun politik. Dengan demikian, alokasi pendanaan untuk hibah kepada masyarakat akan semakin meningkat. Pendanaan untuk hibah perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut secara cermat dan tepat sehingga memberikan efek dan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Tidak Terduga diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 0,63% sebagai bentuk dana yang akan digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kenaikan ini diprediksikan meningkat dengan melihat tren realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021. Sementara itu, alokasi belanja modal seiring dengan berkurangnya dana OTSUS maka belanja modal juga diproyeksikan akan menurun sebesar 50% dari anggaran tahun 2022. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel tabel di bawah ini.

Tabel 7.8
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun				Pertumbuhan
	2023	2024	2025	2026	(%)
BELANJA OPERASI	653.321.347.658,69	664.862.592.970,28	676.629.618.239,53	628.627.162.160,73	1.77
Belanja Pegawai	335.194.270.419,65	339.685.873.643,27	344.237.664.350,09	348.850.449.052,38	1.34
Belanja Hibah	4.506.668.606,01	4.670.260.676,41	4.839.791.138,97	5.015.475.557,31	3.50
Belanja Bantuan Sosial	9.858.926.888,84	9.900.334.381,77	9.941.915.786,17	9.983.671.832,47	0.42
Belanja Barang dan Jasa	303.761.481.744,19	310.606.124.268,83	317.610.246.964,29	324.777.565.718,56	2.25
BELANJA TRANSFER	226.821.454.231,54	226.955.675.425,72	227.090.244.671,81	227.225.165.936,53	0.06
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/	1.600.805.159,03	1.622.416.028,67	1.644.318.645,06	1.666.516.946,77	1.35
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	225.220.649.072,51	225.333.259.397,05	225.445.926.026,75	225.558.648.989,76	0.05
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.956.531.094,30	3.981.457.240,19	4.006.540.420,81	4.031.781.625,46	0.63
BELANJA MODAL	201.040.503.374,47	186.625.960.019,41	186.532.528.635,64	186.557.495.965,28	(2.40)
JUMLAH	1.085.139.836.359,00	1.096.776.843.372,00	1.108.579.426.812,00	1.120.549.989.603,00	1.08

Sumber: BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah)

7.1.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya diprediksi akan mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga tahun 2026 sebesar 0,13% persen. Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan, alokasi untuk BUMA seperti Bank Aceh Syariah sebagai upaya dalam mewujudkan ruang fiskal yang lebih besar diprediksikan tetap ada dari tahun 2023-2026 dengan mengingat pembiayaan dari tahun 2021 sudah berjalan. Untuk itu, proyeksi pembiayaan Aceh dari Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.9
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun				Pertumbuhan
	2023	2024	2025	2026	
Penerimaan Pembiayaan	16.782.796.316,34	16.804.613.951,55	16.826.459.949,69	16.848.334.347,62	0,13%
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
Jumlah	15.804.613.951,55	15.826.459.949,69	15.848.334.347,62	15.870.237.182,27	

Sumber: BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah)

7.1.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun dari tahun 2023-2026. Perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang disajikan merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif. Artinya bahwa perkiraan tidak kaku dan dapat menyesuaikan dengan kondisi pada saat proses perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Lebih rinci mengenai kapasitas riil kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026

No	Uraian	Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.068.335.222.407	1.079.950.383.422	1.091.731.092.464	1.103.679.752.421
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	16.804.613.952	16.826.459.950	16.848.334.348	16.870.237.182
	Total Penerimaan	1.085.139.836.359	1.096.776.843.372	1.108.579.426.812	1.120.549.989.603
3	Belanja Wajib Mengikat	580.337.851.240	585.193.601.367	590.116.156.368	595.106.544.004
	Belanja Pegawai	335.194.270.420	339.685.873.643	344.237.664.350	348.850.449.052
	Belanja Hibah	4.506.668.606	4.670.260.676	4.839.791.139	5.015.475.557
	Belanja Bantuan Sosial	9.858.926.889	9.900.334.382	9.941.915.786	9.983.671.832
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	1.600.805.159	1.622.416.029	1.644.318.645	1.666.516.947
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	225.220.649.073	225.333.259.397	225.445.926.027	225.558.648.990
	Belanja Tak terduga	3.956.531.094	3.981.457.240	4.006.540.421	4.031.781.625
4	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	503.801.985.118	510.583.242.004	517.463.270.444	524.443.445.599

Sumber: BPKD Kabupaten Nagan Raya (data diolah)

7.1.3. Pendanaan Pembangunan Dari CSR

Dalam mewujudkan pembangunan dalam kerangka berkelanjutan, tentunya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat mengembangkan upaya pembangunan dengan melibatkan mitra pembangunan sebagai salah satu strategi dalam membangun Kabupaten Nagan Raya secara partisipatif dan terintegrasi. Untuk menindaklanjuti pencapaian tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah melakukan kerjasama dengan pelaku usaha yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya melalui penetapan Qanun Nagan Raya No. 6 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah dana CSR ini tidak menjadi bahagian Penerimaan Kabupaten Nagan Raya. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Nagan Raya hanya melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pemanfaatan dana tersebut agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya atau lembaga swasta lainnya.

Adapun proyeksi pendanaan pembangunan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.11 di bawah ini.

Tabel 7.11.
Proyeksi Pendanaan Pembangunan dari TJSLP/CSR di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2023-2026

NO	PERUSAHAAN	REALISASI	TARGET				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PT. BARA ENERGI LESTARI	2.621.961.201	5.430.366.000	6.550.000.000	7.205.000.000	7.925.500.000	8.718.050.000
2	PT. USAHA SEMESTA JAYA	183.650.000	183.650.000	251.340.000	301.608.000	361.929.000	434.314.000
3	PT. FAJAR BAIZURY & BROTHERS	188.735.000	207.735.000	284.302.000	341.162.000	409.394.000	491.272.000
4	PT. SOCFINDO PERKEBUNAN SEUMAYAM	701.013.757	675.962.852	925.112.000	1.110.134.000	1.332.160.000	1.598.592.000
5	PT. SAWIT NAGAN RAYA MAKMUR	146.039.000	209.100.000	286.170.000	343.404.000	412.084.000	494.500.000
6	PT. KHARISMA ISKANDAR MUDA	72.000.000	185.000.000	253.188.000	303.825.000	364.590.000	437.508.000
7	PT. BEURATA SUBUR PERSADA	127.868.000	128.720.000	176.164.000	211.396.000	253.675.000	304.410.000
8	PT. RAJA MARGA	186.900.000	196.500.000	268.926.000	322.711.000	387.253.000	464.703.000
9	PT. SOCFINDO PERKEBUNAN SEUNAGAN	618.136.554	681.000.000	932.000.000	1.118.400.000	1.342.080.000	1.610.496.000
10	PT. KALLISTA ALAM	306.550.000	306.550.000	419.539.000	503.446.000	604.135.000	724.962.000
11	PT. SURYA PANEN SUBUR I	580.890.148	625.000.000	855.365.000	1.026.438.000	1.231.725.000	1.478.070.000
12	PT. SURYA PANEN SUBUR II	754.661.708	700.000.000	958.000.000	1.149.600.000	1.379.520.000	1.655.424.000
13	PT. UJONG NEUBOK DALAM	380.350.000	287.000.000	392.783.000	471.339.000	565.606.000	678.727.000
14	PT. WATU GEDE UTAMA	-	-	40.000.000	60.000.000	80.000.000	100.000.000
15	PT. INDONESIA PACIFIC ENERGY	10.000.000	15.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	100.000.000
16	PT. MEGA MULTI CEMERLANG	10.000.000	15.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	100.000.000
17	PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG JEURAM	1.025.055.000	1.100.000.000	1.500.000.000	1.800.000.000	2.160.000.000	2.592.000.000

NO	PERUSAHAAN	REALISASI	TARGET				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
18	PT. SEUNAGAN ENERGI	45.500.000	25.000.000	34.214.000	41.056.000	49.267.000	59.120.000
19	PT. AGRO SINERGI NUSANTARA	133.950.000	64.150.000	87.794.000	105.352.000	126.422.000	151.706.000
20	PT. ENSEM LESTARI	93.400.000	168.400.000	230.469.000	276.562.000	331.874.000	398.248.000
TOTAL		8.186.660.368	11.204.133.852	14.525.366.000	16.811.433.000	19.477.214.000	22.592.102.000

Sumber : Bappeda Kabupaten Nagan Raya, 2022

7.2. Program Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Nagas Raya menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagas Raya selaku penanggung jawab terhadap tercapainya program, indikator, dan target kinerja outcome. Untuk lebih jelasnya di uraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.12.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	Nilai	36,63 C	60 B	399.616.343.655	65 B	407.572.119.928	70 BB	409.223.277.522	81 A	404.778.575.789	81 A	404.778.575.789	Semua SKPK
								141.541.539.607		144.301.599.630		144.878.806.028		143.953.146.361		143.953.146.361	Dinas Pendidikan
								756.485.091		771.236.550		774.321.496		769.374.201		769.374.201	Sekretariat MPD
								40.186.417.489		40.970.052.630		41.133.932.840		40.871.119.916		40.871.119.916	Dinkes
								63.028.352.788		64.257.405.667		64.514.435.290		62.136.639.660		62.136.639.660	BLUD RSU - SIM
								6.674.773.427		6.804.931.509		6.832.151.235		6.788.499.254		6.788.499.254	PUPR
								3.065.438.183		3.125.214.228		3.137.715.085		3.117.667.596		3.117.667.596	PUPR
								1.379.511.807		1.406.412.287		1.412.037.936		1.403.016.143		1.403.016.143	Kesbangpol
								2.367.247.270		2.413.408.591		2.423.062.226		2.407.580.797		2.407.580.797	Satpol PP dan WH
								3.862.798.869		3.938.123.447		3.953.875.941		3.928.613.836		3.928.613.836	BPBD
								2.957.280.057		3.014.947.018		3.027.006.806		3.007.666.654		3.007.666.654	Dinas Syariat Islam



Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						2.492.710.641		2.541.318.498		2.551.483.772		2.535.181.832		2.535.181.832	Dinsos
						1.211.249.366		1.234.868.729		1.239.808.204		1.231.886.821		1.231.886.821	Sekretariat Baitul Mal
						1.105.859.810		1.127.424.076		1.131.933.772		1.124.701.621		1.124.701.621	Sekretariat MPU
						1.229.345.402		1.253.317.638		1.258.330.908		1.250.291.180		1.250.291.180	Sekretariat MAA
						1.921.933.039		1.959.410.733		1.967.248.376		1.954.679.232		1.954.679.232	Disnakertrans
						4.235.770.068		4.318.367.585		4.335.641.055		4.307.939.777		4.307.939.777	DPMGP4
						1.168.014.919		1.190.791.209		1.195.554.374		1.187.915.738		1.187.915.738	DINAS PERTANAHAN
						6.145.858.133		6.265.702.367		6.290.765.176		6.250.572.219		6.250.572.219	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						2.647.427.769		2.699.052.611		2.709.848.821		2.692.535.055		2.692.535.055	Disdukcapil
						3.463.597.709		3.531.137.864		3.545.262.415		3.522.611.025		3.522.611.025	Dinas Perhubungan
						2.225.692.238		2.269.093.237		2.278.169.610		2.263.613.928		2.263.613.928	Diskominfo
						2.631.832.165		2.683.152.892		2.693.885.504		2.676.673.730		2.676.673.730	Disperindagkop

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						2.920.410.882		2.977.358.895		2.989.268.330		2.970.169.297		2.970.169.297	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						2.962.226.233		3.019.989.644		3.032.069.603		3.012.697.104		3.012.697.104	Disbudparpora
						2.130.975.652		2.172.529.677		2.181.219.795		2.167.283.546		2.167.283.546	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						3.456.718.873		3.524.124.891		3.538.221.391		3.515.614.987		3.515.614.987	DKPP
						7.607.760.828		7.756.112.165		7.787.136.613		7.737.383.040		7.737.383.040	Distannak
						2.536.053.286		2.585.506.325		2.595.848.350		2.579.262.956		2.579.262.956	Dinas Perkebunan
						17.123.276.111		17.617.179.995		17.687.648.715		17.574.638.790		17.574.638.790	SETDAKAB
						448.971.215		457.726.154		459.557.058		456.620.856		456.620.856	KDH/WKDH
						5.381.858.429		5.486.804.668		5.508.751.887		5.473.555.369		5.473.555.369	Setwan DPRK
						7.915.816.245		8.070.174.662		8.102.455.360		8.050.687.152		8.050.687.152	DPRK
						5.301.785.943		5.405.170.769		5.426.791.452		5.392.118.596		5.392.118.596	BAPPEDA
						18.339.336.621		18.696.953.685		18.771.741.500		18.787.312.721		18.787.312.721	BPKD

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						307.415.172		316.667.340		338.803.123		336.638.442		336.638.442	Sekretariat Korpri
						2.415.889.423		2.462.999.266		2.472.851.264		2.457.051.722		2.457.051.722	BKPSDM
						4.866.662.288		4.961.562.203		4.981.408.451		4.949.581.237		4.949.581.237	Inspektorat
						2.549.593.123		2.599.310.189		2.609.707.429		2.593.033.487		2.593.033.487	Kec. Darul Makmur
						1.707.672.087		1.740.971.693		1.747.935.580		1.736.767.670		1.736.767.670	Kec. Suka Makmue
						2.063.341.131		2.103.576.283		2.111.990.588		2.098.496.658		2.098.496.658	Kec. Kuala
						2.009.046.741		2.048.223.152		2.056.416.045		2.043.277.192		2.043.277.192	Kec. Kuala Pesisir
						1.666.784.913		1.699.287.218		1.706.084.367		1.695.183.853		1.695.183.853	Kec. Tripa Makmur
						2.522.409.093		2.571.596.071		2.581.882.455		2.565.386.292		2.565.386.292	Kec. Beutong
						2.088.389.288		2.129.112.879		2.137.629.331		2.123.971.589		2.123.971.589	Kec. Seunagan Timur
						2.105.144.930		2.146.195.257		2.154.780.038		2.141.012.717		2.141.012.717	Kec. Seunagan
						1.592.562.626		1.623.617.598		1.630.112.068		1.619.696.956		1.619.696.956	Kec. Tadu Raya
						1.297.106.678		1.322.400.258		1.327.689.859		1.319.206.983		1.319.206.983	Kec. Beutong Ateuh Banggalang

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				269.555.357.405		272.250.910.979		277.561.794.422		285.617.696.004		285.617.696.004	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				119.539.972.030		120.735.371.750		123.150.079.185		126.844.581.561		126.844.581.561	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			59.689.427.765		60.286.322.043		61.492.048.484		63.336.809.938		63.336.809.938	Dinas Pendidikan
			Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	98,12	98,26		98,26		98,56		98,71		98,71	
			Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	98,72	98,90		98,98		99,08		99,36		99,36	
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	76,32	76,51		76,66		76,81		76,98		76,98	
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio Index	61,55	61,88		61,97		61,99		62,08		62,08	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			29.844.713.883		30.143.161.021		30.746.024.242		31.668.404.969		31.668.404.969	Dinas Pendidikan
			Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	74,50	74,87		74,98		75,12		75,52		75,52	
			Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio Index	61,27	61,65		61,89		61,93		61,98		61,98	



Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio Index	72,64	72,97		73,18		73,71		74,03		74,03		
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio Index	56,32	56,63		56,79		56,87		56,92		56,92		
		Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%	98,72	98,99		99,17		99,54		99,84		99,84		
		Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	83,50	83,72		83,91		84,03		84,46		84,46		
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			29.844.713.883		30.143.161.021		30.746.024.242		31.668.404.969		31.668.404.969	Dinas Pendidikan
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,31	70,20		71,20		71,53		74,42		74,42		
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	42,17	42,66		43,17		43,61		43,88		43,88		
		APK SD/MI/Paket A	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		APK SMP/MTs/Paket B	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		APK SMA/SMK/	%	96,26	96,44		96,62		96,78		96,93		96,93		
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,96	9,00		9,18		9,24		9,32		9,32		
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,14	14,26		14,38		14,45		14,58		14,58		
		Angka Pendidikan Tamat SD Sederajat	%	98,83	98,92		99,02		99,32		99,66		99,66		
		Angka Pendidikan Tamat SLTP sederajat	%	95,25	95,66		95,85		95,96		96,03		96,03		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Angka Pendidikan Tamat Diploma I/II/III	%	5,25	5,35		5,49		5,72		5,89		5,89				
		Angka Pendidikan Tamat Diploma IV/S1	%	60,00	60,80		60,96		61,12		61,33		61,33				
		Angka Pendidikan Tamat S2/S3	%	3,00	3,14		3,28		3,58		3,75		3,75				
		Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	97,00	97,19		97,55		97,71		97,88		97,88				
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	85,00	85,44		85,76		85,89		85,97		85,97				
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,73	98,96		99,11		99,38		99,59		99,59				
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	92,46	92,82		92,82		92,97		93,18		93,18				
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	89,74	89,96		90,07		90,43		90,68		90,68				
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	70,04	70,43		70,74		70,74		70,91		70,91				
1	01	07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Ada	Ada	161.116.500,00	Ada	162.727.665,00	Ada	165.982.218,30	Ada	170.961.684,85	Ada	170.961.684,85	Sekretariat MPD
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					59.114.116.608		59.705.257.774		60.899.362.930		62.726.343.817		62.726.343.817	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalansi Stunting	persen	17,30	16,50	37.655.857.713	15,40	38.032.416.290	14,20	38.793.064.616	13,00	39.956.856.554	13,00	39.956.856.554	Dinkes

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah pasien Covid yang mendapatkan pelayanan	Pasien	200,00	220,00	98.000.000	230,00	98.980.000	240,00	100.959.600	250,00	103.988.388	250,00	103.988.388	BLUD/Dinkes
							50.000.000		48.490.000		49.479.800		50.994.194		50.994.194	BLUD RSU - SIM	
							48.000.000		50.490.000		51.479.800		52.994.194		52.994.194	Dinkes	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit	Skor	C	C	20.360.000.000	B	20.563.600.000	B	20.974.872.000	B	21.604.118.160	B	21.604.118.160	BLUD RSU SIM
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.000.258.895		1.010.261.484		1.030.466.714		1.061.380.715		1.061.380.715	Dinkes	
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	2,75	6,38		6,11		5,08		4,30		4,30		
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100000 Kelahiran	438,91	330,40		307,30		280,39		250,22		250,22		
				Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk													
				- Puskesmas	/1000 Penduduk	0,08	0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		- Puskesmas	Unit	14,00	16,00		16,00		16,00		16,00		16,00				
		- Poliklinik	/1000 Penduduk	0,04	0,05		0,05		0,06		0,07		0,07				
		- Poliklinik	Unit	6,00	9,00		9,00		10,00		12,00		12,00				
		- Pustu	/1000 Penduduk	0,29	0,28		0,28		0,28		0,27		0,27				
		- Pustu	Unit	49,00	49,00		49,00		49,00		49,00		49,00				
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				86.245.392.152		87.107.846.074		88.715.868.218		91.106.392.015		91.106.392.015			
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi	Rasio Index	45,70	45,70	13.280.671.000	45,66	13.413.477.710	45,69	13.547.612.487	45,71	13.683.088.612	45,71	13.683.088.612	PUPR
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					670.359.152		677.062.744		690.603.998		711.322.118		711.322.118	Perkim
			Persentase penduduk berakses air minum	%	4,27	6,40		7,42		8,41		9,37		9,37			
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	5,41	9,70		11,79		13,81		15,78		15,78			

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Rumah tangga bersanitasi	Persen	73,48	73,98	1.274.500.000	74,48	1.287.245.000	74,98	1.312.989.900	75,48	1.352.379.597	75,48	1.352.379.597	Perkim
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			71.019.862.000		71.730.060.620		73.164.661.832		75.359.601.687		75.359.601.687		PUPR	
				Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	40,95	42,25		43,55		44,85		46,15		46,15		
				Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Index	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		
				Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	26,63	28,24		29,86		31,48		33,09		33,09		
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			312.206.500		315.328.565		321.635.136		331.284.190		331.284.190			
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			312.206.500		315.328.565		321.635.136		331.284.190		331.284.190		Perkim	
				Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	1.073	196		198		200		202		202		
				Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	227	100		100		100		100		100		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.608.426.000		3.644.510.260		3.717.400.465		3.828.922.479		3.828.922.479			

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			628.610.000		634.896.100		647.594.022		667.021.843		667.021.843	Satpol PP dan WH		
			Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	%	60,00	70,00		76,00		81,00		85,00		85,00			
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)	%	65,00	71,00		75,00		79,00		82,00		82,00			
			Persentase Penegakan PERDA	%	30,00	60,00		67,00		71,00		75,00		75,00			
			Pembinaan Dinul Islam	Orang	9,00	20,00		22,00		25,00		30,00		30,00			
			Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	%	60,00	70,00		76,00		81,00		85,00		85,00			
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			314.354.000		317.497.540		323.847.491		333.562.916		333.562.916	BPBD		
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Indeks	0,36	0,38	2.665.462.000	0,40	2.692.116.620	0,41	2.745.958.952	0,42	2.828.337.721	0,42	2.828.337.721	BPBD	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			735.244.115		742.596.556		757.448.487		780.171.942		780.171.942			
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	%		424.639.460		428.885.855		437.463.572		450.587.479		450.587.479	Dinsos	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	30.710,00	30.610,00	310.604.655		313.710.702		319.984.916		329.584.463		329.584.463	Dinsos



Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.595.773.537		20.119.575.444		20.427.171.642		20.848.500.262		20.848.500.262	
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1.221.717.636		1.233.934.812		1.256.593.770		1.290.211.712		1.290.211.712	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			943.564.000		952.999.640		972.059.633		1.001.221.422		1.001.221.422	Disnakertrans
			Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	NA	13,33		13,33		13,33		13,33		13,33	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,99	4,08		3,92		3,78		3,64		3,64	
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	%	19,93	23,42		23,42		23,42		23,42		23,42	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	64,99	67,49		68,53		69,58		70,63		70,63	
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			51.185.625		51.697.481		52.731.431		54.313.374		54.313.374	Disnakertrans
2	07	04	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			30.857.395		31.165.969		31.477.629		31.792.405		31.792.405	Disbudparpora
2	07	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			169.116.680		170.807.847		172.515.925		174.241.085		174.241.085	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						104.116.680		105.157.847		106.209.425		107.271.520		107.271.520	Disbudparpora
						65.000.000		65.650.000		66.306.500		66.969.565		66.969.565	MAA
		Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi	gampong	35	47		14		50		50		50		
		Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim	%	30	35		34		40		50		50		
		Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah	%	25	35		35		40		70		70		
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			26.993.936		27.263.875		27.809.153		28.643.427		28.643.427	Disnakertrans
		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	79,37	63,49		63,49		47,62		47,62		47,62		
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	39,83	52,18		58,26		64,33		70,38		70,38		
		Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	7.953,00	7.973,00		7.993,00		8.013,00		8.033,00		8.033,00		
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN			58.765.000		59.352.650		60.539.703		62.355.894		62.355.894	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
					2023		2024		2025		2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PERLINDUNGAN ANAK															
2	08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	level	madya	madya	58.765.000	pratama	59.352.650	madya	60.539.703	Nindya	62.355.894	Nindya	62.355.894	DPMGP4
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					153.465.165		154.999.817		158.099.813		162.842.807		162.842.807	
2	09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	70,80	71,80	109.896.000,00	72,90	110.994.960,00	73,90	113.214.859,20	74,00	116.611.304,98	74,00	116.611.305	DKPP
2	09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	70,80	71,80	19.897.165,00	72,90	20.096.136,65	73,90	20.498.059,38	74,00	21.113.001,16	74,00	21.113.001	DKPP
2	09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	70,80	71,80	23.672.000,00	72,90	23.908.720,00	73,90	24.386.894,40	74,00	25.118.501,23	74,00	25.118.501	DKPP
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					220.356.455		222.560.020		227.011.220		233.821.557		233.821.557	
2	10 12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	%	61,34	67,63	173.056.280	71,01	174.786.843	74,56	178.282.580	78,29	183.631.057	78,29	183.631.057	Dinas Pertanahan
2	10 17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Penyelesaian kasus tanah negara	%	60	66	47.300.175	69	47.773.177	72	48.728.640	75	50.190.499	75	50.190.499	Dinas Pertanahan



Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	11					2.760.276.751		2.787.879.519		2.815.758.314		2.843.915.897		2.843.915.897			
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada/ tidak ada	Tidak Ada	Ada	101.140.500	Ada	102.151.905	Ada	103.173.424	Ada	104.205.158	Ada	104.205.158	DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.386.856.251		1.400.724.814		1.414.732.062		1.428.879.382		1.428.879.382	DLH
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,96	57,42		57,65		57,88		58,11		58,11		
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	26,37	34,07		34,85		35,54		36,15		36,15		
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.272.280.000		1.285.002.800		1.297.852.828		1.310.831.356		1.310.831.356	DLH
				Jumlah Sarana prasarana persampahan	Unit	1.026	1.200		1.500		1.700		2.000		2.000		
				Persentase cakupan area pelayanan	Persen	4,66	4,66		4,87		5,08		5,31		5,31		
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					125.120.900		126.372.109		128.899.551		132.766.538		132.766.538	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					125.120.900		126.372.109		128.899.551		132.766.538		132.766.538	Disdukcapil



Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	93,79	98,25		98,75		98,95		99,40		99,40		Disdukcapil		
		Rasio bayi berakte kelahiran	%	89,37	90,50		92,50		93,25		94,00		94,00		Disdukcapil		
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Disdukcapil		
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	93,79	98,25		98,75		98,95		99,40		99,40		Disdukcapil		
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				789.337.185		797.230.557		813.175.168		837.570.423		837.570.423			
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	70,00	100,00	395.693.260	100,00	399.650.193	100,00	407.643.196	100,00	419.872.492	100,00	419.872.492	DPMGP4
				Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	222,00	222,00	3.810.366.900	222,00	3.848.470.569	222,00	3.925.439.980	222,00	4.043.203.180	222,00	4.043.203.180	DPMGP4
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					393.643.925		397.580.364		405.531.972		417.697.931		417.697.931	DPMGP4
				Persentase LPM Berprestasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
					2023		2024		2025		2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		
		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.810.366.900		3.848.470.569		3.925.439.980		4.043.203.180		4.043.203.180		
2	14	04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	222,0	222,0	3.810.366.900	222,0	3.848.470.569	222,0	3.925.439.980	222,0	4.043.203.180	222,0	4.043.203.180	DPMGP4
			Persentase LSM aktif	%	100,0	100,0		100,00		100,00		100,00		100,00		DPMGP4
			Persentase Posyandu aktif	%	100,0	100,0		100,00		100,00		100,00		100,00		DPMGP4
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				1.900.402.000		1.919.406.020		1.957.794.140		2.016.527.965		2.016.527.965		
2	15	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Angkutan Darat)	Trayek	7,00	7,00	1.900.402.000		1.919.406.020		1.957.794.140		2.016.527.965		2.016.527.965	Dinas Perhubungan
			Pemasangan Rambu-rambu	%	12,00	13,00		14,00		15,00		16,00		16,00		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
					2023		2024		2025		2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio Index	83,95	83,95		83,95		83,95		83,95		83,95			
		Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	-	275,00		368,00		549,00		764,00		764,00			
		Rasio ijin trayek	Indeks	15,00	15,00		20,00		25,00		36,00		36,00			
		Persentase layanan angkutan darat	%	5,80	5,80		7,30		9,60		13,45		13,45			
		Jumlah Pelabuhan Laut, Darat/Udara/ Terminal Bis (Terminal Tipe B)	Unit		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
		Jumlah Pelabuhan Laut, Darat/Udara/ Terminal Bis (Terminal Tipe B)	Unit	3,00	4,00		4,00		4,00		5,00		5,00			
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%		4,50		6,50		7,50		9,50		9,50			
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					1.185.288.015		1.197.140.895		1.221.083.713		1.257.716.224		1.257.716.224	
2	16	02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					835.028.015		843.378.295		860.245.861		886.053.237		886.053.237	Diskominfotik
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0,51	0,61		0,66		0,07		0,08		0,75		Diskominfotik	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	90,00	92,00		94,00		95,00		97,00		97,00		Diskominfotik
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			350.260.000		353.762.600		360.837.852		371.662.988		371.662.988	Diskominfotik
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	jumlah	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,76	2,00		2,30		2,45		2,50		2,50		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			600.158.000		606.159.580		618.282.772		636.831.255		636.831.255	
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			500.000.000		505.000.000		515.100.000		530.553.000		530.553.000	Disperindagkop
		Persentase Koperasi Aktif	%	66,43	70,97		75,16		76,43		81,25		81,25		Disperindagkop
		Persentase Koperasi aktif	%	33,57	29,03		24,84		23,57		18,75		18,75		Disperindagkop
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			100.158.000		101.159.580		103.182.772		106.278.255		106.278.255	Disperindagkop
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			675.401.810									

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	PENANAMAN MODAL																
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio daya serab tenaga kerja	%	13,75	15,00	75.615.000,00	17,00	76.371.150,00	19,00	77.898.573,00	21,00	80.235.530,19	21,00	80.235.530	DPMPTSP
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	64,00	66,00	55.132.810	68,00	55.684.138	70,00	56.797.821	72,00	58.501.755	72,00	58.501.755	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)	186,00	194,00	388.654.000	197,00	392.540.540	201,00	400.391.351	205,00	412.403.091	205,00	412.403.091	Setdakab
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Laporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	114,00	120,00	156.000.000	140,00	157.560.000	150,00	160.711.200	170,00	165.532.536	170,00	165.532.536	DPMPTSP
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					6.290.423.565		6.353.327.801		6.416.861.079		6.481.029.689		6.481.029.689	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	36,00	29,00	875.269.797	29,00	884.022.495	29,00	892.862.720	29,00	901.791.347	29,00	901.791.347	Disbudparpora
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	10,00	20,00	5.415.153.768	21,00	5.469.305.306	15,00	5.523.998.359	22,00	5.579.238.342	22,00	5.579.238.342	Disbudparpora

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
					2023		2024		2025		2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	SAING KEOLAHRAGAAN															
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				101.255.105		102.267.656		104.313.009		107.442.399		107.442.399		
2	20	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	90,00	92,00	101.255.105	94,00	102.267.656	95,00	104.313.009	97,00	107.442.399	97,00	107.442.399	Diskominfotik
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				100.000.000		101.000.000		103.020.000		106.110.600		106.110.600		
2	21	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	50,00	52,00	100.000.000	54,00	101.000.000	55,00	103.020.000	56,00	106.110.600	56,00	106.110.600	Diskominfotik
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				135.000.000		136.350.000		137.713.500		139.090.635		139.090.635		
2	22	07 PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)				135.000.000		136.350.000		137.713.500		139.090.635		139.090.635	MAA	
			Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi	gampong	35	47		14		50		50		50		
			Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim	%	30	35		34		40		50		50		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah	%	25	35		35		40		70		70		
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				413.761.500		417.899.115		426.257.097		439.044.810		439.044.810	
2	23	02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				413.761.500		417.899.115		426.257.097		439.044.810		439.044.810	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	3557,00	3900,00		4000,00		4500,00		5000,00		5000,00		
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	koleksi	34.430	37.430		40.430		43.430		46.430		46.430		
		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1.000 Penduduk	1,00	1,2		1,5		1,8		2,00		2,00		
		Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	800,00	900,00		1000,00		1250,00		1500,00		1500,00		
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	5,00	8,00		10,00		15,00		20,00		20,00		
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	9.121	10.121		11.121		12.121		13.121		13.121		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	24					54.677.550		55.224.326		56.328.812		58.018.676		58.018.676	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			54.677.550		55.224.326		56.328.812		58.018.676		58.018.676	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	4,54	6,81		10,22		12,22		15,35		15,35	
			Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	1,00	2,00		3,00		4,00		5,00		5,00	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			36.700.535.061		33.822.728.378		31.297.152.489		28.436.536.206		28.436.536.206	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			35.072.594.246		32.178.508.155		29.620.047.861		26.709.118.440		26.709.118.440	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			700.000.000,00		707.000.000,00		721.140.000,00		742.774.200,00		742.774.200	Distannak
			Produksi sektor pertanian palawija	Ton	3.828,40	3.836,06		3.839,90		3.843,74		3.847,58		3.847,58	
			Cakupan bina kelompok petani	Ton	102.936,80	103.555,35		103.866,01		104.177,61		104.490,14		104.490,14	
			Cakupan bina kelompok petani	ton/ha	6,50	6,52		6,60		6,70		6,70		6,70	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			25.245.032.546		22.252.670.838		19.582.741.658		16.546.529.728		16.546.529.728	Distannak

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Produksi sektor pertanian palawija	Ton	3.828,40	3.836,06		3.839,90		3.843,74		3.847,58		3.847,58				
		Produksi pertanian padi	Ton	102.936,80	103.555,35		103.866,01		104.177,61		104.490,14		104.490,14				
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	6,50	6,52		6,60		6,70		6,70		6,70				
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	22,43	24,67	8.618.600.000	27,14	8.704.786.000	29,85	8.791.833.860	32,82	8.879.752.199	32,82	8.879.752.199	Distannak
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				98.756.200		99.743.762		101.738.637		104.790.796		104.790.796	Distannak	
				Populasi ternak besar (sapi dan kerbau)	ekor	22.343,00	22.387,69		22.432,46		22.477,33		22.522,28		22.522,28		
				Populasi ternak kecil (kambing dan domba)	ekor	17.607,00	17.642,21		17.677,50		17.712,85		17.748,28		17.748,28		
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				152.500.000,00		154.025.000,00		157.105.500,00		161.818.665,00		161.818.665	Distannak	
				Produksi sektor pertanian palawija	Ton	3.828,40	3.836,06		3.839,90		3.843,74		3.847,58		3.847,58		
				Produksi pertanian padi	Ton	102.936,80	103.555,35		103.866,01		104.177,61		104.490,14		104.490,14		



Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ha	6,50	6,52		6,60		6,70		6,70		6,70				
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			257.705.500		260.282.555		265.488.206		273.452.852		273.452.852	Distannak		
		Produksi sektor pertanian palawija	Ton	3.828,40	3.836,06		3.839,90		3.843,74		3.847,58		3.847,58				
		Cakupan bina kelompok petani	Ton	102.936,80	103.555,35		103.866,01		104.177,61		104.490,14		104.490,14				
		Cakupan bina kelompok petani	%	62,02	53,94		52,30		56,32		60,62		60,62				
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			500.000.000		505.000.000		515.100.000		530.553.000		530.553.000			
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah UTTP yang ditera/teraulang	Unit	38,00	53,00	500.000.000	74,00	505.000.000	104,00	515.100.000	146,00	530.553.000	146,00	530.553.000	Disperindagkop
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			883.935.215		892.774.567		910.630.058		937.948.960		937.948.960			
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah industri Pengolahan	Unit	4.145,00	4.195,00	883.935.215	4.245,00	892.774.567	4.295,00	910.630.058	4.345,00	937.948.960	4.345,00	937.948.960	Disperindagkop
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			244.005.600		246.445.656		251.374.569		258.915.806		258.915.806			
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigrasi	UPT	4,00	4,00	51.140.080,00	4,00	51.651.480,80	4,00	52.684.510,42	4,00	54.265.045,73	4,00	54.265.046	Disnakertrans
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN	Jumlah transmigran lokal	KK	410,00	410,00	62.190.520,00	410,00	62.812.425,20	410,00	64.068.673,70	410,00	65.990.733,92	410,00	65.990.734	Disnakertrans

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
					2023		2024		2025		2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		KAWASAN TRANSMIGRASI														
3	32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi	4 Kawasan	-	1,00	130.675.000,00	1,00	131.981.750,00	1,00	134.621.385,00	1,00	138.660.026,55	1,00	138.660.027	Disnakertrans
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					36.761.434.158		37.029.048.500		37.569.629.470		38.396.718.354		38.396.718.354	
4	01	SEKRETARIAT DAERAH					28.981.358.526		29.171.172.111		29.554.595.553		30.141.233.420		30.141.233.420	
4	01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	Baik	Sangat Baik	5.995.782.316	Sangat Baik	6.055.740.139	Sangat Baik	6.176.854.942	Sangat Baik	6.362.160.590	Sangat Baik	6.362.160.590	SETDAKAB
4	01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	7,00	8,00	5.995.782.316	9,00	6.055.740.139	10,00	6.176.854.942	10,00	6.362.160.590	10,00	6.362.160.590	SETDAKAB
4	01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					15.995.782.316		16.055.740.139		16.176.854.942		16.362.160.590		16.362.160.590	SETDAKAB
4	01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Penurunan angka inflasi	Persen	1,13	1,01	994.011.578	0,90	1.003.951.694	0,70	1.024.030.728	0,50	1.054.751.649	0,50	1.054.751.649	SETDAKAB
4	02	SEKRETARIAT DPRD					7.780.075.632		7.857.876.388		8.015.033.916		8.255.484.934		8.255.484.934	
4	02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					7.780.075.632		7.857.876.388		8.015.033.916		8.255.484.934		8.255.484.934	Setwan DPRK
			Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				242.663.567.959		245.090.203.638		249.992.007.712		257.491.767.942		257.491.767.942	
5	01	PERENCANAAN				242.663.567.959		245.090.203.638		249.992.007.712		257.491.767.942		257.491.767.942	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.840.334.386		1.858.737.730		1.895.912.484		1.952.789.859		1.952.789.859	BAPPEDA
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	tidak		tidak		Ada		Ada		Ada		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPKP yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada/ tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK	Ada/ tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
		Penjabaran Konsistensi Program RKPK kedalam APBK	Ada/ tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Ada/ tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK	Ada/ tidak	Ada	Ada	2.365.683.246	Ada	2.389.340.078	Ada	2.437.126.880	Ada	2.510.240.686	Ada	2.510.240.686	BAPPEDA
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					233.538.525.288		235.873.910.541		240.591.388.752		247.809.130.414		247.809.130.414	BPKD
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP			WTP		WTP		WTP		WTP		
			Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP			WTP		WTP		WTP		WTP		
			Persentase SILPA	%	1,46	0,56			0,57		0,58		0,6		0,6		
			Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,465	0,51			0,52		0,53		0,54		0,54		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	9,99	1,02		1,04		1,06		1,08		1,08				
		Persentase belanja pendidikan (20%)	%	21,22	20,4		20,81		21,22		21,65		21,65				
		Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,15	10,2		10,4		10,61		10,82		10,82				
		Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	0,83	0,67		0,69		0,7		0,71		0,71				
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,14	10,2		10,4		10,61		10,82		10,82				
		Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu				
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	774.481.585	WTP	782.226.401	WTP	797.870.929	WTP	821.807.057	WTP	821.807.057	BPKD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	4,44	7,80	1.537.246.445	7,96	1.552.618.909	8,12	1.583.671.288	8,28	1.631.181.426	8,28	1.631.181.426	BPKD
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					864.128.740		872.770.027		890.225.428		916.932.191		916.932.191	BKPSDM
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	4,67	4,67		4,67		4,67		4,67		4,67		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	34	36,00		36,00		37,00		37,00		37,00		
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	jabatan	2611	2.612,00		2.612,00		2.612,00		2.615,00		2.615,00		
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	jabatan	2001	2.182,00		2.232,00		2.232,00		2.232,00		2.232,00		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1.540.000.000		1.555.400.000		1.586.508.000		1.634.103.240		1.634.103.240	BKPSDM
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jam	120	120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,67	4,67		4,67		4,67		4,67		4,67		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			203.168.269		205.199.952		209.303.951		215.583.069		215.583.069	BAPPEDA
		Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Sudah/ Belum	sudah	sudah		sudah		sudah		sudah		sudah		
		Penerapan SIDA:	Sudah/Belum	sudah	sudah		sudah		sudah		sudah		sudah		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	2,04081633	10		30		50		80		80				
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	2	10		30		50		80		80				
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	64	65		70		75		80		80				
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				2.042.654.186		2.063.080.728		2.104.342.342		2.167.472.613		2.167.472.613			
6	01	INSPEKTORAT DAERAH				2.042.654.186		2.063.080.728		2.104.342.342		2.167.472.613		2.167.472.613			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	%	89	90	1.979.528.786	92	1.999.324.074	94	2.039.310.555	96	2.100.489.872	96	2.100.489.872	Inspektorat
				Persentase pelanggaran pegawai	%	0,5	0,4		0,39		0,38		0,37		0,37		
				Jumlah temuan BPK	Temuan	20	18		16		15		14		14		
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3	63.125.400	3	63.756.654	3	65.031.787	3	66.982.741	3	66.982.741	Inspektorat
7		UNSUR KEWILAYAHAN				342.597.740		346.023.717		352.944.192		363.532.518		363.532.518			
7	01	KECAMATAN				342.597.740		346.023.717		352.944.192		363.532.518		363.532.518			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Lakip	Nilai	36,63 C	60 B	13.453.045	65 B	13.587.575	70 B	13.859.327	81 A	14.275.107	81 A	14.275.107	10 Kecamatan
						1.700.000		1.717.000		1.751.340		1.803.880		1.803.880		Kec. Kuala	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						1.500.000		1.515.000		1.545.300		1.591.659		1.591.659	Kec. Kuala Pesisir		
						1.800.000		1.818.000		1.854.360		1.909.991		1.909.991	Kec. Darul Makmur		
						1.300.000		1.313.000		1.339.260		1.379.438		1.379.438	Kec. Tripa Makmur		
						1.253.045		1.265.575		1.290.887		1.329.614		1.329.614	Kec. Tadu Raya		
						1.400.000		1.414.000		1.442.280		1.485.548		1.485.548	Kec. Suka Makmue		
						1.600.000		1.616.000		1.648.320		1.697.770		1.697.770	Kec. Seunagan		
						1.300.000		1.313.000		1.339.260		1.379.438		1.379.438	Kec. Seunagan Timur		
						1.600.000		1.616.000		1.648.320		1.697.770		1.697.770	Kec. Beutong		
						1.400.000		1.414.000		1.442.280		1.485.548		1.485.548	Kec. Beutong Ateuh Banggalang		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	Baik	Sangat Baik	56.681.570	Sangat Baik	57.248.386	Sangat Baik	58.393.353	Sangat Baik	60.145.154	Sangat Baik	60.145.154	10 Kecamatan
							6.031.570		6.091.886		6.213.723		6.400.135		6.400.135	Kec. Kuala	
							5.700.000		5.757.000		5.872.140		6.048.304		6.048.304	Kec. Kuala Pesisir	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						5.800.000		5.858.000		5.975.160		6.154.415		6.154.415	Kec. Darul Makmur		
						5.600.000		5.656.000		5.769.120		5.942.194		5.942.194	Kec. Tripa Makmur		
						5.800.000		5.858.000		5.975.160		6.154.415		6.154.415	Kec. Tadu Raya		
						5.650.000		5.706.500		5.820.630		5.995.249		5.995.249	Kec. Suka Makmue		
						5.700.000		5.757.000		5.872.140		6.048.304		6.048.304	Kec. Seunagan		
						5.500.000		5.555.000		5.666.100		5.836.083		5.836.083	Kec. Seunagan Timur		
						5.400.000		5.454.000		5.563.080		5.729.972		5.729.972	Kec. Beutong		
						5.500.000		5.555.000		5.666.100		5.836.083		5.836.083	Kec. Beutong Ateuh Banggalang		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	222,00	222,00	89.357.945	222,00	90.251.524	222,00	92.056.555	222,00	94.818.252	222,00	94.818.252	10 Kecamatan
								8.900.000		8.989.000		9.168.780		9.443.843		9.443.843	Kec. Kuala
								8.350.000		8.433.500		8.602.170		8.860.235		8.860.235	Kec. Kuala Pesisir

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						9.500.000		9.595.000		9.786.900		10.080.507		10.080.507	Kec. Darul Makmur		
						8.750.000		8.837.500		9.014.250		9.284.678		9.284.678	Kec. Tripa Makmur		
						8.657.945		8.744.524		8.919.415		9.186.997		9.186.997	Kec. Tadu Raya		
						9.150.000		9.241.500		9.426.330		9.709.120		9.709.120	Kec. Suka Makmue		
						9.250.000		9.342.500		9.529.350		9.815.231		9.815.231	Kec. Seunagan		
						9.200.000		9.292.000		9.477.840		9.762.175		9.762.175	Kec. Seunagan Timur		
						8.700.000		8.787.000		8.962.740		9.231.622		9.231.622	Kec. Beutong		
						8.900.000		8.989.000		9.168.780		9.443.843		9.443.843	Kec. Beutong Ateuh Banggalang		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Lakip	Nilai	36,63 C	60 B	24.123.565	65 B	24.364.801	70 B	24.852.097	81 A	25.597.660	81 A	25.597.660	10 Kecamatan
						2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	Kec. Kuala		
						2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	Kec. Kuala Pesisir		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						3.000.000		3.030.000		3.090.600		3.183.318		3.183.318	Kec. Darul Makmur		
						2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	Kec. Tripa Makmur		
						2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	Kec. Tadu Raya		
						2.300.000		2.323.000		2.369.460		2.440.544		2.440.544	Kec. Suka Makmue		
						2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	Kec. Seunagan		
						3.023.565		3.053.801		3.114.877		3.208.323		3.208.323	Kec. Seunagan Timur		
						2.500.000		2.525.000		2.575.500		2.652.765		2.652.765	Kec. Beutong		
						2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	Kec. Beutong Ateuh Banggalang		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	Baik	Sangat Baik	26.723.565	Sangat Baik	26.990.801	Sangat Baik	27.530.617	Sangat Baik	28.356.535	Sangat Baik	28.356.535	10 Kecamatan
						2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	Kec. Kuala		
						2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	Kec. Kuala Pesisir		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						3.000.000		3.030.000		3.090.600		3.183.318		3.183.318	Kec. Darul Makmur		
						2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	Kec. Tripa Makmur		
						2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	Kec. Tadu Raya		
						2.300.000		2.323.000		2.369.460		2.440.544		2.440.544	Kec. Suka Makmue		
						2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	Kec. Seunagan		
						3.023.565		3.053.801		3.114.877		3.208.323		3.208.323	Kec. Seunagan Timur		
						2.500.000		2.525.000		2.575.500		2.652.765		2.652.765	Kec. Beutong		
						2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	Kec. Beutong Ateuh Banggalang		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai Lakip	Nilai	36,63 C	60 B	66.129.025	65 B	66.790.315	70 B	68.126.122	81 A	70.169.905	81 A	70.169.905	10 Kecamatan
						7.130.600		7.201.906		7.345.944		7.566.322		7.566.322	Kec. Kuala		
						6.208.150		6.270.232		6.395.636		6.587.505		6.587.505	Kec. Kuala Pesisir		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						7.860.320		7.938.923		8.097.702		8.340.633		8.340.633	Kec. Darul Makmur		
						6.840.350		6.908.754		7.046.929		7.258.336		7.258.336	Kec. Tripa Makmur		
						6.121.350		6.182.564		6.306.215		6.495.401		6.495.401	Kec. Tadu Raya		
						6.320.750		6.383.958		6.511.637		6.706.986		6.706.986	Kec. Suka Makmue		
						5.784.155		5.841.997		5.958.836		6.137.602		6.137.602	Kec. Seunagan		
						5.600.000		5.656.000		5.769.120		5.942.194		5.942.194	Kec. Seunagan Timur		
						7.650.450		7.726.955		7.881.494		8.117.938		8.117.938	Kec. Beutong		
						6.612.900		6.679.029		6.812.610		7.016.988		7.016.988	Kec. Beutong Ateuh Banggalang		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	Baik	Sangat Baik	66.129.025	Sangat Baik	66.790.315	Sangat Baik	68.126.122	Sangat Baik	70.169.905	Sangat Baik	70.169.905	10 Kecamatan
								7.130.600		7.201.906		7.345.944		7.566.322		7.566.322	Kec. Kuala
								6.208.150		6.270.232		6.395.636		6.587.505		6.587.505	Kec. Kuala Pesisir

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						7.860.320		7.938.923		8.097.702		8.340.633		8.340.633	Kec. Darul Makmur		
						6.840.350		6.908.754		7.046.929		7.258.336		7.258.336	Kec. Tripa Makmur		
						6.121.350		6.182.564		6.306.215		6.495.401		6.495.401	Kec. Tadu Raya		
						6.320.750		6.383.958		6.511.637		6.706.986		6.706.986	Kec. Suka Makmue		
						5.784.155		5.841.997		5.958.836		6.137.602		6.137.602	Kec. Seunagan		
						5.600.000		5.656.000		5.769.120		5.942.194		5.942.194	Kec. Seunagan Timur		
						7.650.450		7.726.955		7.881.494		8.117.938		8.117.938	Kec. Beutong		
						6.612.900		6.679.029		6.812.610		7.016.988		7.016.988	Kec. Beutong Ateuh Banggalang		
8		UNSUR KEWILAYAHAN				1.019.682.976		1.029.879.806		1.050.477.402		1.081.991.724		1.081.991.724			
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.019.682.976		1.029.879.806		1.050.477.402		1.081.991.724		1.081.991.724			
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	Tidak ada	Ada	1.009.475.976	Ada	1.019.570.736	Ada	1.039.962.150	Ada	1.071.161.015	Ada	1.071.161.015	Kesbangpol

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
					2023		2024		2025		2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
8	01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Ada/tidak	Tidak ada	Ada	10.207.000	Ada	10.309.070	Ada	10.515.251	Ada	10.830.709	Ada	10.830.709	Kesbangpol
9		UNSUR KEWILAYAHAN				68.489.460.072		69.174.354.673		70.557.841.766		72.674.577.019		72.674.577.019		
9	01	KEKHUSUSAN ACEH				68.489.460.072		69.174.354.673		70.557.841.766		72.674.577.019		72.674.577.019		
9	01 02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH				34.060.157.701		34.400.759.278		35.088.774.464		36.141.437.697		36.141.437.697	Dinas Syariat Islam	
		Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%)	Unit	463,00	463,00		463,00		463,00		463,00		463,00		463,00	
		Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat	Orang	220,00	222,00		222,00		222,00		222,00		222,00		222,00	
		Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat	Orang	38,00	50,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00	
		Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid	55,00	60,00		65,00		70,00		75,00		75,00		75,00	
		Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	95,00	100,00		105,00		110,00		115,00		115,00		115,00	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz	Orang	80,00	90,00		100,00		110,00		120,00		120,00				
		Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam	%	90,00	92,00		94,00		96,00		98,00		98,00				
		Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam	%	87,00	88,00		89,00		90,00		91,00		91,00				
		Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
		Persentase dayang Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		89,00				
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid	55,00	60,00	243.290.620	65,00	245.723.526	70,00	250.637.997	75,00	258.157.137	75,00	258.157.137	10 Kecamatan
								24.150.000		24.391.500		24.879.330		25.625.710		25.625.710	Kec. Kuala
								24.221.500		24.463.715		24.952.989		25.701.579		25.701.579	Kec. Kuala Pesisir
								24.650.000		24.896.500		25.394.430		26.156.263		26.156.263	Kec. Darul Makmur
								24.500.000		24.745.000		25.239.900		25.997.097		25.997.097	Kec. Tripa Makmur

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD		
					2023		2024		2025		2026		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						24.443.000		24.687.430		25.181.179		25.936.614		25.936.614	Kec. Tadu Raya		
						24.626.120		24.872.381		25.369.829		26.130.924		26.130.924	Kec. Suka Makmue		
						24.350.000		24.593.500		25.085.370		25.837.931		25.837.931	Kec. Seunagan		
						24.000.000		24.240.000		24.724.800		25.466.544		25.466.544	Kec. Seunagan Timur		
						24.350.000		24.593.500		25.085.370		25.837.931		25.837.931	Kec. Beutong		
						24.000.000		24.240.000		24.724.800		25.466.544		25.466.544	Kec. Beutong Ateuh Banggalang		
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Ada	Ada	34.060.157.701	Ada	34.400.759.278	Ada	35.088.774.464	Ada	36.141.437.697	Ada	36.141.437.697,48	Dinas Syariat Islam
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	95,00	100,00	125.854.050	105,00	127.112.591	110,00	129.654.842	115,00	133.544.488	115,00	133.544.488	MPU
9	01	04	PROGRAM BAITUL MAL					7.222.574.235		7.294.799.977		7.440.695.977		7.663.916.856		7.663.916.856	Baitul Mal
				Jumlah ZIS yang terhimpun	Rp. Milyar	792,00	832,00		874,00		918,00		964,00		964,00		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Rp (000)	792,00		832,00		874,00		918,00		918,00		
		Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Rp (000)	792,00		832,00		874,00		918,00		918,00		

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merujuk pada hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2023-2026 sebelumnya.

Indikator makro merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Nagan Raya terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, PDRB per Kapita dan Indeks Gini.

Penetapan IKU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya IKU juga digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Untuk periode tahun 2023-2026 merupakan tahun perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh PJ. Kepala Daerah yang ditunjuk.

Indikator kinerja yang baik Makro, IKU maupun IKD sebaiknya memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur, dapat dikuantifikasikan dan harus dapat dihitung/diukur. Selanjutnya, penetapan Indikator Makro, IKU dan IKD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Makro Kabupaten Nagan Raya, 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,54	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	Bappeda	BPS
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,31	70,20	71,20	71,53	72,42	72,42	Bappeda	BPS
3	Angka Kemiskinan	%	18,23	18,00	17,80	17,50	17,00	17,00	Bappeda	BPS
4	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	45,12	45,44	45,68	45,75	46,00	46,00	Bappeda	BPS
5	Indeks Gini	Indeks	0,268	0,267	0,266	0,265	0,264	0,264	Bappeda	BPS

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya, 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD	BPKD
2	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	3	3	3	Inspektorat	Inspektorat

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	baik	baik	baik	baik	sangat baik	sangat baik	Setdakab (Bag. Pemerintahan)	Setdakab (Bag. Pemerintahan)
4	Nilai LAKIP	Nilai	36,63 C	60 B	65 B	70 BB	81 A	WTP	Setdakab (Bag. Organisasi)	Setdakab (Bag. Organisasi)
5	Jumlah ZIS yang terhimpun	Rp. Milyar	792	832	874	918	964	3	Baitul Mal	Baitul Mal
6	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam	%	80	81	85	85	85	85	Satpol PP dan WH	Satpol PP dan WH
7	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	227	100	100	100	100	627	PERKIM	PERKIM
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	3,33	3,02	3,00	2,98	2,96	2,96	Dinsos	BPS
9	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,90	Dinsos	BPS
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,99	4,08	3,92	3,78	3,64	3,64	Disnakertrans	Disnakertrans
11	Persentase akses sanitasi	%	73,48	73,98	74,48	74,98	75,48	75,48	PERKIM	PERKIM
12	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	90	92	94	95	97	97	DISKOMINFOTIK	DISKOMINFOTIK
13	Prevalansi Stunting	%	17,3	16,5	15,4	14,2	13	13	Dinkes	Dinkes
14	Kabupaten Layak Anak	Level	-	madya	pratama	madya	Nindya	Nindya	DPMGP4	DPMGP4
15	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	4,44	7,80	7,96	8,12	8,28	8,28	BPKD	BPKD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
16	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Rp (Triliun)	2384	2480	2530	2580	2632	2632	DPMPTSP	DPMPTSP

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nagan Raya, 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	PDRB per kapita ADHB	Juta Rupiah	45,12	45,44	45,68	45,75	46,00	46,00	Bappeda	BPS
2	Indek Gini Ratio	Indeks	0,268	0,267	0,266	0,265	0,264	0,264	Bappeda	BPS
3	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa (Ribuh)	30,71	29,63	29,42	29,21	28,28	28,28	Bappeda	BPS
4	Angka Melek Huruf	%	98,00	98,12	98,28	98,50	98,62	98,62	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
5	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,96	9,00	9,18	9,24	9,32	9,32	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,14	14,26	14,38	14,45	14,58	14,58	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
7	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	97.758	500	400	300	200	200	Dinas Sosial	Dinas Sosial
8	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB	%	44,94	45,11	45,34	45,55	45,70	45,70	Distanak/ DKPP/ Disbun	BPS
9	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB	%	4,39	4,49	4,59	4,61	4,65	4,65	Disperindagkop	BPS
10	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB ADHB	%	9,49	10,20	10,50	10,80	11,20	11,20	Disperindagkop	BPS
8	Produksi sektor pertanian palawija	Ton	3.828	3.836	3.840	3.844	3.848	3.848	DISTANNAK	DISTANNAK
9	Produksi pertanian padi	Ton	102.937	103.555	103.866	104.178	104.490	104.490	DISTANNAK	DISTANNAK
10	Produksi perkebunan sawit rakyat	Ton	547.888	560.559	569.934	579.310	588.685	588.685	DISBUN	DISBUN
11	Produksi perkebunan	Ton	5.325,79	5.458,93	5.595,41	5.735,29	5.878,68	6.025,64	DISBUN	DISBUN

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	%	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	58,00	Bappeda	BPS
2	Pengeluaran Per Kapita	Rp (Ribu)	8,22	8,30	8343,00	8402,00	8464,00	8464,00	Bappeda	BPS
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib Dasar										
1	Pendidikan									
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	42,17	42,66	43,17	43,61	43,88	43,88	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.2.	Angka partisipasi kasar									
	APK SD/MI/Paket A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	APK SMP/MTs/Paket B	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
	APK SMA/SMK/	%	96,26	96,44	96,62	96,78	96,93	96,93	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan									
	Tamat SD Sederajat	%	98,83	98,92	99,02	99,32	99,66	99,66	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Tamat SLTP sederajat	%	95,25	95,66	95,85	95,96	96,03	96,03	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Diploma I/II/III	%	5,25	5,35	5,49	5,72	5,89	5,89	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Diploma IV/S1	%	60,00	60,80	60,96	61,12	61,33	61,33	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	S2/S3	%	3,00	3,14	3,28	3,58	3,75	3,75	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.4.	Angka Partisipasi Murni									
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	89,74	89,96	90,07	90,43	90,68	90,68	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	70,04	70,43	70,74	70,74	70,91	70,91	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1.5.	Angka partisipasi sekolah									
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	97,00	97,19	97,55	97,71	97,88	97,88	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	85,00	85,44	85,76	85,89	85,97	85,97	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.6	Angka Melanjutkan (AM):									
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,73	98,96	99,11	99,38	99,59	99,59	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	92,46	92,82	92,82	92,97	93,18	93,18	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.7	Fasilitas Pendidikan:									
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	98,12	98,26	98,26	98,56	98,71	98,71	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	98,72	98,90	98,98	99,08	99,36	99,36	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	76,32	76,51	76,66	76,81	76,98	76,98	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1.9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio Index	61,55	61,88	61,97	61,99	62,08	62,08	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.10	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	74,50	74,87	74,98	75,12	75,52	75,52	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.11	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio Index	61,27	61,65	61,89	61,93	61,98	61,98	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio Index	72,64	72,97	73,18	73,71	74,03	74,03	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.13	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Rasio Index	56,32	56,63	56,79	56,87	56,92	56,92	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.14	Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%	98,72	98,99	99,17	99,54	99,84	99,84	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.15	Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	83,50	83,72	83,91	84,03	84,46	84,46	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan									
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	2,75	6,4	6,1	5,1	4,3	4,3	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 Kelahiran	18,87	15,0	14,1	13,8	12,2	12,2	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	19,6	17,0	15,3	13,3	11,2	11,2	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	19,01	17,9	16,6	15,5	13,7	13,7	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100000 Kelahiran	438,91	330,4	307,3	280,4	250,2	250,2	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	/1000 Balita	26,00	27,00	27,00	28,00	28,00	28,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk									
	Puskesmas	/1000 Penduduk	0,08288	0,09240	0,09131	0,09024	0,08921	0,08921	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Puskesmas	Unit	14	16	16	16	16	16	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Poliklinik	/1000 Penduduk	0,03552	0,05198	0,05136	0,05640	0,06691	0,06691	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Poliklinik	Unit	6	9	9	10	12	12	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Pustu	/1000 Penduduk	0,29007	0,28299	0,27962	0,27637	0,27321	0,27321	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
	Pustu	Unit	49	49	49	49	49	49	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,00592	0,00578	0,00571	0,00564	0,00558	0,00558	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk								
	Dokter Umum	/1000 Penduduk	0,35518	0,35807	0,36522	0,37225	0,37915	0,37915	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Dokter Umum	Orang	60	62	64	66	68	68	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Dokter Spesialis	/1000 Penduduk	0,11247	0,12128	0,13125	0,14100	0,15054	0,15054	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Dokter Spesialis	Orang	19	21	23	25	27	27	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Dokter Gigi	/1000 Penduduk	0,07104	0,07508	0,08560	0,09588	0,10594	0,10594	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Dokter Gigi	Orang	12	13	15	17	19	19	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
	Dokter Gigi Spesialis	/1000 Penduduk	0	0,00578	0,01141	0,01692	0,02230	0,02230	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Dokter Gigi Spesialis	Orang	0	1	2	3	4	4	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	43	66	73	76	80	80	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	91	92	93	94	95	95	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	23,42	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.15.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	51,61	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.16.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	6,8	90	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.17.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	40,13	85%	90%	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
2.18.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	104	231	211	190	180	180	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.19.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	1,74	31	29	27	25	25	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.20.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.21.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	96,39	90%	90%	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.22.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.23.	Angka kejadian Malaria	/100.000 penduduk	<1	<1	<1	<1	<1	<1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.24.	Cakupan kunjungan bayi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.26.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,00	94	95	97,00	98,00	98,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.27.	Cakupan pelayanan nifas	%	90,00	91	92	93	94	94	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
2.28.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	20,45	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.29.	Cakupan pelayanan anak balita	%	68,93	70,00	72,00	73,00	75,00	75,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.30.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	13,00	15,00	17,00	21,00	25,00	25,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.31.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.32.	Persentase balita gizi buruk	%	0,09	0,80	0,70	0,60	0,50	0,50	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1.	Pekerjaan Umum:								PU PR	PU PR
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	40,95	42,25	43,55	44,85	46,15	46,15	PU PR	PU PR
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio Index	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	PU PR	PU PR



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
3.1.3.	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	26,63	28,24	29,86	31,48	33,09	33,09	PU PR	PU PR
3.1.4	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	22,43	24,67	27,14	29,85	32,83	32,83	PU PR	PU PR
3.1.5	Rasio jaringan irigasi	Rasio Index	45,70	45,70	45,66	45,69	45,71	45,71	PU PR	PU PR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
4.1	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	1029	150	150	150	150	150	PERKIM/Baitul Mal	PERKIM/Baitul Mal
4.2	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	227	100	100	100	100	100	PERKIM	PERKIM
4.3	Persentase penduduk berakses air minum	%	4,27	6,40	7,42	8,41	9,37	9,37	PERKIM	PERKIM
4.4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	5,41	9,70	11,79	13,81	15,78	15,78	PERKIM	PERKIM
4,5	Persentase Rumah Tangga bersanitasi	%	73,48	73,98	74,48	74,98	75,48	75,48	PERKIM	PERKIM
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
5.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)	%	65	71	75	79	82	82	SATPOL PP dan WH	SATPOL PP dan WH
5.2	Persentase Penegakan PERDA	%	30	60	67	71	75	75	SATPOL PP dan WH	SATPOL PP dan WH
6	Sosial									
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	17.85	200	300	100	100	100	DINSOS	DINSOS
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani (BPNT)	%	11.071	200	200	100	100	100	DINSOS	DINSOS
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (BNPT)	%	6.054	200	200	100	100	100	DINSOS	DINSOS
6.4.	Adanya regulasi santunan kematian	Ada/ Tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Bagian Keisra	Bagian Keisra
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
1	Tenaga Kerja									

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	79,37	63,49	63,49	47,62	47,62	47,62	Disnakertrans	Disnakertrans
1.2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	39,83	52,18	58,26	64,33	70,38	70,38	Disnakertrans	Disnakertrans
1.3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	7,953	7,973	7,993	8,013	8,033	8,033	Disnakertrans	Disnakertrans
1.4	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	NA	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	Disnakertrans	Disnakertrans
1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,99	4,08	3,92	3,78	3,64	3,64	Disnakertrans	Disnakertrans
1.6	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	19,93	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	Disnakertrans	Disnakertrans
1.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	64,99	67,49	68,53	69,58	70,63	70,63	Disnakertrans	Disnakertrans
1.8	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	0,050	0,056	0,058	0,062	0,067	0,067	Disnakertrans	Disnakertrans
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.2.	Kabupaten Layak Anak	Level	-	madya	pratama	madya	Nindya	Nindya	DPMGP4	DPMGP4

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
2.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16,00	17,00	17,00	20,00	20,00	20,00	DPMGP4	DPMGP4
2,4	Rasio KDRT	%	0'07	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	DPMGP4	DPMGP4
3	Pangan									
3.1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	N/A	71,8	72,9	73,9	74,0	74,0	DKPP	DKPP
4	Penanggulangan Bencana dan Kerusakan Lingkungan dan Penanganan									
4.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH	DLH
4.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH	DLH
4.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada/ tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH	DLH
4.4	Indeks Kapasitas ketahanan Bencana	Indeks	0,36	0,38	0,40	0,41	0,42	0,42	BPBD	BPBD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
4.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,96	57,42	57,65	57,88	58,11	58,11	DLH	DLH
4.6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	26,37	34,07	34,85	35,54	36,15	36,15	DLH	DLH
4.7	Jumlah Sarana prasarana persampahan	Unit	1.026	1.200	1.500	1.700	2.000	2.000	DLH	DLH
4.8	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	4,66	4,66	4,87	5,08	5,31	5,31	DLH	DLH
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	93,79	98,25	98,75	98,95	99,4	99,4	Disdukcapil	Disdukcapil
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	89,37	90,5	92,50	93,25	94	94	Disdukcapil	Disdukcapil
5.3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Disdukcapil	Disdukcapil
5.4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	93,79	98,25	98,75	98,95	99,4	99,4	Disdukcapil	Disdukcapil
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
6.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	70	100	100	100	100	100	DPMGP4	DPMGP4
6.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	222	222	222	222	222	222	DPMGP4	DPMGP4
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	222	222	222	222	222	222	DPMGP4	DPMGP4
6.4	Persentase LSM aktif	%	100	100	100	100	100	100	DPMGP4	DPMGP4
6.5	Persentase LPM Berprestasi	%	100	100	100	100	100	100	DPMGP4	DPMGP4
6.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	DPMGP4	DPMGP4
6.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	DPMGP4	DPMGP4
6.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	DPMGP4	DPMGP4

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
6.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	DPMGP4	DPMGP4
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,77	2,60	2,50	2,40	2,40	2,40	DPMGP4	DPMGP4
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,1	2	2	2	2	2	DPMGP4	DPMGP4
7.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	3	2	2	2	2	2	DPMGP4	DPMGP4
7.4	Rasio Akseptor KB	%	69	70	71	72	73	73	DPMGP4	DPMGP4
7.5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	%	69	70,0	71,0	72,0	73,0	73,0	DPMGP4	DPMGP4
7.6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	/1.000 perempuan	0,87	0,7	0,65	0,6	0,5	0,5	DPMGP4	DPMGP4

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
7.7	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	DPMGP4	DPMGP4
8	Perhubungan									
8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum									
	Angkutan Darat	Trayek	-	4	6	8	10	10	Dishub	Dishub
	Angkutan Udara	Frek	36	576	720	1152	1440	1440	Dishub	Dishub
8.1	Rasio ijin trayek	Indeks	-	15	20	25	36	36	Dishub	Dishub
8.2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	-	275	368	549	764	764	Dishub	Dishub
8.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis									
	Jumlah Bandar Udara	Unit	1	1	1	1	1	1	Dishub	Dishub
	Jumlah Terminal Tipe B	Unit	1	1	1	1	1	1	Dishub	Dishub

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
	Pelabuhan Laut	Unit	1	2	2	2	3	3	Dishub	Dishub
8.4	Persentase layanan angkutan darat	%	-	5,8	7,3	9,60	13,45	13,45	Dishub	Dishub
8.5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	-	4,5	6,5	7,5	9,5	9,5	Dishub	Dishub
8.6	Pemasangan Rambu-rambu	%	12	24	38	42	68	68	Dishub	Dishub
8.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio Index	83,95	85,63	89,10	90,25	94,41	94,41	Dishub	Dishub
8.8	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum									
	Angkutan Udara	Orang	1.716	43.200	54.000	86.400	108.000	108.000	Dishub	Dishub
8.9	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun									
	Bandara	Kg	8.506	212.705	233.976	257.373	283.110	283.110	Dishub	Dishub
9	Komunikasi dan Informatika									



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
9.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0,51	0,61	0,66	0,70	0,75	0,75	DISKOMINFOTIK	DISKOMINFOTIK
9.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	85	86	87	88	89	89	DISKOMINFOTIK	DISKOMINFOTIK
9.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	85	86	87	88	89	89	DISKOMINFOTIK	DISKOMINFOTIK
10	Koperasi, UMKM									
10.1	Persentase koperasi aktif	%	66,43	70,97	75,16	76,43	81,25	81,25	Disperindagkop dan UKM	Disperindagkop dan UKM
10.2	Persentase koperasi tidak aktif	%	33,57	29,03	24,84	23,57	18,75	18,75	Disperindagkop dan UKM	Disperindagkop dan UKM
10.3	Persentase pelatihan untuk pelaku UMKM	%	34,57	14,05	6,89	9,46	12,81	12,81	Disperindagkop dan UKM	Disperindagkop dan UKM
10.2	Jumlah pemasaran UMKM	Unit	74	89	94	99	105	105	Disperindagkop dan UKM	Disperindagkop dan UKM
11	Penanaman Modal									

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	64	66	68	70	72	72	DPMPTSP	DPMPTSP
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Triliun)	2384	2480	2530	2580	2632	2632	DPMPTSP	DPMPTSP
11.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)	186	194	197	201	205	205	DPMPTSP	DPMPTSP
11,4	Rasio daya serap tenaga kerja	%	13,75	15,00	17,00	19,00	21,00	21,00	DPMPTSP	DPMPTSP
11,5	Laporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	-	120	140	150	170	170	DPMPTSP	DPMPTSP
12	Kepemudaan dan Olah Raga									
12.1.	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	36	29	29	29	29	29	Disbudparpora	Disbudparpora
12.2.	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	Disbudparpora	Disbudparpora
12.3.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	92,28	92,30	92,32	92,34	92,36	92,36	Disbudparpora	Disbudparpora
12.4.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	55,42	55,47	55,52	55,57	55,62	55,62	Disbudparpora	Disbudparpora



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
12.5	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	25	15	35	25	40	40	Disbudparpora	Disbudparpora
12.6	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	10	20	21	15	22	22	Disbudparpora	Disbudparpora
13	Statistik									
13.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	BPS	BPS
13.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	BPS	BPS
13.3	Buku "PDRB"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	BPS	BPS
14	Persandian									
14.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	50	52	54	55	56	56	Diskominfotik	Diskominfotik
15	Kebudayaan									
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	3	2	3	2	3	3	Disbudparpora	Disbudparpora

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
15.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	1	4	3	4	3	3	Disbudparpora	Disbudparpora
15.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	2	4	5	6	8	8	Disbudparpora	Disbudparpora
16	Perpustakaan									
16.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	3557	3900	4000	4500	5000	5000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
16.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	koleksi	34.430	37.430	40.430	43.430	46.430	46.430	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
16.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1.000 Penduduk	1	1,2	1,5	1,8	2	2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
16.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	800	900	1.000	1250	1500	1500	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
16.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	9.121	10.121	11.121	12.121	13.121	13.121	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
16.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	5	8	10	15	20	20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17	Kearsipan									

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
17.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	4,54	6,81	10,22	12,22	15,35	15,35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	1	2	3	4	5	5	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Layanan Urusan Pilihan										
1	Pariwisata									
1.1.	Kunjungan wisata	%	90,06	91,08	91,12	91,15	91,18	91,18	Disbudparpora	Disbudparpora
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	14,63	15,65	15,68	15,70	15,75	15,75	Disbudparpora	Disbudparpora
1.3.	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	Lokasi	7	3	2	4	3	3	Disbudparpora	Disbudparpora
2,	Pertanian									
2.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	6,50	6,52	6,60	6,70	6,70	6,70	Distannak	Distannak
2.2.	Cakupan bina kelompok petani	%	62,02	53,94	52,30	56,32	60,62	60,62	Distannak	Distannak

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
4	Perdagangan									
4.1.	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang	Unit	38	53	74	104	146	146	Disperindagkop dan UKM	Disperindagkop dan UKM
5	Perindustrian									
5.1.	Cakupan Bina kelompok pengrajin	%	73,91	82,61	86,96	91,30	100	100	Disperindagkop dan UKM	Disperindagkop dan UKM
5.2.	Jumlah industri Pengolahan	Unit	4145	4195	4245	4295	4345	4345	Disperindagkop dan UKM	Disperindagkop dan UKM
5.3.	Kawasan Industri	Unit	0	1	0	0	0	0	Disperindagkop dan UKM	Disperindagkop dan UKM
6	Tansmigrasi									
6.1.	Jumlah transmigran lokal	KK	410	410	410	410	410	410	Disnakertrans	Disnakertrans
6.2	Jumlah transmigrasi	UPT	4	4	4	4	4	4	Disnakertrans	Disnakertrans
6.3	Jumlah Pengembangan Kawasan Trasmigrasi	Kawasan	4	1	1	1	1	1	Disnakertrans	Disnakertrans

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
7	Kelautan dan Perikanan									
7.1.	Produksi perikanan	Ton	2.036,14	4.344,57	4.561,86	4.789,46	5.029,46	5.029,46	DKPP	DKPP
	- Perikanan Tangkap	Ton	940,84	3.406,96	3.577,31	3.756,18	3.943,99	3.943,99	DKPP	DKPP
	- Perikanan Budidaya	Ton	1.095,30	937,61	984,55	1.033,28	1.085,47	1.085,47	DKPP	DKPP
8	Peternakan									
8.1.	Populasi ternak besar (sapi dan kerbau)	ekor	22.343	22.388	22.432	22.477	22.522	22.567	Distannak	Distannak
8.2	Populasi ternak kecil (kambing dan domba)	ekor	17.607	17.642	17.677	17.713	17.748	17.784	Distannak	Distannak
9	Pertanahan									
9.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	61,34	67,63	71,01	74,56	78,29	78,29	Dinas Pertanahan	Dinas Pertanahan
9.2	Penyelesaian kasus tanah negara	%	60	66	69	72	75	75	Dinas Pertanahan	Dinas Pertanahan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
Penunjang Urusan										
1	Perencanaan Pembangunan									
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda	Bappeda
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	tidak	tidak	Ada	Ada	Ada	Bappeda	Bappeda
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPK yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda	Bappeda
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda	Bappeda
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda	Bappeda
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPK kedalam APBK	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda	Bappeda
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda	Bappeda

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
2	Keuangan									
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD	BPKD
2.2.	Persentase SILPA	%	1,465	0,560	0,57	0,58	0,60	0,60	BPKD	BPKD
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,465	0,51	0,52	0,53	0,54	0,54	BPKD	BPKD
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	9,99	1,02	1,04	1,06	1,08	1,08	BPKD	BPKD
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	21,22	20,40	20,81	21,22	21,65	21,65	BPKD	BPKD
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,15	10,20	10,40	10,61	10,82	10,82	BPKD	BPKD
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	0,83	0,67	0,69	0,70	0,71	0,71	BPKD	BPKD
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,14	10,20	10,40	10,61	10,82	11,04	BPKD	BPKD
2.9.	Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKD	BPKD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	BKPSDM	BKPSDM
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,672	4,672	4,672	4,672	4,672	4,672	BKPSDM	BKPSDM
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	1,0273	1,0273	1,0273	1,0273	1,0273	1,0273	BKPSDM	BKPSDM
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	34	36	36	37	37	37	BKPSDM	BKPSDM
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	jabatan	2611	2612	2612	2612	2615	2615	BKPSDM	BKPSDM
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	jabatan	2.001	2182	2232	2232	2232	2232	BKPSDM	BKPSDM
3.7.	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	26,14	59	60	65	70	70	BKPSDM	BKPSDM
3.8.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,76	2,00	2,30	2,45	2,50	2,50	Diskominfotik, Setdakab (Bag. Organisasi)	Diskominfotik, Setdakab (Bag. Organisasi)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
3.8.	Meningkatnya nilai SAKIP	Unit	36,63 C	60 B	65 B	70 BB	81 A	81 A	Setdakab (Bag. Organisasi)	Setdakab (Bag. Organisasi)
4	Penelitian dan pengembangan									
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.									
	Penerapan SIDA:	Sudah/ Belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Bappeda	Bappeda
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	2	10	30	50	80	80	Bappeda	Bappeda
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	64	65	70	75	80	80	Bappeda	Bappeda
5	Pengawasan									
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	89	90	92	94	96	96	Inspektorat	Inspektorat
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,5	0,4	0,39	0,38	0,37	0,37	Inspektorat	Inspektorat

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
5.3.	Jumlah temuan BPK	Temuan	20	18	16	15	14	14	Inspektorat	Inspektorat
6	Sekretariat Dewan									
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRK	Sekretariat DPRK
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRK	Sekretariat DPRK
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRK	Sekretariat DPRK
6,4	Jumlah Qanun yang disahkan	Peraturan Daerah/ Qanun	8	12	9	9	8	8	Sekretariat DPRK	Sekretariat DPRK
Keistimewaan dan Kekhususan Aceh										
1	Pendidikan									

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
1.1.	Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz	Orang	80	90	100	110	120	120	DSI	DSI
1.2.	Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam	%	90	92	94	96	98	98	DSI	DSI
1.3.	Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam	%	87	88	89	90	91	91	DSI	DSI
1.4.	Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DSI	DSI
1.5.	Persentase dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%	85	86	87	88	89	89	DSI	DSI
2	Kebudayaan									
2.1.	Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi	gampong	35	47	50	50	50	50	Disbudparpora	Disbudparpora
2.2.	Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim	%	30	35	40	45	50	50	Disbudparpora	Disbudparpora
2.3.	Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah	%	25	35	40	60	70	70	Disbudparpora	Disbudparpora
2.4.	Meningkatnya pemahaman terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni, Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur	wilayah	23	25	27	30	35	35	Disbudparpora	Disbudparpora

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
2.5	Jumlah warisan budaya lokal yang ditetapkan	Unit	29	29	29	29	29	29	Disbudparpora	Disbudparpora
3	Keagamaan									
3.1.	Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%)	Unit	463	463	463	463	463	463	DSI	DSI
3.2.	Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat	Orang	220	222	222	222	222	222	DSI	DSI
3.3.	Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat	Orang	38	50	60	60	60	60	DSI	DSI
3.4.	Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid	55	60	65	70	75	75	DSI	DSI
3.5.	Pembinaan Dinul Islam	Orang	9	20	22	25	30	30	Satpol PP dan WH	Satpol PP dan WH
3.6.	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	%	60	70	76	81	85	85	Satpol PP dan WH	Satpol PP dan WH
3.7.	Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	95	100	105	110	115	115	Baitul Mal/DSI	Baitul Mal/DSI
3.8.	Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Rp (000)	792	832	874	918	964	964	Baitul Mal	Baitul Mal

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Akhir (2026)	SKPK	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026			
3.9.	Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Rp (000)	792	832	874	918	964	964	Baitul Mal	Baitul Mal
Keistimewaan dan Kekhususan Aceh										
1	Kesatuan Bangsa dan Politik									
1.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Ada/tidak	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Kesbangpol	Kesbangpol
1.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Kesbangpol	Kesbangpol
1.3.	Jumlah LSM	LSM	10	11	12	13	14	14	Kesbangpol	Kesbangpol
1.4.	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada serentak	persen	85%	87%	88%	89%	95%	95%	Kesbangpol	Kesbangpol

BAB IX PENUTUP

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 dan RTRW Aceh Tahun 2013- 2033 serta mempedomani RPJMN 2020-2024.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023–2026 memuat latar belakang maksud tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum daerah, gambaran keuangan daerah, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan, proyeksi pendapatan dan belanja kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-3036. Di samping itu, RPD Kabupaten Nagan Raya ini juga memuat arah kebijakan, kerangka pendanaan pembangunan, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

9.2. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023–2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah sampai tersedianya Qanun RPJMK Nagan Raya hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

**BUPATI NAGAN RAYA,
DTO
H. M. JAMIN IDHAM, SE**